



UNIVERSITAS INDONESIA

**EVALUASI KEBIJAKAN DIPLOMASI KEBUDAYAAN
ANGKLUNG INDONESIA
(Studi Kasus Kebijakan Komunikasi Pemerintah
Pasca Diakuinya Angklung Dalam Daftar Representatif Warisan
Budaya Tak Benda Oleh UNESCO)**

TESIS

**THERESIA E.E. PARDEDE
1006745083**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA MANAJEMEN KOMUNIKASI
KEKHUSUSAN MANAJEMEN KOMUNIKASI POLITIK**

**JAKARTA
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**EVALUASI KEBIJAKAN DIPLOMASI KEBUDAYAAN
ANGKLUNG INDONESIA**
(Studi Kasus Kebijakan Komunikasi Pemerintah
Pasca Diakuinya Angklung Dalam Daftar Representatif Warisan
Budaya Tak Benda Oleh UNESCO)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Sains

THERESIA E.E. PARDEDE
1006745083

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA MANAJEMEN KOMUNIKASI
KEKHUSUSAN MANAJEMEN KOMUNIKASI POLITIK**

**JAKARTA
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Theresia E.E. Pardede
NPM : 1006745083

Tandatangan : 

Tanggal : 4 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : **Theresia E.E. Pardede**
NPM : 1006745083
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Tesis : Evaluasi Kebijakan Diplomasi Kebudayaan Angklung Indonesia (Studi Kasus Kebijakan Komunikasi Pemerintah Pasca Diakuihnya Angklung Dalam Daftar Representatif Warisan Budaya Tak Benda Oleh UNESCO)

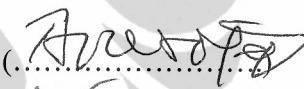
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang :
Prof. Alois Agus Nugroho, Ph.D


(.....)

Pembimbing :
Prof. Sasa Djuarsa Sendjaja, Ph.D


(.....)

Penguji Ahli :
Dr. Billy K. Sarwono, MA


(.....)

Sekretaris Sidang:
Dr. Irwansyah, MA


(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 4 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang lebih indah dari syukur dan puja-puji pada Sang Khalik, Allah Yang Maha Kuasa, karena atas berkat limpahan rahmat-Nya sajalah penulis mampu menyelesaikan tesis tepat pada waktunya. Adapun penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Kekhususan Komunikasi Politik Program Studi Manajemen Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Sebuah disiplin ilmu yang menarik, aplikatif, dan penuh tantangan, mengingat selama menempuh studi disini, penulis pun sempat mengecap tugas sebagai salah satu pelayan publik di negeri ini.

Meski pengalaman menjadi penyambung lidah rakyat di lembaga legislatif DPR RI Masa Bakti 2009-2014 yang dijalankan tidak sampai satu periode, penulis menyadari benar bahwa ilmu komunikasi politik merupakan salah satu elemen esensial dalam menjalankan fungsi sebagai pelayan publik. Kecakapan berinteraksi dengan konstituen dalam rangka menggali aspirasi dari berbagai komponen masyarakat, membahasnya kembali dalam berbagai rapat DPR, menyampaikan gagasan yang ada, lalu mempersuasi para pihak yang berkepentingan hingga sampai pada suatu kebijakan publik yang berdampak bagi masyarakat luas, menjadi sebuah bentuk keahlian yang penting dimiliki bagi para pelaku politik praktis. Tanpa pemahaman ilmu komunikasi politik yang memadai di kalangan para pengambil keputusan, tidak mustahil jika nantinya aktivitas politik praktis di banyak lembaga negara, terutama lembaga legislatif, terjebak dalam demokrasi prosedural yang miskin makna.

Sebagaimana kita ketahui bersama, angklung dan sejumlah ikon kebudayaan Indonesia lainnya berulang kali menjadi pemberitaan yang kontroversial akibat klaim kebudayaan yang dilakukan oleh Malaysia. Namun berkat perjuangan dari berbagai pihak terutama yang dilakukan oleh para pecinta angklung di tanah air, eksistensi angklung Indonesia lantas mendapat pengakuan dari lembaga internasional bagian dari institusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *Unites*

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), sebagai salah satu daftar representatif warisan budaya tak benda (*representative list of intangible cultural heritage of humanity*), pada sidang ke-5 Komite Antar Pemerintah tentang perlindungan warisan budaya tak benda di Nairobi, Kenya pada 17 November 2010 lalu.

Meski dunia sudah mengakui angklung Indonesia sebagai warisan budaya dunia, tidak berarti perjuangan sudah selesai. Sejumlah tugas besar masih menanti Pemerintah untuk mengupayakan pelestarian angklung sebagai bentuk komitmen atas kelanjutan pengakuan internasional ini. Dari sejumlah studi literatur, studi dokumen, maupun hasil interaksi dengan berbagai seniman terutama para praktisi, pendidik, serta pembuat angklung di daerah Jawa Barat, penulis menemukan sejumlah elemen fundamental yang perlu dijalankan oleh Pemerintah. Dibutuhkan rencana strategis yang integratif yang tertuang dalam berbagai bentuk kebijakan komunikasi lintas sektoral, untuk benar-benar bisa menjadikan angklung sebagai alat diplomasi kebudayaan yang efektif, dalam kerangka komunikasi politik luar negeri dan komunikasi internasional Indonesia, demi mengharumkan nama Indonesia di mata dunia.

Saya tak memungkiri, banyak pihak yang telah berperan dan mendukung saya untuk menempuh dan menyelesaikan studi S2 ini. Oleh karena itu, ijinkan saya mengucapkan terimakasih kepada:

- 1) Prof. Sasa Djuarsa Sendjaja, Ph.D, selaku dosen dan pembimbing yang telah begitu baik dan peduli, bersedia menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberi bimbingan dan arahan pada saya selama proses penyusunan tesis ini;
- 2) Para pahlawan angklung yang tanpa pernah lelah mengharumkan nama bangsa terutama keluarga besar Saung Angklung Udjo (SAU), Masyarakat Musik Angklung (MMA), Angklung Web Institue (AWI), Komunitas Pencinta Bambu dan para pendidik angklung di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) maupun di Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Bandung;

- 3) Pemikir dan guru Hak Kekayaan Intelektual yang telah memberi banyak inspirasi dan memperluas cakrawala berpikir saya, diantaranya Dr. Henry Soelistyo, SH.LL.M, Rizky Adiwilaga dan Ari Juliano;
- 4) Para dosen dan Staf Kesekretariatan Pascasarjana Jurusan Komunikasi FISIP Universitas Indonesia di Kampus Salemba, Jakarta Pusat, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan administrasi selama penulis menuntut ilmu. Tak lupa juga pada seluruh pengajar di FISIP UI selama ini;
- 5) Segenap keluarga yang telah memberi semangat tak henti bagi saya untuk menjadi seorang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Almarhumah Mama tercinta Lersiana Purba dan Bapak T.M Pardede, atas mimpi-mimpi yang kerap menginspirasi. Kepada Kak Desy Wandiyati, Esther Novelia, Kristin Aprisiyanti, Benny dan Sri Rahmi M. Kepada keponakan-keponakan tercinta sumber energi positif selama ini: Joshua, Salma, Jason, Jacqueline, Joanna. Untuk sang penyemangat Mochamad H. dan keluarga besar Hj. Harprileny Soebiantoro, Prameshwari serta keluarga besar Sugiri;
- 6) Teman-teman seperjuangan dari kelas A Manajemen Komunikasi Politik Angkatan 2010 yang tak pernah alpa saling mengingatkan, hidup kelas Asoy! Semoga semua lulus dengan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita masing-masing.

Pada akhirnya, penulis berharap kiranya tesis ini membawa manfaat yang seluas-luasnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang komunikasi politik terkait diplomasi kebudayaan, terutama dalam hal pelestarian angklung di tanah air, untuk memperkaya khazanah pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemahaman kebudayaan sebagai identitas bangsa di era global.

Jakarta, Juni 2012

Theresia Ebenna Ezeria Pardede

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Theresia E.E. Pardede

NPM : 1006745083

Program Studi: Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Kekhususan Manajemen
Komunikasi Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Evaluasi Kebijakan Diplomasi Kebudayaan Angklung Indonesia (Studi Kasus Kebijakan Komunikasi Pemerintah Pasca Diakuinya Angklung Dalam Daftar Representatif Warisan Budaya Tak Benda Oleh UNESCO)

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal: 21 Juni 2012

Yang menyatakan



(Theresia E.E. Pardede)

ABSTRAK

Nama : Theresia E.E. Pardede
Program Studi : Manajemen Ilmu Komunikasi
Judul : Evaluasi Kebijakan Diplomasi Kebudayaan Angklung Indonesia
(Studi Kasus Kebijakan Komunikasi Pemerintah Pasca Diakuinya
Angklung Dalam Daftar Representatif Warisan Budaya Tak Benda
Oleh UNESCO)

xiv+110 halaman; 161 halaman lampiran; 5 tabel; 23 gambar; 50 buku & tesis;
23 jurnal, makalah, surat kabar, majalah & artikel Internet.

Tesis ini mengevaluasi kebijakan komunikasi Pemerintah atas upaya pelestarian angklung, dalam kaitannya dengan diplomasi kebudayaan sebagai bentuk komunikasi internasional. Instrumen angklung sendiri telah diakui sebagai warisan kebudayaan tak benda asal Indonesia oleh UNESCO pada November 2010 lalu. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan desain evaluatif menggunakan model studi kasus. Adapun hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan komunikasi Pemerintah sebagaimana dokumen komitmen yang ditandatangani pada sidang UNESCO tahun 2010 lalu belum terwujud. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dibutuhkan kebijakan komunikasi yang integratif dari Pemerintah agar pengakuan angklung sebagai warisan kebudayaan tak benda ini dapat dioptimalkan sebagai alat diplomasi kebudayaan yang efektif bagi komunikasi internasional Indonesia.

Kata Kunci: Angklung Indonesia, Diplomasi Kebudayaan, Kebijakan Komunikasi, Warisan Budaya Tak Benda.

ABSTRACT

Name : Theresia E.E. Pardede
Study Program : Management Communication Studies
Title : The Evaluation of Cultural Diplomacy Policy of Indonesian Angklung (Case Study on Government Communication Policy after the Acknowledge of Angklung into the Representative List of Intangible Heritage of Humanity by UNESCO)

xiv+110 content pages; 161 enclosure pages; 5 tables; 23 pictures; 50 books & thesis; 23 journals, papers, newspapers, magazines & Internet articles.

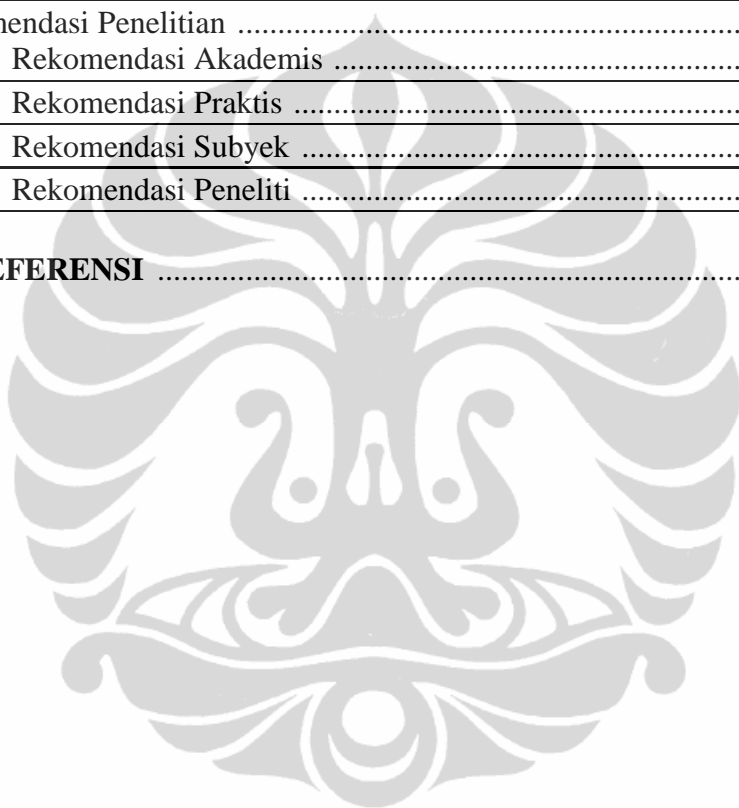
This thesis was evaluating the government communication policy for the safeguarding of angklung, regarding to the cultural diplomacy as a form of international communication. UNESCO has approved Angklung instrument itself as an intangible cultural heritage from Indonesia on November 2010. This research was using a qualitative method with an evaluated design in a study case model. Therefore, the result of this research showed that government communication policy, as a document of commitment that is signed in the UNESCO convention in the year 2010, hasn't been accomplished. This research was concluding that the integrated communication policy by the government for angklung existence as an intangible cultural heritage was needed to optimize the effectiveness of cultural diplomacy for the international communication of Indonesia.

Keywords: *Angklung of Indonesia, Cultural Diplomacy, Communication Policy, Intangible Cultural Heritage.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Konteks Penelitian	16
1.3. Pertanyaan Penelitian	18
1.4. Tujuan Penelitian	18
1.5. Signifikansi Penelitian	19
1.5.1 Signifikansi Akademik	19
1.5.2 Signifikansi Praktis	20
2. TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 Perspektif Teoritis	21
2.1.1 Teori Komunikasi Internasional	25
2.1.2 Model Kebijakan Komunikasi	30
2.1.3 Teori Diplomasi Kebudayaan	35
2.1.4 Public Relations Politik	51
2.1.5 Aspek Perlindungan Hukum Angklung sebagai Ekspresi Budaya 54	
2.2 Kerangka Analisis	61
3 METODE PENELITIAN	63
3.1 Paradigma Penelitian	63
3.2 Metode Penelitian	64
3.3 Unit Analisis	68
3.3.1 Subjek Penelitian	68
3.3.2 Informan Penelitian	70
3.3.3 Lokasi Penelitian	70
3.3.4 Teknik Pengumpulan Data	71
3.3.5 Teknik Analisis Data	72
4 HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	74

4.1	Komitmen Pemerintah dalam Pelestarian Angklung	77
4.2	Sejarah Angklung	82
4.3	Festival Musik Bambu Nusantara	89
4.4	Pertunjukan dan Pemecahan Rekor Angklung di Washington, Amerika Serikat	90
4.5	Hasil Temuan dan Analisis	90
4.6	Upaya Pelestarian Angklung Indonesia	95
5	KESIMPULAN DAN SARAN	96
5.1	Kesimpulan	96
5.2	Rekomendasi Penelitian	98
5.2.1	Rekomendasi Akademis	98
5.2.2	Rekomendasi Praktis	98
5.2.3	Rekomendasi Subyek	99
5.2.4	Rekomendasi Peneliti	100
	DAFTAR REFERENSI	102



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Peringkat <i>The Anholt Nation Brands Index</i> Q2 2007	7
Tabel 2.1	Konsep-Konsep Diplomasi Kebudayaan	38
Tabel 2.2	Hubungan Antara Situasi, Bentuk, Tujuan dan Sarana Diplomasi Kebudayaan	39
Tabel 3.1.	Perbandingan Antara Kelima Model Metode Penelitian Kualitatif (Creswell, 1998)	66
Tabel 4.1.	Kompilasi Rekomendasi Responden	98



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	<i>National Brand Hexagon</i>	1
Gambar 1.2.	Reog Ponorogo Diklaim Sebagai Kesenian Malaysia	10
Gambar 2.1.	Model Proses Komunikasi Internasional Mowlana (1985) ...	26
Gambar 2.2.	Model Perbandingan Sistem Kebijakan Komunikasi Salvaggio(1985)	31
Gambar 2.3.	Skema Pelaku dan Sasaran Diplomasi Kebudayaan	36
Gambar 2.4.	Presiden Soekarno Berpidato pada Sidang PBB 30 September 1960	40
Gambar 2.5.	Gelora Bung Karno	41
Gambar 2.6.	Monumen Nasional (Monas)	42
Gambar 2.7.	Presiden Soeharto Bersama dengan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan	42
Gambar 2.8.	Kawasan Taman Mini Indonesia Indah	44
Gambar 2.9.	Presiden BJ Habibie Pada Saat Pelantikan Sumpah Pengangkatan	46
Gambar 2.10.	Presiden Abdurrachman Wahid	46
Gambar 2.11.	Presiden Megawati Soekarnoputri Bersama Presiden Pakistan Benazir Bhutto	48
Gambar 2.12.	Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono Dalam Pidato Politik	49
Gambar 2.13.	Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono bersama Juru Bicara Presiden yang kini menjadi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Dr. Dino Pati Djalal	50
Gambar 2.14.	Penggolongan Hukum Hak Kekayaan Intelektual	58
Gambar 2.15.	Hak Eksklusif dalam Hak Cipta	59
Gambar 4. 1.	Angklung Buhun dalam Upacara Ritual	83
Gambar 4.2.	Pengrajin Angklung	84
Gambar 4.3.	Angklung Sebagai Medium Pendidikan	85
Gambar 4.4.	Pak Daeng Soetigna	86
Gambar 4.5.	Udjo Ngalagena	87
Gambar 4.6.	Turis Mancanegara Bermain Angklung di Saung Angklung Udjo	88

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|-------------|--|
| Lampiran 1 | Dokumen Konvensi Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda UNESCO |
| Lampiran 2 | Dokumen Nominasi Angklung Sebagai Daftar Representatif UNESCO 2010 |
| Lampiran 3 | Dokumen Komitmen Terkait Pelestarian Angklung Indonesia |
| Lampiran 4 | Dokumen Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 2010 |
| Lampiran 5 | Liputan Berita Bambu Nusantara World Music Festival ke-1 |
| Lampiran 6 | Liputan Berita Bambu Nusantara World Music Festival ke-2 |
| Lampiran 7 | Liputan Berita Bambu Nusantara World Music Festival ke-3 |
| Lampiran 8 | Liputan Berita Bambu Nusantara World Music Festival ke-4 |
| Lampiran 9 | Liputan Berita Bambu Nusantara World Music Festival ke-5 |
| Lampiran 10 | Liputan Berita Bambu Nusantara World Music Festival ke-6 |



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada tahun 2006, Simon Anholt¹, seorang konsultan kebijakan independen asal Inggris, mengembangkan sebuah indeks pengukuran citra suatu negara bernama *Anholt Nation Brand Index (NBI)*. Setiap empat bulan sekali NBI mengumpulkan persepsi 25.000 orang dari negara-negara maju maupun negara berkembang, tentang aset-aset budaya, politik, komersial, dan aset manusia, potensi investasi maupun daya tarik pariwisata.

Hasil dari NBI ini adalah peringkat kekuatan dan penampilan citra suatu bangsa dan memaparkan cerita masyarakat dunia apabila melihat negara tersebut. Adapun pemeringkat analitis yang belakangan menjadi acuan pencitraan bangsa-bangsa di dunia ini diukur dalam gabungan dari faktor-faktor yang disebut *National Brand Hexagon*.



Gambar 1.1. *National Brand Hexagon*

Sumber: Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025: Studi Industri Kreatif Indonesia

¹ <http://www.simonanholt.com>, diakses 16 Juni 2012 pukul 20.30 WIB.

Nation Brand Hexagon ini terdiri atas beberapa dimensi, meliputi: (a) Ekspor; (b) Sumber daya manusia; (c) Pemerintahan; (d) Pariwisata; (e) Budaya dan warisan budaya; dan (f) Imigrasi dan Investasi. Anholt berpendapat, citra suatu negara akan membuat perbedaan yang kritical terhadap kesuksesan suatu bisnis, perdagangan, usaha pariwisata, termasuk juga hubungan diplomatik dan hubungan budaya suatu bangsa dengan bangsa lain. Dilanjutkannya, setiap bangsa sebenarnya merefleksikan citra. Suatu gambaran yang tercetak dalam alam pikiran orang lain mengenai bangsa sebagai suatu entitas, yang bisa positif maupun negatif.

Pada umumnya sebuah negara mengupayakan pencitraan melalui kegiatan promosi perdagangan, investasi dan pariwisata. Namun sejatinya, pencitraan negara harus digerakkan oleh pemerintah. Pemerintahlah yang paling punya tanggungjawab atas peringkat citra suatu negara. Meskipun sektor swasta diharapkan dapat berperan penting dalam proses pembentukan citra tersebut, pemerintah merupakan pihak yang wajib dalam mengawal, mengampanyekan serta melakukan edukasi baik kepada publik internal maupun masyarakat internasional, sehingga citra negara positif yang diharapkan dapat dipersepsikan dengan baik.

Dalam bukunya, *According to Kotler (198)*, Philip Kotler berpendapat bahwa sangat sulit bagi sebuah negara untuk dapat mengubah citranya. Namun lebih lanjut ia katakan, sebuah negara dapat membenahi sejumlah masalah kecil yang ada dalam citranya. Kotler menambahkan, semua kampanye untuk mengubah citra suatu negara harus terlebih dahulu dimulai dengan perubahan nyata dalam kebijakan dan tindakan luar negeri. Karena yang berperan besar dalam melakukan upaya *branding* suatu bangsa adalah pemerintah, pemimpin bisnis atau keduanya.

Keberhasilan *branding* suatu bangsa harus melibatkan kemitraan yang intim antara sektor publik dan sektor swasta. Sektor publik tidak bisa berbuat banyak jika sendirian. Dan apabila sektor publik mengembangkan dan menyebarluaskan sebuah identitas *brand* sendirian, maka besar kemungkinan sektor swasta

kehilangan ruang dalam menyampaikan dan mengembangkan identitas yang ada. Padahal, keterlibatan sektor swasta dapat menjadi ‘senjata’ tambahan yang ampuh bila dioptimalkan untuk melipatgandakan penyebaran citra yang dilakukan sektor publik.

Tak dipungkiri, perkembangan dunia pun saat ini tampak semakin menuju pada apa yang disebut oleh McLuhan sebagai suatu *global village* (desa dunia)². Globalisasi telah memberi sejumlah implikasi tersendiri dalam seluruh sendi peradaban, terutama dalam konteks perubahan pola komunikasi manusia. Dunia terhubung menjadi suatu desa besar yang menurut McLuhan membuat seluruh sekat penghalang dan batasan sosial antar manusia lenyap. Hilangnya batasan dalam akses komunikasi telah mengakibatkan sejumlah fenomena baru yang menarik untuk diamati secara mendalam dari sudut pandang ilmu komunikasi. Globalisasi turut memberi pengaruh pada meningkatnya kontak-kontak komunikasi individu dengan individu lain, maupun hubungan antar bangsa dan negara.

Khamaeni (6) menyadari bahwa globalisasi telah menyebabkan terjadinya ‘perang budaya’ yang menghendaki generasi baru melucuti keyakinan dirinya dengan berbagai cara, dengan efek yang dapat terus berlanjut dari generasi ke generasi, berlangsung tanpa sadar dengan cara yang bahkan menyenangkan bagi sang korban. Dikatakan selanjutnya oleh McLuhan, perang peradaban yang terjadi di dunia dewasa ini dengan mudah dapat ditemui dalam gambaran seni dan hiburan di media massa. Mereka hadir dalam simbol-simbol, yang justru mempengaruhi aspek psikologis individu. Terjadinya proses hibridisasi media telah menghasilkan suatu kekuatan media baru, multimedia di era globalisasi.³

Aspek lain yang juga timbul akibat globalisasi, adalah meningkatnya interdependensi atau saling ketergantungan internasional. Hal ini disebabkan oleh

² Marshall McLuhan, *Understanding Media: The Extensions of Man*, London: Routledge, 2001, halaman 23.

³ *Ibid*, halaman 54.

karena faktor eksternal yakni faktor internasional, kini memainkan peranan yang tak kalah substantif sebagai akses tak terhindarkan dari globalisasi (McClintock, et.al, 1997: 179). Ketika pusat-pusat informasi dan kebudayaan dunia dikuasai dan dikelola oleh negara-negara maju yang sekuler seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat, sebagai konsekuensinya, konsep sekuler dari pusat kebudayaan bangsa maju dengan serentak, menyebarluas secara mendunia atau global. Pada kondisi penyebaran konsep informasi dan kebudayaan sekuler semacam itu, negara-negara berkembang umumnya hanya menjadi *counter balance* dengan menyampaikan konsep yang kurang sekuler. Keadaan ini telah menyebabkan pusat-pusat informasi dan kebudayaan di negara-negara berkembang sekedar berperan sebagai tambahan bagi pusat informasi dunia.

Dikatakan Liliweri (2004:44), ketertinggalan masyarakat negara-negara berkembang yang muncul dalam konstelasi global, tidak semata-mata disebabkan oleh karena adanya keseragaman masalah-masalah yang dihadapi negara-negara berkembang di dalam negeri. Akan tetapi juga diakibatkan oleh karena kolonialisasi yang dahulu dilakukan oleh negara-negara maju, dengan mengeksploitasi sumber daya yang ada di negara-negara berkembang, bahkan hingga sekarang melalui bentuk dan bidang sumber daya yang baru.

Meski demikian, peristiwa runtuhnya salah satu ikon modernisme *twin tower* di New York, Amerika Serikat yang diiringi dengan kasus-kasus teror serupa di berbagai negara, baik negara-negara berkembang maupun negara-negara maju, telah membuka mata dunia dan menyadarkan bahwa keanekaragaman kebudayaan adalah suatu keniscayaan dalam hidup bermasyarakat.⁴ Isu tentang pluralisme lantas mendapat perhatian yang luar biasa di seluruh belahan dunia, dan telah memberi peluang kepada seluruh masyarakat di berbagai negara, termasuk juga negara-negara berkembang, untuk ‘tampil beda’, untuk menunjukkan identitas nasionalnya melalui keindahan kebudayaan yang mereka miliki. Kondisi ini seharusnya mampu diartikan sebagai sebuah peluang, untuk menggali kebudayaan ‘lokal’ yang unik dari negara masing-masing yang khas, sekaligus agar dapat

⁴ Derek Rubin & Jaap Verheul, *American Multiculturalism after 9/11: Transatlantic Perspectives*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009, halaman 119-120.

membantu pencapaian kepentingan nasional dalam percaturan politik internasional.

Sesungguhnya ada beberapa negara di Asia telah berhasil melakukan pencitraan negara dengan baik. yang bisa menjadi referensi atas keberhasilannya melakukan pencitraan khusus, melalui upaya diplomasi kebudayaan dalam bentuk strategi komunikasi internasional yang komprehensif.

Jepang adalah salah satu contoh negara di Asia yang pantas dijadikan pembelajaran. Dengan kepopuleran *anime* dan *manga*-nya, kebudayaan popular ala Jepang ini telah menciptakan komunitas fanatik yang kerap disebut “*fandom*” di seluruh belahan dunia. Melalui kebudayaan pop *cosplay*⁵ yang khas dengan imajinasi, terbukti bahwa *anime* dan *manga* telah mempengaruhi konteks kebudayaan komunitas pencinta *anime* dan *manga* di berbagai negara. Kepopuleran anime dan manga bahkan turut memberi dampak positif pada upaya diplomasi luar negeri Jepang dengan negara-negara lain.⁶

Mengamati perkembangan pesat *branding* negara Korea Selatan, banyak hal menarik yang dapat pula ditelaah disini. Korea Selatan dengan cermat menyematkan ikon-ikon khas budaya mereka dalam berbagai aktivitas komunikasi internasional mereka. Ini dilakukan tidak hanya oleh para pemegang kekuasaan negara, tapi juga seluruh komponen masyarakatnya. Fenomena demam Korea berhasil dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan melalui berbagai saluran kreatif yang mereka produksi. Baik itu film, musik, maupun televisi, dan terutama dengan gemerlapnya dunia hiburan yang disajikan Korea Selatan dengan kehadiran artis-artis mereka.⁷ Dari dunia hiburan, *setting* film mereka memperlihatkan keindahan objek-objek pariwisata di Korea Selatan. Kosmetik

⁵ *Cosplay* adalah singkatan dari *costume play*. Ini merupakan kegiatan pertunjukan seni dimana peserta yang mengikuti akan berpakaian layaknya karakter-karakter yang ada dalam film atau komik Jepang, lebih lanjut lihat Morgan Elizabeth, *Pop-Diplomacy: Anime and Manga As Vehicles of Cultural Context, Identity Formation, and Hybridity*. Washington: ProQuest LLC, 2010, halaman 7.

⁶ *Ibid*, halaman 11.

⁷ Benny Kurniawan, *Ilmu Budaya Dasar*, Tangerang: Jelajah Nusa, 2012, halaman 95-98.

juga menjadi saluran diplomasi kebudayaan mereka, menyadari bahwa daya tarik artis Korea Selatan telah membuka peluang bagi sektor ekonomi lain.⁸

Tak berhenti sampai disana, perdagangan manufaktur besar seperti alat elektronik dan otomotif juga dirambah Korea Selatan. Sejumlah merek dagang yang sepuluh tahun lalu tampak asing terdengar, kini menjadi ikon kemajuan teknologi yang tak terkalahkan. Sebut saja *Samsung, LG, Daewoo, Hyundai*, dan masih banyak lagi.

Mencermati indeks pengukuran *The Anholt Nation Brands Index* pada caturwulan ke-2 tahun 2007 yang lalu, Indonesia masih berada pada urutan ke-38. (Lihat Tabel 1.1). Peringkat ini berada dibawah negara-negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Singapura (urutan ke-27) dan Malaysia (urutan ke-35).

Yang ironis ialah, Indonesia belum melihat kekayaan alam dan potensi kekayaan budaya sebagai sebuah aset berharga yang mampu meningkatkan citra. Meskipun Indonesia memiliki keindahan alam dan warisan budaya yang tinggi dengan potensi besar untuk menarik wisatawan asing, namun saat ini wisatawan asing masih cenderung memilih lokasi di negara lain di Asia sebagai destinasi pariwisata.

Patut disadari, Indonesia masih berada jauh di belakang dalam hal pemberdayaan kebudayaan.⁹ Banyak dari antara pemegang kekuasaan dan kebijakan tidak paham bagaimana menggunakan kehebatan kebudayaan ini sebagai suatu aset.¹⁰ Apalagi, keadaan ini bertambah runyam dengan munculnya konflik identitas budaya yang diperdebatkan dengan negara tetangga, Malaysia. Memang tak dapat dipungkiri, adanya kesamaan rumpun dan latar belakang sosiohistoris antara Indonesia dengan negeri Jiran ini, telah mengakibatkan hubungan bilateral antar keduanya seolah suam-suam kuku, penuh dinamika.

⁸ Feriawan Hidayat, "K-Pop Jadi Andalan Korea Gaet Wisatawan", <http://www.beritasatu.com>, 18 April 2012.

⁹ Inggried Dwi Wedhaswary, "Soal Budaya, Jangan Teriak Setelah 'Dicolong!'" *Kompas.com*, 2 September 2009.

¹⁰ Jodhi Yudono, "Pengamat: Klaim Budaya Karena Kurangnya Perhatian Pemerintah", *Kompas.com*, 20 Juni 2012.

Rank	Country
1	UK
2	Germany
3	France
4	Canada
5	Switzerland
6	Sweden
7	Italy
8	Australia
9	Japan
10	United States
11	Netherlands
12	Spain
13	Denmark
14	Norway
15	New Zealand
16	Ireland
17	Greece
18	Belgium
19	Wales
20	Portugal
21	Brazil
22	Russia
23	China
24	Argentina
25	Hungary
26	Czech Republic
27	Singapore
28	Poland
29	Mexico
30	Egypt
31	India
32	South Korea
33	South Africa
34	Turkey
35	Malaysia
36	Estonia
37	Israel
38	Indonesia

Tabel 1.1 Peringkat *The Anholt Nation Brands Index Q2 2007*

Sumber: Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025: Studi Industri Kreatif Indonesia

Sebagai negara serumpun, Malaysia memang cukup lihai mengoptimalkan kekuatan budaya yang dimiliki menjadi daya tarik dalam upaya promosi dan pembentukan citra negara. Semboyan promosinya beberapa waktu lalu yang

Universitas Indonesia

singkat namun penuh makna, “*Malaysia Truly Asia*” yang diluncurkan pada tahun 2000 terbukti ampuh dalam meningkatkan persepsi dan kesan positif dunia terhadap Malaysia. Pada tahun 2000, jumlah wisatawan asing di negeri jiran tersebut hanya berjumlah 10,2 juta orang. Tujuh tahun kemudian, jumlah kunjungan wisata meningkat 70 persen dengan total kunjungan wisatawan asing mencapai 17,54 juta orang.

Kesuksesan kampanye “*Malaysia Truly Asia*” juga didukung dengan tersedianya transportasi umum yang memadai, seperti Kuala Lumpur Monorel, Light Railways Transit, Kuala Lumpur Rapid Bus, kereta komuter, dan sekitar 30.000 armada taksi yang disediakan hanya untuk Kuala Lumpur.

Dato’ Mirza Mohamad Taiyab, Direktur Utama Malaysia Tourism Promotion Board, seperti dilansir dalam pernyataan resminya di Pusat Pelancongan Malaysia, mengatakan bahwa “*Malaysia Truly Asia*” bukan sekedar merek dagang. Slogan itu mencerminkan masyarakat yang hidup bersama di Malaysia dan keberagaman budaya yang amat menarik bagi wisatawan.¹¹

Namun kita memang tak mungkin bisa tinggal diam, ketika upaya yang dilakukan oleh negara tetangga dalam mempromosikan negerinya itu justru terkesan mengintimidasi eksistensi kebudayaan Indonesia, bahkan barangkali dapat dikatakan mencoba menginvasi kekayaan budaya Nusantara. Tentu masih segar dalam ingatan kita, bagaimana ketegangan antara negara Indonesia dan Malaysia terjadi, ketika sejumlah media memberitakan bahwa negeri Jiran itu mengklaim sejumlah karya budaya yang ada di Indonesia.¹² Polemik lagu “Rasa Sayange”, “Reog Ponorogo”, tari pendet, kain batik, makanan rendang, sampai alat musik angklung (Yudono, para. 6)¹³, silih berganti memenuhi ruang media.

¹¹ Khaerudin, “Apa Pun Bisa Dijual.” *Kompas.com*. 3 Des 2010 dan Ni Luh Made Pertiwi F & Made Asdhiana, “Ekonomi Malaysia Ditopang Pariwisata” *Kompas.com*, 15 Maret 2011.

¹² Ade Marboen, “2007-2012 Malaysia Klaim Tujuh Budaya Indonesia.” *Antaraneews.com*, 19 Juni 2012.

¹³ Lihat J. Yudono, “Waspada, Malaysia Incar Budaya Kerinci!” *Harian Kompas*, 28 Mar 2011.

Persoalan demi persoalan yang terkait dengan kebudayaan Indonesia yang diklaim pihak Malaysia sesungguhnya telah memiliki data historis yang cukup panjang. Sebagaimana dilansir media¹⁴, tenun ikat Sambas dari Kalimantan Barat sempat ditemukan dijual di Malaysia dengan label *made in* Malaysia. Tari piring dari Sumatera Barat juga pernah diakui Malaysia sebagai bagian dari kebudayaannya. Lalu lagu “Kakak Tua” dari Maluku diklaim dan dieksploitasi secara komersial, begitupun halnya dengan lagu “Anak Kambing Saya” dari Nusa Tenggara.

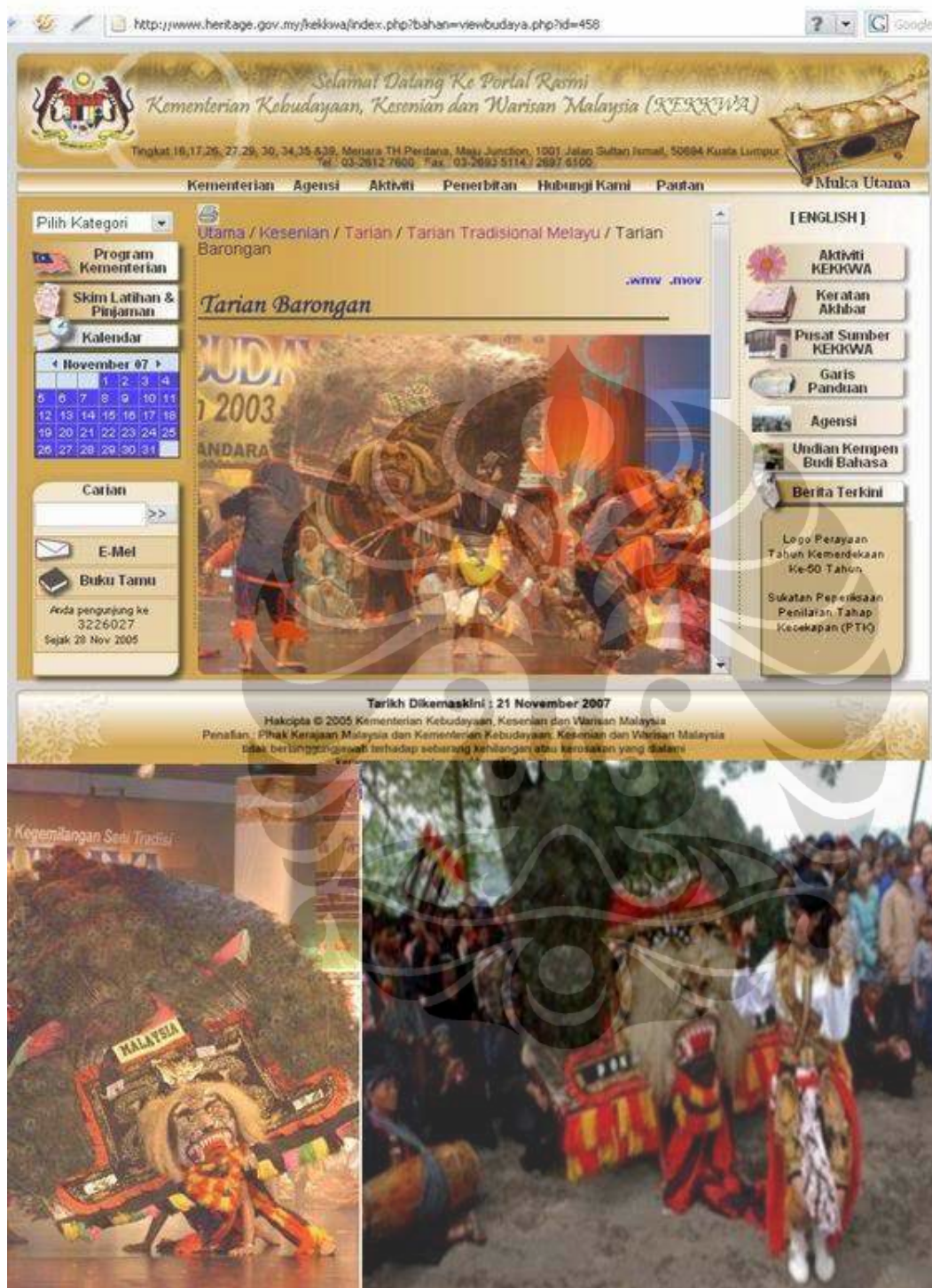
Selanjutnya, pada tahun 2000, lagu “Injit-Injit Semut” dari Jambi dan keberadaan gamelan Jawa sebagai instrumen musik tradisional juga diklaim dan dieksploitasi secara komersial kembali oleh Malaysia. Tahun 2005, badik Tumbuk Lada dari Riau, Deli dan Siak, turut diklaim sebagai bagian budaya Malaysia. Tahun 2006, batik Parang dari Yogyakarta dan alat musik angklung, juga diklaim kembali oleh Malaysia.

Pada tahun 2007, sejumlah karya budaya Indonesia lagi-lagi diklaim oleh Malaysia. Meski tanggal 7 November 2003 wayang kulit sudah dikukuhkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia, karya budaya dari Jawa ini tetap diklaim sebagai bagian dari budaya Malaysia. Begitupun halnya dengan Rendang, makanan khas Sumatera Barat. Naskah kuno dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan Riau juga dibawa ke Malaysia dan dibuat versi *online* tanpa seijin Indonesia.

Selanjutnya, masih pada tahun 2007 tepatnya di bulan November, melalui publikasi elektronik pada situs resmi Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia (KEKKWA), tampak Malaysia mempromosikan “Tari Barongan” sebagai tarian khas Malaysia. Padahal, tari yang dimaksud tampak begitu serupa dengan Reog Ponorogo. (Lihat Gambar 1.2.)¹⁵

¹⁴ <http://infografis.kompas.com/read/2011/05/09/111304/Budaya.Indonesia>, diakses 6 Juni 2012.

¹⁵ <http://www.ligagame.com/forum/index.php?topic=58746.0>, diakses 23 Mei 2012.



Gambar 1.2. Reog Ponorogo Diklaim Sebagai Kesenian Malaysia

Sumber: www.heritage.gov.my

Di bulan Desember 2008, polemik dengan Malaysia kembali mengemuka setelah lagu Rasa Sayange milik kebanggaan suku Maluku diklaim oleh Malaysia.

Universitas Indonesia

Selanjutnya pada bulan Agustus 2009, kontroversi lagi-lagi muncul akibat tayangan promosi pariwisata Malaysia menampilkan tari Pendet dalam iklan tayangannya.¹⁶ Meski visual tari Pendet yang tampak pada iklan program acara “Enigmatic Malaysia” itu lantas diklarifikasi sebagai kelalaian dari pihak *Discovery Channel*, karena pihak kreatif saluran televisi kabel berbayar cakupan internasional itu yang memasukkan visual tarian Pendet dalam iklan program acara Enigmatic Malaysia itu, polemik akibat pemberitaan itu telah menjadi kontroversi tak terhindarkan.

Heru Margianto berpendapat¹⁷, meski menjengkelkan, Malaysia, “Si Truly Asia” ini memang telah membuat bangsa Indonesia ‘bangun dari tidur lelapnya’. Malaysia yang belakangan membuat jengkel atas berbagai klaimnya terhadap sejumlah kebudayaan Indonesia karena tidak sekaya Indonesia dalam hal kebudayaan, nyatanya begitu proaktif “mencari serpihan budaya” dari negeri serumpun untuk memperkuat identitas kebudayaannya.

Klaim atas sejumlah budaya Indonesia terjadi selalu terkait dengan sektor pariwisata. Malaysia yang mengusung slogan “Truly Asia” memang berupaya keras membangun citra sebagai representasi Asia untuk destinasi wisata dunia. Klaim-klaim yang pernah terjadi memang menjengkelkan bagi Indonesia. Tapi, menengok geliat pariwisata di “Negeri Jiran” itu, Indonesia memang harus belajar banyak dari “Si Truly Asia”.

Malaysia menawarkan pengalaman wisata berbasis petualangan hutan tropis, segarnya hawa dataran tinggi yang tak terlupakan, pantai berpasir yang hangat, sekaligus wisata budaya yang multikultural, hingga wisata belanja khas *sophaholic* kelas dunia. Sepintas tawaran wisata itu hampir serupa dengan “Si Ultimate in Diversity”, Indonesia. Namun yang berbeda, Malaysia memberikan kemudahan akses dalam segala hal. “Sang Jiran” memang menggarap sektor

¹⁶ Bambang, “Iklan Tari Pendet Dibuat Oleh Discovery Channel”, *antaranews.com*, 25 Agustus 2009.

¹⁷ Heru Margianto. “Menjengkelkan, tapi Kita Memang Harus Belajar dari ‘Si Truly Asia’(1)” *Kompas.com*. 1 September 2009.

pariwisatanya ibarat memenuhi kebutuhan primer dan menjadikan agenda itu amat diprioritaskan.

Disadari atau tidak, kondisi akibat polemik berkelanjutan akibat klaim kebudayaan ini telah memberi dampak negatif dan potensi konflik tersendiri bagi Indonesia. Tidak hanya pada relasi komunikasi politik bilateral antara Indonesia dan Malaysia, namun juga pada citra Indonesia di dunia internasional.

Padahal, pengembangan citra positif Indonesia di kalangan masyarakat internasional merupakan prasyarat ideal bagi tercapainya tujuan komunikasi politik luar negeri Indonesia. Hal tersebut penting dilaksanakan mengingat citra positif dapat mempermudah tercapainya cita-cita dan tujuan nasional Indonesia, yakni ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia¹⁸, dengan cara meningkatkan persahabatan maupun melalui kerjasama baik di forum bilateral serta multilateral, dimana pada akhirnya hal itu akan turut memberi sumbangsih manfaat yang besar bagi kepentingan pembangunan nasional Indonesia di berbagai bidang.

Mengutip kembali lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh WR. Supratman, “...bangunlah jiwanya, bangunlah badannya...”, sesungguhnya jiwa dan karakter bangsa adalah pondasi yang memang sejak awal senantiasa ditekankan oleh para pendiri bangsa. Sebagaimana uraian pemikiran Soekarno, kekuatan kebudayaan bangsa yang tinggi penting untuk berfungsi sebagai unsur yang kuat dalam pembangunan karakter bangsa. Dengan meyakini Pancasila sebagai dasar ideologi terbuka, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dibingkai dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” diharapkan dapat menjadi tameng perisai yang tangguh dalam menghadapi segala tantangan perubahan jaman terlebih di derasnya arus globalisasi dewasa ini.

Aspek penguatan budaya memang menjadi isu pembangunan yang alpa dilakukan oleh para pemimpin negeri setelah Bung Karno. Jika pada kepemimpinan Soeharto, model pembangunan di Indonesia lebih dititikberatkan pada

¹⁸ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea ke-4.

pembangunan fisik ketimbang pembangunan mental dan karakter manusianya, maka setelah reformasi bergulir, upaya penguatan karakter bangsa melalui kebudayaan justru melemah bahkan cenderung dikurangi.

Empat belas tahun setelah reformasi berjalan, tak banyak pemimpin yang mampu berbicara lantang dan konsisten dalam mengingatkan bangsa ini tentang pentingnya pengembangan budaya. Dari segi ilmu pengetahuan pun, pemikiran kebudayaan yang produktif seperti pada masa generasi Indonesia tahun 1930-an sampai 1945 malah semakin jarang menjadi topik penting untuk diwacanakan.

Menilik kembali peliknya citra negatif negara Indonesia di mata dunia, memang banyak hal yang perlu dibenahi dalam rangka perbaikan citra ini. Bagaimana arus disorientasi budaya yang semakin nyata cenderung menghalangi bangsa ini bersatu untuk memperjuangkan citranya. Sebagai bangsa, Indonesia seharusnya mampu melahirkan kebanggaan bagi warganya, mengingat sesungguhnya Indonesia memiliki begitu banyak potensi keunikan yang layak untuk diperkenalkan pada dunia. Indonesia memerlukan pencitraan dan persepsi yang baik untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi warganya dalam percaturan internasional. Disinilah sesungguhnya potensi kebudayaan dapat diberdayakan, tidak hanya sebagai artefak produk kebudayaan namun dapat dimakna lebih jauh nilai pembeda yang memperlihatkan keunikan identitas Indonesia sebagai warga dunia.

Penguatan identitas kebudayaan ini menjadi isu penting bagi Indonesia, tidak hanya untuk sebuah pencitraan bagi dunia. Penguatan kebudayaan menjadi suatu prioritas yang esensial sebagai jawaban atas berbagai permasalahan multidimensi yang dihadapi Indonesia. Tanpa penguatan sendi kebudayaan, bangsa ini akan kehilangan jati dirinya dalam menghadapi penetrasi budaya global yang demikian ganas.

Menurut Prof. Dr. Agus Sardjono, SH,MH,CN, (2009: 144-146), ada banyak sekali potensi yang dapat digali jika Indonesia mau memanfaatkan hasil karya

kebudayaannya, terutama dalam mekanisme perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual. Melalui dimensi hukum Hak Cipta (*Copyright*) maupun Sumber Daya Genetika (*Genetic Resources/GR*), Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge/TK*), dan Kebudayaan Rakyat atau Ekspresi Budaya Tradisional (*Folklore/F*)—biasa disingkat GRTKF, Indonesia sangat mungkin mengembangkan berbagai nilai tambah (*added value*) dari kekayaan unsur kebudayaan yang ada di katulistiwa.

Lebih lanjut, beliau mencontohkan bagaimana nilai artistik suatu bentuk kesenian tradisional dapat memiliki keunggulan, tidak hanya untuk mempromosikan Indonesia, tapi juga untuk menopang ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk pemanfaatan yang diterangkannya adalah ekspresi budaya tradisional atau *folklore* yang dikemas secara modern dalam pertunjukan Megalitikum Quantum yang diprakarsai oleh Rizaldi Siagian dalam rangka ulangtahun Kompas. Juga bagaimana pertunjukan *Ilagaligo* di berbagai negara yang menuai sukses secara komersil, yang mana cerita aslinya justru berasal dari Sulawesi, Indonesia. Pertunjukan-pertunjukan ini terbukti mampu menyedot perhatian massa, sehingga ditonton banyak pengunjung yang berani membayar mahal.

Contoh nyata lainnya adalah tingginya daya tarik Pulau Bali karena keelokan nilai budaya dan keindahan alamnya. Begitu dikenalnya Bali di mata internasional, Bali lantas dipilih menjadi salah satu setting lokasi setting film *box-office* produksi Hollywood, *Eat Pray Love*.¹⁹ Ini merupakan salah satu contoh nyata betapa pemanfaatan ekspresi kebudayaan di Bali, disamping keindahan alamnya, amat signifikan dampaknya jika dioptimalkan, tidak hanya bagi Bali tapi juga Indonesia.

Mencermati lebih dalam pada kasus klaim kebudayaan atas instrumen angklung, kita bangsa Indonesia patut bersyukur, mengingat perjuangan tak kenal lelah para pemerhati dan pencinta angklung di tanah air untuk memastikan pengakuan dunia

¹⁹ Lihat Hillary Brenhouse, "Bali's Travel Boom: Eat, Pray, Love Tourism." *Time Magazine*, 22 Jul 2010

atas angklung sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia telah berhasil diwujudkan. Setelah melalui serangkaian riset dan pembuktian dokumentasi, tanggal 17 Oktober 2010, pada sidang ke-5 di Nairobi, Kenya, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), menetapkan angklung sebagai salah satu daftar representatif Warisan Budaya Tak Benda (*representative list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*) asal Indonesia.²⁰ Warisan Budaya Tak Benda ini sendiri merupakan hasil konvensi UNESCO yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2007, tentang Pengesahan *Convention For The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda).

Pengakuan angklung sebagai alat musik dari Indonesia yang terbuat dari bambu, dengan dua jenis kategori; **angklung tradisional** bertangga nada pentatonik, dan penemuan **angklung modern** yang biasa disebut *angklung Padaeng* (yang ditemukan oleh Alm. Daeng Soetigna tahun 1938) bertangga nada diatonis kromatik, adalah suatu bentuk pengakuan internasional atas identitas nasional bangsa ini.

Pengakuan UNESCO atas angklung juga diikuti dengan ditandatanganinya komitmen pelestarian angklung dari Pemerintah, sebagai salah satu kriteria pelestarian dalam konvensi UNESCO²¹. Melalui perwakilan beberapa sektor, diantaranya Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (sekarang menjadi bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten, dan Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah bertugas untuk menyediakan sejumlah kebijakan publik yang

²⁰ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, *Indonesian Angklung*, 16 Nov 2010.

²¹ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, *Convention For the Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage*, 17 Oct 2003.

berpihak pada keberlangsungan, pengembangan, dan pelestarian angklung di Indonesia.

Selain angklung, Indonesia juga sudah mendapatkan pengakuan internasional dari tiga karya budaya sebelumnya, yakni batik, wayang dan keris. Namun sayangnya, meski upaya inventarisasi karya budaya lainnya dalam rangka perlindungan dan pelestarian budaya sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian terkait, kebudayaan tetap belum dipandang sebagai aset penting, dalam upaya membentuk citra Indonesia demi menjawab tantangan era global yang nyata ini.

Oleh karenanya, disini peneliti memilih untuk menilik salah satu warisan budaya tak benda asal Indonesia yakni angklung secara spesifik sebagai studi kasus. Selain karena angklung sebagai salah satu instrumen musik khas Indonesia pertama yang diakui keberadaannya oleh dunia internasional, angklung juga memiliki kekhasan tersendiri dalam fungsinya menjadi alat komunikasi yang universal.

Dalam hal ini, peneliti ingin menganalisa tindak lanjut Pemerintah dalam melestarikan angklung pasca pengakuan UNESCO sebagai *central of phenomenon*. Peneliti bermaksud mengamati berbagai kebijakan komunikasi Pemerintah yang telah dihasilkan sebagai respon atas komitmen Pemerintah terhadap konvensi UNESCO di Nairobi, Kenya tahun 2010 lalu.

2. Konteks Penelitian

Mengamati kondisi yang ada, hingga penelitian ini dibuat, belum terdapat penelitian yang mengungkap seperti apa efektivitas tindaklanjut kebijakan komunikasi yang telah dijalankan Pemerintah Indonesia pasca diakuinya unsur kebudayaan Indonesia sebagai daftar warisan dunia tak benda, baik terhadap kebudayaan itu sendiri, bagi citra negara Indonesia maupun terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Padahal keberadaan warisan dunia tak benda ini

membutuhkan urgensi yang tinggi mengingat belum satupun dari unsur kebudayaan yang telah diperjuangkan masuk dalam daftar warisan budaya UNESCO, pernah diteliti secara menyeluruh analisis dampaknya terhadap pelestarian dan pencitraan Indonesia, apakah itu batik, keris, wayang, ataupun keris.

Bertolak dari pemikiran tersebut, peneliti menilai dibutuhkan suatu penelitian untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan komunikasi yang telah dihasilkan Pemerintah, dalam rangka merespon komitmen Pemerintah terhadap hasil konvensi UNESCO.

Disini peneliti membatasi permasalahan secara spesifik pada kebijakan komunikasi Pemerintah dalam upaya pelestarian angklung di Indonesia. Pasca diakuinya angklung sebagai daftar warisan budaya tak benda oleh UNESCO, komitmen Pemerintah yang mana saja yang sudah dijalankan dan diwujudkan dalam bentuk kebijakan publik.

Peneliti ingin memfokuskan penelitian hanya pada bagaimana proses kebijakan komunikasi atas kebijakan terkait angklung dihasilkan oleh Pemerintah. Mengacu pada komitmen Pemerintah sebagaimana yang disebutkan dalam naskah konvensi, dimana peneliti ingin mengevaluasi kesesuaian elemen komitmen tersebut dengan kebijakan komunikasi yang telah dikeluarkan Pemerintah pasca pengakuan angklung oleh UNESCO.

Selanjutnya, peneliti lantas ingin mengevaluasi apakah dalam kebijakan komunikasi yang ada, tergambar upaya diplomasi kebudayaan yang ingin dijalankan oleh Pemerintah Indonesia dengan angklung sebagai unsurnya. Dari sana peneliti ingin memetakan pada sektor mana saja intervensi kebijakan yang ditetapkan Pemerintah tersebut dilakukan, untuk mengevaluasi apakah upaya pelestarian angklung tersebut terintegrasi ke dalam sebuah rencana strategis diplomasi kebudayaan yang komprehensif.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang berhasil dirumuskan, maka poin penting yang menjadi pertanyaan penelitian dari makalah tesis ini adalah:

- a. Bagaimana kebijakan komunikasi yang dijalankan Pemerintah, pasca diakuinya angklung ke dalam daftar warisan budaya manusia tak benda oleh UNESCO?
- b. Sektor mana saja dalam pelestarian angklung yang sudah diintervensi dengan kebijakan komunikasi oleh Pemerintah, dan sektor mana yang belum?
- c. Seperti apakah kesesuaian kebijakan komunikasi terkait angklung yang telah ada pasca pengakuan angklung dari UNESCO, jika mengacu pada komitmen Pemerintah hasil konvensi UNESCO yang telah disepakati?

4. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan komunikasi yang telah dijalankan Pemerintah, sebagai bentuk pelaksanaan komitmen Pemerintah atas upaya pelestarian angklung pasca diakuinya angklung sebagai salah satu warisan budaya tak benda asal Indonesia oleh UNESCO.

Sedangkan secara khusus, penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan komunikasi yang dilakukan Pemerintah dengan komitmen Pemerintah sebagaimana tercantum dalam hasil konvensi, untuk melestarikan angklung sebagai unsur kebudayaan yang menarik dari Indonesia.

5. Signifikansi Penelitian

5.1. Signifikansi Akademik

Melalui adanya penelitian ini, peneliti mengharapkan bentuk-bentuk studi terhadap kebijakan komunikasi dalam membahas strategi dan konsep diplomasi kebudayaan dalam perspektif ilmu komunikasi politik, dapat terus dikembangkan secara luas. Sehingga penelitian ini bermanfaat dalam memperkaya teori dan pengembangan ilmu pengetahuan secara luas dan interkoneksi. Tidak terbatas hanya pada ilmu komunikasi, tapi juga bidang ilmu lain seperti ilmu kebijakan publik dan ilmu hubungan internasional.

5.2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi praktisi di berbagai bidang manajemen komunikasi, seperti misalnya bidang manajemen komunikasi politik terutama dalam bauran ilmu manajemen *Public Relations* Politik, manajemen *Public Relations* secara umum, komunikasi pemasaran, manajemen kebijakan publik, maupun manajemen seni pertunjukan.

Khusus di bidang manajemen komunikasi politik, penelitian ini bermanfaat dalam mengidentifikasi bagaimana sebuah kebijakan komunikasi yang dilakukan suatu sistem politik, berperan tidak hanya dalam upaya pelestarian unsur kebudayaan, namun lebih dalam lagi yakni dipandang sebagai upaya diplomasi kebudayaan suatu negara.

Diplomasi kebudayaan yang dimaksud disini bukan semata-mata sebagai sebuah pesan komunikasi antar budaya, namun juga harus mampu berperan sebagai suatu bentuk penyampaian komunikasi politik untuk menyampaikan kepentingan yang lebih besar lagi, yakni demi terwujudnya kepentingan nasional.

Dalam kerangka area manajemen *Public Relations* maupun komunikasi pemasaran, penelitian ini bermanfaat untuk mempelajari bagaimana serangkaian kebijakan komunikasi yang ditetapkan sebuah organisasi (dalam hal ini negara), dengan sasaran khalayak yang tepat, dapat mempengaruhi opini publik dan dan membingkai persepsi, untuk sebuah tujuan nasional yang jelas, yakni pencitraan suatu bangsa.

Manfaat bagi bidang manajemen kebijakan publik, penelitian ini dapat dipergunakan sebagai rujukan untuk kajian pengembangan perencanaan kebijakan publik yang komprehensif, untuk pengelolaan unsur kebudayaan yang lebih matang.

Sedangkan bagi mereka yang berkecimpung di bidang seni pertunjukan, penelitian ini dapat memberi khazanah baru dalam memahami bagaimana kebijakan komunikasi atas sebuah karya seni dapat membuahkan respon majemuk yang begitu bermakna.

Implikasi kebijakan komunikasi Pemerintah atas ornamen kebudayaan bernama angklung, tidak hanya akan dirasakan oleh komunitas pencinta angklung saja. Namun melalui penelitian ini, diharapkan ada dampak lanjutan yang bisa dimanfaatkan secara optimal. Dimana sebuah diplomasi kebudayaan melalui unsur kebudayaan yang khas, dapat digunakan sebagai suatu bentuk komunikasi yang berdampak luas yang mempengaruhi citra Indonesia di skala internasional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perspektif Teoritis

Wacana kebijakan pemerintah menjadi bagian tak terpisahkan dari kerja jurnalistik dan media. Di saat yang bersamaan, beragam isu yang berkembang di media pun tidak bisa dilepaskan dari kerja komunikasi publik pemerintah. Ini tentunya melibatkan para ahli, pengambil keputusan, jurnalis, dan warga yang bertemu di dalam sebuah arena publik dengan berbagai tipologi media komunikasi.

Kebijakan publik merupakan hasil keputusan yang dibuat oleh pemerintah dan ditujukan kepada masyarakat, baik kalangan pemerintah maupun swasta. Dinamika lingkungan sosial maupun beragam kepentingan antara para pihak yang berinteraksi yang terlibat, akan memengaruhi perumusan maupun pelaksanaan kebijakan publik.

Dalam pandangan Siregar (2005:1), komunikasi pemerintah dapat diamati dalam dua wilayah, yang pertama adalah secara individual dan berkaitan dengan pejabat pemerintah (atau pejabat publik) dalam berkomunikasi, sedangkan yang kedua dilihat secara institusional, yakni orientasi birokrasi publik dalam menyelenggarakan komunikasi.

Lembaga-lembaga publik, saat ini memiliki beragam cara maupun metode untuk mengomunikasikan program dan citra lembaga kepada publik dan masyarakat luas. Tidak sedikit strategi dan program komunikasi disusun, baik disusun sendiri ataupun dengan bantuan pihak ketiga, diarahkan untuk mengedukasi publik. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa masyarakat luas kurang memahami berbagai kebijakan publik yang ada, baik itu undang-undang maupun perangkat peraturan di bawahnya, meskipun media massa telah ikut berpartisipasi untuk

mensosialisasikannya. Ini tak terhindarkan akibat minat baca masyarakat yang relatif masih rendah, maupun sosialisasi undang-undang pada kelompok strategis dalam masyarakat masih belum optimal.

Chalaby (2000:34) secara khusus mencermati tentang bagaimana publik berkomunikasi dan menggunakan ruang publik untuk saling bertukar wacana. Ia menyebutkan bahwa era komunikasi publik telah ditandai dengan perkembangan konsep jurnalisme yang berhubungan dengan kepentingan pasar, serta mempengaruhi publik dan proses politik (38). Perubahan diskursus publik, struktur ruang publik, relasi antar media dengan ekonomi, serta penyedia konten dengan publik, jelas membutuhkan penyikapan baru dalam kebijakan komunikasi pemerintah. Dalam era transisi seperti ini, jurnalisme menjadi diskursus publik yang dominan dalam ruang publik, dan arena itu pula pemenuhan hak rasa ingin tahu publik menjadi kian mengemuka.

Sebagaimana fenomena sentral yang diangkat dalam penelitian ini, berbagai kebijakan komunikasi dewasa ini memang menjadi salah satu bagian tak terpisahkan dalam konsolidasi demokrasi. Larry Diamond, dalam bukunya *Developing Democracy toward Consolidation* (1999), mengungkapkan definisi konsolidasi demokrasi sebagai persoalan bagaimana merawat stabilitas dan persistensi demokrasi.

Lebih jauh ia juga mengatakan bahwa konsolidasi demokrasi menekankan pada proses pencapaian legitimasi yang kuat dan dalam, sehingga tumbuh kepercayaan antara semua aktor politik yang signifikan, baik pada level massa maupun elite, karena mereka yakin bahwa pemerintahan demokratis adalah bentuk yang paling tepat bagi masyarakat mereka.¹⁹

Robert Dahl (1982) menyampaikan adanya tujuh unsur yang harus dipenuhi dalam demokrasi.²⁰ Tujuh unsur itu adalah:

¹⁹ Andi Faisal Bakti, *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi*, Tangerang: Churia Press, 2012, halaman 1-3.

²⁰ *Ibid.*, halaman 4.

- kontrol atas kekuasaan, yakni ada pada pemimpin yang dipilih rakyat secara teliti dan jujur;
- tidak adanya pemaksaan yang dilakukan oleh pemimpin pilihan rakyat ini;
- semua orang dewasa berhak memilih pejabat;
- semua orang dewasa punya hak untuk dipilih;
- rakyat memiliki hak bebas untuk menyampaikan pandangan secara kritis tanpa adanya ancaman dan hukuman;
- rakyat mempunyai hak memperoleh informasi yang dilindungi hukum;
- rakyat bebas membentuk lembaga dan partai politik.

Dengan perspektif ini, maka demokrasi kerap dikaitkan dengan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pluralisme dan sekularisme. Makna umum demokrasi adalah kepemimpinan dan kedaulatan politik ada di tangan rakyat, dimana intinya ada pada kemampuan rakyat melakukan negosiasi sejajar dengan pihak pemimpin, terutama pihak eksekutif. Ruang-ruang berpendapat memang menjadi suatu keniscayaan dalam perkembangan dunia global, terlebih sejak demokratisasi gelombang ketiga melanda berbagai negara di dunia.

Munculnya kehadiran masyarakat sipil dalam wilayah publik merupakan indikator yang memperlihatkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat untuk membicarakan kepentingan politis. Politik tidak harus dibicarakan oleh rezim penguasa saja, namun juga dapat dibicarakan dengan bebas di kedai-kedai kopi atau warung biasa.

Keberadaan wilayah publik ini penting dalam menjamin terbukanya pintu ilmu pengetahuan manusia. Mengingat ilmu-ilmu sosial tidak sekedar mengambil alih metode ilmu-ilmu alam yang positivistik, melainkan memiliki ciri kritis, yakni menjadi pengetahuan yang mampu membebaskan diri dari klaim bebas nilai.

Diskursus publik mengharapkan adanya suatu perubahan yang emansipatif (membebaskan) yang hanya mungkin terjadi jika kita menggunakan pendekatan

komunikasi melalui media-media yang rasional dan efektif, serta mengandalkan keterbukaan dan kejujuran, untuk membebaskan pandangan-pandangan sistematis yang selalu bertendensi distortif dalam kaitan pertentangan ideologi dengan kekuasaan.²¹

Seperti yang kita ketahui bersama, perkembangan informasi dalam konteks yang signifikan pada masyarakat modern bahkan telah menjadikan komunikasi sebagai suatu obyek penting suatu kebijakan. Masyarakat informasi dengan segala karakteristiknya, telah menimbulkan suatu permasalahan sosial baru yang jangkauannya relatif luas. Permasalahan tersebut antara lain adalah²²:

- adanya invasi maupun kebutuhan untuk melindungi *privacy*;
- akses masalah yang timbul akibat penyalahgunaan informasi;
- persoalan bagaimana menjaga kontrol sosial;
- ketidakseimbangan informasi;
- penguasaan atau monopoli informasi;
- kasus-kasus pornografi;
- maupun ledakan informasi.

Bagaimanapun, pengenalan dan identifikasi terhadap berbagai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat informasi ini sesungguhnya bervariasi, tergantung pada kondisi ekonomi dan politik serta sistem sosial yang ada pada masyarakat.

Sebelum mengamati lebih jauh seperti kebijakan komunikasi Pemerintah dalam menyediakan berbagai bentuk intervensi dalam kebijakan publik untuk pelestarian angklung di Indonesia ditelusuri dalam penelitian ini, peneliti ingin mengulas terlebih dahulu beberapa perspektif tentang ilmu komunikasi yang yang mungkin dieksplorasi, melalui studi kasus terkait dengan fenomena sentral angklung dan kebijakan komunikasi pelestarian angklung ini.

²¹ Mudji Sutrisno & Hendar Putranto, *Teori-teori Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 2005, halaman 41-43.

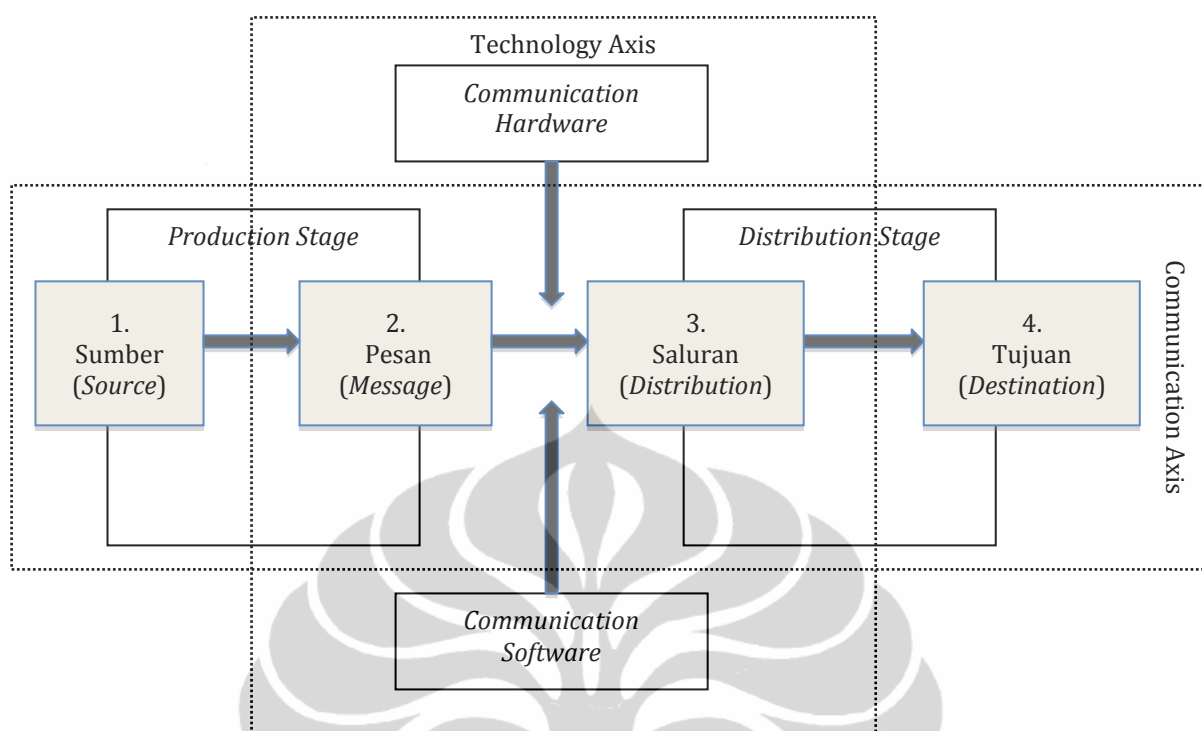
²² Denis McQuail & Sven Windahl, halaman 213.

2.1.1. Teori Komunikasi Internasional

Komunikasi internasional dipahami sebagai salah satu bentuk interaksi antar manusia yang berbeda bangsa. Komunikasi internasional dilakukan tidak hanya dalam kerangka menciptakan relasi internasional antar negara. Dan seperti kita ketahui, globalisasi yang telah melenyapkan seluruh batasan telah memungkinkan komunikasi internasional terjadi dalam segala kesempatan.

Mowana (1985) telah membuat analisa umum atas bermacam bentuk komunikasi internasional dan menggambarannya dalam sebuah model, yang memperlihatkan dua dimensi dari komunikasi internasional.

Tujuan dari dibuatnya model ini (lihat Gambar 2.1) adalah untuk menampilkan tahapan komunikasi mulai dari pengirim pesan hingga ke penerima pesan, yang dimediasi oleh teknologi, berdasarkan sistem produksi dan distribusinya. Dalam komunikasi internasional, proses komunikasi dilihat dari skala nasional, dimana masing-masing dari empat tahapan yang ada dapat, bahkan sering, dikelola secara khusus dan terpisah dari tahapan lainnya, berdasarkan dimensi kebudayaan.



Gambar 2.1. Model Proses Komunikasi Internasional Mowlana (1985)

Sumber: Denis McQuail & Sven Windahl (1993:217)

Menurut model ini, sumber pesan dari suatu negara, apakah itu politisi dari suatu negara maupun pengiklan, akan bergabung dalam pesan yang diproduksi oleh negara lain, misalnya tergabung dalam berita pada suatu bulletin berita negara lain, dimana kemudian pesan tersebut akan tersebarluaskan tidak hanya ke negara tersebut, namun juga ke negara lainnya.²³

Pada umumnya, seluruh proses produksi pesan dilakukan di satu negara, lalu kemudian didistribusikan ke negara lain. Inilah proses yang terjadi dalam peta penyebarluasan pesan pada konteks ilmu komunikasi internasional. Model ini pula yang bisa menerangkan bagaimana “utara” yang kaya dihubungkan dengan “selatan” yang miskin.

²³ Denis McQuail & Sven Windahl, *Communication Models for The Study of Mass Communications*, 2nd ed., Edinburgh: Addison Wesley Longman, 1993, halaman 217-218.

Di sebagian negara berkembang, umumnya kerap akan terjadi kesenjangan-baik kesenjangan kebudayaan, sosial maupun ekonomi- antara sumber pesan, produksi pesan, dan sistem pendistribusian pesan dari satu pihak ke pihak lain yang menjadi calon penerima pesan selanjutnya.

Penyebarluasan pesan biasanya terkendala oleh karena terhentinya proses pendistribusian akibat kendala teknologi. Kondisi ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap tahapan proses produksi dan distribusi pesan, terdapat dua aspek penting teknologi yang terkait, yakni perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).

Perangkat keras untuk proses produksi meliputi, sebagai contoh, studio dan percetakan, transmiter maupun perangkat keras distribusi pesan lainnya, saluran satelit, penerima frekuensi dan sebagainya. Sedangkan perangkat lunak untuk produksi termasuk diantaranya elemen naskah, *Performance Rights* (hak untuk mengumumkan), aspek pengelolaan dan norma-norma profesional.

Contoh untuk perangkat lunak proses distribusi diantaranya adalah publisitas, riset dan pemasaran. Pada dua tahapan produksi dan distribusi tersebut, Mowlana juga mengingatkan adanya kehadiran variabel ekstra maupun intra dalam medium yang dapat mempengaruhi. Misalnya pada sisi proses produksi, fakta bahwa ada aspek-aspek tertentu seperti ekonomi dan kepemilikan, maupun pada sisi distribusi, yang memperlihatkan bagaimana faktor sosial dan ekonomi akan menentukan berjalan atau tidaknya arus informasi melalui saluran-saluran internasional.

Salah satu hal penting yang dapat diilustrasikan melalui model ini, adalah bahwa model Proses Komunikasi Internasional ini dapat membantu menganalisa kondisi ketergantungan majemuk yang sering terjadi, terutama pada arus komunikasi dari negara-negara maju ke negara berkembang. Semakin tinggi tingkat ketergantungan terhadap empat elemen utama, maka semakin besar pula ketergantungan suatu negara terhadap negara penyedia sumber informasi.

Kemandirian komunikasi hanya akan dapat terwujud apabila suatu negara telah mampu mencukupi kebutuhan negaranya sendiri dalam hal ketersediaan perangkat keras maupu perangkat lunak, maupun dalam proses produksi dan distribusi pesan. Kemampuan mencukupi diri sendiri ini harus ditingkatkan, melampaui kepentingan elemen 'intra-media' seperti kepemilikan media, agar suatu negara dapat mengontrol sekaligus mencukupi kebutuhan dan ketersediaan informasi dalam konteks sosial. Kemandirian yang dimaksud disini bukan berarti meniadakan komunikasi internasional sama sekali, namun memperhatikan potensi kecukupan informasi, yang mana ini kerap terabaikan oleh banyak negara berkembang di dunia.

Stevenson, R. (544-547) berupaya menjelaskan bagaimana trend global dalam komunikasi membuka panorama yang lebih luas tentang pemahaman komunikasi internasional dewasa ini. Dikatakannya, ada lima jenis trend global yang tampak dari komunikasi internasional. Kelima aspek itu adalah:

- (1) Dominasi Anglo-Amerika. Fenomena bahwa kebudayaan global seolah tercipta dari kota-kota besar negara maju seperti Hollywood, New York dan London, dan menjadi bentuk baru imperialisme modern, yang disebut imperialisme kebudayaan (*cultural imperialism*). Hal ini dengan mudah terlihat dalam forum akademis internasional, bagaimana para delegasi mengenakan jeans Levi's, merokok Marlboro dan minum Coca-cola. Dominasi ini, selanjutnya dapat dikategorisasikan kembali dalam empat area yang berbeda.
 - a. Bahasa. Kebudayaan global telah memposisikan bahasa Inggris sebagai alat dan bahasa universal.
 - b. Berita. Dominasi Anglo-Amerika terlihat jelas dalam perspektif berita, dimana kantor-kantor berita Amerika Serikat seperti *CNN*, *International Herald Tribune*, *Time*, *Newsweek*, dan *Economist* menjadi penting dalam dunia jurnalisme.
 - c. Kebudayaan Pop. Meski dianggap sebagai imperialisme kebudayaan kebudayaan Anglo-Amerika memang telah mempengaruhi kebudayaan pop dunia. Bagaimana penerimaan

masyarakat terhadap film-film karya Hollywood atau antusiasme anak-anak terhadap Disneyland, disukai atau tidak telah menjelaskan seperti apa dominasi Anglo-Amerika dalam budaya pop.

- d. Teknologi. Meskipun banyak inovasi dalam dunia elektronik saat ini berasal dari Asia, berbagai satelit dan komputer yang memungkinkan terciptanya “*global village*” masih dibuat di Amerika Serikat.
- (2) Revitalisasi Kebudayaan. Adalah suatu kondisi yang ironis, menyadari bahwa hasil yang timbul dari berakhirnya Perang Dingin adalah justru hadirnya konflik kebudayaan. Pemahaman multikultural yang sempit dan identitas etnis yang terlalu kuat telah menyebabkan disintegrasi di berbagai negara.
 - (3) Kebudayaan Global. Sesungguhnya konflik revitalisasi kebudayaan yang terjadi di berbagai belahan dunia merupakan dampak negatif dari kebudayaan global. Kebudayaan global cenderung mempromosikan komersialisasi, bersifat dangkal dan justru mengancam keberadaan kebudayaan manusia yang sebenarnya.
 - (4) Kebebasan Jurnalisme Independen. Perkembangan jurnalisme paska dominasi sistem komunis telah membuka keran kebebasan bagi dunia jurnalisme modern.
 - (5) Bisnis Media Baru. Pertumbuhan pesat sistem komunikasi global telah membuka peluang bagi generasi baru pebisnis media di berbagai tempat.

Seperti diterangkan dalam model Proses Komunikasi Internasional Mowlana, melalui aktivitas komunikasi internasional kita dapat mengetahui apa yang dilakukan Malaysia, dan dalam konteks komunikasi internasional pula kita mengalami apa yang dinamakan ‘perang virtual’, perang persepsi melalui pembentukan opini publik di media massa, dalam merespon klaim unsur kebudayaan yang dilakukan oleh negara jiran itu.

Meski demikian, kita tak bisa mengabaikan begitu saja kepentingan ekonomi dari media massa di Indonesia. Kebutuhan akan *rating* dan sejumlah kewajiban redaksi terhadap pemilik media dalam aspek bisnis, mau tidak mau telah membawa pesan komunikasi internasional ini dalam tingkatan subjektivitas tertentu. Apakah itu terletak pada keterbatasan perspektif wartawan dalam menyajikan kelengkapan dan keakuratan informasi, adanya upaya *framing* media untuk pesan-pesan 'sponsor' tertentu, atau agenda setting yang memang didisain dalam upaya mempromosikan idealisme tertentu dari meja redaksi.

Dalam hal ini, segala bentuk perbedaan pendapat antara Indonesia dan Malaysia memang senantiasa menarik minat khalayak untuk diperbincangkan. Mengingat begitu panjang perjalanan sejarah pahit-manis hubungan bilateral Indonesia-Malaysia, tentunya topik klaim kebudayaan ini juga bagi media menarik untuk diulas dan diseting menjadi isu media yang kontroversial.

2.1.2. Model Kebijakan Komunikasi

Salvaggio (1985) membuat proposisi tentang perbedaan yang terjadi pada empat jenis masyarakat, yakni:

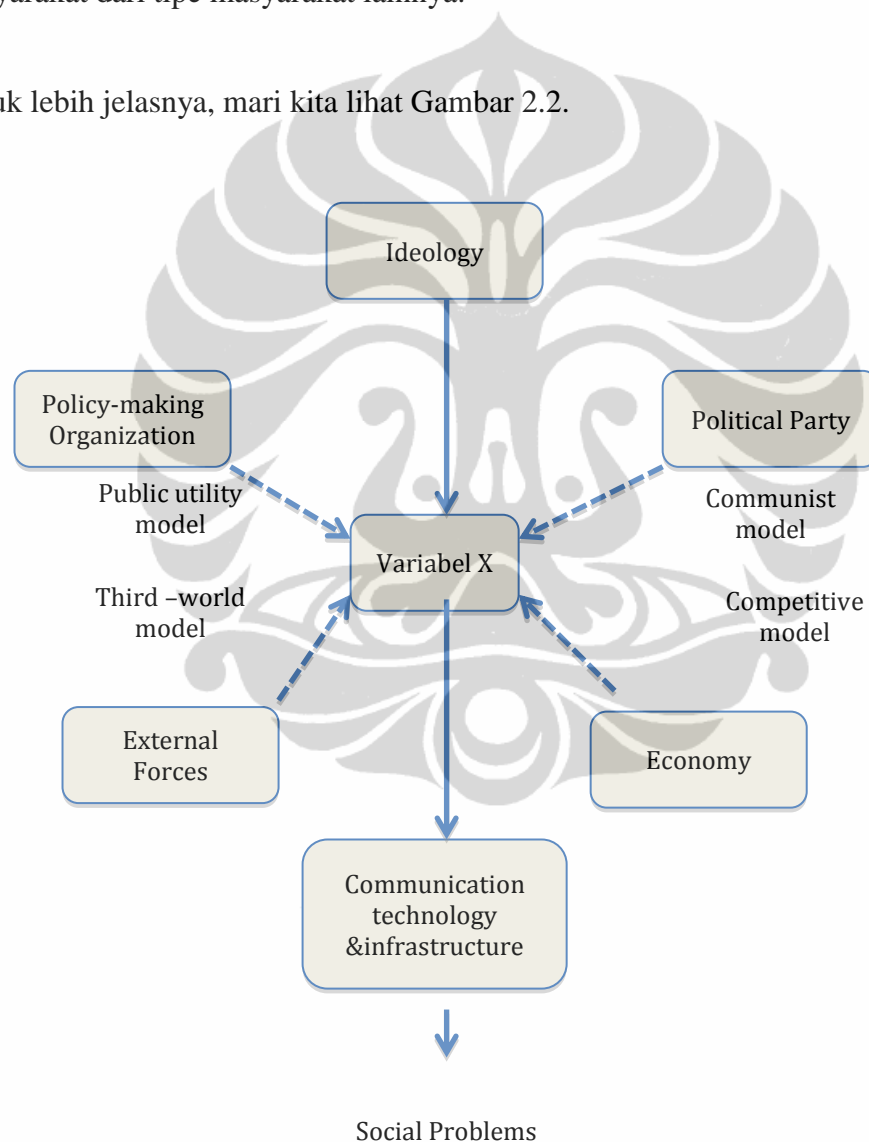
- pada masyarakat yang kompetitif (pasar bebas), dalam modelnya ia sebut sebagai *Competitive Model*;
- pada masyarakat yang menekankan fungsi publik (seperti pasar ekonomi sosial di Eropa Barat), disebut sebagai *Public-utility Model*;
- pada masyarakat komunis (seperti di masyarakat Rusia maupun Cina), merupakan *Communist Model*;
- serta pada masyarakat dari Dunia Ketiga (dimana banyak diantaranya merupakan negara berkembang) yang dalam modelnya ia sebut sebagai *Third-World Model*.

Ide pokok yang diutarakan Salvaggio adalah bahwa pada dasarnya, faktor-faktor yang sama akan membedakan bagaimana hubungan antara teknologi komunikasi

dengan jenis permasalahan yang dialami suatu masyarakat, namun dalam kombinasi yang berbeda dan prioritas yang berbeda pula.

Ada dua faktor utama penting dalam seluruh jenis masyarakat, yang dapat mempengaruhi timbulnya permasalahan sosial di masyarakat dalam perkembangan infrastruktur teknologi komunikasi. Yang pertama adalah faktor ideologi, dan faktor lainnya adalah variabel X, yang membedakan suatu tipe masyarakat dari tipe masyarakat lainnya.

Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Model Perbandingan Sistem Kebijakan Komunikasi, adaptasi dari Salvaggio (1985).

Sumber: Denis McQuail & Sven Windahl (1993:214)

Pada model Perbandingan Sistem Kebijakan Komunikasi ini, dijelaskan variabel mana yang paling sering berhubungan dengan variabel X pada setiap tipe masyarakat, sebagaimana diterangkan berikut ini. Bagaimana kekuatan ekonomi mempengaruhi sistem pasar bebas (*Competitive Model*), lembaga kebijakan seperti kementerian mempengaruhi sistem masyarakat yang bertipe *Public-utility Model*, pengaruh kuat partai politik dalam *Communist Model*, maupun dalam kasus negara-negara berkembang, adalah bagaimana kekuatan eksternal seperti organisasi internasional, bermakna dalam praktik *Third-World Model*.

Model ini juga mengingatkan kita pada variabel maupun permasalahan alami lainnya yang relatif ditimbulkan dari masyarakat informasi. Bagaimana kecenderungan alamiah, derajat dan macam pengenalan yang mungkin ditemukan untuk mencari solusi atas permasalahan sosial yang terjadi.

Kembali pada fenomena kebijakan komunikasi terkait komitmen Pemerintah dalam pelestarian angklung, sesungguhnya model ini peneliti anggap tepat untuk menggambarkan kondisi yang terjadi. Bagaimana Indonesia, yang dikategorikan oleh dunia sebagai negara Dunia Ketiga atau dijelaskan dalam *Third-world model*, memiliki ketergantungan yang cukup tinggi pada faktor eksternal, dalam berbagai proses pembentukan kebijakan internal negaranya.

Sebagaimana diulas pada bab sebelumnya, Indonesia kerap menjadi sasaran empuk para aktor internasional, yang merasa perlu melibatkan diri dalam kebijakan internal negara berkembang seperti Indonesia.

UNESCO merupakan lembaga internasional khusus dalam United Nations, yang didirikan sejak tahun 1945 untuk meliputi empat area utama: pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan komunikasi.²⁴ Lembaga ini didirikan untuk membangun perdamaian di dunia, melalui ilmu pengetahuan, perkembangan

²⁴ <http://www.unesco.org>

sosial, pertukaran dan pemahaman bersama antar umat manusia, sebagaimana mandate seluruh dunia di abad ke-21 ini.

Isu global yang dipromosikan UNESCO adalah dimensi pengembangan kemanusiaan, dimana preservasi dan promosi keanekaragaman kebudayaan kini semakin dibutuhkan, bersamaan dengan penghargaan atas hak dasar individu serta dalam rangka untuk berbagi pengetahuan.

Sementara perlindungan atas kekayaan kebudayaan dunia dan warisan alam yang dilaksanakan oleh UNESCO sendiri diadopsi negara-negara anggota UNESCO dari konvensi Warisan Dunia (*World Heritage Convention*) pada tahun 1972.²⁵ Sejak konvensi 1972 ini diadopsi, masyarakat internasional dihadapkan pada konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), dimana perlindungan dan konservasi terhadap kekayaan alam maupun kekayaan kebudayaan menjadi signifikan kontribusinya dalam konsep pembangunan berkelanjutan ini.

Konvensi Warisan Dunia ini bertujuan untuk mengidentifikasi, melindungi, melakukan konservasi, mempresentasikan serta mentransmisikan kebudayaan dan warisan alam kepada generasi mendatang, dimana kriteria dan kondisi properti daftar warisan dunia ini dikembangkan untuk mengevaluasi nilai universal (*Outstanding Universal Value*) sekaligus memberi panduan kepada negara-negara terkait dalam hal melindungi dan mengelola warisan dunia yang dimiliki.

Melalui konvensi ini juga, negara-negara anggota UNESCO sepakat untuk memberi label pada sejumlah warisan dunia yang ada di tiap negara. Apabila suatu area yang dideskripsikan sebagai warisan dunia mengalami kerusakan, maka Komite UNESCO akan mempertimbangkan area warisan dunia tersebut masuk ke dalam daftar warisan dunia yang dalam keadaan bahaya (*List of World Heritage in Danger*). Lalu jika kemudian nilai universal yang telah dimasukkan dalam daftar

²⁵ United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, "*Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention*", November 2011, halaman 2.

warisan dunia itu rusak, maka Komite UNESCO akan menghapus keberadaan properti itu dari daftar warisan budaya dunia (*World Heritage List*).

Mengenai Komite Warisan Dunia (*The World Heritage Committee*) yang ada pada UNESCO itu sendiri, terdiri dari 21 anggota yang mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya setahun sekali, pada setiap bulan Juni atau Juli. Komite ini bertugas untuk mengelola pertemuan, dimana jangka waktu keanggotaan Komite adalah 6 tahun.

Komite mempunyai tugas mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memutuskan labelisasi yang akan dilakukan pada properti warisan dunia, baik warisan kebudayaan maupun warisan alam. Komite juga bertugas mencari pendanaan untuk meningkatkan upaya proteksi nilai universal ini, meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan konvensi secara periodik, merevisi panduan operasional yang ada, serta melaporkan aktivitas yang mereka lakukan setiap periode dua tahun, baik ke Sekretariat Jenderal pihak negara yang terkait maupun kepada Kongres UNESCO.

Mengenai konvensi yang khusus membahas pelestarian warisan kebudayaan tak benda, ini bermula dari hasil konferensi UNESCO di Paris, tanggal 29 September sampai 17 Oktober 2003, yang membahas dan mempertimbangkan pentingnya menjaga warisan kebudayaan tak benda sebagai batu pijakan utama dalam keanekaragaman kebudayaan, serta untuk menjamin pembangunan berkelanjutan.²⁶

Pada fokus permasalahan penelitian ini, keberadaan lembaga internasional UNESCO sebagai wujud peran faktor eksternal yang telah diakui seluruh dunia termasuk Indonesia, telah secara eksplisit menunjukkan pengaruhnya dalam menentukan siapa yang berhak atas klaim kebudayaan angklung. UNESCO juga lah yang menjadi pihak netral yang menentukan asal suatu kebudayaan melalui serangkaian penelitian ilmiahnya. Bahkan dalam hal penentuan kebijakan terkait

²⁶ United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, "Convention For The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage", Paris 17 Oktober 2003, halaman 1.

angklong, UNESCO kembali menjadi pihak berkompeten yang berhak memintakan komitmen Indonesia, baik pemerintah maupun sektor privatnya, untuk memformulasi kebijakan pelestarian angklong di tanah air.

2.1.3. Teori Diplomasi Kebudayaan

Secara konvensional, pengertian diplomasi adalah usaha suatu negara-bangsa untuk memperjuangkan kepentingan nasional di kalangan masyarakat internasional.²⁷ Diplomasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk perundingan, melainkan segala bentuk upaya hubungan luar negeri.

Warsito dan Kartikasari (2007:2), menjelaskan diplomasi kebudayaan yang dilakukan oleh negara-negara berkembang merupakan strategi hubungan internasional yang mempelajari kebudayaan sebagai substansi politik luar negeri yang dijalankan. Kebudayaan yang dimaksudkan disini terutama adalah kebudayaan mikro, yang biasanya termanifestasikan dalam pendidikan, kesenian, ilmu pengetahuan dan olahraga.

Dalam pengertian definitif, diplomasi kebudayaan dapat diartikan sebagai usaha suatu negara untuk memperjuangkan kepentingannya melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikro seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga dan kesenian, ataupun secara makro sesuai dengan ciri-ciri khas yang utama, misalnya dengan propaganda, yang dalam pengertian konvensional dapat bukan dianggap sebagai aktivitas politik, ekonomi, ataupun militer.²⁸

Diplomasi kebudayaan dapat dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, individual maupun kolektif, bahkan oleh setiap warga negara. Karena itu, pola hubungan diplomasi kebudayaan antarbangsa dapat dilakukan di berbagai

²⁷ K.J Holsti, *International Politics, A Framework for Analysis*, 3d ed., New Delhi: Prentice Hall of India, 1984, halaman 82-83.

²⁸ Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, *Diplomasi Kebudayaan: Konsep dan Relevansi Bagi Negara Berkembang, Studi Kasus Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2007, halaman 4.

level. Antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan swasta, swasta dengan swasta, pemerintah dengan pribadi, swasta dengan pribadi, maupun pribadi dengan pribadi. Namun pola umum yang biasanya terjadi dalam hubungan diplomasi kebudayaan adalah antara masyarakat negara tertentu dengan masyarakat negara lain.



Gambar 2.3. Skema Pelaku dan Sasaran Diplomasi Kebudayaan

Sumber: Warsito & Kartikasari (2007: 17)

Adapun tujuan dari diplomasi kebudayaan adalah untuk mempengaruhi pendapat umum (dalam hal ini opini masyarakat negara lain), guna mendukung suatu kebijaksanaan politik luar negeri tertentu. Sasarannya adalah pendapat umum, yang dapat mempengaruhi para pengambil keputusan pada pemerintah ataupun organisasi internasional.

Diplomasi kebudayaan menggunakan berbagai macam alat komunikasi sebagai sarannya, yang dianggap dapat menyampaikan isi atau misi politik luar negeri tertentu, termasuk di dalamnya sarana diplomatik maupun militer. Sementara isi pesan atau materi diplomasi kebudayaan adalah pendayagunaan segala aspek budaya, antara lain kesenian, pariwisata, olahraga, tradisi, teknologi, sampai dengan pertukaran ahli dan sebagainya.

Yang membedakan tindakan diplomasi kebudayaan dengan diplomasi non-kebudayaan adalah ciri pelaku dan sasarannya. Diplomasi kebudayaan dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah, dengan sasaran utamanya adalah masyarakat suatu negara-bangsa, bukan semata-mata langsung terhadap pemerintahnya. Itu sebabnya, karakteristik konsep-konsep diplomasi kebudayaan amat didasarkan pada ciri-ciri pola komunikasinya, dan bukan pada bidang operasi maupun bidang-bidang disiplin yang dilibatkannya.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Warsito dan Kartikasari, terdapat beberapa jenis konsep diplomasi kebudayaan, yang dibedakan dari segi pola komunikasinya, menurut tujuan, bentuk dan sasarannya.

Dalam penjelasannya, Warsito menekankan bahwa secara teoritik, tujuan diplomasi kebudayaan adalah untuk memenuhi kepentingan nasional. Kepentingan nasional yang dimaksudkan disini dapat diartikan sebagai kepentingan yang bertumpu pada legal-formal pemerintahan, maupun kepentingan masyarakat luas, baik orang per orang maupun kelompok.

Diterangkan Warsito & Kartikasari, bahwa dalam pengertian awam atau konvensional, bentuk diplomasi kebudayaan hanya dikenal pada waktu damai saja. Padahal, dimensi bentuk diplomasi kebudayaan sangat luas, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1., mulai dari pameran hingga pemblokiran.

Bentuk Diplomasi kebudayaan	Tujuan	Sarana		Cara		Situasi
		Infrastuktur	Suprastruktur	Langsung	Tidak langsung	Damai
Eksebsi / pameran	Pengakuan (<i>recognition</i>)	Elektronik/ audio visual	Pariwisata	Bilateral	melalui negara ketiga	Krisis
Propaganda	Penyesuaian (<i>adjustment</i>)	Cetak	Para militer	Multilateral	melalui lembaga internasional	Konflik
Kompetisi	Bujukan (<i>persuasion</i>)		Pendidikan	Konvensi internasional		Perang
Penetrasi	Ancaman (<i>coercion</i>)		Kesenian			
Negosiasi	Hegemoni		Perdagangan			
Pertukaran ahli/studi	Subversi		Opini publik			
Terorisme			Olahraga			
Embargo / penghentian arus masuk barang/jasa						
Boikot						
Blokade / peblokiran						

Tabel 2.1. Konsep-Konsep Diplomasi Kebudayaan

Sumber: Warsito & Kartikasari (2007: 19)

telah diolah kembali

SITUASI	BENTUK	TUJUAN	SARANA
Damai	<ul style="list-style-type: none"> • Eksibisi • Kompetisi • Pertukaran misi • Negosiasi • Konferensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengakuan • Hegemoni • Persahabatan • Penyesuaian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pariwisata • Olah Raga • Pendidikan • Perdagangan • Kesenian
Krisis	<ul style="list-style-type: none"> • Propaganda • Pertukaran misi • Negosiasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Persuasi • Penyesuaian • Pengakuan • Ancaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Politik • Media massa • Diplomati • Misi tingkat tinggi • Opini publik
Konflik	<ul style="list-style-type: none"> • Teror • Penetrasi • Pertukaran misi • Boikot • Negosiasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ancaman • Subversi • Persuasi • Pengakuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Opini publik • Perdagangan • Para militer • Forum resmi • Pihak ketiga
Perang	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetisi • Teror • Penetrasi • Propaganda • Embargo • Boikot • Blokade 	<ul style="list-style-type: none"> • Dominasi • Hegemoni • Ancaman • Subversi • Pengakuan • Penaklukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Militer • Para militer • Penyelundupan • Opini publik • Perdagangan • Penyediaan barang konsumtif (termasuk senjata)

Tabel 2.2.

Hubungan Antara Situasi, Bentuk, Tujuan, dan Sarana Diplomasi Kebudayaan

Sumber: Warsito & Kartikasari (2007: 31)

Lebih lanjut dalam menelusuri sejarah diplomasi kebudayaan di Indonesia, tidaklah mungkin dilakukan tanpa mempelajari sejarah politik luar negeri Indonesia dari masa ke masa.

Kepemimpinan Presiden Soekarno²⁹

Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, perwujudan politik luar negeri Indonesia diproyeksikan, baik ke dalam maupun ke luar negeri, adalah bagian dari kebijakan Presiden Soekarno yang bersifat mercusuar, hingar bingar dan semarak. Kecenderungan kebijaksanaan yang ditempuh Presiden Soekarno pada waktu itu satu sisi ditujukan untuk memperkuat persatuan nasional, di lain pihak menjadi bagian strategi Presiden Soekarno untuk menghadapi ancaman Neo-kolonialisme dari kekuatan-kekuatan lama yang baru tumbuh.



Gambar 2.4. Presiden Soekarno berpidato pada Sidang PBB 30 September 1960

Sumber: www.pnri.go.id

Di bawah Presiden Soekarno, Indonesia bercita-cita menjadi pemimpin Front Internasional anti imperialis. Soekarno sebagai cerminan tokoh revolusioner mengutuk sistem internasional yang berlaku bagai tatanan eksploitatif, dengan kekuatan-kekuatan tua yang mapan (*The Old Established Forces* atau *Oldefos* yang merupakan negara-negara imperialis dan kolonialis Eropa dan Amerika) berusaha menundukkan kekuatan-kekuatan baru yang sedang tumbuh (*The New Emerging Forces* atau *Nefos*, ada pada negara-negara yang baru merdeka maupun yang sedang berusaha melepaskan diri dari kolonialisme dan imperialisme).

²⁹ Warsito & Kartikasari, *Op.cit.*, halaman 74-126.

Bantuan dari *Oldefos*, dianggap Presiden Soekarno sebagai alat yang justru membatasi kemerdekaan *Nefos*. Oleh karena itu, Presiden Soekarno memilih menyatakan kesanggupan berdiri pada kaki sendiri dan mempersetankan bantuan Amerika.

Pandangan Soekarno mengenai adanya kekuatan-kekuatan baru (*Nefos*) yang berhadapan dengan kekuatan-kekuatan lama (*Oldefos*), tidak hanya dimaksudkan dalam bidang politik maupun militer sebagaimana upaya perebutan kembali wilayah Irian Barat dan konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Hal ini juga diperuntukkan bagi kebijakan Presiden Soekarno dalam bidang lain, termasuk diantaranya bidang olahraga, dimana Soekarno bermaksud menyaingi dan menentang *Olympic Games* yang dinilainya telah mencela pelaksanaan *Asian Games* di Jakarta tahun 1962. Pembangunan ikon-ikon infrastruktur dalam negeri seperti Gelora Senayan (sekarang disebut sebagai Gelora Bung Karno) yang ditujukan untuk menyambut dan menjadi tuan rumah Asian Games dan Monumen Nasional (Monas) sebagai perlambang kebanggaan bangsa, menjadi pembuktian bahwa politik apapun yang dilakukan oleh Indonesia selama kepemimpinan Presiden Soekarno selalu bersifat megah layaknya mercusuar.



Gambar 2.5. Gelora Bung Karno

Sumber: Google Image



Gambar 2.6. Monumen Nasional (Monas)

Sumber: Google Image

Kepemimpinan Presiden Soeharto³⁰

Dominasi oleh kebutuhan mendesak akibat situasi perekonomian dalam negeri pada tahun 1980-an dimana sumber dana bagi pembangunan menipis karena eksploitasi migas serta resesi ekonomi global, politik proteksi perdagangan terhadap ekspor Indonesia dan kondisi moneter Internasional telah mendorong Pemerintah Indonesia Orde Baru mengambil kebijakan diplomasi kebudayaan.



Gambar 2.7. Presiden Soeharto bersama dengan
Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan

Sumber: www.pnri.go.id

³⁰ *Ibid*, halaman 127-170

Masa Orde Baru yang dikenal sebagai masa berlangsungnya pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, yakni selama kurang lebih tigapuluh dua tahun menjabat. Beberapa bentuk diplomasi kebudayaan yang cukup menonjol dalam kurun waktu tersebut adalah Pameran Kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat (KIAS) dan berdirinya Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

KIAS sebagai bentuk diplomasi kebudayaan berawal dari ide yang dicetuskan oleh Mochtar Kusumaatmaja, Menteri Luar Negeri saat itu. Diplomasi kebudayaan disebutkan mempunyai tujuan utama membangun citra Indonesia di luar negeri. Diplomasi kebudayaan dianggap dapat berperan positif dalam pembangunan termasuk dalam politik luar negeri, antara lain dengan (1) pengenalan yang baik seorang diplomat Indonesia terhadap kebudayaan negara dimana ia ditempatkan, karena dapat membantu memudahkan tugas dan mencapai tujuan misinya; (2) pengenalan yang baik di luar negeri terhadap aspek-aspek kebudayaan Indonesia yang beragam juga akan memberi citra yang baik terhadap Indonesia di luar negeri; (3) citra Indonesia yang baik di luar negeri akan membantu pelaksanaan politik luar negeri di Indonesia, (d) pengenalan kebudayaan Indonesia di luar negeri akan dapat pula membantu memajukan usaha-usaha di bidang ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata.

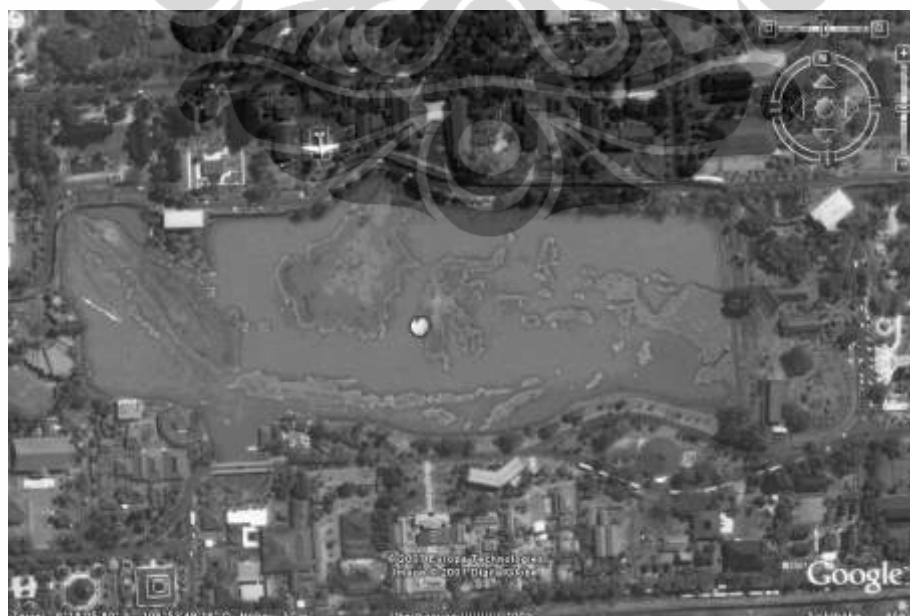
Realisasi ide diplomasi kebudayaan itulah yang menjadi dasar bagi berdirinya Yayasan Nusantara Jaya pada tahun 1984, yang diketuai oleh Mochtar Kusumaatmaja. Yayasan ini pula yang memprakarsai pelaksanaan program pameran KIAS ini.

Yang menarik, respon masyarakat Amerika terhadap pameran KIAS cukup menggembirakan. Masyarakat Amerika dengan pengetahuan geografi dan kebudayaannya yang kurang serta seakan menganggap tidak ada budaya lain selain Amerika, benar-benar terkesan dengan acara-acara dalam pameran KIAS sehingga merasa perlu untuk datang sendiri ke Indonesia. Pameran KIAS telah membuka pintu hati masyarakat Amerika melalui kesenian.

Pemerintah Orde Baru menindaklanjuti kegiatan pameran KIAS ini dengan kunjungan misi perdagangan, untuk sekaligus mempromosikan produk-produk ekspor Indonesia dari sektor non migas, termasuk lahan investasi, dan potensi kepariwisataan di Indonesia. Hasilnya tidak hanya dukungan dari pers Amerika, kongres Amerika pun pada tahun 1992 mengeluarkan Undang-Undang yang mendorong pengusaha kecil menengah disana untuk lebih agresif mengembangkan kegiatannya ke luar negeri.

Dalam hal ini, kesenian telah mampu meningkatkan cita positif masyarakat internasional pada umumnya, dan masyarakat Amerika Serikat pada khususnya, yang pada akhirnya akan menentukan kebijakan elit politik Amerika terhadap Indonesia.

TMII merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Presiden Soeharto untuk menunjukkan citra keagungan kebudayaan Indonesia. Meski awal berdirinya sempat mengundang kontroversi, keberadaan TMII merupakan bentuk diplomasi kebudayaan yang menarik diamati.



Gambar 2.8. Kawasan Taman Mini Indonesia Indah

Sumber: Google Image

TMII adalah objek wisata budaya, tempat konservasi dan preservasi kebudayaan bangsa Indonesia. Dengan anjungan-anjungan daerah yang juga berfungsi sebagai museum hidup, museum pengetahuan dan teknologi serta taman, TMII menyajikan gambaran menyeluruh mengenai Indonesia dalam skala kecil. Adanya TMII telah membuka kesempatan bagi perkembangan semangat berkesenian di daerah-daerah pada masa itu. Suasana kompetisi untuk menampilkan yang terbaik, telah merangsang daya kreativitas dan inovasi para seniman daerah dalam menghasilkan karya-karya seni berkualitas.

Sebagai kawasan wisata, TMII mempunyai peran yang tak sedikit bagi segi kepariwisataan Indonesia. TMII tercatat sebagai kawasan wisata Indonesia yang paling banyak menggelar produk-produk kesenian daerah, dimana disana dapat ditemukan atraksi menarik dari berbagai daerah, yang akhirnya mendorong pengunjung untuk datang ke tempat dimana kesenian tersebut berasal.

Kepemimpinan Presiden B.J Habibie

Masa kepemimpinannya yang pendek dalam transisi reformasi, barangkali menjadi kendala utama bagi Presiden Habibie untuk menjalankan tugasnya. Tak banyak referensi yang ditemui, dan peneliti justru mencatat peristiwa kegagalan diplomasi Indonesia dalam kasus kemerdekaan Timor Timur pada tahun 1999.

Namun demikian, secara personal Presiden Habibie dikenal memiliki hubungan diplomasi yang baik dengan negara Jerman, tempat dimana ia menimba ilmu, baik dengan masyarakat Jerman secara umum maupun dengan pemerintah Jerman pada khususnya.



Gambar 2.9. Presiden BJ Habibie pada saat pelantikan Sumpah Pengangkatan

Sumber: www.pnri.go.id

Kepemimpinan Presiden Abdurrachman Wahid



Gambar 2.10. Presiden Abdurrachman Wahid

Sumber: www.pnri.go.id

Perubahan sistem politik Indonesia pasca lengsernya Soeharto dan konsekuensi logis dari globalisasi, telah membawa sejumlah implikasi pada era Pemerintahan Indonesia berikutnya. Bertambahnya aktor internasional seperti organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perusahaan multinasional,

industri media massa, kelompok-kelompok minoritas baru dan pemerintah daerah, tak terelakkan telah turut mewarna perjalanan diplomasi kebudayaan di negeri ini.

Pada saat menjabat sebagai Presiden, Gus Dur mengeluarkan Peraturan Presiden (PP) No. 6 Tahun 2000, yang isinya mencabut Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 Tahun 1967, sebuah kebijakan diskriminatif yang dibuat pada masa kepemimpinan Soeharto terdahulu.³¹

Presiden Abdurrachman Wahid, yang biasa dipanggil Gus Dur, dengan kiprah dan kebijakannya yang cukup fenomenal kala itu, telah memberi ruang hidup bagi etnis Tionghoa dan penganut keyakinan Konghucu di tanah air. Melalui sepak terjangnya dan pandangan humanisme universalisnya, Gus Dur memberi banyak inspirasi bagi warga lintas etnis, agama dan golongan. Bahkan oleh klenteng Tay Kek Sie, Gus Dur ditahbiskan menjadi “Bapak Tionghoa Indonesia”. Sejak dikeluarkannya PP tersebut dan diakuinya etnis Tionghoa sebagai bagian dari entitas Indonesia, identitas kebudayaan etnis Tionghoa kian mewarnai keragaman budaya di Indonesia. Sebut saja festival barongsai, kue keranjang, hari raya Imlek, kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kebudayaan nasional Indonesia.

Diplomasi kebudayaan melalui intervensi kebijakan yang dilakukan Presiden Abdurrachman Wahid ini merupakan salah satu contoh bagaimana suatu kebijakan publik dapat membuka keran diplomasi yang begitu berdampak pada suatu masyarakat.

³¹ Jodhi Yudono, “Kiprah Gus Dur Membela Tionghoa”, *Kompas.com*, 11 April 2012

Kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri



Gambar 2.11. Presiden Megawati Soekarnoputri bersama Presiden Pakistan Benazir Bhutto

Sumber: www.pnri.go.id

Dalam masa kepemimpinan Ibu Megawati, tak banyak bentuk diplomasi kebudayaan yang berhasil ditelurkan. Diplomasi yang dilakukan pada kepemimpinan Megawati, tampaknya juga tak mampu membendung invasi Malaysia pada kasus Pulau Sipadan dan Ligitan³². Di masa kepemimpinan Megawati, Indonesia justru seringkali mendapat *travel warning* sebagai destinasi pariwisata, dimana kondisi ini sempat membuat pariwisata Indonesia pasca kasus-kasus pengemboman kian terpuruk.

Kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono

Diplomasi kebudayaan di era kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya disebut SBY), memiliki keunikan tersendiri dalam penyelenggaraannya. Presiden yang pertama kali dipilih secara langsung melalui pemilihan umum oleh rakyat Indonesia setelah reformasi bergulir ini, dalam perjalanannya sesungguhnya tidak terlalu konkret dalam menjabarkan dan mengupayakan diplomasi kebudayaan pada berbagai kebijakannya.

³² “Malaysia Memenangkan Sengketa Sipadan dan Ligitan”, *Liputan6.com*, 18 Des 2002.



Gambar 2.12. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dalam pidato politik di salah satu forum internasional

Sumber: www.pnri.go.id

Namun demikian, gesekan bilateral yang kerap terjadi akibat kembali memanasnya hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia, telah membuat pemerintah bereaksi. Klaim yang dilakukan Malaysia atas sejumlah artefak dan ikon budaya Indonesia, termasuk di dalamnya angklung, telah mengakibatkan perang opini di media massa.

Beragam wacana mengenai “keteledoran” Pemerintah Indonesia dalam memberikan perhatian pada ragam budaya yang diakui Malaysia dalam iklan promosi negaranya di salah satu saluran televisi kabel internasional, lantas membuat Pemerintah Indonesia bereaksi dengan meresponnya dalam bentuk kebijakan.

Yang dilakukan Pemerintah adalah menginventarisir ragam budaya yang sempat diklaim Malaysia, lalu bersama kelompok masyarakat pemerhati dan praktisi kebudayaan terkait, lalu mendaftarkannya ke organisasi internasional UNESCO, untuk dapat masuk dalam daftar warisan kebudayaan tak benda yang diakui dunia.

Beberapa bentuk ekspresi budaya Indonesia yang berhasil mendapatkan pengakuan dalam daftar warisan budaya manusia tak benda dari UNESCO ini adalah wayang pada tahun 2003, keris di tahun 2005, batik pada tahun 2009, dan angklung pada tahun 2010.



Gambar 2.13. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menerima tamu negara bersama Juru Bicara Presiden yang kini menjadi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Dr. Dino Pati Djalal

Sumber: www.pnri.go.id

Lebih lanjut dikatakan Warsito, semakin negatif hubungan antara dua atau lebih negara-bangsa, maka semakin banyak pula bentuk diplomasi kebudayaan yang harus dipergunakan.

Upaya diplomasi kebudayaan, sebagaimana diuraikan di atas telah menjelaskan pentingnya aspek pembentukan opini publik untuk sebuah tujuan kepentingan nasional. Karena memang seperti diulas pada bab sebelumnya, proses globalisasi yang disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, juga telah mengakibatkan konsep mengenai nilai-nilai menjadi sangat kompetitif.

Misalnya saja pada konsep demokrasi. Bagi Amerika Serikat, konsep demokrasi erat kaitannya dengan kebebasan individu, dimana porsi kebebasan menjadi hal yang melebihi kepentingan lainnya dalam memahami nilai demokrasi di sana. Lain halnya dengan konsep demokrasi di Indonesia, yakni demokrasi Pancasila, yang menganggap bahwa porsi individu tidak lebih dari merupakan peran sosial warga negara yang bersangkutan. Begitupun konsep nilai lainnya, seperti nasionalisme, agama, lingkungan, perdamaian dan sebagainya.

Berikut ini peneliti menyampaikan pandangan dari beberapa pakar terkait pembentukan opini publik dalam perspektif disiplin ilmu komunikasi, sebagai bahan telaah atas fenomena kebijakan komunikasi pelestarian angklung di Indonesia.

2.1.4. *Public Relations* Politik

Membangun kepercayaan adalah isu penting yang menjadi salah satu alasan manusia berkomunikasi. Al Golin, praktisi *public relations* senior mengamati bahwa kepercayaan adalah elemen penting dalam hubungan yang dijalankan organisasi dalam jangka panjang.³³

Public relations (PR) sesungguhnya merupakan aktivitas yang dibutuhkan oleh seluruh organisasi, baik komersial maupun non komersial. PR pada hakikatnya merupakan aktivitas komunikasi yang ditujukan untuk membangun *good will* (niat baik) dan pemahaman (*understanding*) dari pihak-pihak yang menjalin hubungan.³⁴

Frank Jefkins (200:9-11) dalam bukunya yang berjudul *Public Relations*, menguraikan beberapa definisi PR, diantaranya PR menurut (*British*) *Institute of Public Relations*. Dikatakan bahwa PR merupakan keseluruhan upaya terencana dan berkesinambungan yang dilakukan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik (*good will*) dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya.³⁵

J.C Seidel, praktisi senior PR dari New York, mendefinisikan PR sebagai proses yang berkelanjutan dari usaha-usaha manajemen untuk memperoleh niat baik (*good will*) dan pengertian dari para pelanggan, pegawai, serta publik secara

³³ Laurie J. Wilson & Joseph D. Ogden, *Strategic Communications Planning for Effective Public Relations & Marketing*, 5th ed., Iowa: Kendall/ Hunt, 2008, halaman 2.

³⁴ Gun Gun Heryanto & Irwa Zarkasy, *Public Relations Politik*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, halaman 2.

³⁵ *Ibid.*

umum, yang ditempuh dalam dua arah. Ke dalam, melalui analisis dan perbaikan terhadap diri sendiri, dan ke luar, dengan memberikan pernyataan-pernyataan.³⁶

Sedangkan Scott M Cutlip dkk (2005:4) mendeskripsikan PR sebagai fungsi manajemen khusus yang membantu pembentukan dan pemeliharaan garis komunikasi dua arah, saling pengertian, saling menerima dan bekerja sama antara satu organisasi atau perusahaan dengan masyarakat, yang melibatkan manajemen masalah, membantu manajemen untuk selalu mendapat informasi dan merespons pendapat umum, mendefinisikan dan menekankan tanggungjawab manajemen dalam melayani kepentingan masyarakat, membantu manajemen untuk mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, berfungsi sebagai peringatan awal untuk mengantisipasi kecenderungan dengan menggunakan riset, serta menggunakan komunikasi yang masuk akal dan etis sebagai sarana utamanya.³⁷

Aristoteles pernah menyimpulkan bahwa '*man is by nature a political animal*'. Yang dimaksud disini adalah bahwa manusia sejatinya tidak akan pernah lepas dari aktivitas berpolitik. Politik, yang berasal dari kata Latin *politicus* atau Yunani *politicos*, sesungguhnya bermakna '*relating to a citizen*', sebagaimana asal kedua kata tersebut, polis yang bermakna '*city*'(kota). Dalam konteks ini, politik terkait dengan proses pengambilan keputusan mengenai apa yang menjadi tujuan sistem politik (negara), sekaligus cara melaksanakan tujuan-tujuan sistem tersebut.

Untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang ada, Budiardjo (2005:8) menggarisbawahi bahwa perlunya ada kebijakan-kebijakan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (alokasi dan distribusi) dari sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, diperlukanlah kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*), yang dipakai untuk membina kerjasama maupun menyelesaikan konflik, dimana cara yang dipergunakan adalah dengan memakai cara yang sifatnya persuasi maupun koersif.

³⁶ *Ibid*, halaman 3

³⁷ *Op.cit.*

Public Relations (PR) Politik sendiri sesungguhnya merupakan ilmu terapan baru dalam bidang kajian ilmu komunikasi. Pada dasarnya, PR Politik merupakan aktivitas persuasi yang dilakukan suatu institusi terhadap publik internal dan eksternalnya. PR Politik memiliki karakteristik yang khas dalam membangun hubungan dengan publik internal dan publik eksternal. Adapun karakteristiknya adalah sebagai berikut:

- Komunikasi bertujuan, maksudnya adalah PR politik biasanya diarahkan untuk mencapai tujuan khusus dalam kepentingan politik organisasi;
- Intensionalitas, dimana PR Politik secara sengaja dan sadar menjalankan proses komunikasi untuk mempengaruhi lingkungan politik;
- Adanya mekanisme yang sistematis, dimana PR politik dilakukan dengan rencana yang terarah, sistematis, dan berkesinambungan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Menurut pandangan Romy Frochlich, PR politik adalah sebuah kerja melayani publik dengan membawa sejumlah isu untuk menjadi perhatian publik. PR Politik menurut Moloney dan Colmer, adalah alat strategis bagi partai politik untuk menggunakan kebijakan (*policy*), kepribadian (*personality*), dan presentasi (*presentation*) guna memperoleh perhatian pemilih. Sementara Frochilch dan Rudiger, mengatakan bahwa PR Politik adalah penggunaan saluran-saluran media untuk mengomunikasikan interpretasi isu-isu politik yang khusus dalam upaya pengumpulan dukungan publik.³⁸ Tujuan utama aktivitas PR Politik adalah untuk mendapatkan dukungan politik dari publik internal maupun eksternal, dalam mencapai tujuan khusus suatu organisasi atau institusi politik.

Mengacu pada topik penelitian ini, maka kita dapat mengamati bahwa kebijakan komunikasi juga mengandung unsur PR Politik, dan ini harus disadari sebagai sebuah tanggungjawab dan bentuk pelayanan publik birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

³⁸ *Ibid*, halaman 7.

PR Politik menjadi esensial karena dapat membangun kohesivitas kelompok dengan lingkungan internal maupun eksternal secara lebih alamiah, karena dilakukan dengan terencana, teratur, dan berkesinambungan. PR Politik juga dapat menjadi penghubung antara pemerintah dengan rakyat dalam rangka mobilisasi sosial, implementasi hubungan, kepatuhan dan integrasi. Selain itu, PR politik juga dapat menjalankan fungsi sosialisasi kepada warga masyarakat, sebagai bentuk transmisi nilai-nilai politik dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan terakhir, PR Politik juga bermanfaat dalam mengoordinasikan tata nilai politik yang diinginkan oleh lembaga, hingga memungkinkan munculnya homogenitas antara organisasi dan publik, baik internal maupun eksternal.³⁹

PR Politik juga berperan dalam menangani krisis pada suatu organisasi. Krisis yang terjadi dapat menjadi tantangan tersendiri bagi pihak PR, apalagi jika krisis tersebut berpengaruh pada citra organisasi. Dalam konteks klaim kebudayaan terkait fenomena diakuinya angklung sebagai warisan kebudayaan dunia tak benda yang berasal dari Indonesia, peneliti menilai kondisi ini seharusnya bisa menjadi amunisi bagi komunikasi internasional Indonesia. Pengakuan angklung oleh UNESCO ini mestinya bisa menjadi sumber data yang mempengaruhi pembentukan opini publik tentang kekayaan kebudayaan Indonesia.

2.1.5. Aspek Perlindungan Hukum Angklung

Hingga tulisan ini dibuat, masih banyak mispersepsi yang timbul akibat kurangnya pemahaman atas konsep kekayaan intelektual yang ada pada angklung. Selama ini, persepsi publik atas diakuinya angklung ke dalam daftar warisan kebudayaan tak benda oleh UNESCO rancu dengan pendaftaran hak paten. Padahal, kedua hal itu sama sekali tidak terkait satu sama lain.

Dimasukkannya angklung sebagai salah satu jenis kebudayaan yang masuk dalam daftar representatif Warisan Budaya Manusia Tak Benda (*representative list of the*

³⁹ *Ibid*, halaman 21.

Intangible Cultural Heritage of Humanity) yang diakui oleh UNESCO pada tahun 2010 lalu, sesungguhnya sama sekali tidak terkait dengan proses pendaftaran paten metode pembuatan angklung itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti melihat perlunya menjabarkan pengertian daftar representatif Warisan Budaya Manusia Tak Benda (*representative list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*) yang diakui oleh UNESCO, serta menyisipkan sebuah gambaran umum pemahaman tentang dimensi perlindungan hukum angklung dalam perspektif hukum.

Yang dimaksud dengan Warisan Kebudayaan Tak Benda, mengacu pada terminologi Konvensi UNESCO 17 Oktober 2003 di artikel ke-2 ayat pertama, ialah:

“Berbagai praktik, penampilan, ekspresi, kebudayaan, keahlian, termasuk beragam instrumen, obyek, artefak dan ruang kebudayaan yang terkait didalamnya, yang oleh komunitas, kelompok masyarakat maupun dalam beberapa kasus pada individu, dikenal sebagai bagian dari warisan kebudayaan mereka. Warisan kebudayaan tak benda ini diajarkan dari generasi ke generasi dan secara konstan dikreasikan kembali oleh komunitas dan kelompok yang bertanggungjawab dalam lingkungan mereka, menginteraksikan mereka dengan alam dan sejarah, dan memberikan mereka identitas maupun keberlangsungan, untuk mempromosikan penghargaan atas keanekaragaman kebudayaan dan kreativitas manusia.”⁴⁰

Selanjutnya dijabarkan di ayat kedua, bahwa yang termasuk dalam warisan kebudayaan tak benda adalah semua aspek yang didefinisikan pada pasal 2 ayat 1, yang dimanifestasikan dalam area berikut:

- tradisi tutur dan ekspresi, termasuk bahasa sebagai medium warisan kebudayaan tak benda;
- penampilan seni;
- praktik sosial, ritual dan perayaan festival;
- pengetahuan dan berbagai praktik terkait alam; dan

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 3.

- kerajinan tradisional.

Sedangkan pada ayat ke-3, ditambahkan bahwa yang dimaksudkan dengan pelestarian adalah, “segala pengukuran yang bertujuan untuk memastikan kegunaan warisan kebudayaan tak benda, termasuk pengidentifikasian, upaya dokumentasi, penelitian, pencegahan, perlindungan, promosi, peningkatan, regenerasi, terutama melalui pendidikan formal maupun non formal, sebagaimana proses revitalisasi keanekaragaman warisan budaya lainnya.”

Masih dalam penjelasan hasil Konvensi Paris 17 Oktober 2003, pada Bab IV di artikel 16 tentang pelestarian warisan kebudayaan tak benda dalam skala internasional. Diuraikan bahwa Komite, berdasarkan permintaan negara yang memiliki kepedulian pada kebudayaan tertentu, dapat menetapkan, memperbarui dan mempublikasikan “*Representative List of The Intangible Cultural Heritage of Humanity*” (Daftar Representatif Warisan Kebudayaan Tak Benda Manusia).

Dari uraian ini, jelaslah bahwa pengakuan UNESCO, semata-mata ditujukan untuk pendaftaran warisan kebudayaan akibat isu global yang dikhawatirkan dapat memupuskan keberadaan suatu situs budaya maupun nilai kebudayaan tradisional tertentu. Pengakuan ini bukanlah merupakan area Hak Kekayaan Intelektual, yang masuk dalam penjabaran Hukum Bisnis.

Dalam sistem Hukum Internasional, dikenal adanya sistem Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, yang merupakan hasil kesepakatan dunia dalam konvensi internasional, yaitu *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibagi dalam dua kelompok substansi, yakni Hak Cipta dan Hak atas Kekayaan Industri. Hak Cipta adalah bidang penting HKI yang mengatur perlindungan beragam karya cipta seperti antara lain karya tulis,

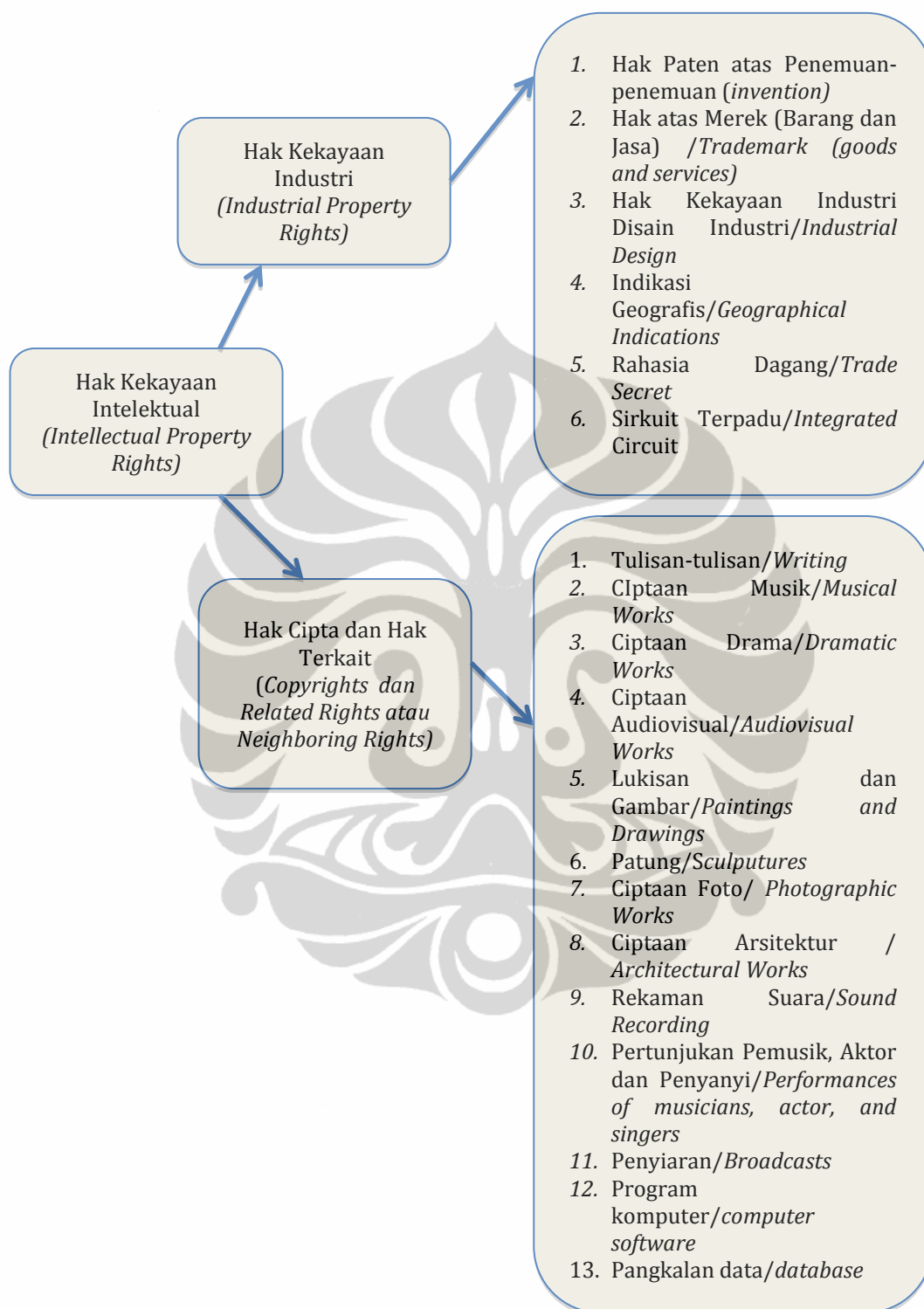
termasuk ilmu pengetahuan, karya seni, drama, tari, lagu, film maupun sinematografi.⁴¹

Lingkup HKI lainnya yakni Hak atas Kekayaan Industri adalah jenis HKI yang konteksnya berbeda dengan Hak Cipta. Instrumen hukum dalam Hak atas Kekayaan Industri yang dikenal dalam sistem hukum di Indonesia cukup beragam, meliputi diantaranya Hak Paten, Merek, Desain Industri, dan Rahasia Dagang.

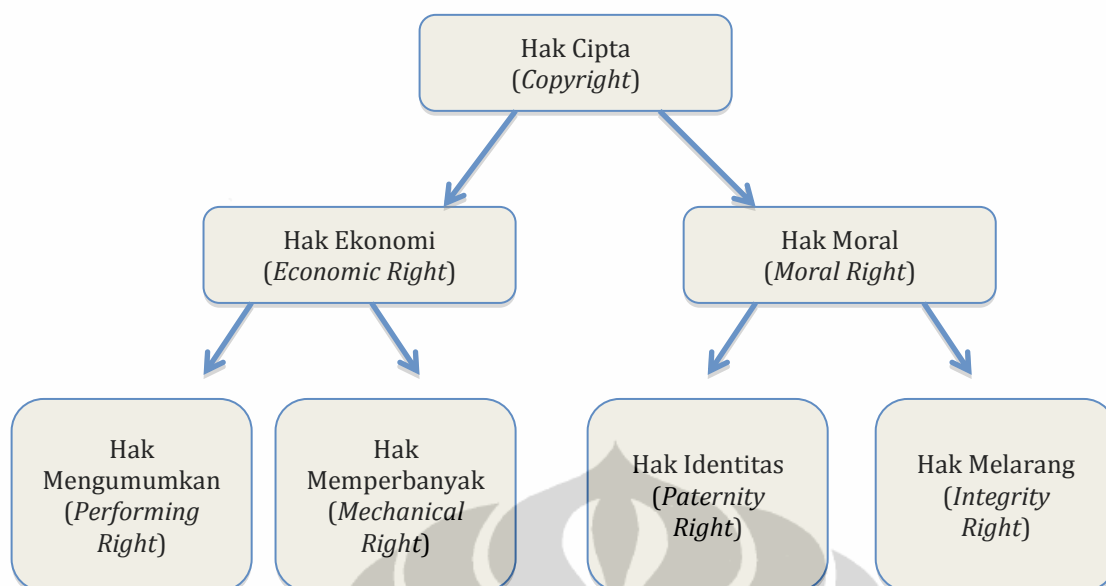
Lingkup Hak Cipta mencakup di dalamnya Hak Terkait atau *Related Right*, yang lazim juga disebut *Neighboring Right*. Hak cipta merupakan hak milik perorangan, namun mengakui pembatasan-pembatasan tertentu menurut norma-norma internasional sebagai norma fungsi sosial, yang memberi akses dan mengizinkan masyarakat menggunakan atau memanfaatkan ciptaan secara wajar.

Untuk mendapatkan gambaran lebih menyeluruh marilah kita amati skema penggolongan hukum Hak Kekayaan Intelektual pada Gambar 2.14. dan Gambar 2.15 pada halaman berikut.

⁴¹ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Yogyakarta: Rajawali Press, 2011, halaman 11.



Gambar 2.14. Penggolongan Hukum Hak Kekayaan Intelektual
Sumber: Suyud Margono (2010: 23)



Gambar 2.15. Hak Eksklusif dalam Hak Cipta

Sumber: Suyud Margono (2010: 23) dan Henry Soelistyo (2011:13-15)
telah diolah kembali

Hak Cipta merupakan HKI yang bersifat eksklusif, dimana perlindungan hukum ini memberikan kewenangan pada pemilik hak untuk penggunaan karya selama kurun waktu tertentu. Eksklusivitas pada Hak Cipta itu sendiri mencakup dua dimensi, yakni Hak Moral (*Moral Rights*) dan Hak Ekonomi (*Economic Rights*).

Dari segi muatan, Hak Cipta mengandung esensi monopoli atas Hak Ekonomi dan Hak Moral yang terkandung dalam ciptaan. Hak ekonomi memberikan pencipta kewenangan untuk mengumumkan (*Performing Right*) dan memperbanyak (*Mechanical Right*) ciptaannya, dimana sifat dari aspek hak ekonomi ini dapat dialihkan atau dipindahkan (contohnya ke ahli waris). Sementara Hak Cipta juga memberikan pencipta hak moral, yang sifatnya tidak dapat dialihkan, untuk menjaga dan mengeksploitasi ciptaannya.

Pada dimensi moral Hak Cipta, terdapat *Right of Paternity* yang memberikan kewenangan pada pencipta atas identitas karyanya, meminta namanya dicantumkan maupun tidak dicantumkan dalam ciptaan. Selain itu terdapat pula *Right of Integrity* yang memberikan hak pada pencipta untuk melarang orang lain

mengubah, mengurangi, menambah, maupun memperlakukan ciptaannya secara tidak pantas.

Penciptaan karya-karya intelektual sebagai kekayaan intelektual memang tidak hanya hadir sebagai karya fisik, tetapi juga memiliki arti sebagai sarana pemenuhan kebutuhan batiniah, karena terkait dengan kemampuan dan kecerdasan manusia untuk menciptakan sesuatu melalui penggunaan sumber daya yang berbeda.

Suatu karya intelektual dilahirkan oleh seseorang berdasarkan kemampuan intelektualnya dengan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan biaya. Segala pengorbanan yang diberikan tiada lain merupakan suatu investasi atas kemampuan intelektualnya, yang seharusnya diakui, dihormati, dan diberi perlindungan hukum.

Proses penciptaan hasil karya intelektual manusia, sebagaimana diungkapkan Afrillyana Purba (2012: 3-4) sebenarnya bukan hanya terjadi di masa sekarang. Proses penciptaan sesungguhnya telah berlangsung turun-temurun di lingkungan masyarakat tradisional Indonesia. Ciptaan-ciptaan masyarakat tradisional tersebut banyak yang dihasilkan secara berkelompok pada suatu komunitas masyarakat tertentu, dimana umumnya akan terkait langsung dengan lingkungan atau alam.

Seringkali proses penciptaan berlangsung secara kebetulan, karena pada umumnya apa yang dihasilkan oleh masyarakat tradisional merupakan bagian dari aktivitas keseharian mereka. Apakah itu kesenian, alat dan proses untuk membuat kerajinan tradisional, alat dan proses membuat jamu, pengembangan tanaman obat tradisional, metode pengelolaan tanah dan lain sebagainya.

Pengetahuan tersebut merupakan suatu pengetahuan yang digunakan dan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, serta akan masih terus dikembangkan. Karena itu, hal ini perlu mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan suatu sistem hukum hak kekayaan

intelektual baru, yang kini dikenal dengan nama pengetahuan tradisional (*traditional knowledge/TK*) dan ekspresi budaya tradisional (atau disebut *folklore/F*) (4).

Tak seperti sifat kepemilikan HKI yang umumnya bersifat privat, kepemilikan pengetahuan tradisional masyarakat Indonesia bersifat komunal. Hal ini berbeda dengan sifat HKI yang pada umumnya bersifat individualistik dan merupakan menjadi hak yang eksklusif ketika sudah mendapatkan perlindungan hukum.

Pengaturan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya ini merupakan masalah hukum baru yang sedang berkembang baik di Indonesia maupun internasional. Ini disebabkan karena belum ada instrumen hukum nasional maupun internasional yang memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap jenis kekayaan intelektual yang relatif baru dalam penggolongan HKI.

Menelaah apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia, peneliti menilai perlu adanya kerangka kebijakan dalam bentuk perlindungan hukum guna melindungi HKI dalam bentuk pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya ini. Hal ini penting mengingat banyak sekali kekayaan budaya bangsa ini yang perlu dilindungi agar kepentingan nasional Indonesia dapat diproteksi dalam menghadapi persaingan global yang multidimensi ini.

2.2. Kerangka Analisis

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan komunikasi yang dihasilkan Pemerintah dalam merealisasikan komitmen Pemerintah atas pelestarian angklung.

Diungkapkan Yin (2002:136-137), proposisi teoritis membantu memfokuskan perhatian pada data tertentu dan mengabaikan data-data lainnya. Proposisi-proposisi tersebut membentuk rencana pengumpulan data dan karenanya

membentuk prioritas pada strategi analisis yang relevan. Strategi proposisi teoritis ini diharapkan mampu menuntun peneliti dalam memfokuskan perhatian pada data tertentu dan mengabaikan data lain yang tidak dibutuhkan.

Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan proposi setelah menyandingkan permasalahan yang ditemui dengan tinjauan kepustakaan yang ada. Pertanyaan penelitian sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu terdiri dari tiga hal. Yang pertama adalah mencermati bagaimana kebijakan komunikasi yang dijalankan Pemerintah, pasca diakuinya angklung ke dalam daftar warisan budaya manusia tak benda oleh UNESCO. Kedua adalah mendalami sektor mana dalam pelestarian angklung yang sudah diintervensi dengan kebijakan komunikasi. Dan yang terakhir ialah mengevaluasi kesesuaian kebijakan komunikasi terkait angklung yang telah ada pasca pengakuan angklung dari UNESCO, jika mengacu pada komitmen Pemerintah hasil konvensi UNESCO yang telah disepakati.

Dari ketiga pertanyaan penelitian tersebut, peneliti lantas memformulasi proposi penelitian dalam jabaran pemikiran berikut ini:

1. Kebijakan komunikasi yang dijalankan Pemerintah harus merujuk pada dokumen komitmen pelestarian angklung yang ditandatangani pada sidang UNESCO di Kenya tahun 2010.
2. Pendalaman terhadap sektor pelestarian angklung yang sudah diintervensi dengan kebijakan komunikasi Pemerintah dapat diamati dari regulasi terkait angklung yang dikeluarkan oleh Pemerintah pasca pengakuan angklung sebagai warisan budaya tak benda.
3. Terdapat kesesuaian dan relevansi antara kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah pasca pengakuan angklung dengan komitmen yang tertera pada dokumen pengakuan angklung UNESCO.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Paradigma Penelitian

Creswell (2008) memberi definisi pada penelitian sebagai berikut, “ *Research is a process of steps used to collect and analyze information to increase our understanding of a topic or an issue which is consist of three steps: pose a question, collect data to answer the question and present an answer to the question.*”

Dalam konteks penelitian, Guba (2000) mendefinisikan paradigma sebagai perangkat landasan kepercayaan atau keyakinan yang memandu tindakan, baik mengenai kehidupan sehari-hari yang beraneka ragam, maupun tindakan-tindakan yang diambil sehubungan dengan suatu disiplin penelitian. Disini penulis mengartikan paradigma sebagai kumpulan longgar tentang asumsi yang secara logis dianut bersama konsep atau preposisi yang mengarahkan cara berpikir dan cara penelitian.

Dikenal dua paradigma yang sering digunakan, yakni kuantitatif dan kualitatif. Peneliti memilih menggunakan paradigma kualitatif untuk memahami fenomena yang ada. Sebagaimana dikatakan Creswell (2009:4), “Riset kualitatif mengandung pengertian adanya upaya penggalian dan pemahaman terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok, yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan.”⁴² Seiring dengan perkembangan penelitian dengan pendekatan kualitatif, Denzin dan Lincoln (1994) memberikan beberapa batasan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menyituasikan aktifitas pengamatan di lokasi tempat berbagai fakta, data, bukti, atau hal-hal yang terjadi dan terkait baik langsung maupun tidak langsung terhadap apa yang diteliti. Penelitian kualitatif pada prinsipnya merupakan kajian berbagai studi dan kumpulan berbagai jens

⁴² Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010, halaman 1.

materi empiris, yang disajikan dalam rincian persoalan di berbagai momen dengan berbagai pemaknaan dalam berbagai kehidupan individual. Dibandingkan dengan metode penelitian kuantitatif yang lebih percaya pada kesahihan eksternal, keandalan instrumen pengukuran dan objektivitas yang dapat menyebabkan meski desain penelitian bagus tapi sempit cakupannya, penelitian kualitatif lebih menekankan pada kriteria relevansi.

Terkait dengan penelitian yang ada, penulis memilih untuk mengambil pendekatan kualitatif, karena secara epistemik, ilmu sosial membutuhkan upaya untuk menjelaskan pengetahuan apa yang hendak diterangkannya, dan pemahaman yang bagaimana yang hendak ditegaskannya. Ada sejumlah ciri pendekatan kualitatif menurut Gorman & Clayton. Penulis kualitatif, melaporkan *meaning of events* dari apa yang diamati penulis. Penulis terlibat secara partisipatif dalam observasinya. Karena ia hadir dan mengamati langsung kejadian yang ada, maka sifat kejadiannya juga bersifat spesifik, memiliki nilai special dan kekhususan tertentu.

Selama meneliti, ia tidak bisa meramalkan fenomena suatu kejadian sebagaimana dilakukan pendekatan kuantitatif dengan hipotesisnya. “Tujuan akhir tulisan kualitatif ialah memahami apa yang dipelajari dari perspektif kejadian itu sendiri, dari sudut pandang kejadiannya itu sendiri,” demikian kata Gorman dan Clayton.

Menggunakan pendekatan paradigma kualitatif, membuat penulis menyampaikan kerangka tulisan secara naratif untuk menyampaikan data, kutipan, berbagai teks yang ada. Pemaknaan dieksplorasi dan diinterpretasi pada konteks yang lebih luas. Sebuah teori dibangun secara induktif, Dimana penulis tidak menghipotesis apapun pada ujung amatannya.

3.2. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat evaluatif, dengan memilih model studi kasus untuk memahami

fenomena yang ada. Studi kasus, dipahami sebagai suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas, dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan (Yin, 2002:18).

Keunikan studi kasus, sebagaimana dinyatakan Bungin (2005) adalah pada hal-hal berikut. Pertama, studi kasus dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antar variable serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman lebih luas.

Kedua, studi kasus memberi kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep dasar perilaku manusia. Melalui penyelidikan intensif, peneliti dapat menemukan karakteristik dan hubungan-hubungan yang tak mungkin diduga sebelumnya.

Ketiga, melalui studi kasus dapat disajikan data-data dan temuan-temuan yang sangat berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan bagi perencanaan penelitian yang lebih besar dan mendalam, dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu sosial.

Lebih lanjut, Black & Champion (1992) mengemukakan kelebihan lain dari model studi kasus. Studi kasus bersifat luwes dalam hal metode pengumpulan data yang digunakan. Dapat menggunakan wawancara, observasi, materi audiovisual, focus group discussion, dan dokumentasi. Konteks dari kasus yang diangkat meliputi situasi dan *setting*-nya (dapat berupa *setting* fisik, sosial, budaya, atau ekonomi).

Studi kasus juga dapat menjangkau dimensi yang lebih spesifik dari topik yang diselidiki. Lebih lanjut, studi kasus mampu mengungkap hal yang spesifik dan unik dari kseseluruhan sistem yang diteliti karena keunikan hal yang spesifik itu.

Studi kasus dapat dilakukan secara praktis pada banyak lingkungan sosial. Dengan menggunakan studi kasus, faktor lingkungan sosial apapun tidak akan menjadi penghalang bagi peneliti. Studi kasus dapat digunakan untuk menguji teori. Adapaun jenis studi kasus yang dipergunakan untuk menguji teori adalah instrumental studi kasus. Studi kasus juga dapat dilakukan dengan dana yang minim jika dilakukan dengan metode pengumpulan data yang sederhana. Untuk lebih jelasnya dapat diamati pada Tabel 3.1.

Selanjutnya, studi kasus dapat dilakukan beberapa tahapan, dimana yang utama adalah mempersiapkan kerangka penelitian. Dikatakan Yin (1994: 19), kerangka penelitian merupakan sebuah perencanaan aksi untuk mendapatkan gambaran dari mana seseorang hendak meneliti, dimana didalamnya terdapat sekumpulan pertanyaan yang akan dicari jawabannya, dan pada kerangka tersebut pula dibuat serangkaian kesimpulan yang menjadi jawaban atas pertanyaan itu. Kerangka penelitian ini akan memandu peneliti dalam segala proses mulai dari pengumpulan, analisa, dan interpretasi pengamatan yang dilakukan. Kerangka ini juga akan menjadi model pertanggungjawaban logika yang memungkinkan peneliti menggambarkan inferensi terkait kasus dan variabel yang ada dalam penelitian tersebut.

Untuk mendalami studi kasus, Yin melanjutkan bahwa setidaknya terdapat lima komponen yang amat penting, yakni: (1) pertanyaan penelitian, (2) proposisi, (3) unit analisis, (4) tahapan logika dari proposisi data, dan (5) kriteria atas analisa temuan data yang ada.

Dimensi	Biografi	Fenomenologi	<i>Grounded Theory</i>	Etnografi	Studi Kasus
Fokus	Melakukan eksplorasi terhadap kehidupan individu yang dianggap unik dan khas	Memahami inti dari pengalaman individu yang berkaitan dengan suatu fenomena tertentu	Menemukan suatu teori berdasarkan data yang diperoleh langsung di lapangan	Memberikan gambaran dan melakukan interpretasi dari suatu budaya dan kelompok sosial	Mengembangkan analisis yang mendalam dari suatu kasus tunggal atau kasus jamak
Asal disiplin keilmuan	<ul style="list-style-type: none"> • Antropologi • Sejarah • Psikologi • Sosiologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Filsafat • Sosiologi • Psikologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosiologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Antropologi • Budaya • Sosiologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ilmu Politik • Sosiologi • Psikologi • Antropologi
Metode Pengumpulan Data	Wawancara primer dan studi dokumentasi	Wawancara mendalam dengan banyak subjek (lebih dari 10 subjek)	Wawancara mendalam dengan banyak subjek (lebih dari 20-30 subjek) untuk menetapkan kategori dan teori secara lebih detail	Observasi dan wawancara primer di lapangan dengan rentang waktu yang relatif lama	Dapat dengan banyak metode, seperti wawancara, observasi, dokumentasi, studi arsip, pemeriksaan fisik, dll
Metode Analisis Data	<ul style="list-style-type: none"> • Model bercerita • Analisis sejarah 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis pernyataan • Analisis arti • Deskripsi umum suatu pengalaman 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Open coding</i> • <i>Axial coding</i> • <i>Selective coding</i> • <i>Conditional matrix</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Deskripsi • Analisis • Interpretasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis deskripsi • Analisis tema • Asersi
Bentuk Narasi	Gambaran detail dan spesifik dari kehidupan individu	Deskripsi inti/dasar dari suatu pengalaman	Teori atau model teoritis	Deskripsi perilaku berbudaya dari suatu kelompok atau individu	Studi mendalam dari kasus tunggal atau jamak

Tabel 3.1. Perbandingan Antara Kelima Model Metode Penelitian Kualitatif

(Creswell, 1998)

Sumber: Haris Herdiansyah (2010: 81)

Adapun langkah yang dilakukan peneliti dalam studi kasus ini dibagi dalam lima langkah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi pertanyaan penelitian, untuk membentuk fokus penelitian dan menghindari pengumpulan data yang berlebihan dan tak dibutuhkan. Dimana pertanyaan penelitian atas perumusan permasalahan adalah pada kebijakan komunikasi Pemerintah dalam diplomasi kebudayaan Indonesia pada konteks komunikasi internasional.

Langkah kedua adalah tahapan pemilihan kasus yang ingin diteliti. Pada tahapan ini penulis melakukan pemilihan sampel dari populasi yang ada. Kasus yang diteliti adalah kebijakan komunikasi Pemerintah sebagai upaya pelestarian angklung, sebagaimana komitmen Indonesia yang telah ditetapkan dalam konvensi UNESCO pada tahun 2010. Langkah ketiga membuat instrumentasi penelitian. Pada tahapan ini pula penulis membuat proposisi atas kasus yang diteliti, lalu melakukan perancangan metode pengumpulan data, dimana pengumpulan data yang dipilih diambil melalui studi literatur, dokumentasi, diskusi kelompok terarah (*focus group discussion / FGD*), dan wawancara mendalam. Langkah yang keempat merupakan tahapan pengambilan data di lapangan, sedangkan yang kelima merupakan tahapan analisa data dan kecocokan pola.

Pengumpulan data yang paling utama dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi literatur, diskusi kelompok terarah / *focus group discussion*, studi dokumen, dan wawancara *open-ended* (bersifat terbuka). Mengenai studi dokumen, dikatakan Moleong (2008), ada dua bentuk dokumen yang dapat dijadikan bahan dalam studi dokumentasi. Dokumen pribadi seperti catatan harian, surat pribadi, maupun autobiografi, dapat digunakan oleh peneliti untuk dianalisis. Sedangkan bentuk dokumen lain yang dapat dijadikan bahan analisa adalah dokumen resmi. Dokumen resmi terdiri dari dua kategori, dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal dapat berupa catatan, memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga, sistem yang diberlakukan, hasil notulensi rapat keputusan pimpinan, dan lain sebagainya. Sedangkan dokumen

eksternal dapat berupa bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, seperti majalah, Koran, bulletin, dan lain sebagainya.

Focus group discussion atau diskusi kelompok terarah yang lebih dikenal dengan sebutan FGD, pada dasarnya merupakan wawancara yang dilaksanakan dalam kelompok. Tujuan dilakukannya FGD ini adalah untuk berdialog bersama, bertatap muka dengan sesama responden/subjek/informan guna menghasilkan suatu informasi langsung dari berbagai sudut pandang (Herdiansyah, 2009).

3.3. Unit Analisis

3.3.1. Subjek Penelitian

Yin (1994: 21) menyebutkan bahwa pendefinisian unit analisis kasus yang diteliti adalah sesuatu yang mendasar dalam penelitian dengan model studi kasus. Namun begitu, baik pada kasus individual maupun kasus yang jamak, proposisi tetap dibutuhkan untuk membantu mengidentifikasi informasi yang relevan. Tanpa proposisi, peneliti mungkin akan terjebak dalam pengumpulan data yang tak terstruktur.

Disini peneliti memutuskan untuk menjadikan dokumen sebagai unit analisis utama penelitian ini. Dokumen yang dimaksud mencakup seluruh dokumen Pemerintah terkait ajuan pendaftaran angklung kepada UNESCO untuk pengakuan sebagai warisan budaya tak benda, serta berbagai dokumen kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah terkait kebudayaan khususnya angklung, setelah pengakuan angklung oleh UNESCO tersebut. Peneliti akan mengumpulkan dokumen dalam dua bagian utama, dimana kelompok yang pertama adalah dokumen komitmen Pemerintah atas upaya pelestarian angklung sebagai warisan budaya tak benda dunia asal Indonesia, sedangkan kelompok dokumen yang lainnya adalah kumpulan dokumen yang dibuat dan ditetapkan Pemerintah setelah angklung diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia asal Indonesia. Disini

peneliti meneliti beberapa kebijakan dari pihak-pihak Pemerintah yang terkait dengan komitmen pelestarian angklung sebagaimana disebutkan dalam Sidang UNESCO ke-5 dan tertera dalam dokumen pengakuan angklung, dimana pihak-pihak tersebut adalah:

- Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata unit Direktorat Jenderal Nilai Seni, Budaya dan Film, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (sekarang direktorat ini telah bergabung dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setelah *reshuffle* kabinet);
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk diantaranya Dinas Kehutanan dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Pemerintah Provinsi Banten;
- Pemerintah Kota Bandung.

Selanjutnya, peneliti juga melengkapi studi dokumen yang ada dengan dokumen eksternal terkait pemberitaan media nasional terhadap berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah untuk pelestarian angklung ini. Ditambahkan pula data yang dikumpulkan peneliti melalui *focus group discussion* atau diskusi kelompok terarah, untuk mendapatkan gambaran yang utuh dari para pemangku kepentingan angklung Indonesia ini. FGD ini difokuskan untuk menggali pemikiran dan sudut pandang komunitas masyarakat pencinta angklung yang tidak berada di dalam struktur pemerintahan, diantaranya Saung Angklung Udjo, Masyarakat Musik Angklung, Angklung Web Institute, Komunitas dan para pendidik angklung di lembaga pendidikan yang ada di Provinsi Jawa Barat, diantaranya Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI), dengan memilih beberapa responden kunci dari masing-masing komunitas untuk memperkaya data penelitian ini.

3.3.2. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan dan merupakan responden kunci dalam subjek penelitian ini, diantaranya adalah:

- Ketua Yayasan Saung Angklung Udjo, yang juga merupakan putera Alm. Udjo Ngalagena, Bapak Sam Udjo;
- Direktur Operasional PT Saung Angklung Udjo, yang juga merupakan puteri Alm. Udjo Ngalagena, Ibu Mutiara Desiana;
- Pembina Masyarakat Musik Angklung & Pembina Yayasan Saung Angklung Udjo, Bapak Hadiman;
- Ketua Komunitas Cinta Bambu, Bapak Ir. Purjatnika;
- Dosen dan Ketua Jurusan Karawitan di Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Nanang Supriatna, S. Sen., M.Pd
- Direktur STSI Bandung, Prof. Dr. Endang Caturwatim M.S

Sebagai pengayaan sudut pandang penentu kebijakan, peneliti juga melakukan wawancara singkat dengan Direktur Pembinaan Kesenian dan Perfilman yang sekarang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Sulistyono S. Tirtokusumo. Sedangkan untuk pemahaman aspek hukum HKI dalam mendalami kasus angklung ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan salah satu pakar hukum HKI dari Yogyakarta, Bapak DR. Henry Soelistyo, SH, LL.M.

3.3.3. Lokasi Penelitian

Meskipun penelitian menggunakan berbagai jenis dokumen sebagai unit analisisnya, peneliti tetap harus melakukan beberapa penelitian tambahan di Jakarta maupun di Bandung. Dua kota ini dipilih atas pertimbangan karena kemudahan akses pertemuan dengan para responden kunci untuk FGD maupun wawancara. Sebagaimana diketahui, sebagian dari informan yang merupakan

praktisi angklung umumnya berada di area Bandung. Sedangkan informan yang terkait dengan pihak pengambil keputusan (Pemerintah) berada di Jakarta.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dikatakan Yin (1994: 79), ada bermacam data yang dapat digunakan untuk model penelitian studi kasus. Beberapa di antaranya adalah studi dokumen, studi arsip rekaman audio visual, wawancara, pengamatan langsung, *participant-observation*, dan penelitian artefak fisik. Masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan, sehingga ia merekomendasikan adanya pengumpulan data tidak hanya dari satu jenis sumber saja, melainkan dengan banyak jenis sumber data.

Pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumen, dikatakan Yin (1994:81-83) umumnya memegang peranan penting dalam pengumpulan data untuk penelitian model studi kasus. Karenanya, pencarian sistematis dalam pengumpulan dokumen yang relevan menjadi penting dalam perencanaan pengumpulan data. Meskipun begitu, tak sedikit pihak yang melakukan kritik terhadap studi dokumen karena aspek kebenarannya. Oleh sebab itu, penting bagi peneliti untuk melakukan penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang ada untuk memahami apakah dokumen tersebut dibuat untuk tujuan tertentu yang spesifik dengan khalayak sasaran tertentu atau tidak.

Wawancara juga merupakan salah satu sumber pengumpulan data yang kerap digunakan pada model studi kasus. Sebagaimana dijelaskan Yin (1994:83), wawancara adalah sumber esensial dalam model penelitian studi kasus. Wawancara dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, dimana salah satu bentuk yang jamak digunakan adalah wawancara tipe *open-ended*, yang memungkinkan peneliti bertanya pada responden kunci tentang fakta suatu hal sekaligus mempertanyakan apa opini mereka atas hal tersebut.

Wawancara jenis lainnya, kerap disebut sebagai *focused-interview*, adalah jenis dimana responden diwawancara dalam periode waktu yang singkat. Namun begitu, penanya tetap dimungkinkan untuk menggunakan sistem *open-ended* meski lebih ditekankan pada aspek protokoler, mengacu pada daftar pertanyaan yang telah dibuat.

Teknik pengumpulan data yang diambil penulis untuk penelitian ini ada beberapa, yakni studi dokumen internal dan eksternal, diskusi kelompok terarah/ *focus group discussion* (FGD), serta wawancara dengan tipe *open-ended* dan *focused interview*, untuk memperluas temuan peneliti atas fenomena yang diteliti.

3.5. Teknik Analisis Data

Yin (1994: 103) mengemukakan adanya dua jenis utama teknik analisis data dalam model penelitian studi kasus. Teknik yang pertama adalah bertumpu pada preposisi teoritis yang digunakan dalam penelitian. Disini preposisi akan direfleksikan dengan pertanyaan penelitian, ditelaah dengan tinjauan pustaka yang diperoleh, lalu kemudian dianalisa temuan-temuannya. Sementara teknik kedua adalah mengembangkan deskripsi atas kasus dengan kerangka deskriptif dalam pengelolaan studi kasus yang ada.

Disinilah peran proposisi, sebagaimana diulas sebelumnya. Proposisi kemudian akan menajamkan proses perencanaan pengumpulan data. Proposisi merupakan contoh orientasi teoritis untuk memandu peneliti dalam menganalisa kasus yang diteliti. Dengan proposisi, penelitian akan terbantu dalam hal memfokuskan perhatian hanya pada data-data spesifik yang dibutuhkan, dan dapat mengabaikan data lain hasil pengumpulan data. Selain itu proposisi juga membantu proses pengelolaan keseluruhan penelitian serta berguna untuk mendefinisikan penjelasan alternatif yang akan dianalisa.

Model studi kasus, diterangkan Yin (1994: 106), juga menggunakan teknik analisa data yang spesifik sebagai bagian dari keseluruhan teknik analisa data. Ada dua tahapan teknik analisis data yang digunakan, pertama adalah model analisis dominan, berisi empat teknik utama diantaranya adalah pencocokan pola, pengembangan penjelasan, analisis serial waktu dan model program logika. Sedangkan tahapan teknik analisis data kedua adalah model analisis Lesser, dimana ini merupakan teknik-teknik yang biasa digunakan untuk menghubungkan beberapa mode analisis dominan.

Analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah salah satu bentuk analisis dominan dalam studi kasus, yaitu strategi penggunaan pencocokan pola. Logika seperti ini digunakan dengan cara memperbandingkan suatu pola yang didasarkan atas empirik dengan pola yang diprediksikan. Disini peneliti akan mencocokkan pola proposisi dengan hasil temuan dari unit analisis yang ada. Apakah data dari dokumen yang dikumpulkan cocok dengan proposisi yang dikembangkan peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Penelitian terhadap kebijakan komunikasi Pemerintah dalam kerangka diplomasi kebudayaan melalui angklung, yang telah diakui sebagai salah satu warisan kebudayaan dilakukan secara longitudinal semenjak angklung dikukuhkan oleh UNESCO, yakni November 2010 hingga hingga bulan Juni 2012.

Peneliti mengumpulkan beragam data yang berhubungan dengan keberadaan angklung Indonesia pasca pengakuan UNESCO. Adapun data studi dokumen yang dipergunakan untuk meneliti kebijakan Pemerintah terkait angklung ini terdiri dari dua bentuk dokumen. Dokumen resmi bersifat internal yang diteliti antara lain ialah:

- a. *“Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage: Intergovernmental Committee for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage, Nomination File No. 00393, for Inscription on The Representative List of The Intangible Cultural Heritage in 2010”*, ini merupakan sebuah dokumen lengkap ajuan Indonesia untuk pengakuan angklung, yang juga merupakan dokumen penelitian UNESCO. Dokumen sebanyak 19 halaman ini diajukan oleh Indonesia kepada UNESCO dengan ditandatangani oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Bapak Agung Laksono, pada tanggal 30 Desember 2009.
- b. *“Commitment of The Coordinating Ministry For People’s Welfare Regarding Safeguarding of The Culture of Indonesian Angklung”*, merupakan dokumen komitmen pelestarian angklung yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dan ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Indroyono Soesilo. Dokumen ini ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2009.
- c. *“Commitment of The Ministry of Culture and Tourism Regarding Safeguarding of The Culture of Indonesian Angklung”*, merupakan

- dokumen komitmen pelestarian angklung yang dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, dan ditandatangani oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE. Dokumen ini ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2009.
- d. *“Commitment of The Directorate General for Cultural Values, Arts and Film Ministry of Culture and Tourism Regarding Safeguarding of The Culture of Indonesian Angklung”*, merupakan dokumen komitmen pelestarian angklung yang dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Nilai Kebudayaan, Seni dan Film, Drs. Tjetjep Suparman, M.Si. Dokumen ini ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2009.
 - e. Dokumen komitmen dari Saung Angklung Udjo, ditandatangani pada tanggal 22 Agustus 2009 oleh Taufik Hidayat Udjo selaku Presiden Direktur dan Satria Yanwar Akbar sebagai Direktur Operasional.
 - f. *“Commitment of The Angklung Music Society Regarding Safeguarding of The Culture of Indonesian Angklung”*, merupakan dokumen komitmen pelestarian angklung yang dikeluarkan oleh Masyarakat Musik Angklung, dan ditandatangani oleh Obby A.R. Wiramihardja, pada tanggal 24 Agustus 2009.
 - g. *Declaration of Lovers of the Indonesian Angklung Cultural Heritage (the Bandung Declaration)*, sebagai komitmen dari komunitas pencinta angklung yang terdiri dari pengrajin, pendidik, pemain, dan seluruh pencinta musik angklung. Deklarasi ini ditandatangani oleh 87 orang pada 11 Agustus 2009.
 - h. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.105/UM.001/MKP/2010 tentang Perubahan Pertama atas Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014, yang isinya menetapkan Perubahan Pertama Atas Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014, yang merupakan pedoman dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Peraturan Menteri ini ditandatangani pada tanggal 2 Nopember 2010 oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, S.E.

Untuk dokumen resmi yang bersifat eksternal, peneliti mengamati wawancara audiovisual terkait diplomasi kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan medium angklung, pasca diakuinya angklung sebagai warisan kebudayaan oleh UNESCO. Data yang diteliti dikhususkan pada data mengenai kebijakan pertunjukan angklung yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia, dan diliput oleh media massa serta tersebar luas melalui internet.

Adapun data dokumen resmi eksternal yang turut diteliti disini adalah:

- Pemberitaan media mengenai Festival Musik Bambu Nusantara, gelaran pertunjukan kebudayaan yang secara periodik dan telah 5 kali diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata bekerja sama dengan sektor privat, *Republic of Entertainment*. Liputan Festival Musik Bambu pertama ditemukan peneliti dipublikasikan oleh Suara Karya Online. Festival Bambu Nusantara yang ke-2 ditemukan dipublikasikan oleh Tempo online, sementara yang ke-3 ditemukan dipublikasikan oleh detik.com. Festival Bambu Nusantara ke-4 ditemukan peneliti di Kompas.com, dan Festival Bambu Nusantara ke-5 ditemukan peneliti di Pikiran Rakyat online.
- Hasil liputan wawancara saluran berita televisi *Voice of America*, dengan salah satu anak almarhum Udjo Ngalagena yakni Daeng Udjo, yang menjadi instruktur angklung pada acara “Festival Indonesia 2011”, sebuah pelaksanaan kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat, tepatnya di Washington, hari Sabtu, 9 Juli 2011. Pada saat ini pula, angklung didaftarkan ke dalam Rekor Dunia Permainan Angklung atas pemecahan rekor pertunjukan dan permainan angklung bersama yang melebihi jumlah 5000 peserta;

Untuk data diskusi kelompok terarah (FGD), dilaksanakan dalam beberapa pertemuan, dengan responden yang tak selalu sama dalam setiap kesempatan dikarenakan keterbatasan waktu. Rangkaian FGD tersebut dilakukan pada:

- tanggal 5 Juli 2011 di Saung Angklung Udjo;
- tanggal 6 Januari 2012 di Gedung Pramuka, Bandung;
- tanggal 10 Mei 2012 di Gedung E Ruang Sidang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk menambah pengayaan pemahaman peneliti mengenai dimensi konsep perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari angklung ini, peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan sifat *open-ended* kepada salah satu pakar hukum Hak Kekayaan Intelektual, Dr. Henry Soelistyo, SH. LL.M, pada tanggal 13 Juni 2012.

4.1. Komitmen Pemerintah dalam Pelestarian Angklung

Sebagaimana hasil penelusuran dokumen internal yang berhasil ditemukan peneliti, diakuinya angklung ke dalam daftar warisan budaya manusia tak benda dari UNESCO mengimplikasikan sejumlah hal.

Berdasarkan konvensi UNESCO tentang pelestarian warisan budaya disebutkan bahwa pelestarian warisan diukur melalui elaborasi dari promosi dan perlindungan elemen-elemen warisan budaya. Pengukuran elemen warisan budaya tersebut seharusnya terefleksi dari luasnya lingkup partisipasi dari komunitas, kelompok, atau jika dimungkinkan oleh kepedulian individu. Keduanya dimaksudkan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan pelestarian warisan budaya tersebut.

Adapun bentuk komitmen Pemerintah dalam rangka pelestarian angklung ini ditugaskan kepada sektor-sektor terkait sebagai berikut.

1) Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat

Kementerian ini bertugas untuk:

- a. mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan memotivasi pemangku kepentingan dalam pelestarian angklung Indonesia sebagai warisan budaya tak benda;
- b. menyediakan peluang kepada seluruh anggota komunitas angklung di Indonesia untuk menjalankan aktivitas dalam rangka pelestarian angklung Indonesia;
- c. memberi apresiasi kepada anggota komunitas angklung Indonesia yang secara terus-menerus berupaya melestarikan, mengembangkan, dan mendayagunakan kebudayaan angklung;
- d. mendorong penegakan hukum dalam upaya konservasi dan pelestarian angklung Indonesia;
- e. mendorong pihak-pihak terkait untuk mempromosikan budidaya bambu hitam, yang merupakan bahan dasar pembuatan alat musik angklung;
- f. mendorong pihak-pihak terkait untuk melibatkan pertunjukan musik angklung dalam kurikulum pendidikan sebagai bentuk muatan lokal;
- g. mendorong dan mendukung pertunjukan musik angklung agar diselenggarakan dalam pemerintahan dan komunitas.

2) Direktorat Jenderal Bidang Kebudayaan, Seni, dan Perfilman, yang bertugas untuk:

- a. mendorong berbagai aktivitas untuk melestarikan warisan budaya tak benda seperti misalnya studi, penelitian, peremajaan, penyimpanan, forum kerja, seminar, penampilan dan pameran hasil karya kebudayaan tradisional;
- b. menjalankan sosialisasi, promosi, dan mengupayakan pembangunan kapasitas masyarakat dalam hal meningkatkan aktivitas yang terkait dengan pelestarian warisan budaya tak benda;

- c. untuk mengembangkan pemetaan kebudayaan sebagai salah satu bentuk inventaris warisan budaya tak benda yang dikembangkan dalam teritori Republik Indonesia;
 - d. untuk menganjurkan pihak-pihak terkait, baik pemerintah maupun swasta di seluruh Indonesia agar mengaktifkan dan menggunakan potensi dari kebudayaan tradisional, termasuk diantaranya angklung Indonesia, dalam berbagai kegiatan yang relevan;
 - e. untuk mengoptimalkan upaya peralihan warisan budaya kepada generasi muda melalui rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan Nasional dan pihak terkait lainnya, sehingga materi kebudayaan tradisi seperti angklung Indonesia dapat dimasukkan dalam materi pengajaran muatan lokal pada institusi-institusi pendidikan, baik formal maupun non formal.
- 3) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat memiliki tugas sebagai berikut:
- a. berkolaborasi dengan Saung Angklung Udjo untuk mengadakan penelitian terkait pencarian jenis-jenis bambu hitam terbaik yang dapat dipergunakan untuk pembuatan angklung, termasuk memperbaharui pemetaan area pertumbuhan yang terbaik bagi bambu hitam terbaik untuk pembuatan angklung (seperti misalnya bambu Surade);
 - b. mempromosikan budidaya bambu sebagai area konservasi hutan yang dikhususkan untuk penanaman bambu. Promosi pembudidayaan angklung ini juga digunakan untuk mengurangi erosi hutan;
 - c. berkolaborasi dengan Dinas Kehutanan untuk menemukan lokasi area hutan yang memiliki bambu hitam;
 - d. berkolaborasi dengan Saung Angklung Udjo untuk memberikan semangat kepada penanaman semua jenis pohon, termasuk diantaranya bambu, kepada pengunjung Saung Angklung Udjo, sekaligus penyebaran benihnya.
 - e. menjalankan semua yang dimaksudkan di atas, dalam jangka waktu 5-10 tahun rencana penanaman Dinas Kehutanan.

- 4) Yayasan Kamar Dagang dan Industri Indonesia bertugas untuk mendukung pelestarian kebudayaan angklung dalam masyarakat.
- 5) Pemerintahan Provinsi Jawa Barat memiliki tugas diantaranya:
 - mendukung proses nominasi angklung ke UNESCO;
 - bekerjasama dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan angklung, sebagai bagian dari warisan kebudayaan nasional Indonesia;
 - merekomendasikan hiburan orkestrasi angklung, terutama yang berasal dari sekolah, sebagai hiburan dalam kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Pemerintahan yang terkait dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- 6) Pemerintahan Provinsi Banten bertugas untuk berusaha sebisa mungkin untuk memperluas pelatihan Angklung Buhun di sekolah.
- 7) Pemerintahan Kota Bandung bertugas untuk:
 - a. lebih aktif dalam menyebarluaskan pelatihan dan penampilan musik angklung di kota Bandung;
 - b. menyokong kesenian angklung dan area kebudayaan di Saung Angklung Udjo, Bandung.
- 8) Komunitas Musik Angklung memiliki tugas dalam:
 - a. melanjutkan pelatihan angklung untuk guru-guru musik (prioritas 1);
 - b. mengorganisasikan pelatihan pembuatan angklung (prioritas 2);
 - c. mengorganisasikan secara berkala penampilan musik angklung, dalam rangka mengevaluasi hasil latihan angklung yang diberikan kepada kelompok-kelompok pelatihan (prioritas 3);
 - d. diharapkan dapat merangkul lintas komunitas dalam skala yang lebih besar, untuk mewujudkan cita-cita Daeng Soetigna, yakni angklung dapat digunakan sebagai alat perdamaian dunia (prioritas 4).

- 9) Saung Angklung Udjo, mendapat tugas untuk:
- a. menjalankan secara konsisten dan periodik, pelatihan pembuatan angklung dan instruktur angklung dari berbagai wilayah di Indonesia, guna mencapai regenerasi dalam pembuat dan pelatih angklung (Prioritas 1 untuk dilaksanakan pada tahun 2009). UNESCO menganggarkan dana sebesar USD \$ 59.800 untuk prioritas ini;
 - b. mengadakan penelitian dan dokumentasi yang berhubungan dengan keaslian dan pengembangan berbagai tipe angklung dari Indonesia, baik tradisional maupun modern (Prioritas 2 untuk dilaksanakan pada tahun 2009). UNESCO menganggarkan dana sebesar USD \$ 21.000 untuk prioritas ini;
 - c. mengadakan penelitian dan dokumentasi yang berhubungan dengan kegunaan angklung bagi kehidupan manusia (Prioritas 3 untuk dilaksanakan pada tahun 2009). UNESCO menganggarkan dana sebesar USD \$ 24.000 untuk prioritas ini;
 - d. mencari dokumentasi dari berbagai varietas kesenian dan instrumen angklung, serta meningkatkan kesadaran publik akan warisan kebudayaan angklung, melalui pendirian Museum Angklung (direncanakan dengan luas bangunan 400 m², dengan anggaran USD \$ 117.073). Ini merupakan prioritas ke-4 untuk dilaksanakan tahun 2010 atau 2011;
 - e. menjalankan pengembangan infrastruktur pelatihan angklung sebagai warisan budaya, termasuk di dalamnya balai pelatihan dan studio musik, dalam rangka mengakomodir lebih banyak lagi kegiatan pelatihan dan regenerasi pemain dan pelatih angklung (area yang direncanakan dengan luas bangunan 850 m², dengan anggaran USD \$ 248.780), sebagai prioritas ke-5 untuk tahun 2011-2013;
 - f. menjalankan pengembangan infrastruktur produksi dan pembuatan angklung tradisional, untuk pembuatan instrumen angklung (area yang direncanakan seluas bangunan 450m², dengan anggaran USD \$ 131.700), sebagai prioritas ke-6 untuk tahun 2013.

10) *Angklung Web Institute* mempunyai tugas menyebarluaskan pengetahuan tentang angklung kepada dunia melalui komunitas angklung yang ada.

4.2. Sejarah Angklung

Mencermati fenomena klaim kebudayaan angklung yang dilakukan oleh Malaysia lantas mendorong peneliti untuk juga mencari literatur terkait sejarah pengembangan angklung di Indonesia. Angklung, sebagai salah satu jenis alat musik yang terbuat dari bambu, sesungguhnya telah lama dikenal dalam kebudayaan Indonesia. Beberapa ahli, seperti J. Kunst (1936:814) berpendapat bahwa beberapa alat musik bambu ini berasal dari masa bahkan sebelum adanya pengaruh Hindu. Menurut dugaan mereka, permulaan berkembangnya alat musik dari bambu di Indonesia ini erat hubungannya dengan perpindahan penduduk dari daratan Asia, yang kemudian menjadi nenek moyang suku-suku Melayu Polinesia, beberapa milenium sebelum Masehi.

Tidak diketahui secara pasti sejak kapan angklung muncul dan berkembang. Dr. J. Groneman dalam bukunya "*De Gamelan to Jogjakarta, Letterkundige Vehadelingen der Koninkl*" memperkirakan bahwa angklung sudah menjadi alat musik yang digemari penduduk, sebelum berkembangnya pengaruh Hindu di Indonesia.

Almarhum Daeng Soetigna, penemu angklung modern bertangga nada diatonis kromatik, dalam skripsinya menyebutkan bahwa keberadaan angklung di pulau Jawa pertama kali dikenal pada abad ke-17, melalui tulisan mengenai Sultan Agung dari Banten yang dalam purinya mempunyai perangkat angklung lengkap, biasa dimainkan oleh hamba sahayanya, orang Bali. Semenjak itu, angklung lantas mengalami penyebaran ke daerah selatan Banten, lalu ke arah timur, diantaranya ke daerah Priangan, Garut, dan Tasikmalaya.

Sebagai alat musik yang berbahan baku bambu, angklung memiliki tiga bagian utama, yakni: (1) tabung suara, (2) kerangka, dan (3) dasar. Angklung dibunyikan dengan cara digoyang-goyangkan, sehingga menghasilkan resonansi bunyi pada tabung suara. Pada masa lalu, angklung dipergunakan seperti layaknya lonceng, bersifat khidmat dan digunakan dalam hubungan kegiatan ritual.



Gambar 4. 1. Angklung Buhun dalam Upacara Ritual

Sumber: www.unesco.org

Di beberapa tempat di Bali angklung biasa digunakan hanya untuk upacara Pengaben (pembakaran jasad). Di Kanekes, Banten Selatan, angklung dipergunakan sebagai alat musik upacara pada waktu menjelang menanam padi di lading (angklung tradisional tersebut dikenal dengan sebutan “angklung Buhun”). Sementara di Kampong Jati, Serang, terdapat pula angklung tradisional lainnya, yakni “angklung Gubrag”, yang kerap dianggap sebagai alat musik sakral, untuk mengiringi mantera pengobatan orang sakit atau menolak wabah. Di sekitar Kulon Progo, juga terdapat angklung tradisional yang disebut “angklung Krumpyung”, digunakan pada permulaan musim menggarap sawah pada “upacara Bersih Desa”. Begitupun halnya di Desa Ringin Anca dan Karangpatian, Ponorogo, terdapat upacara sejenis yang biasa diiringi dengan orkes Angklung.

Sebagai alat musik, angklung mengalami inovasi yang sangat pesat ketika Alm. Daeng Soetigna, menemukan angklung jenis baru. Semula, angklung tradisional

umumnya bertangga nada pentatonik (hanya terdiri dari lima nada). Namun, berkat kegigihan Pak Daeng, begitu almarhum akrab dipanggil saat itu, angklung modern ditemukan. Angklung bertangga nada diatonis kromatik (seperti halnya tangga nada pada piano), adalah ciptaan Pak Daeng dalam upaya untuk mencari alternatif solusi, sebagai alat pendidikan musik bagi anak-anak muridnya di Kabupaten Kuningan, yang tidak berani bernyanyi pada pelajaran seni suara yang ia ajarkan.

Dengan penemuan ini, mulailah babak baru bagi angklung. Sebagai alat musik, angklung tidak lagi berhadapan dengan kendala tangga nada, sehingga dapat dimainkan untuk lagu apapun. Pak Daeng dalam skripsinya juga menjelaskan bermacam keunggulan alat musik angklung yang ia temukan. Keunggulan tersebut ia terangkan dalam beberapa aspek, yakni: (1) angklung mudah diproduksi dan murah biaya pembuatannya, karena bambu sebagai bahan bakunya mudah ditemukan di negara tropis, (2) angklung adalah alat musik yang sederhana, memainkannya sangat mudah, bahkan bagi anak yang paling tidak musikal sekalipun, (3) unsur memainkan angklung sebagai alat musik terbilang unik, karena dibutuhkan kebersamaan dalam bermain angklung untuk menghasilkan suatu rangkaian melodi maupun *chord*, (4) angklung menciptakan sensasi pengalaman tersendiri, mampu memukau dan menarik perhatian dan tidak mengurangi ketertarikan anak sedikitpun.



Gambar 4.2. Pengrajin Angklung

Sumber: www.unesco.org

Nilai keutamaan angklung ada pada filosofinya, dimana untuk memainkan musik angklung, harus ada satu “kelompok”, satu grup anak-anak yang bersedia melaksanakan wujud dari nilai “gotong-royong” dengan sepenuhnya. Bermain angklung, berarti menguatkan rasa tanggung jawab dari perorangan dan semangat kebersamaan. Dalam bermain angklung, tidak akan ada kemungkinan orang lain merasa lebih penting dari yang lain, yang sering timbul pada perlakuan para solis dalam kelompoknya.



Gambar 4.3. Angklung Sebagai Medium Pendidikan

Sumber: www.unesco.org

Tanpa mengecilkan peran para pemerhati dan pengajar angklung lainnya yang pernah hidup dan turut memberikan sumbangsih pada tumbuh kembang musik angklung di Indonesia, setidaknya ada dua nama kunci yang berdedikasi dan telah berperan amat signifikan sebagai soko guru bagi penyebaran ilmu seni musik angklung, tidak hanya di Indonesia tapi juga seluruh dunia. Mereka adalah Alm. Daeng Soetigna dan Alm. Udjo Ngalagena.

Daeng Soetigna

Lahir dengan nama Daeng Soetigna bin Mas Kartaatmadja, pria kelahiran Garut, 13 Mei 1908 dan wafat di Bandung, 8 April 1984 ini adalah seorang guru, yang mulai bertugas sejak jaman penjajahan Belanda. Ia pulalah maestro yang mengubah angklung menjadi alat musik diatonis, menerapkannya dalam dunia pendidikan, setahap demi setahap melalui berbagai upaya yang tidak mudah.

Dengan kecintaannya sebagai seorang guru, Daeng Soetigna berguru tentang pembuatan angklung kepada Pak Djaja, dan mengajarkan angklung pada anak-anak muridnya di sekolah, di Kabupaten Kuningan pada tahun 1938. Melalui pendidikan seni musik dengan alat musik angklung, Pak Daeng mampu menyampaikan nilai bangsa yang utama, yakni “gotong-royong”, sebagai akar dari falsafah bangsa.



Gambar 4.4. Pak Daeng Soetigna

Sumber: www.serambipirous.com

Pak Daeng adalah perintis, inovator, dan pejuang angklung Indonesia, yang mampu mempopulerkan permainan musik angklung di tanah air dengan sebutan 5M (mudah, murah, menarik, mendidik, dan massal).

Udjo Ngalagena

Almarhum tidak pernah tahu kapan persisnya ia lahir. Ngalagena pun bukan nama yang diberikan orangtuanya. Ia sendiri yang menciptakan, sebagaimana ia mengira-ngira kapan ia dilahirkan, tanggal 5 Maret 1929. Beliau wafat pada 3 Mei 2001. Jika Pak Daeng dikenang dengan peninggalannya berupa inovasi angklung modern, “angklung Padaeng”, maka warisan Mang Udjo –demikian almarhum akrab dipanggil- yang paling besar pengaruhnya adalah Saung Angklung Udjo.



Gambar 4.5. Udjo Ngalagena

Sumber: Google Image

Saung Angklung Udjo, adalah rumah, sanggar, tempat berlatih, dan pusat pertunjukan kesenian dan sentra kebudayaan Indonesia, tidak hanya bagi Udjo dan anak-cucunya, tapi juga untuk seluruh warga dunia yang ingin mengenal angklung sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia.

Berlokasi di Jalan Padasuka, Bandung, Mang Udjo bersama Uum, istrinya memulai mimpi besarnya dari lahan seluas 150 meter persegi. Bulan September tahun 1968, turis mancanegara pertama berkunjung ke Saung Angklung Udjo

(SAU). Mereka adalah enam orang turis dari negara Perancis yang dibawa oleh biro perjalanan Nitour, dengan dua pemandu wisata, Tata Nuryata dan Rosalyn.

Mang Udjo sendiri berguru angklung pada Pak Daeng, bersama sejumlah murid lainnya, ketika Mang Udjo bersekolah di (KGA), pada tahun 1951. Kala itu Pak Daeng adalah instruktur di sekolah tersebut. Keduanya kemudian sama-sama mengajar di Konservatori Karawitan Indonesia Sunda, Jalan Buah Batu 212, Bandung.



Gambar 4.6. Turis Mancanegara Bermain Angklung di Saung Angklung Udjo

Sumber: www.unesco.org

Mang Udjo memiliki sepuluh orang anak, dimana anak pangais bungsunya, Taufik Hidayat Udjo, kini menjadi penerus usaha ayahandanya, sebagai Direktur Utama PT Saung Angklung Udjo. Bersama dengan saudara-saudaranya, Kang Opick, demikian Taufik kerap dipanggil, mengelola Saung Angklung Udjo, sebuah sanggar sederhana yang kini telah berevolusi menjadi sentra pertunjukan angklung dan kantong kebudayaan Indonesia dari kota Bandung, yang dikenal di seluruh dunia.

Universitas Indonesia

4.3. Festival Musik Bambu Nusantara

Festival Musik Bambu Nusantara atau yang disebut dengan *Bambu Nusantara World Music Festival* (BNWMF) adalah pagelaran kebudayaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (dahulu merupakan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata). Hingga kini, BNWMF telah dilaksanakan lima kali dalam lima tahun terakhir. Meski kebijakan Pemerintah melaksanakan festival ini telah ada sebelum pengakuan angklung sebagai warisan budaya tak benda dikukuhkan oleh UNESCO penulis menilai perlu untuk menganalisa data ini lebih dalam.

BNWMF pertama kali dilaksanakan di Jakarta, dua hari berturut-turut sejak tanggal 18 Agustus 2007 di Hal D Pekan Raya Jakarta. Festival ke-2 diadakan di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), kota Bandung, pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2008. Festival ke-3 diselenggarakan di Paris Van Java, sebuah *mall* di kota Bandung, pada tanggal 17-18 Oktober 2009. Festival ke-4 kembali diadakan di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), kota Bandung, pada tanggal 2-3 Oktober 2010. Sedangkan festival ke-5 diselenggarakan juga di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), kota Bandung, pada tanggal 1-2 Oktober 2011. Sementara ke-6, berdasarkan data yang diperoleh dari situs kementerian www.budpar.go.id rencananya akan diadakan di Jakarta, pada tanggal 29-30 Agustus 2012.

Dari liputan media nasional tampak bahwa respon khalayak yang hadir dalam BNWMF sebagai festival hajatan tahunan Pemerintah itu terbilang positif. Namun begitu, tidak ada yang pengutamakan pada angklung, bahkan pada festival ke-5 yang diselenggarakan satu tahun setelah diakuinya angklung sebagai warisan budaya tak benda dunia asal Indonesi. BNWMF tidak menempatkan angklung sebagai fokus utama festival dan tidak terefleksikan secara utuh bagaimana upaya nyata Pemerintah dalam pelestarian angklung dilakukan dalam festival ini.

4.4. Pertunjukan dan Pemecahan Rekor Angklung di Washington, Amerika Serikat

Pada hari Sabtu, 9 Juli 2011 lalu, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington, Amerika Serikat telah membuat suatu sejarah dalam konteks diplomasi kebudayaan, dengan mengadakan pertunjukan ansambel angklung dan pemecahan rekor bermain angklung bersama lebih dari 5.000 peserta.

Daeng Udjo, selaku instruktur angklung yang bertugas memandu permainan angklung saat itu, mengatakan dalam wawancaranya dengan VOA, semula ia menyangsikan jumlah peserta yang hadir dapat mencapai 5.000 orang. Namun rupanya antusiasme masyarakat Amerika Serikat amat tinggi dan permainan angklung bersama dapat berlangsung baik, dengan akhir sebuah pemecahan rekor, yang ditandatangani Duta Besar Dino Pati Djalal.

4.5. Hasil Temuan dan Analisis

Dari hasil diskusi kelompok terarah, studi dokumen baik yang bersifat internal dan eksternal, maupun wawancara mendalam dengan beberapa responden kunci penelitian, peneliti mengungkap adanya sejumlah temuan.

Pada studi dokumentasi kebijakan komunikasi Pemerintah pasca diakuinya angklung sebagai warisan kebudayaan, sebagaimana hasil ulasan dari Renstra Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, dalam studi dokumen ini peneliti tidak menemukan adanya pembahasan kebijakan spesifik yang secara mendalam menggali potensi angklung sebagai warisan kebudayaan yang telah diakui dunia, dalam konteks komunikasi internasional terencana untuk strategi diplomasi kebudayaan luar negeri Indonesia.

Pada Renstra Kementerian bahkan tidak ditemukan data telah diakuinya angklung oleh

UNESCO

Universitas Indonesia

⁴⁴, padahal Renstra tersebut merupakan dokumen perubahan dari Renstra sebelumnya.

Menarik menelaah bahwa pada Renstra disebutkan, menindaklanjuti Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Visi Presiden Periode 2009-2014, Visi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014 adalah “Terwujudnya Bangsa Indonesia Yang Mampu Memperkuat Jati Diri dan Karakter Bangsa serta Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.” Dari penjabaran visi Kementerian, dapat disimpulkan bahwa pada tatanan visi, strategi komunikasi untuk upaya menajamkan kebudayaan telah tampak dalam Renstra ini.

Akan tetapi, pada tataran mikro peneliti belum menemukan adanya kesesuaian visi dan strategi dan taktik. Dari dokumen Renstra Kementerian, peneliti melihat bahwa komitmen Pemerintah untuk pelestarian angklung masih belum konkret diterjemahkan dalam upaya-upaya taktis. Dari sisi penganggaran, peneliti juga tidak mendapat gambaran utuh tentang upaya pelestarian kebudayaan seperti yang akan dilakukan di Kementerian.

Renstra Kementerian juga tidak menyebutkan penjabaran teknis dari visi penanaman jati diri dan karakter, penggunaan unsur kebudayaan spesifik dalam upaya promosi Indonesia, dan tidak berhasil menemukan kebijakan strategis Kementerian, untuk merealisasikan komitmen Pemerintah akan upaya pelestarian angklung yang telah disepakati bersama UNESCO.

Kesulitan lain yang ditemukan dalam proses analisa kebijakan melalui studi dokumen ini adalah karena perubahan kabinet yang turut memberi implikasi pada perubahan struktur birokrasi dan keorganisasian yang ada. Pada saat penandatanganan konvensi pelestarian angklung, sektor yang memegang peran terbesar adalah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, serta Direktorat Jenderal Nilai Kebudayaan, Seni dan Film yang memang berada di dalam struktur

⁴⁴ Lihat Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014, halaman 4-5.

organisasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Namun semenjak perubahan kabinet Indonesia Bersatu II, struktur kementerian mengalami perubahan skema organisasi.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata kini berganti menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (dengan alamat situs resmi tetap www.budpar.go.id). Sedangkan Kebudayaan kini disatukan kembali ke dalam naungan otoritas Kementerian Pendidikan Nasional, sehingga kembali berganti nama menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Implikasi ini juga menyebabkan sulitnya pemantauan atau evaluasi, mengingat perubahan birokrasi telah membuat Direktorat Jenderal Nilai Kebudayaan, Seni dan Film kini melekat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dari hasil analisa terhadap publikasi Festival Bambu Nusantara, acara pagelaran kebudayaan yang merupakan bagian dari program promosi Indonesia yang dijalankan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (dahulu Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata), tergambar bahwa festival ini mendapat sambutan meriah dari khalayak yang hadir.

Sayangnya, belum temukan adanya kajian mendalam mengenai hubungan antara keberhasilan terselenggaranya festival dengan indikator keberhasilan pariwisata dan pengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat ekonomi kreatif.

Sementara itu, dari diskusi mendalam tanggal 6 Januari 2012 yang dilakukan dengan para responden, peneliti berhasil membuat kategorisasi atas usulan maupun pendapat yang terangkum sebagai hasil dari FGD.

Adapun FGD ini menghasilkan sejumlah rekomendasi bagi Pemerintah. Mengenai kompilasi rekomendasi tersebut, oleh peneliti dikategorikan ke dalam beberapa dimensi. Dimensi pembudidayaan bambu, dimensi produksi angklung, dimensi

pertunjukan angklung, dimensi perlindungan hukum angklung, dan dimensi preservasi angklung, sebagaimana dapat diamati pada Tabel 4.1.

Dari hasil penelitian yang dikaji melalui diskusi, wawancara mendalam dengan komunitas angklung dan penelusuran dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014, peneliti menemukan bahwa:

- Tidak terdapat kordinasi kebijakan antara pihak-pihak yang terkait dalam perwujudan komitmen upaya pelestarian angklung ini. Sebaliknya, banyaknya pihak yang berkepentingan pada lintas sektoral dalam birokrasi Pemerintahan, telah membuat proses pengambilan keputusan atas suatu kebijakan publik lebih kompleks.
- Dari perbincangan dengan para penentu kebijakan, peneliti mengamati bahwa isu pelestarian kebudayaan belum dimaknai sebagai suatu isu strategis yang bila dikelola dengan baik, bisa berdampak multidimensi.
- diakuinya angklung sebagai warisan kebudayaan tak benda oleh UNESCO, tidak dilanjutkan Pemerintah dengan perencanaan komunikasi internasional yang holistik baik dalam hal kebijakan komunikasi formal maupun strategi PR Politik dalam pembangunan opini positif publik di media massa;
- Komunitas pencinta angklung memiliki nilai kepedulian yang lebih tinggi dalam upaya perwujudan pelestarian angklung. Ini juga terlihat dari konsistensi mereka, terutama anak-anak Alm. Udjo dalam memikirkan dan mendiskusikan alternatif-alternatif kebijakan untuk pelestarian angklung, dari hulu ke hilir.
- Pendayagunaan unsur kebudayaan dalam strategi diplomasi kebudayaan masih bersifat sektoral dimana angklung hanya dipergunakan secara efektif oleh beberapa sektor tertentu. Misalnya pada program pemecahan rekor main angklung bersama yang diprakarsai oleh Kedutaan Besar RI seperti di Washington;

Aspek Pelestarian Angklung Indonesia Pasca Pengakuan UNESCO					
Dimensi Pembudidayaan Bambu	Dimensi Produksi Angklung	Dimensi Pendidikan Angklung	Dimensi Pertunjukan Angklung	Dimensi Perlindungan Hukum Angklung	Dimensi preservasi angklung
Pembibitan bambu	Pemilihan bambu	Metode Pelatihan Angklung	Ketersediaan ruang publik untuk menampilkan angklung	Sosialisasi konsep Hak Kekayaan Intelektual	Inventarisasi dan Dokumentasi angklung
Penanaman bambu	Standarisasi Produksi, terutama dari aspek ketepatan nada	Pembinaan Pendidik Angklung	Penyelenggaraan festival dan kompetisi berkala untuk pertunjukan angklung	Pemahaman Perlindungan Hukum Hak Cipta untuk Karya Seni angklung yang direkam & atau ditampilkan	Penelitian lanjutan
Pemeliharaan bambu	Pembinaan pengrajin	Materi pelatihan untuk anak didik	Standar minimum pertunjukan angklung (dari segi kualitas bunyi)	Pemahaman Perlindungan Hukum Espresi Budaya Tradisional (<i>folklore</i>)	Museum angklung dan sejarahnya
Pencarian varietas bambu untuk angklung	Materi pelatihan pengrajin	Materi pelatihan untuk guru/pendidik	relasi terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif		Penemuan derivatif angklung (seperti <i>software</i> , <i>jenis hibrida angklung</i>)
Hutan khusus bambu	Pemantauan kualitas produksi	Materi lagu permainan angklung untuk umum	Penciptaan karya rekam angklung untuk kebutuhan komunikasi pariwisata		
Penghargaan	Penghargaan	Pertukaran pelajar	Kolaborasi pertunjukan		

telah diolah kembali

- Minimnya kebijakan komunikasi dalam merespon diakuinya angklung sebagai warisan kebudayaan oleh UNESCO, mengakibatkan pada

Universitas Indonesia

lambatnya upaya realisasi perwujudan komitmen untuk pelestarian angklung di Indonesia.

- Minimnya pemahaman makna di masyarakat tentang konsep pelestarian warisan kebudayaan yang menjadi inti konvensi UNESCO, telah membuat kegaduhan persepsi di masyarakat, dimana konsep perlindungan warisan kebudayaan menjadi rancu dengan konsep perlindungan hukum ekspresi kebudayaan yang harusnya justru diprioritaskan para penentu kebijakan di negeri ini.

4.6. Upaya Pelestarian Angklung Indonesia

Mengevaluasi minimnya perhatian Pemerintah terhadap komitmen pelestarian angklung, peneliti menilai perlu dilakukan diskusi periodik antara unsur-unsur Pemerintah terkait dengan elemen masyarakat dan komunitas angklung. Hal ini menjadi penting, karena tidaklah mungkin suatu kebijakan dapat diformulasi dan dikomunikasikan dengan baik kepada khalayak, jika khalayak kunci tidak dilibatkan dalam proses perencanaannya.

Apabila proses komunikasi antara pihak-pihak yang terkait dalam upaya pelestarian angklung ini dapat berjalan dengan baik, maka kemungkinan pencapaian dan terealisasinya komitmen pelestarian angklung pun akan lebih baik pula.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Menyikapi hasil temuan dari penelitian ini, peneliti berkesimpulan bahwa untuk kebijakan diplomasi kebudayaan adalah aspek krusial yang harus menjadi perhatian para penentu kebijakan di Indonesia. Sebagai bagian dari masyarakat global, kita tidak bisa lepas dari kehadiran bentuk-bentuk komunikasi internasional yang tersymbolisasi dalam berbagai bentuk kebudayaan global.

Untuk menyiasati keseragaman yang tak terelakkan sebagai bagian dari warga dunia, Indonesia perlu menyetengahkan kebijakan komunikasi yang lebih humanis, dengan mengandalkan kekuatan keragaman kebudayaan yang dimiliki.

Meski dalam satu kondisi, pengakuan angklung dalam daftar representatif warisan kebudayaan manusia tak benda merupakan satu pencapaian, kita tidak bisa cukup berpuas diri dengan pengakuan UNESCO itu.

Masih ada sejumlah tugas yang harus menjadi pekerjaan rumah kita bersama, agar ke depan Indonesia mampu mengoptimalkan seluruh ornamen kebudayaannya, hal hal ini terutama angklung, ini sebagai bagian dari kebijakan komunikasi internasional bangsa ini, dalam konteks diplomasi kebudayaan.

Kebijakan komunikasi internasional dalam bentuk diplomasi kebudayaan sesungguhnya adalah suatu bentuk komunikasi politik yang memiliki urgensi tinggi dalam konstalasi persaingan di era global. Kecepatan transmisi pemberitaan media massa sebagai konsekuensi dari kemajuan dunia teknologi informasi dan komunikasi, mendorong kita untuk bersikap lebih rasional dalam mengoptimalkan potensi keanekaragaman kebudayaan yang dimiliki negeri ini.

Bagaimanapun, diakui dan dimasukkannya angklung sebagai salah satu daftar warisan kebudayaan tak benda oleh organisasi internasional UNESCO, belumlah bisa dianggap sebagai pencapaian, jika tidak dibarengi dengan pemanfaatan yang optimal dari warisan kebudayaan khas Indonesia itu.

Indonesia perlu menggali lagi efek lanjutan pengakuan angklung yang bisa dieksplorasikan. Ini penting mengingat selama ini, ada gejala bahwa penghargaan atas kekayaan kebudayaan dilakukan hanya ketika ada tekanan eksternal. Ke depan perlu ada penelitian awal, sebelum Pemerintah mengajukan suatu unsur kebudayaan dalam ranah pelestarian UNESCO. Apakah pendaftaran angklung untuk menjadi salah satu objek pelestarian budaya bangsa dilakukan dengan proyeksi pemikiran yang matang, atau sekedar merupakan manifestasi kepanikan dan bentuk reaktifnya negeri ini dalam menyikapi serangan komunikasi internasional negara tetangga.

Meski bentuk diplomasi kebudayaan melalui angklung belum sepenuhnya dipergunakan dalam komunikasi yang holistik oleh para pembuat kebijakan di Indonesia, sudah sepatutnya ke depan diupayakan model-model pendekatan baru yang dinamis, agar Indonesia dapat mengoptimalkan angklung dalam berbagai kebijakan komunikasi internasional yang ada.

Model-model pendekatan baru nan dinamis yang dimaksudkan disini, berpangkal pada etika diskursus sebagaimana yang disampaikan Habermas dalam tesis-tesisnya. Modernisasi dengan segala kecanggihannya yang telah menghubungkan manusia begitu cepat tanpa batasan dan halangan, harus ditunjang dengan transparansi informasi publik. Dengan begitu, komunikasi yang terjalin antara masyarakat pemangku kepentingan dengan sektor-sektor Pemerintah terkait dapat lebih terjalin dan proses dialektika untuk merumuskan suatu kebijakan publik dapat tercipta dengan lebih harmonis.

Sebagaimana karakteristik demokrasi yang terkonsolidasi, diperlukan pola perumusan kebijakan yang lebih interaktif untuk terselenggaranya pemerintahan

yang bersih (*clean governance*) dan berjalannya pemerintah yang baik (*good government*) di negeri ini.

5.2. Rekomendasi Penelitian

5.2.1. Rekomendasi Akademis

Secara akademis penelitian ini merekomendasikan pelaksanaan penelitian yang mendalam terhadap perencanaan strategi komunikasi internasional secara holistik, terintegrasi dan kontinu, khususnya mengoptimalkan peran kebudayaan dalam PR politik dan diplomasi kebudayaan.

Riset yang dilakukan harus dijalankan secara menyeluruh, agar mampu menyumbangkan analisa mendalam serta rekomendasi bagi elemen-elemen yang terkait strategi komunikasi internasional, seperti diplomasi kebudayaan, studi kebijakan luar negeri, studi-studi kebudayaan, aspek perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual, pemberdayaan ekonomi kreatif dan kepariwisataan.

Begitu pun dengan pengembangan penelitian pada area komunikasi, terutama PR Politik, sebagai kajian komunikasi politik yang lebih spesifik.

5.2.2. Rekomendasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan adanya diskursus antara para pemangku kepentingan pelestarian warisan budaya, untuk dapat bersama-sama merumuskan kebijakan komunikasi yang terintegrasi. Diplomasi kebudayaan yang dilakukan angklung harus ditunjang dengan penguatan kebijakan di berbagai dimensi pelestarian angklung.

Diperlukan adanya kerjasama lintas sektoral di bawah pengawasan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, untuk betul-betul memantau upaya pelestarian angklung yang telah dijadikan komitmen oleh Pemerintah Indonesia. Selain untuk mengupayakan pelestarian, kerjasama lintas sektoral yang holistik juga penting dalam pembuatan kebijakan komunikasi internasional, untuk mengupayakan taktik diplomasi kebudayaan elegan dalam kerangka hubungan internasional yang kondusif.

Dalam hal ini kiranya diperlukan interaksi yang sinergis dan dinamis antara kementerian. Dibawah kordinasi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, menaungi kerjasama lintas sektoral di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Kehutanan.

Sejalan dengan kebijakan di pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi khususnya Jawa Barat dan Provinsi Banten) juga harus mampu melakukan sinkronisasi kebijakan, agar kebijakan pelestarian warisan kebudayaan yang sudah dicanangkan di level pusat, dapat diteruskan hingga ke level daerah.

5.2.3. Rekomendasi Subyek

Para responden yang merupakan komunitas pencinta angklung merekomendasikan dibentuknya suatu kelompok kerja resmi yang ditujukan untuk membantu Pemerintah membuat perencanaan kebijakan untuk pelestarian angklung di Indonesia.

Kelompok kerja yang dimaksud terdiri dari para pakar yang mampu mengevaluasi dimensi-dimensi pelestarian angklung, sekaligus memanfaatkan eksistensi angklung dalam segala bentuk strategi komunikasi dan aktivitas taktisnya.

Dengan demikian, hasil pemikiran dan penelitian lanjutan kelompok kerja ini dapat menjadi solusi alternatif bagi kemandekan realisasi komitmen pelestarian angklung yang selama ini terjadi. Dan dengan begitu, Pemerintah terbantu karena adanya peran aktif masyarakat komunitas pencinta angklung dalam berpartisipasi menentukan arah dan strategi kebijakan angklung yang lebih komprehensif.

Indonesia seharusnya mampu mengoptimalkan potensi kekayaan kebudayaan yang ada sebagai amunisi efektif dalam menghadapi perang persepsi. Melalui pemberdayaan promosi kebudayaan yang utuh dan terpadu, dan dengan mengoptimalkan kemampuan sumber daya insani di bidang teknologi komunikasi dan informasi, kebijakan pelestarian angklung dan berbagai warisan kebudayaan lainnya diharapkan dapat menciptakan suatu bentuk diplomasi yang persuasif di level internasional.

Karena Indonesia adalah negara berdaulat yang memiliki kekayaan budaya dan mampu memosisikan diri sebagai negara yang beradab, maka di masa mendatang para penentu kebijakan harus mampu mendayagunakan unsur kebudayaan yang ada dalam berbagai kebijakan komunikasi internasional terkait, dalam konteks diplomasi kebudayaan yang lebih berkualitas.

5.2.4. Rekomendasi Peneliti

Dari penelitian ini, sesungguhnya banyak kajian mendalam yang dapat dilakukan untuk memahami makna kekayaan kebudayaan yang dimiliki Indonesia, dan memanfaatkannya secara optimal untuk memajukan bangsa.

Peneliti merekomendasikan adanya riset lanjutan untuk mencermati sejauh mana pertunjukan kebudayaan dalam upaya pelestarian budaya yang diselenggarakan oleh Pemerintah, berkorelasi dengan persepsi positif

masyarakat internasional atas Indonesia, dan berbanding lurus dengan pendapatan negara dari sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif.



DAFTAR REFERENSI

I. BUKU

Bakti, Andi Faisal. *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi*, Tangerang: Churia Press, 2012.

Budianto, Heri. *Media dan Komunikasi Politik*. Jakarta: Universitas Mercu Buana, 2011.

Budiman, Hikmat. *Lubang Hitam Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Burkett, Morgan Elizabeth. *Pop-Diplomacy: Anime and Manga As Vehicles of Cultural Context, Identity Formation, and Hybridity*. Washington: ProQuest LLC, 2010.

Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Achmad Fawaid, Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Djohan. (3rd ed.). *Psikologi Musik*. Yogyakarta: Best Publisher, 2009.

Dzulfikriddin. *Mohammad Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia: Peran dan Jasa Mohammad Natsir dalam Dua Orde Indonesia*. Bandung: Mizan., 2010.

Gerring, John. *Case Study Research, Principles and Practices*. New York: Cambridge, 2007.

Gillham, Bill. *Case Study Research Methods*. London: Continuum, 2000.

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Heryanto, Gun Gun & Irwa Zarkasy. *Public Relations Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Jones, Pip. (2nd ed.). *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme* (Achmad Fedyani Saifuddin, Penerjemah). Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2010.

Liliweri, Alo. *Dasar-Dasar Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Khamaeni, Imam Ali. *Perang Kebudayaan*. Jakarta: Cahaya, 2005.

Korten, David C. *When Corporations Rule The World*. (2nd ed.) Connecticut: Kumarian Press, 2001.

Kotler, Philip. *According to Kotler, Tokoh Paling Kompeten Dalam Menjawab Pertanyaan Anda*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer: 2006.

Kusumohamidjojo, Budiono. (2nd ed.) *Filsafat Kebudayaan: Proses Realisasi Manusia*. Yogyakarta: Jalasutra, 2010.

Kurniawan, Benny. *Ilmu Budaya Dasar*. Tangerang: Jelajah Nusa, 2012.

Margono, Suyud. *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIP's Agreement*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

- McClintock, Anne, et al., (4th ed.). *Dangerous Liaisons: Gender, Nation, & Postcolonial Perspectives*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997.
- McLuhan, Marshall. *Understanding Media: The Extensions of Man*. London: Routledge, 2001.
- McQuail, Denis & Sven Windahl. (2nd ed.) *Communication Models for The Study of Mass Communications*, Edinburgh: Addison Wesley Longman, 1993.
- Montefiore, Simon Sebag. *Speeches That Changed The World*. Trans. Haris Munandar. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Mulyana, Deddy & Solatun. (2nd ed.) *Metode Penelitian Komunikasi: Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Nainggolan, B. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: Alumni, 2011.
- Nugroho, Alois A, ed. *Etika Komunikasi Politik*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Atma Jaya, 2011.
- Patton, Michael Q. (3rd ed.). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. California: Sage, 2002.
- Purba, Afrillyanna. *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Bandung: Alumni, 2012.

- Rubin, Derek & Jaap Verheul (ed.). *American Multiculturalism after 9/11: Transatlantic Perspectives*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009.
- Rubin, Rebecca, B, et al., (6th ed.). *Communication Research Strategic and Sources*. California: Wardsworth. 2005.
- Sadri, Houman & Madelyn Flammia. *Intercultural Communication: A New Approach to International Relations and Global Challenges*. New York: The Continuum International, 2011.
- Samovar, Larry A & Richard E. Porter. (4th ed.). *Communication Between Cultures*. California: Wadsworth, 2000.
- Santana K., Septiawan. (2nd ed.) *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Saptawasana, Bima & Haryanto Cahyadi. *Teori-Teori Kebudayaan*. Ed. Sutrisno, Mudji dan Hendar Putranto. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Sardjono, Agus. *Membumikan HKI di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2009.
- Sen, Krishna & David T. Hill. *Media, Culture and Politics in Indonesia*. Jakarta: Equinox , 2007.
- Sendjaja, Sasa, et al., ed. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, 2002.
- Shoelhi, Mohammad. *Propaganda Dalam Komunikasi Internasional*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012.

- Soekro, Shinta R.I, et al., Ed. Sjamsul Arifin. *Bangkitnya Perekonomian Asia Timur: Satu Dekade Setelah Krisis*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.
- Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Sudibyo, Agus. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Sumarsono, Tatang & Erna P. Ganarsih. *Membela Kehormatan Angklung: Sebuah Biografi dan Bunga Rampai Daeng Soetigna*. Bandung: Serambi Pirous, 2007.
- Syafii, S. *Udjo: Diplomasi Angklung*. Jakarta: Grasindo, 2009.
- Undang-Undang Perlindungan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*. Surabaya: Anfaka Perdana, 2011.
- Weiss, Carol H. *Evaluation Research, Methods for Assessing Program Effectiveness*. New Jersey: Prentice-Hall, 1972.
- Widyatmadja, Josef P. *Kebangsaan dan Globalisasi dalam Diplomasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Wilson, J. Laurie & Joseph D. Ogden, *Strategic Communications Planning for Effective Public Relations & Marketing*, 5th ed., Iowa: Kendall/Hunt, 2008.
- Yin, Robert K. (2nd ed.). *Case Study Research, Design and Methods*. California: Sage, 1994.

II. WAWANCARA

Soelistyo, Henry. Wawancara Tatap Muka. Gedung Sarbini, Jakarta. 13 Jun.2012.

III. KARYA LAIN DAN KARYA NON CETAK

Nababan, Frenia. *“Sosialisasi Penanggulangan Demam Berdarah: Studi Kasus Sosialisasi PSN-30 Menit di Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat.”* Skripsi. Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro. Semarang, 2008.

Murdago, Petty T.S. *“Misi Kebudayaan sebagai Strategi Komunikasi Antarbudaya: Studi Kasus Misi Kebudayaan Kelompok Sanggrina Bunda Dalam Membangun Diplomasi Kebudayaan Pemerintah Indonesia dengan Kanada.”* Tesis. Program Pasca Sarjana FISIP Universitas Indonesia. Jakarta, 2007.

IV. PUBLIKASI ELEKTRONIK

Bambang, “Iklan Tari Pendet Dibuat Oleh Discovery Channel”, *Antaraneews.com*. 2009. 25 Agustus 2009.

<<http://m.antaranews.com/berita/1251181413/iklan-tari-pendet-dibuat-oleh-discovery-channel>>

Brenhouse, H. “Bali’s Travel Boom: Eat, Pray, Love Tourism.” *Time Magazine*. 2010. 22 Jul 2010.

<<http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,2011931,00.html>>

Universitas Indonesia

Glossary Communication. *McGraww-Hill*. < http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072400773/student_view0/glossary.html>

Jacobsen, J. "Remembered Justice: The Background, Early Caree and Judicial Appointments of Justice Potter Stewart." *University of Akron*. 2002. 26 Mar 2002.

<<http://www.uakron.edu/law/lawreview/v35/docs/jacobsen352.pdf>>

Khaerudin. "Apa Pun Bisa Dijual." *Kompas.com*. 2010. 3 Des 2010.

<<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/12/03/09020534/Apa.Pun.Bisa.Dijual>>

Lasswell, H. "The Theory of Political Propaganda." *The American Political Science Review*, Vol. 21, No. 3. Aug 1927.

<<http://ics-www.leeds.ac.uk/papers/pmt/exhibits/2941/Lasswell.pdf>>

Ligagame Forum, *Reog Ponorogo diklaim Kesenian Malaysia*,

<<http://www.ligagame.com/forum/index.php?topic=58746.0>>

Marboen, A. "2007-2012 Malaysia Klaim Tujuh Budaya Indonesia",

Antaraneews.com. 2012. 19 Juni 2012.

<<http://m.antaraneews.com/berita/317054/2007-2012-malaysia-klaim-tujuh-budaya-indonesia>>

Margianto, H. Menjengkelkan, tapi Kita Memang Harus Belajar dari 'Si Truly Asia'(1)" *Kompas.com*. 2009. 1 September 2009.

<<http://internasional.kompas.com/read/2009/09/01/10035169/Menjengkelkan.tapi.Kita.Memang.Harus.Belajar.dari.Si.Truly.Asia.1>>

Margianto, H. Menjengkelkan, tapi Kita Memang Harus Belajar dari 'Si Truly Asia'(2)" *Kompas.com*. 2009. 1 September 2009.

Universitas Indonesia

<<http://internasional.kompas.com/read/2009/09/01/10265759/Menjen-gkelkan.Tapi.Kita.Memang.Harus.Belajar.dari.Si.Truly.Asia.2>>

Margianto, H. Menjengkelkan, tapi Kita Memang Harus Belajar dari ‘Si Truly Asia’(3)” *Kompas.com*. 2009. 1 September 2009.

<<http://internasional.kompas.com/read/2009/09/01/10303341/Menjen-gkelkan.Tapi.Kita.Memang.Harus.Belajar.dari.Si.Truly.Asia.3>>

McLellan, D. “Democracy and Ideology.” *The International Endowment for Democracy*. 2012. University of London. 16 Jun. 2012.

< http://www.iefd.org/articles/democracy_and_ideology.php>

“Nation Brands Index.” *Simon Anholt*. 2009. 16 Jun 2012.

<http://www.simonanholt.com/Research/research-introduction.aspx>>

Pertiwi, Ni Luh M. & Made Asdhiana. “Ekonomi Malaysia Ditopang Pariwisata”. *Kompas.com*. 2011.15 Mar 2011.

<<http://travel.kompas.com/read/2011/03/15/18400057/Ekonomi.Malaysia.Ditopang.Pariwisata>>

Stevenson, R. “Defining International Communication As a Field.”

Journalism Quarterly Vol. 69, No. 3, Fall 1992

<http://courses.essex.ac.uk/gv/gv905/W2%20Readings/stevenson_intl_comm_field.pdf>

Saputra, A. “Klaim Malaysia, Dari Reog, Angklung, Hingga Beras.”

Detik.com. 2012. 14 Jan 2012.

<<http://www.detiknews.com/read/2012/01/14/112437/18115444/10/klaim-malaysia-dari-reog-angklung-hingga-beras>>

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Indonesian Angklung. 2010. 16 Nov 2010.

Universitas Indonesia

<<http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00393>>

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
Convention For the Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage.
2003. 17 Oct 2003.
<<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540e.pdf>>

Wedhaswary, I. “Soal Budaya, Jangan Teriak Setelah ‘Dicolong’!”
Kompas.com, 2009. 2 September 2009.
<<http://internasional.kompas.com/read/2009/09/02/13150245/Soal.Budaya.Jangan.Teriak.Setelah.Dicolong>>

Yudono, J. “Waspada, Malaysia Incar Budaya Kerinci!” *Harian Kompas*.
2011. 28 Mar 2011.
<<http://edukasi.kompas.com/read/2011/03/28/00132393/Waspada.Malaysia.Incar.Budaya.Kerinci>>

Yudono, J. “Kiprah Gus Dur Membela Tionghoa”, *Kompas.com*. 2012. 11
April 2012
<<http://nasional.kompas.com/read/2012/04/11/01005217/Kiprah.Gus.Dur.Membela.Tionghoa.>>

Yudono, J. “Pengamat: Klaim Budaya Karena Kurangnya Perhatian
Pemerintah”, *Kompas.com*. 2012. 20 Juni 2012.
<<http://edukasi.kompas.com/read/2012/06/20/13502363/Pengamat.Klaim.Budaya.karena.Kurangnya.Perhatian.Pemerintah>>

Udjo, D. Ngobrol dengan Daeng Udjo. *Warung VOA*. Washington. 15 Jul.
2011.
<http://www.youtube.com/watch?v=nIjV8xSsRQI&feature=youtube_gdata_player>

Universitas Indonesia

A large, intricate, light gray decorative emblem centered on the page. It features a central vertical axis with symmetrical, flowing, and scalloped patterns that resemble stylized floral or architectural motifs.

**CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING
OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE**

Paris, 17 October 2003

MISC/2003/CLT/CH/14

Evaluasi Kebijakan..., Theresia E.E.Pardedek, FISIP UI, 2012.

CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization hereinafter referred to as UNESCO, meeting in Paris, from 29 September to 17 October 2003, at its 32nd session,

Referring to existing international human rights instruments, in particular to the Universal Declaration on Human Rights of 1948, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 1966, and the International Covenant on Civil and Political Rights of 1966,

Considering the importance of the intangible cultural heritage as a mainspring of cultural diversity and a guarantee of sustainable development, as underscored in the UNESCO Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore of 1989, in the UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity of 2001, and in the Istanbul Declaration of 2002 adopted by the Third Round Table of Ministers of Culture,

Considering the deep-seated interdependence between the intangible cultural heritage and the tangible cultural and natural heritage,

Recognizing that the processes of globalization and social transformation, alongside the conditions they create for renewed dialogue among communities, also give rise, as does the phenomenon of intolerance, to grave threats of deterioration, disappearance and destruction of the intangible cultural heritage, in particular owing to a lack of resources for safeguarding such heritage,

Being aware of the universal will and the common concern to safeguard the intangible cultural heritage of humanity,

Recognizing that communities, in particular indigenous communities, groups and, in some cases, individuals, play an important role in the production, safeguarding, maintenance and re-creation of the intangible cultural heritage, thus helping to enrich cultural diversity and human creativity,

Noting the far-reaching impact of the activities of UNESCO in establishing normative instruments for the protection of the cultural heritage, in particular the Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage of 1972,

Noting further that no binding multilateral instrument as yet exists for the safeguarding of the intangible cultural heritage,

Considering that existing international agreements, recommendations and resolutions concerning the cultural and natural heritage need to be effectively enriched and supplemented by means of new provisions relating to the intangible cultural heritage,

Considering the need to build greater awareness, especially among the younger generations, of the importance of the intangible cultural heritage and of its safeguarding,

Considering that the international community should contribute, together with the States Parties to this Convention, to the safeguarding of such heritage in a spirit of cooperation and mutual assistance,

Recalling UNESCO's programmes relating to the intangible cultural heritage, in particular the Proclamation of Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity,

Considering the invaluable role of the intangible cultural heritage as a factor in bringing human beings closer together and ensuring exchange and understanding among them,

Adopts this Convention on this seventeenth day of October 2003.

I. General provisions

Article 1 – Purposes of the Convention

The purposes of this Convention are:

- (a) to safeguard the intangible cultural heritage;
- (b) to ensure respect for the intangible cultural heritage of the communities, groups and individuals concerned;
- (c) to raise awareness at the local, national and international levels of the importance of the intangible cultural heritage, and of ensuring mutual appreciation thereof;
- (d) to provide for international cooperation and assistance.

Article 2 – Definitions

For the purposes of this Convention,

1. The “intangible cultural heritage” means the practices, representations, expressions, knowledge, skills – as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith – that communities, groups and, in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage. This intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature and their history, and provides them with a sense of identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity. For the purposes of this Convention, consideration will be given solely to such intangible cultural heritage as is compatible with existing international human rights instruments, as well as with the requirements of mutual respect among communities, groups and individuals, and of sustainable development.

2. The “intangible cultural heritage”, as defined in paragraph 1 above, is manifested *inter alia* in the following domains:

- (a) oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage;
- (b) performing arts;
- (c) social practices, rituals and festive events;
- (d) knowledge and practices concerning nature and the universe;
- (e) traditional craftsmanship.

3. “Safeguarding” means measures aimed at ensuring the viability of the intangible cultural heritage, including the identification, documentation, research, preservation, protection, promotion, enhancement, transmission, particularly through formal and non-formal education, as well as the revitalization of the various aspects of such heritage.

4. “States Parties” means States which are bound by this Convention and among which this Convention is in force.

5. This Convention applies *mutatis mutandis* to the territories referred to in Article 33 which become Parties to this Convention in accordance with the conditions set out in that Article. To that extent the expression “States Parties” also refers to such territories.

Article 3 – Relationship to other international instruments

Nothing in this Convention may be interpreted as:

- (a) altering the status or diminishing the level of protection under the 1972 Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage of World Heritage properties with which an item of the intangible cultural heritage is directly associated; or
- (b) affecting the rights and obligations of States Parties deriving from any international instrument relating to intellectual property rights or to the use of biological and ecological resources to which they are parties.

II. Organs of the Convention

Article 4 – General Assembly of the States Parties

1. A General Assembly of the States Parties is hereby established, hereinafter referred to as “the General Assembly”. The General Assembly is the sovereign body of this Convention.
2. The General Assembly shall meet in ordinary session every two years. It may meet in extraordinary session if it so decides or at the request either of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage or of at least one-third of the States Parties.
3. The General Assembly shall adopt its own Rules of Procedure.

Article 5 – Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage

1. An Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, hereinafter referred to as “the Committee”, is hereby established within UNESCO. It shall be composed of representatives of 18 States Parties, elected by the States Parties meeting in General Assembly, once this Convention enters into force in accordance with Article 34.
2. The number of States Members of the Committee shall be increased to 24 once the number of the States Parties to the Convention reaches 50.

Article 6 – Election and terms of office of States Members of the Committee

1. The election of States Members of the Committee shall obey the principles of equitable geographical representation and rotation.
2. States Members of the Committee shall be elected for a term of four years by States Parties to the Convention meeting in General Assembly.
3. However, the term of office of half of the States Members of the Committee elected at the first election is limited to two years. These States shall be chosen by lot at the first election.
4. Every two years, the General Assembly shall renew half of the States Members of the Committee.
5. It shall also elect as many States Members of the Committee as required to fill vacancies.
6. A State Member of the Committee may not be elected for two consecutive terms.
7. States Members of the Committee shall choose as their representatives persons who are qualified in the various fields of the intangible cultural heritage.

Article 7 – Functions of the Committee

Without prejudice to other prerogatives granted to it by this Convention, the functions of the Committee shall be to:

- (a) promote the objectives of the Convention, and to encourage and monitor the implementation thereof;
- (b) provide guidance on best practices and make recommendations on measures for the safeguarding of the intangible cultural heritage;
- (c) prepare and submit to the General Assembly for approval a draft plan for the use of the resources of the Fund, in accordance with Article 25;
- (d) seek means of increasing its resources, and to take the necessary measures to this end, in accordance with Article 25;
- (e) prepare and submit to the General Assembly for approval operational directives for the implementation of this Convention;
- (f) examine, in accordance with Article 29, the reports submitted by States Parties, and to summarize them for the General Assembly;
- (g) examine requests submitted by States Parties, and to decide thereon, in accordance with objective selection criteria to be established by the Committee and approved by the General Assembly for:

- (i) inscription on the lists and proposals mentioned under Articles 16, 17 and 18;
- (ii) the granting of international assistance in accordance with Article 22.

Article 8 – Working methods of the Committee

1. The Committee shall be answerable to the General Assembly. It shall report to it on all its activities and decisions.
2. The Committee shall adopt its own Rules of Procedure by a two-thirds majority of its Members.
3. The Committee may establish, on a temporary basis, whatever ad hoc consultative bodies it deems necessary to carry out its task.
4. The Committee may invite to its meetings any public or private bodies, as well as private persons, with recognized competence in the various fields of the intangible cultural heritage, in order to consult them on specific matters.

Article 9 – Accreditation of advisory organizations

1. The Committee shall propose to the General Assembly the accreditation of non-governmental organizations with recognized competence in the field of the intangible cultural heritage to act in an advisory capacity to the Committee.
2. The Committee shall also propose to the General Assembly the criteria for and modalities of such accreditation.

Article 10 – The Secretariat

1. The Committee shall be assisted by the UNESCO Secretariat.
2. The Secretariat shall prepare the documentation of the General Assembly and of the Committee, as well as the draft agenda of their meetings, and shall ensure the implementation of their decisions.

III. Safeguarding of the intangible cultural heritage at the national level

Article 11 – Role of States Parties

Each State Party shall:

- (a) take the necessary measures to ensure the safeguarding of the intangible cultural heritage present in its territory;
- (b) among the safeguarding measures referred to in Article 2, paragraph 3, identify and define the various elements of the intangible cultural heritage present in its territory, with the participation of communities, groups and relevant non-governmental organizations.

Article 12 – Inventories

1. To ensure identification with a view to safeguarding, each State Party shall draw up, in a manner geared to its own situation, one or more inventories of the intangible cultural heritage present in its territory. These inventories shall be regularly updated.
2. When each State Party periodically submits its report to the Committee, in accordance with Article 29, it shall provide relevant information on such inventories.

Article 13 – Other measures for safeguarding

To ensure the safeguarding, development and promotion of the intangible cultural heritage present in its territory, each State Party shall endeavour to:

- (a) adopt a general policy aimed at promoting the function of the intangible cultural heritage in society, and at integrating the safeguarding of such heritage into planning programmes;
- (b) designate or establish one or more competent bodies for the safeguarding of the intangible cultural heritage present in its territory;
- (c) foster scientific, technical and artistic studies, as well as research methodologies, with a view to effective safeguarding of the intangible cultural heritage, in particular the intangible cultural heritage in danger;
- (d) adopt appropriate legal, technical, administrative and financial measures aimed at:
 - (i) fostering the creation or strengthening of institutions for training in the management of the intangible cultural heritage and the transmission of such heritage through forums and spaces intended for the performance or expression thereof;
 - (ii) ensuring access to the intangible cultural heritage while respecting customary practices governing access to specific aspects of such heritage;
 - (iii) establishing documentation institutions for the intangible cultural heritage and facilitating access to them.

Article 14 – Education, awareness-raising and capacity-building

Each State Party shall endeavour, by all appropriate means, to:

- (a) ensure recognition of, respect for, and enhancement of the intangible cultural heritage in society, in particular through:
 - (i) educational, awareness-raising and information programmes, aimed at the general public, in particular young people;
 - (ii) specific educational and training programmes within the communities and groups concerned;

- (iii) capacity-building activities for the safeguarding of the intangible cultural heritage, in particular management and scientific research; and
- (iv) non-formal means of transmitting knowledge;
- (b) keep the public informed of the dangers threatening such heritage, and of the activities carried out in pursuance of this Convention;
- (c) promote education for the protection of natural spaces and places of memory whose existence is necessary for expressing the intangible cultural heritage.

Article 15 – Participation of communities, groups and individuals

Within the framework of its safeguarding activities of the intangible cultural heritage, each State Party shall endeavour to ensure the widest possible participation of communities, groups and, where appropriate, individuals that create, maintain and transmit such heritage, and to involve them actively in its management.

IV. Safeguarding of the intangible cultural heritage at the international level

Article 16 – Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity

1. In order to ensure better visibility of the intangible cultural heritage and awareness of its significance, and to encourage dialogue which respects cultural diversity, the Committee, upon the proposal of the States Parties concerned, shall establish, keep up to date and publish a Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.
2. The Committee shall draw up and submit to the General Assembly for approval the criteria for the establishment, updating and publication of this Representative List.

Article 17 – List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding

1. With a view to taking appropriate safeguarding measures, the Committee shall establish, keep up to date and publish a List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding, and shall inscribe such heritage on the List at the request of the State Party concerned.
2. The Committee shall draw up and submit to the General Assembly for approval the criteria for the establishment, updating and publication of this List.
3. In cases of extreme urgency – the objective criteria of which shall be approved by the General Assembly upon the proposal of the Committee – the Committee may inscribe an item of the heritage concerned on the List mentioned in paragraph 1, in consultation with the State Party concerned.

Article 18 – Programmes, projects and activities for the safeguarding of the intangible cultural heritage

1. On the basis of proposals submitted by States Parties, and in accordance with criteria to be defined by the Committee and approved by the General Assembly, the Committee shall periodically select and promote national, subregional and regional programmes, projects and

activities for the safeguarding of the heritage which it considers best reflect the principles and objectives of this Convention, taking into account the special needs of developing countries.

2. To this end, it shall receive, examine and approve requests for international assistance from States Parties for the preparation of such proposals.

3. The Committee shall accompany the implementation of such projects, programmes and activities by disseminating best practices using means to be determined by it.

V. International cooperation and assistance

Article 19 – Cooperation

1. For the purposes of this Convention, international cooperation includes, inter alia, the exchange of information and experience, joint initiatives, and the establishment of a mechanism of assistance to States Parties in their efforts to safeguard the intangible cultural heritage.

2. Without prejudice to the provisions of their national legislation and customary law and practices, the States Parties recognize that the safeguarding of intangible cultural heritage is of general interest to humanity, and to that end undertake to cooperate at the bilateral, subregional, regional and international levels.

Article 20 – Purposes of international assistance

International assistance may be granted for the following purposes:

- (a) the safeguarding of the heritage inscribed on the List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding;
- (b) the preparation of inventories in the sense of Articles 11 and 12;
- (c) support for programmes, projects and activities carried out at the national, subregional and regional levels aimed at the safeguarding of the intangible cultural heritage;
- (d) any other purpose the Committee may deem necessary.

Article 21 – Forms of international assistance

The assistance granted by the Committee to a State Party shall be governed by the operational directives foreseen in Article 7 and by the agreement referred to in Article 24, and may take the following forms:

- (a) studies concerning various aspects of safeguarding;
- (b) the provision of experts and practitioners;
- (c) the training of all necessary staff;
- (d) the elaboration of standard-setting and other measures;

- (e) the creation and operation of infrastructures;
- (f) the supply of equipment and know-how;
- (g) other forms of financial and technical assistance, including, where appropriate, the granting of low-interest loans and donations.

Article 22 – Conditions governing international assistance

1. The Committee shall establish the procedure for examining requests for international assistance, and shall specify what information shall be included in the requests, such as the measures envisaged and the interventions required, together with an assessment of their cost.
2. In emergencies, requests for assistance shall be examined by the Committee as a matter of priority.
3. In order to reach a decision, the Committee shall undertake such studies and consultations as it deems necessary.

Article 23 – Requests for international assistance

1. Each State Party may submit to the Committee a request for international assistance for the safeguarding of the intangible cultural heritage present in its territory.
2. Such a request may also be jointly submitted by two or more States Parties.
3. The request shall include the information stipulated in Article 22, paragraph 1, together with the necessary documentation.

Article 24 – Role of beneficiary States Parties

1. In conformity with the provisions of this Convention, the international assistance granted shall be regulated by means of an agreement between the beneficiary State Party and the Committee.
2. As a general rule, the beneficiary State Party shall, within the limits of its resources, share the cost of the safeguarding measures for which international assistance is provided.
3. The beneficiary State Party shall submit to the Committee a report on the use made of the assistance provided for the safeguarding of the intangible cultural heritage.

VI. Intangible Cultural Heritage Fund

Article 25 – Nature and resources of the Fund

1. A “Fund for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage”, hereinafter referred to as “the Fund”, is hereby established.
2. The Fund shall consist of funds-in-trust established in accordance with the Financial Regulations of UNESCO.

3. The resources of the Fund shall consist of:
 - (a) contributions made by States Parties;
 - (b) funds appropriated for this purpose by the General Conference of UNESCO;
 - (c) contributions, gifts or bequests which may be made by:
 - (i) other States;
 - (ii) organizations and programmes of the United Nations system, particularly the United Nations Development Programme, as well as other international organizations;
 - (iii) public or private bodies or individuals;
 - (d) any interest due on the resources of the Fund;
 - (e) funds raised through collections, and receipts from events organized for the benefit of the Fund;
 - (f) any other resources authorized by the Fund's regulations, to be drawn up by the Committee.
4. The use of resources by the Committee shall be decided on the basis of guidelines laid down by the General Assembly.
5. The Committee may accept contributions and other forms of assistance for general and specific purposes relating to specific projects, provided that those projects have been approved by the Committee.
6. No political, economic or other conditions which are incompatible with the objectives of this Convention may be attached to contributions made to the Fund.

Article 26 – Contributions of States Parties to the Fund

1. Without prejudice to any supplementary voluntary contribution, the States Parties to this Convention undertake to pay into the Fund, at least every two years, a contribution, the amount of which, in the form of a uniform percentage applicable to all States, shall be determined by the General Assembly. This decision of the General Assembly shall be taken by a majority of the States Parties present and voting which have not made the declaration referred to in paragraph 2 of this Article. In no case shall the contribution of the State Party exceed 1% of its contribution to the regular budget of UNESCO.
2. However, each State referred to in Article 32 or in Article 33 of this Convention may declare, at the time of the deposit of its instruments of ratification, acceptance, approval or accession, that it shall not be bound by the provisions of paragraph 1 of this Article.
3. A State Party to this Convention which has made the declaration referred to in paragraph 2 of this Article shall endeavour to withdraw the said declaration by notifying the Director-General of UNESCO. However, the withdrawal of the declaration shall not take

effect in regard to the contribution due by the State until the date on which the subsequent session of the General Assembly opens.

4. In order to enable the Committee to plan its operations effectively, the contributions of States Parties to this Convention which have made the declaration referred to in paragraph 2 of this Article shall be paid on a regular basis, at least every two years, and should be as close as possible to the contributions they would have owed if they had been bound by the provisions of paragraph 1 of this Article.

5. Any State Party to this Convention which is in arrears with the payment of its compulsory or voluntary contribution for the current year and the calendar year immediately preceding it shall not be eligible as a Member of the Committee; this provision shall not apply to the first election. The term of office of any such State which is already a Member of the Committee shall come to an end at the time of the elections provided for in Article 6 of this Convention.

Article 27 – Voluntary supplementary contributions to the Fund

States Parties wishing to provide voluntary contributions in addition to those foreseen under Article 26 shall inform the Committee, as soon as possible, so as to enable it to plan its operations accordingly.

Article 28 – International fund-raising campaigns

The States Parties shall, insofar as is possible, lend their support to international fund-raising campaigns organized for the benefit of the Fund under the auspices of UNESCO.

VII. Reports

Article 29 – Reports by the States Parties

The States Parties shall submit to the Committee, observing the forms and periodicity to be defined by the Committee, reports on the legislative, regulatory and other measures taken for the implementation of this Convention.

Article 30 – Reports by the Committee

1. On the basis of its activities and the reports by States Parties referred to in Article 29, the Committee shall submit a report to the General Assembly at each of its sessions.
2. The report shall be brought to the attention of the General Conference of UNESCO.

VIII. Transitional clause

Article 31 – Relationship to the Proclamation of Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity

1. The Committee shall incorporate in the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity the items proclaimed “Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity” before the entry into force of this Convention.

2. The incorporation of these items in the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity shall in no way prejudice the criteria for future inscriptions decided upon in accordance with Article 16, paragraph 2.
3. No further Proclamation will be made after the entry into force of this Convention.

IX. Final clauses

Article 32 – Ratification, acceptance or approval

1. This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by States Members of UNESCO in accordance with their respective constitutional procedures.
2. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Director-General of UNESCO.

Article 33 – Accession

1. This Convention shall be open to accession by all States not Members of UNESCO that are invited by the General Conference of UNESCO to accede to it.
2. This Convention shall also be open to accession by territories which enjoy full internal self-government recognized as such by the United Nations, but have not attained full independence in accordance with General Assembly resolution 1514 (XV), and which have competence over the matters governed by this Convention, including the competence to enter into treaties in respect of such matters.
3. The instrument of accession shall be deposited with the Director-General of UNESCO.

Article 34 – Entry into force

This Convention shall enter into force three months after the date of the deposit of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, but only with respect to those States that have deposited their respective instruments of ratification, acceptance, approval, or accession on or before that date. It shall enter into force with respect to any other State Party three months after the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 35 – Federal or non-unitary constitutional systems

The following provisions shall apply to States Parties which have a federal or non-unitary constitutional system:

- (a) with regard to the provisions of this Convention, the implementation of which comes under the legal jurisdiction of the federal or central legislative power, the obligations of the federal or central government shall be the same as for those States Parties which are not federal States;
- (b) with regard to the provisions of this Convention, the implementation of which comes under the jurisdiction of individual constituent States, countries, provinces or cantons which are not obliged by the constitutional system of the federation to

take legislative measures, the federal government shall inform the competent authorities of such States, countries, provinces or cantons of the said provisions, with its recommendation for their adoption.

Article 36 – Denunciation

1. Each State Party may denounce this Convention.
2. The denunciation shall be notified by an instrument in writing, deposited with the Director-General of UNESCO.
3. The denunciation shall take effect twelve months after the receipt of the instrument of denunciation. It shall in no way affect the financial obligations of the denouncing State Party until the date on which the withdrawal takes effect.

Article 37 – Depositary functions

The Director-General of UNESCO, as the Depositary of this Convention, shall inform the States Members of the Organization, the States not Members of the Organization referred to in Article 33, as well as the United Nations, of the deposit of all the instruments of ratification, acceptance, approval or accession provided for in Articles 32 and 33, and of the denunciations provided for in Article 36.

Article 38 – Amendments

1. A State Party may, by written communication addressed to the Director-General, propose amendments to this Convention. The Director-General shall circulate such communication to all States Parties. If, within six months from the date of the circulation of the communication, not less than one half of the States Parties reply favourably to the request, the Director-General shall present such proposal to the next session of the General Assembly for discussion and possible adoption.
2. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of States Parties present and voting.
3. Once adopted, amendments to this Convention shall be submitted for ratification, acceptance, approval or accession to the States Parties.
4. Amendments shall enter into force, but solely with respect to the States Parties that have ratified, accepted, approved or acceded to them, three months after the deposit of the instruments referred to in paragraph 3 of this Article by two-thirds of the States Parties. Thereafter, for each State Party that ratifies, accepts, approves or accedes to an amendment, the said amendment shall enter into force three months after the date of deposit by that State Party of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
5. The procedure set out in paragraphs 3 and 4 shall not apply to amendments to Article 5 concerning the number of States Members of the Committee. These amendments shall enter into force at the time they are adopted.

6. A State which becomes a Party to this Convention after the entry into force of amendments in conformity with paragraph 4 of this Article shall, failing an expression of different intention, be considered:

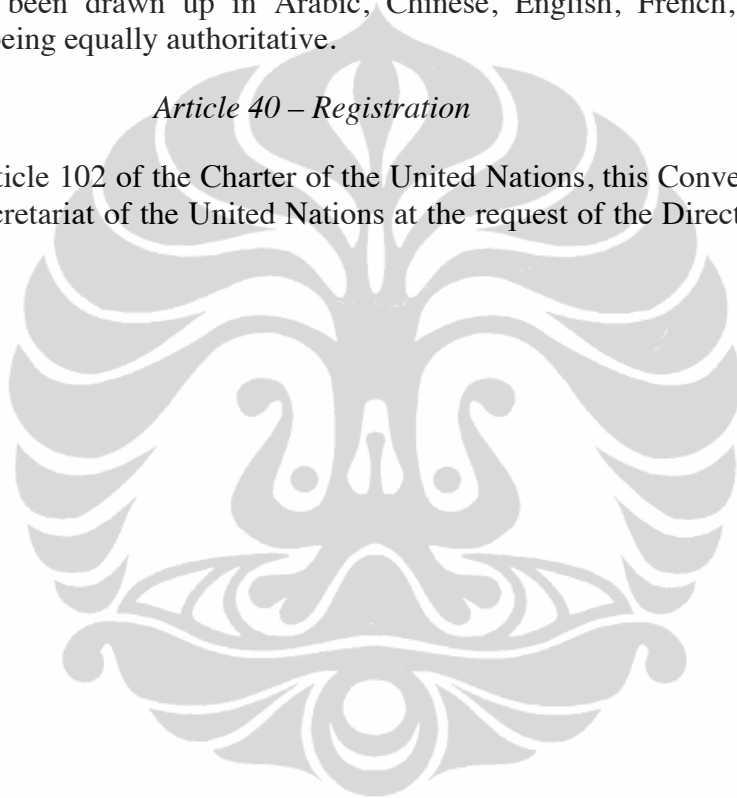
- (a) as a Party to this Convention as so amended; and
- (b) as a Party to the unamended Convention in relation to any State Party not bound by the amendments.

Article 39 – Authoritative texts

This Convention has been drawn up in Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish, the six texts being equally authoritative.

Article 40 – Registration

In conformity with Article 102 of the Charter of the United Nations, this Convention shall be registered with the Secretariat of the United Nations at the request of the Director-General of UNESCO.





United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Intangible
Cultural
Heritage

CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF
THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

INTERGOVERNMENTAL COMMITTEE FOR THE
SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

Fifth session
Nairobi, Kenya
November 2010

NOMINATION FILE NO. 00393
FOR INSCRIPTION ON THE REPRESENTATIVE LIST
OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN 2010

A. STATE(S) PARTY(IES)

For multi-national nominations, States Parties should be listed in the order on which they have mutually agreed.

Indonesia

B. NAME OF THE ELEMENT

B.1. Name of the element in English or French

This is the official name of the element that will appear in published material about the Representative List. It should be concise. Please do not exceed 200 characters, including spaces and punctuation. The name should be transcribed in Latin Unicode characters (Basic Latin, Latin-1 Supplement, Latin Extended-A or Latin Extended Additional).

Indonesian Angklung

B.2. Name of the element in the language and script of the community concerned, if applicable

This is the official name of the element in the vernacular language corresponding to the official name in English or French (point B.1.). It should be concise. Please do not exceed 200 characters in Unicode (Latin or others), including spaces and punctuation.

Angklung Indonesia

B.3. Other name(s) of the element, if any

In addition to the official name(s) of the element (B.1.) please mention alternate name(s), if any, by which the element is known, in Unicode characters (Latin or others).

Traditional Angklung (Pentatonic – Slendro Scale: Angklung Kanekes, Angklung Dogdog Lojor, Angklung Gabrag, Angklung Badeng, Angklung Bunko, Angklung Badud, Angklung Buncis, Calung.

Modern Angklung (Diatonic/Chromatic): Angklung Padaeng. Slendro, Pelog and Madenda Scale Angklungs.

C. CHARACTERISTIC OF THE ELEMENT

C.1. Identification of the communities, groups or, if applicable, individuals concerned

According to the 2003 Convention, intangible heritage can only be identified with reference to communities, groups or individuals that recognize it as part of their cultural heritage. Thus it is important to identify clearly one or several communities, groups or, if applicable, individuals concerned with the nominated element. The information provided should allow the Committee to identify the communities, groups or individuals concerned with an element, and should be mutually coherent with the information in sections 1 to 5 below.

The Indonesian Angklung community consists of: angklung craftspersons, angklung trainers, angklung musicians, school and university administrators, teachers and students, and government officials whose service is related to angklung.

The angklung community is spread especially in West Java and Banten Provinces, and also in the provinces of Central Java, DI Yogyakarta, East Java, Bali, Eastern Lesser Sunda Islands (NTT), Western Lesser Sunda Islands (NTB), DKI Jakarta, Nangroe Aceh Darussalam, North Sumatra, South Sumatra, Riau and Riau Islands (14 Provinces). Research was conducted among the angklung communities in the districts of Bandung, Bogor, Sukabumi and Sumedang in West Java Province, Rangkas Bitung in Banten province and DKI Jakarta (see appended map). Information regarding angklung in other areas was obtained from cultural experts and from books and papers.

C.2. Geographic location and range of the element and location of the communities, groups or, if applicable, individuals concerned

This section should identify the range of distribution of the element, indicating if possible the geographic locations in which it is centred. If related elements are practiced in neighbouring areas, please so indicate.

West Java Province, particularly in the districts of Bandung, Bogor, Sukabumi and Sumedang, Rangkasbitung in Banten Province. Found also in Central Java, DI Yogyakarta, East Java, Bali, NTT, NTB, DKI Jakarta, Nangroe Aceh Darussalam, North Sumatra, South Sumatra, Riau and Riau Islands Provinces.

Table 1.0. Angklung Culture in the 33 Provinces of Indonesia

Province	Whether traditional angklung or similar culture exists?	Whether Modern/ Padaeng angklung culture exists?	Whether angklungs are produced in the province	Agree with nominaton of Indonesian Angklung to UNESCO	Name Respondent
----------	---	--	--	---	-----------------

NAD (Aceh)	No	Yes	No	Agree	Cut Putri Alyanur, Wesli
N. Sumatra	No	Yes	No	Agree	Evy J. Nandenk
W. Sumatra	No	No	No	Agree	Yusraini
Bengkulu	No	No	No	Agree	Ruli RM
Riau	No	Yes	Yes	Agree	Hendry Nazir
Riau Islands	No	Yes	No	Agree	Anwar, Vita Mutiara
Jambi	No	No	No	Agree	Pamin
S. Sumatra	Yes	Yes	No	Agree	Adi Surairrah
Lampung	No	No	No	Agree	Shirley Foliza
Bangka/Bel	No	No	No	Agree	Ratno
DKI Jakarta	No	Yes	No	Agree	Edward
West Javat *	Yes	Yes	Yes	Agree	Windi Rusdiana
Banten *	Yes	No	Yes	Agree	Taufik Saleh
Central Java	Yes	No	Yes	Agree	Dwi Puji Lestari
DI Yogyakarta	Yes	Yes	No	Agree	Ngatiman
East Java	Yes	Yes	Yes	Agree	Munarno
W.Kalimantan	No	No	No	Agree	Suyarso
C.Kalimantan	No	No	No	Agree	Sumade
S.Kalimantan	No	No	No	Agree	Kamin
E. Kalimantan	No	No	No	Agree	Usdek
Bali	Yes	No	Yes	Agree	I Wayan Suarka
NTB	Yes	Yes	No	Agree	Sufrin
NTT	No	Yes	Yes	Agree	Feri
W. Sulawesi	No	No	No	Agree	Herman
N. Sulawesi	No	No	No	Agree	Ritna
C. Sulawesi	No	No	No	Agree	Mohamad Khamil
S. Sulawesi	No	No	No	Agree	Hasan
SE.Sulawesi	No	No	No	Agree	Ike
Gorontalo	No	No	No	Agree	Latif Hakili
Maluku	No	No	No	Agree	Samsudin
N. Maluku.	No	No	No	Agree	Hendrick
W. Papua	No	No	No	Agree	Andreas W.

Papua	No	No	No	Agree	Marcel Siante
Total	8/33 Yes	11/33 Yes	7/33 Yes	33/33 Agree	35 Respondents

+ This data was confirmed by children from 33 Provinces involved in angklung training of the Gita Bahana Nusantara Orchestra in 1-17/08/09 in Jakarta. Angklung culture has been known for a long time until now in Banten and West Java Provinces. Lately Saung Aungklung Udjo has been sending angklung to many provinces in Indonesia, and to 49 countries in the world.

See the maps of Indonesia and Banten/ West Java appended.

C.3. Domain(s) represented by the element

Identify concisely the domain(s) of intangible cultural heritage manifested by the element, which might include one or more of the domains identified in Article 2.2 of the Convention. (This information will be used primarily for visibility, if the element is inscribed.)

(a) Oral Tradition and Expression -- performed and transmitted by oral/informal system using hand signals

(b) Performing Arts -- frequently performed for entertainment at public functions

(c) Customs, rituals and celebrations -- performed as part of traditional rituals and celebrations eg. rice planting and harvest, circumcision.

(d) Knowledge and practices based upon nature and the universe -- much symbolism attached to forms of angklung; Bamboo harvesting methods are sustainable and environment friendly. Played to invoke natural forces for successful harvests

(e) Skill in traditional handicrafts -- making and tuning angklung is a traditional handcraft requiring considerable skill which takes years to master.

D. BRIEF SUMMARY OF THE ELEMENT

The brief description of the element will be particularly helpful in allowing the Committee to know at a glance what element is being proposed for inscription, and, in the event of inscription, will be used for purposes of visibility. It should be a summary of the description provided in point 1 below but is not an introduction to that longer description.

Angklung is an original, simple bamboo musical instrument of Indonesia known at least since the 18th Century. Angklung consists of 2-4 tubes of special black bamboo suspended in a white bamboo frame bound with rattan cords. The tubes are carefully whittled and cut by a master craftsman to sound certain notes when the bamboo frame is shaken or tapped. Each angklung produces a single note or chord. Thus many players each holding a single instrument must collaborate together to play melodies. This develops teamwork, mutual respect (learning to live together), discipline, and artistic sense, even among players from different communities or nationalities. Traditional angklungs use pentatonic scale, while modern/Padaeng angklungs use diatonic scale. Angklung is closely related with traditional customs, arts and cultural identity in West Java and Banten Provinces and elsewhere. Many philosophical values are associated with the form of the instruments. Traditional angklungs are played during ceremonies, eg. rice planting time with the hope of a bountiful harvest, harvest time, circumcision, etc. Traditional angklung culture is transmitted from parents to children, or through non-formal education. Now modern Angklung Padaeng is taught in educational institutions from kindergarten to university level, and is proven to have a positive effect.

1. IDENTIFICATION AND DEFINITION OF THE ELEMENT (CF. CRITERION R.1)

This is the key section of the nomination to satisfy criterion R.1: “The element constitutes intangible cultural heritage as defined in Article 2 of the Convention”. A clear and complete explanation is essential to demonstrate that the nominated element meets the Convention’s definition of intangible heritage. This section should address all the significant features of the element as it exists at present, and should include:

- a. an explanation of its social and cultural functions and meanings today, within and for its community,*
- b. the characteristics of the bearers and practitioners of the element,*
- c. any specific roles or categories of persons with special responsibilities towards the element,*
- d. the current modes of transmission of the knowledge and skills related to the element.*

The Committee should receive sufficient information to determine:

- a. that the element is among the “practices, representations, expressions, knowledge, skills — as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith —”;*
- b. “that communities, groups and, in some cases, individuals recognize [it] as part of their cultural heritage”;*
- c. that it is being “transmitted from generation to generation, [and] is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature and their history”;*
- d. that it provides communities and groups involved with “a sense of identity and continuity”; and*
- e. that it is not incompatible with “existing international human rights instruments as well as with the requirements of mutual respect among communities, groups and individuals, and of sustainable development”.*

Overly technical descriptions should be avoided and submitting States should keep in mind that this section must explain the element to readers who have no prior knowledge or direct experience of it. Nomination files need not address in detail the history of the element, or its origin or antiquity.

Angklung is a simple, original bamboo musical instrument of Indonesia documented since at least 1704 (Quote Van Riebeeck, *Priangan*). The word Angklung comes from the Sudanese *angkleung-angkleungan*. *Angka* means pitch/tone, and *lung* means broken. 2-4 bamboo resonating tubes carved and tuned carefully are suspended in a rectangular partitioned frame made of white bamboo tightly bound with rattan cords. Lugs on the bottom of the tubes move in rectangular shaped slots in the bamboo base tube of the frame. The resonator tubes sound when the frame is shaken or tapped. The 2 or 3 resonating tubes are tuned to the same note in different octaves. There are also 3 and 4 tube angklungs with tubes tuned to the notes of a chord. Making and tuning the resonator tubes is a great skill taking years to master. Udjo Ngalagena, founder of Saung Angklung Udjo, referred to the sound of angklung as ‘the music of nature.

Social and cultural functions of angklung identified in C (iii) (a)-(e) above. Characteristics of bearers and practitioners identified in C (i) above.

The form of the angklung itself contains symbolism and philosophical values. The large and small tubes symbolize that the great, strong and rich must always protect and shelter the small, weak and poor. (Obby A.R. Wiramihardja, Interview, Jakarta, 01/08/09). Each angklung has at least 2 resonating tubes, symbolizing that that human beings should never isolate themselves or be egoistic, but rather always live within a society. The tubes are arrayed from small to large. This symbolizes that every day, human beings must strive to be better than yesterday, and that some people are created small and some big, but there is nothing to be regretted, as it is all due to fate. The angklung will sound nicely if the large and small tubes move at the same time, within their limits. This symbolizes that if everyone is aware of his or her rights and responsibilities, life will be harmonious. The tubes will sound if the lugs at their bottom ends touch the base tube of the frame. Similarly, one may become great, speak and be of good character if one does not

forget one's identity and culture, while if one forgets then one cannot become anything. The three tubes of an angklung symbolize *tritangtu*, (in Bali *trihitakarana*) -- to perform good action with mind, body and words. The angklung resonating tubes are arranged neatly in their respective places. Similarly, we should remain neatly in our proper places, and not overtake others. (Satria, *loc. cit*)

The special feature of Angklung is that each player usually holds and plays only one angklung producing a single note (or chord). Thus to play melodies, many players must collaborate. (Obby, *loc.cit*). All respondents confirmed that this develops cooperation, dialogue and friendship among players, including those from different nations Angklung is so simple that even a kindergarten student or one with no experience can play it, as admitted by Syahla (6 yrs.) and Azkar (6 yrs.), students at Pelita Nustantara Kindergarten in Bandung (Interview 24/07/09).

In 1938, Daeng Soetigna (1908-1984) developed diatonic/chromatic angklungs which could play all kinds of music and were later known as Angklung Padaeng. This expanded the world of angklung. Daeng said that angklung has five qualities: cheap, easy, en masse, educational and attractive Angklung was recognized as a educational tool by Decree of the Minster of Education and Culture No. 082/ 1968. Angklung has frequently been used for reception of State guests and diplomats at international conferences. Its woody, sweet and natural sound and its ability to play the songs of all nations have often created friendly conducive atmospheres (Obby, *loc. cit.*). Guests are themselves given angklungs and a quick lesson, and then play songs together. Some important meetings positively influenced by angklung music include The Linggarjati Conference between the Republic of Indonesia and the Dutch Colonial Government in 1946; The First Asia-Africa Conference in 1955, and the 25th Anniversary of the AA Conference in 1980; Several Indonesian Embassies, eg. Geneva, and Paris, have angklung groups, and hold performances, inviting foreign diplomats to play angklung together (Interview, Bandung 07/07/09).

75 of 76 respondents said that angklung is a part of their cultural heritage and identity, as confirmed by literature and experts' opinions (Table 1.0 above).

2. Traditional angklung culture is transmitted from one generation to another by children learning from their parents (Interview, Rangkasbitung, 25/07/09), or by students learning in *sanggars* or informal arts workshops (Interviews, Bogor, 02/08/09, Surade, 03/08/09). Daeng Soetigna, Udjo Ngalagena, Obby Wiramihardja, Hardiman, and other prominent angklung figures learned about angklung informally
3. After Angklung Padaeng was developed, angklung culture is transmitted through extracurricular activities at all levels of schools and universities. Angklung education retains its oral pattern. All 76 respondents felt that children like to learn angklung. Among the respondents, 22 students (2 Kindergarten, 4 Elementary, 5 Junior High, 6 Senior High and 5 University students admitted they liked learning angklung. This was confirmed by 9 headmasters/headmistresses and 9 angklung music trainers.

66 of 76 respondents replied that angklung culture was related to cultural identity and safeguarding of culture in their areas. Angklung culture is clearly related to Sudanese cultural identity (West Java and Banten).

The culture of Angklung Indonesia does not contravene international human rights instruments. Daeng Soetigna aspired to create world peace through the spreading of angklung

Angklung uses natural materials. Bamboo should be harvested only during the 2 weeks in a year when *cicadas* sound. Bamboo is cut at least 3 segments above the ground, so the root will continue to propagate. This is conducive to conservation of the environment and sustainable development. Angklung creates employment for craftspersons and teachers.

2. CONTRIBUTION TO ENSURING VISIBILITY AND AWARENESS AND TO ENCOURAGING DIALOGUE (CF. CRITERION R.2)

The nomination should demonstrate (Criterion R.2) that "Inscription of the element will contribute to ensuring visibility and awareness of the significance of the intangible cultural heritage and to encouraging dialogue, thus reflecting cultural diversity worldwide and testifying to human creativity".

Please explain how the element's inscription on the Representative List will contribute to ensuring visibility of the intangible cultural heritage and will raise awareness at the local, national and international levels of its importance. This section need not address how inscription will bring greater visibility to the element, but how its inscription will contribute to the visibility of intangible cultural heritage more broadly. Explain how inscription will promote respect for cultural diversity and human creativity, and will promote mutual respect among communities, groups and individuals.

Not to exceed 1,000 words.

The results of 76 interviews conducted and field observation indicate that traditional angklung culture is being maintained, but is in need of safeguarding efforts. All respondents have indicated that Angklung Padaeng is developing in its area of origin, and is even spreading to other areas such as NAD, North Sumatra, South Sumatra, Riau, Riau Islands, etc. (See Table 1.0 above). According to the data of Saung Angklung Udjo, Angklung Padaeng, has become known in 49 countries. (Satria, Interview, Bandung, 11/08/09).

63 of 76 respondents were of the opinion that inscription on the UNESCO Representative List would increase public awareness of angklung intangible cultural heritage. Those who did not reply to this question were mostly young children who could not be expected to understand the question. Many respondents added that if Indonesian Angklung were to be inscribed on the UNESCO Representative List, they themselves would become more active in their efforts to safeguard and develop angklung cultural heritage.

Inscription of Indonesian Angklung would clearly increase awareness regarding the cultural values of Indonesian Angklung as well as the importance of its safeguarding at local, national and international levels, such as has been the case with other elements of intangible cultural heritage inscribed by UNESCO. For example, coverage of angklung in printed and electronic media would certainly increase. Angklung communities and organizations would be motivated to become more active in their safeguarding efforts through various programmes such as performances, training, exhibitions, seminars, discussions, workshops etc. as described 4 a, b, dan c, below. For example, Satria Yanuar Akbar (27 yrs.) stated that Saung Angklung Udjo would become more active in its efforts to safeguard traditional angklung such as Angklung Buncis (Interview, Bandung, 07/08/09). The inscription would surely increase public awareness regarding the UNESCO Convention as well as regarding safeguarding of intangible cultural heritage in general terms.

Angklung culture promotes cultural diversity and cultural industry, as well as human creativity. Traditional angklung is being maintained, while modern angklung (Angklung Padaeng) is actually developing, even as far as overseas.

All 76 respondents said that in their experience, angklung was a vehicle for cultural dialog and exchange of ideas, and promoted mutual respect among those who play angklung. Indeed, angklung cannot be played without cooperation and mutual respect among the players. Especially, those who are involved in angklung training are able to feel the benefits. According to Daeng Soetigna, and confirmed by Obby A.R. Wiramihardja (Interview, 01/08/09), by Vita Mutiara and by 9 School Headmasters or Headmistresses and 9 angklung trainers, playing angklung together can develop good qualities among the players, especially among children. Some of these good qualities mentioned are as follows: cooperation (learning to live together), discipline, responsibility, concentration, development of imagination, development of memory, mutual respect, self-motivation, equal rights, sensitivity and refinement as well as artistic and musical feelings (Obby, *loc cit*). In Batam Island, Riau Islands, angklung orchestra is used for 'character building'. Angklung has also been used to treat victims of stroke, autistic children, those having brain disorders, and to give comfort to those suffering from terminal diseases.

(Seminar, Bandung, 11/08/09). This mutual respect and cooperation would be even further enhanced should Indonesian Angklung be inscribed by UNESCO.

Contribution of the Inscription of Indonesian Angklung to the Goals of the UNESCO List

(Articles 1 (a)-(d) of the Convention)

(a) safeguarding the intangible cultural heritage

The inscription would motivate all stakeholders (angklung community as well as academics, business and government parties) to become more active in safeguarding angklung intangible cultural heritage, because it would bring with it an obligation to carry on the safeguarding efforts mentioned in 4 (a), and to carry out the safeguarding measures described 4 (b), inspired by the commitments stated in 4 (c) below.

(b) to guarantee respect for the intangible cultural heritage and for the communities, groups and individuals concerned

The inscription would guarantee more respect for the communities, groups and craftspersons who still make and teach angklung. This is important, so that the younger generation may still be attracted to learn angklung culture.

c) to increase awareness on the local, national and international levels regarding the importance of intangible cultural heritage, and to guarantee mutual respect regarding the same.

On a local level, 63 of 76 respondents interviewed were of the opinion that the inscription would clearly increase visibility and awareness among the public as well as the media regarding the intangible cultural heritage of angklung as well as regarding the UNESCO intangible cultural heritage programme in general, such as has happened after the proclamations of Indonesian Wayang and Indonesian Kris and the inscription of Indonesian Batik by UNESCO. Visibility and awareness among the international community would clearly be enhanced by the inscription. Mutual respect would also be increased as all components of the angklung community would feel an increased obligation to mutual respect, cooperation and safeguarding angklung culture. Mutual respect and a resolve to cooperate together have been expressed in a Declaration signed by representatives of elements of Indonesian Angklung communities present at the Session for Verification of the Indonesian Angklung Nomination File in Bandung 11th August 2009. See copy of Declaration and translation annexed.

(d) to arrange for international collaboration and assistance

Some respondents felt that traditional angklung was decreasing or was even threatened. In the meantime, the culture of modern angklung or Angklung Padaeng was considered to be expanding. It is felt that cooperation is needed, both on a national level as well as with international parties, to carry out safeguarding efforts for Indonesian angklung, especially in the case of traditional angklungs. Inscription of angklung culture on the Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity by UNESCO would motivate all stakeholders in such cooperative efforts.

3. SAFEGUARDING MEASURES (CF. CRITERION R.3)

Items 3.a. to 3.c. request the elaboration of a coherent set of safeguarding measures as called for in Criterion R.3: "Safeguarding measures are elaborated that may protect and promote the element". Such measures should reflect the broadest possible participation of the communities, groups or, if applicable, individuals concerned, both in their formulation and in their implementation.

3.a. Current and recent efforts to safeguard the element

Please describe the current and recent efforts of the concerned communities, groups or, if applicable, individuals to ensure the viability of the element. Describe efforts of the concerned State(s) Party(ies) to safeguard the element, taking note of external or internal constraints, such as limited resources.

COORDINATING MINISTRY FOR PEOPLE'S WELFARE

Coordination between the Ministry and the angklung community.

DIRECTORATE GENERAL FOR CULTURAL VALUES, ARTS AND FILM, (with UNESCO JAKARTA office)

Involving the angklung community in a Symposium and Workshop on Inventory for Safeguarding Intangible Cultural Heritage (19 – 20/08/09).

CENTRE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT OF CULTURE

Formed a team to draft the Angklung nomination file.

WEST JAVA PROVINCE FORESTRY SERVICE

Collaborated with Saung Angklung Udjo in research on most appropriate types of bamboo, and promotion of tree planting including bamboo planting.

ANGKLUNG MUSIC SOCIETY (Est. 2001)

Conducting regular training for angklung teachers.

Organizing competitions for student angklung orchestras at all levels and for the public, to evaluate quality of the groups and increase public awareness.

Maintaining ongoing relations with government and NGOs to advance angklung culture.

SAUNG ANGKLUNG UDJO (Est. 1966)

1. **Maintenance:** conducting consistent, periodic activities of training, documentation, conservation, performance and production of angklung arts

2. **Development:** compilation and development of angklung products beginning from the production process up to packaging of new arts, to be acceptable by today's people

Dissemination: taking an active role in introducing angklung through various programmes of performing arts or introduction of culture locally and overseas.

3. ANGKLUNG WEB INSTITUTE (Website) <http://angklung-web-institute.com> (Est. 2003)

A medium of information exchange about angklung knowledge and competence.

KADIN INDONESIA FOUNDATION

Supporting the preparation of the nomination file.

PROVINCIAL GOVERNMENT OF WEST JAVA

Supporting angklung as a cultural icon of West Java

Inviting angklung orchestras from schools for to perform at official functions.

BANTEN PROVINCIAL GOVERNMENT

Calling Angklung Buhun groups from Kanekes to perform at events.

Training an angklung group at SMA 3 Senior High School, Rangasbitung

BANDUNG MUNICIPAL GOVERNMENT

Supporting angklung training activities at schools in Bandung and inviting angklung orchestras to perform at events.

Developing and promoting a special area of arts and culture at Saung Angklung Udjo, Bandung.

An external constraint has been difficulty in obtaining raw materials (black bamboo) due to its being harvested for the furniture industry. Report by Yana Sudiana (50 yrs.), angklung craftsman in Kampung Cijambe Girang, Surade, (Interview, 03/08/09) and confirmed by Handiman (Interview, *loc.cit*). Research and encouragement for planting black bamboo is needed to overcome this problem. Saung Angklung Udjo, the West Java Forestry Service and other agencies have begun collaboration and the Forestry Service has included this programme in its 5 and 10 year plans (Interview, Bandung, 22/08/09). Bamboo is being sought in other areas, eg. Cirebon and Tasikmalaya (Seminar, 11/08/09). Training is needed to ensure bamboo is harvested in the way which conserves the bamboo.

An internal constraint has been shortage of qualified angklung teachers/trainers /craftspersons, reported by Sanusi (43 yrs.) of the Bogor Culture and Tourism Service (Interview 02/08/09). This can be overcome by training teacher/trainers and angklung craftspersons. Another constraint is

shortage of funds for ongoing activities for safeguarding angklung culture. Satria (27 yrs.) stated the desire of Saung Angklung Udjo to assist safeguarding efforts of traditional angklung (Interview 07/08/09). Guidance of angklung craftspersons is needed.

3.b. Safeguarding measures proposed

For the Representative List, the safeguarding measures are those that may help to solidify the element's current viability and to ensure that its viability is not jeopardized in the future, especially as an unintended result of inscription and the resulting visibility and public attention.

Identify and describe the various safeguarding measures that are elaborated that may, if implemented, protect and promote the element, and provide brief information concerning, for example, their priority, scope, approaches, timetables, responsible persons or bodies, and costs..

COORDINATING MINISTRY FOR PEOPLE'S WELFARE

1. To coordinate, facilitate and motivate stakeholders in safeguarding Indonesian Angklung as Intangible Cultural Heritage;
2. To provide opportunities to all members of the angklung community in Indonesia to carry out activities for safeguarding Indonesian Angklung;
3. To give appreciation to members of the Indonesian Angklung community who continuously carry out safeguarding, development and utilization of angklung culture
4. To assist in activities to promote Indonesian Angklung;
5. To push for the establishment of regulations for conservation and safeguarding of Indonesian Angklung;
6. To push the appropriate agencies to promote the cultivation of black bamboo, as the raw material for making angklung musical instruments;
7. To push the appropriate agencies to include angklung musical arts in the educational curriculum as local content;
8. To push and support performances of the musical art of Indonesian Angklung at functions held by the government and by the community.

DIRECTORATE GENERAL FOR CULTURAL VALUES, ARTS AND FILM

1. To push various activities for safeguarding of intangible cultural heritage such as study, research, revitalization, inventory, workshops, seminars, performances and exhibitions of works of traditional culture;
2. To carry out socialization, promotion and efforts to build the capacity of the community, in order to increase activities for safeguarding intangible cultural heritage;
3. To develop the Culture Map as one of the inventories of Intangible Cultural Heritage maintained within the territory of the Republic of Indonesia;
4. To advise related agencies, both government and private all over Indonesia to activate and utilize the potency of traditional culture, including Indonesian Angklung, in various relevant activities;
5. To optimize efforts for transmission of cultural heritage to the younger generation through recommendations to the Department of National Education and other related agencies so that material of traditional culture, such as Indonesian Angklung, may be included in local content teaching materials at educational institutions, both formal and non-formal.

WEST JAVA PROVINCE FORESTRY SERVICE (Dr. Ir. Anang Sudarno, M.Sc)

1. Collaboration with Saung Angklung Udjo to conduct research regarding which are the best kinds of black bamboo to be used for making angklung, including updating mapping of the best areas biophysically suitable for producing the most suitable black bamboo for angklung raw materials (eg. Surade and others),
2. To promote cultivation of bamboo as a non-timber forestry product in areas which use

bamboo as a raw material. Promotion of bamboo cultivation to check erosion.

3. Collaboration with the Forestry Service to locate forest areas having black bamboo
4. Collaboration with Saung Angklung Udjo to encourage planting of all kinds of trees, including bamboo, to visitors to Saung Angklung Udjo, including distribution of seedlings. Giving of regular training to Udjo personnel regarding tree and bamboo planting, including the conservation method of harvesting bamboo.
5. Including all of the above in the 5 and 10 year plans of the Forest Service.

KADIN INDONESIA FOUNDATION

To support safeguarding of Angklung Culture through the community.

WEST JAVA PROVINCIAL GOVERNMENT

1. To support the nomination of Indonesian Angklung to UNESCO;
2. To cooperate in efforts to safeguard and develop angklung culture, as a part of Indonesia's national cultural heritage;
3. To recommend entertainment by angklung orchestras, especially those from schools, for entertainment at events held by Government Services within the Provincial Government of West Java.

BANTEN PROVINCIAL GOVERNMENT

To endeavour to expand training in Angklung Buhun at schools

MUNICIPAL GOVERNMENT OF BANDUNG

1. To be more active in spreading training and performance of angklung music within the city of Bandung;
2. To guide the angklung arts and culture area at Saung Angklung Udjo, Bandung.

ANGKLUNG MUSIC SOCIETY

1. To continue training of angklung music trainers. Priority 1. Continuous.
2. To organize training for angklung craftspersons Priority 2, Continuous
3. To frequently organize performances of angklung music, to test the angklung groups which have been trained. Priority 3. Continuous
4. Aspires to hold a large scale inter-community performance to manifest the hopes of the late Daeng Soetigna that angklung should be a tool to be used for world peace. Priority 4.

SAUNG ANGKLUNG UDJO

1. To carry out consistent periodic training for craftspersons and angklung trainers from all over Indonesia, in order to achieve regeneration of craftspersons and trainers. (Budgeted Cost USD \$59.800) Priority 1 2009 onwards
2. To conduct research and documentation related to the origins and development of the various types of angklung of Indonesia, both traditional and modern, (Budgeted Cost USD \$21.000) Priority 2. 2009 Onwards
3. To conduct research and development related to the beneficial uses of angklung for mankind (psychological and medical benefits of playing angklung). (Budgeted Cost USD \$24.000) Priority 3 2009 Onwards
4. To carry out documentation of the varieties of angklung arts and products, as well as to increase public awareness of angklung cultural heritage, through the establishment of an Angklung Museum (planned area of the building 400 M², Budgeted Cost \$117.073) Priority 4/ 2010-2011
5. To carry out development of infrastructure of training in angklung cultural heritage, consisting of a training centre and a music studio, in order to accommodate more training activities and regeneration of players and trainers in angklung (planned area of the building 850 m², Budgeted Cost USD \$248.780) Priority 5. 2011 – 2013
6. To carry out development in infrastructure for production of the traditional handcraft of

angklung making, in order to produce good quality angklung instruments (planned area of the building 450m², Budgeted cost USD \$131.700) Priority 6 2013

ANGKLUNG WEB INSTITUTE: <http://angklung-web-institute.com>

To disseminate knowledge of angklung to the world through the angklung community.

All stakeholders are committed to preserving the cultural values associated with both traditional and modern angklung. The function of Angklung Padaeng as an educational instrument is being actively maintained in schools. Tourism related to angklung has been going on at Saung Angklung Udjo since 1966, but in a healthy and sustainable way which has preserved cultural values, and provided livelihood to artists and their family members presently numbering 1500 persons.

3.c. Commitment of communities, groups or individuals concerned

The feasibility of safeguarding depends in large part on the aspirations and commitment of the communities, groups or, if applicable, individuals concerned. This section should provide evidence that the communities, groups or, if applicable, individuals concerned have the will and commitment to safeguard the element if conditions are favourable. The best evidence will often be an explanation of their involvement in past and ongoing safeguarding measures and of their participation in the formulation and implementation of future safeguarding measures, rather than simple pledges or affirmations of their support or commitment.

The resolve of the Angklung community including major groups to mutual respect and cooperation for safeguarding and development of the culture of Indonesian Angklung is stated in a Declaration signed at Saung Angklung Udjo, Bandung, on 11th August 2009. A copy and translation of this Declaration is annexed.

Commitment of the Angklung Music Society (MMA)

Annexed. Detailed in 3 (b) above

Commitment of Saung Angklung Udjo

Annexed. Detailed in 3 (b) above.

3.d. Commitment of State(s) Party(ies)

The feasibility of safeguarding also depends on the support and cooperation of the concerned State(s) Party(ies). This section should provide evidence that the State Party concerned has the commitment to support the safeguarding effort by creating favourable conditions for its implementation and should describe how the State Party has previously and will in the future demonstrate such commitment. Declarations or pledges of support are less informative than explanations and demonstrations.

Commitment of the Coordinating Ministry for People's Welfare

Annexed. Detailed in 3 (b) above.

Commitment of the Ministry of Culture and Tourism and Directorate General of Cultural Values, Arts and Film

Annexed. Detailed in 3 (b) above

Commitment of support by the Provincial Government of West Java.

Detailed in 3 (b) above.

Commitment of support by the Provincial Government of Banten

Detailed in 3 (b) above.

Commitment of support by the Municipal Government of Bandung

Detailed in 3 (b) above

4. COMMUNITY PARTICIPATION AND CONSENT IN THE NOMINATION PROCESS (CF. CRITERION R.4)

This section asks the submitting State Party to establish that the nomination satisfies Criterion R.4: 'The element has been nominated following the widest possible participation of the community, group or, if applicable, individuals concerned and with their free, prior and informed consent'.

4.a. Participation of communities, groups and individuals in the nomination process

Describe how and in what ways the community, group or, if applicable, individuals concerned have participated actively in the nomination process at all stages, as required by Criterion R.4. States Parties are further encouraged to prepare nominations with the participation of a wide variety of other concerned parties, including where appropriate local and regional governments, neighbouring communities, NGOs, research institutes, centres of expertise and other interested parties. The participation of communities in the practice and transmission of the element should be addressed in point 1 above, and their participation in safeguarding should be addressed in point 3; here the submitting State should describe the widest possible participation of communities in the nomination process.

The Indonesian Angklung Nomination Team has guaranteed community participation in the following ways:

- a. Including angklung community members in the nomination team
- b. Inviting angklung community members to nomination team meetings.
- c. Field research was conducted among the angklung community in Bandung, Bogor, Sukabumi and Sumedang (West Java), Rangkas Bitung (Banten) and DKI Jakarta. The research took the form of administering a questionnaire of 22 questions to a total of 76 respondents.
- d. Interviews for a survey of the existence of angklung culture were conducted among culture experts from 32 Provinces at Beautiful Indonesia in Miniature Theme Park, Jakarta (West Papua Province does not yet have a pavilion at the park) on 1st August 2009, and to 3 other culture experts from Nanggroe Aceh Darussalam, Riau Islands and West Papua. The experts were also asked whether they agreed that Indonesian Angklung be nominated to

UNESCO, and all (33 out of 33 Provinces) stated that they agreed with the nomination.

- e. Representatives of the angklung community from various places participated in a Verification Session of the Nomination File on 11th August 2009 at Saung Angklung Udjo, Bandung and have given their input for corrections and additions to the nomination file.
- f. These representatives of the angklung community have been pleased to sign statements of their participation and free, informed prior agreement to the corrected nomination file, before its presentation to the Government for submission to UNESCO (See 5.b below).
- g. Plans for safeguarding angklung culture already conducted (4.a) and which are planned (4.b) (Criteria R.3 of Operational Directives to Article 18 of the Convention) involve various elements of the angklung community in their execution.
- h. Udjo Ngalagena had established Saung Angklung Udjo (SAU) in 1966 as a centre for development of angklung culture. Saung Angklung Udjo has developed to become the largest centre for angklung culture, and remains active even now. Obby A.R. Wiramihardja had established Masyarakat Musik Angklung (MMA or Angklung Music Society) of Indonesia in Jakarta in 2001, to coordinate communities, groups/organizations and individual enthusiasts of Indonesia. (Interview, Jakarta, 01/08/09). SAU and MMA were actively involved in preparing and supporting the nomination file, and will be involved in future safeguarding activities described in the file.
- i. Representatives of the Indonesian Angklung Community present at the Nomination Verification Session on 11th August 2009 at Saung Angklung Udjo, Bandung, have signed a Declaration stating their resolve for mutual respect and cooperation together to safeguard and develop the intangible cultural heritage of Angklung Indonesia.
- j. The team has interviewed schoolchildren from 33 Provinces of Indonesia, who played angklung as part of the Gita Bahana Nusantara Orchestra. This orchestra performed at the 63rd Independence Day Celebrations at the Presidential Palace on 17/08/09 in Jakarta. At this event, these children, dressed in the traditional costumes of their respective provinces, sang and played angklung before the President of the Republic of Indonesia and the assembled dignitaries. They all stated that playing angklung together had built enthusiasm for cooperation and friendship among them.

4.b. Free, prior and informed consent to the nomination

The free, prior and informed consent to the nomination of the element from the community, group or, if applicable, individuals concerned may be demonstrated through written or recorded concurrence, or through other means, according to the legal regimens of the State Party and the infinite variety of communities and groups concerned. The Committee will welcome a broad range of demonstrations or attestations of community consent in preference to standard or uniform declarations..

Please attach supporting evidence demonstrating such consent and indicate below what evidence you are providing and what form it takes.

See the attached statements of involvement and agreement, in Bahasa Indonesia and English. The documents state that various elements of the angklung community, including craftspersons, artists, teachers, students, academics and related officials, have been involved in the preparation of the nomination file, that they agree with the contents after due corrections have been made, and that they give their free, informed and prior consent to the submission of the nomination file to UNESCO. These statements were obtained after a Nomination Verification Seminar attended by angklung community representatives, academics and relevant officials at

Saung Angklung Udjo, Bandung on 11th August 2009.

4.c. Respect for customary practices governing access

Access to certain specific aspects of intangible cultural heritage is sometimes restricted by customary practices governing, for example, its transmission or performance or maintaining the secrecy of certain knowledge. Please indicate if such practices exist and, if they do, demonstrate that inscription of the element and implementation of the safeguarding measures would fully respect such customary practices governing access to specific aspects of such heritage (cf. Article 13 of the Convention). Describe any specific measures that might need to be taken to ensure such respect.

In conducting its research, the research team respected customary practices regarding access, especially with regard to traditional Angklung Buhun in Kanekes (Baduy) (Interview, 25/07/09) as well as in other places, regarding when angklung may be performed and who may take out and play the angklung instruments. Should Indonesian Angklung be inscribed on the Representative List, these customary practices would continue to be respected and followed. Access to the Kanekes (Baduy) area, particularly to the inner area, is in any case restricted for outsiders including to the media. This restriction serves to safeguard the culture of traditional Angklung Buhun.

It is the resolve of the angklung community that the several traditional forms of angklung mentioned in A (iii) above should continue to be performed in their traditional context i.e., in connection with customary celebrations such as rice planting, rice harvesting, circumcision, etc. There have been some efforts to give some of the traditional kinds of angklung new significance by introducing their study as extracurricular activities in schools having those traditional angklung as part of their local culture, to enhance transmission to younger generations, while maintaining the associated traditional values.

Access to Angklung Padaeng is on the other hand not restricted, and is open to all.

5. INCLUSION OF THE ELEMENT IN AN INVENTORY (CF. CRITERION R.5)

This section is where the State Party establishes that the nomination satisfies Criterion R.5: "The element is included in an inventory of the intangible cultural heritage present in the territory(ies) of the submitting State(s) Party(ies) as defined in Articles 11 and 12".

Identify the inventory in which the element has been included and the office, agency, organization or body responsible for maintaining that inventory. Demonstrate that the inventory has been drawn up in conformity with Articles 11 and 12, in particular Article 11(b) that stipulates that intangible cultural heritage shall be identified and defined "with the participation of communities, groups and relevant non-governmental organizations" and Article 12 requiring that inventories be regularly updated.

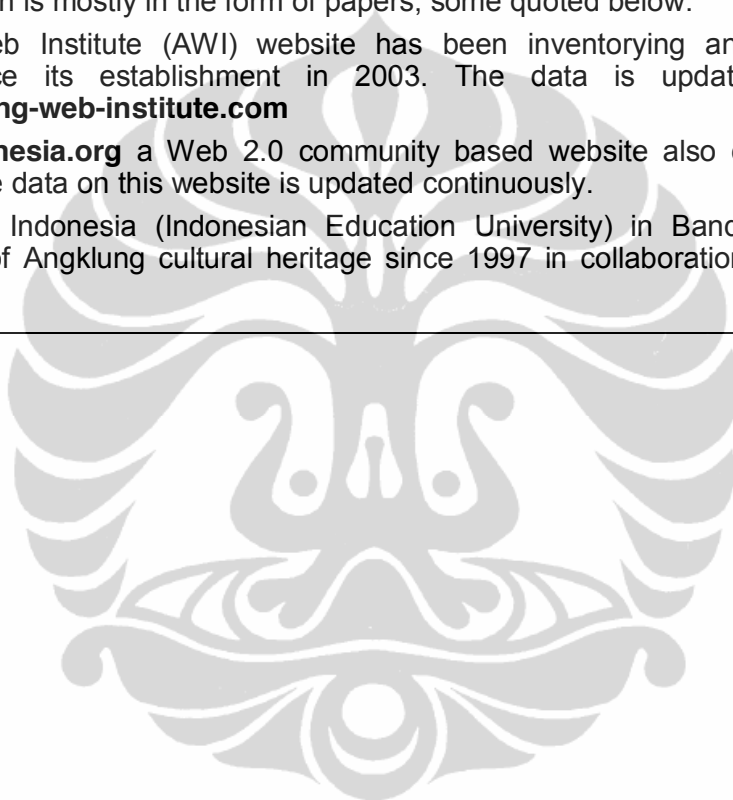
The nominated element's inclusion in an inventory should not in any way imply or require that the inventory(ies) should have been completed prior to nomination. Rather, a submitting State Party may be in the process of completing or updating one or more inventories, but has already duly included the nominated element on an inventory-in-progress.

Data regarding Angklung Indonesia is included inventory of elements of cultural heritage of the Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Indonesia, specifically the inventory maintained by the Centre for Research and Development of Culture. See attached letter of the Minister of Culture and Tourism of the Republic of Indonesia. The Department of Culture and Tourism, in collaboration with UNESCO Jakarta Office, has recently prepared a Practical Guidebook to Inventory of Intangible Cultural Heritage, including a form for entry of data regarding elements of ICH, both manually as well as to a Web 2.0 based website which permits continuous updating and review of data by community members. This new form and system are fully compliant with Articles 11 and 12 of the ICH Convention, and are being implemented immediately. Existing inventory regarding angklung in websites will be linked to the new system by metadata links.

Some places and sites of inventories of Indonesian Angklung prepared with participation of communities, groups and relevant NGOs are as follows:

1. 1976. Dept. of Education and culture published a Guide Book to Playing Angklung. Publication data can be found on the website <http://pustaka.budpar.go.id>
2. 1986 Dept. of Education and Culture published a book on Daeng Soetigna, including angklung culture. Publication data can be found on the website <http://pustaka.budpar.go.id>
3. 1966 Saung Angklung Udjo community began inventory of the cultural heritage of both traditional and modern angklung. Up till now, the information has been updated every 3 months. From January 2010, the data will be updated continuously. Website: www.angklung-udjo.co.id
4. Angklung Music Society (MMA) has been collecting data on Angklung since 2000. Documentation is mostly in the form of papers, some quoted below.
5. Angklung Web Institute (AWI) website has been inventorying angklung cultural heritage since its establishment in 2003. The data is updated monthly. . <http://angklung-web-institute.com>
6. budaya-indonesia.org a Web 2.0 community based website also carries data on angklung. The data on this website is updated continuously.

Universitas Pendidikan Indonesia (Indonesian Education University) in Bandung has been carrying out inventory of Angklung cultural heritage since 1997 in collaboration with the Ford Foundation.



DOCUMENTATION

a. Required and supplementary documentation

Compulsory Photographs:

1. Pentatonic Traditional Angklung Buhun from Kanekes being played
2. Diatonic/Chromatic Angklung or Angklung Padaeng being played
3. Making of angklung by master craftsman Rahmat at Saung Angklung Udjo, Bandung
4. Students of SMA-N1 Jatinunggal Senior High school learning to make angklung
5. Children of Pelita Nusantara Kindergarten in Bandung learn to play angklung
6. Children of Isola 2 Elementary School in Bandung play angklung
7. Students of the Foreign Language Academy in Bandung playing angklung
8. Foreign guests play angklung at Saung Angklung Udjo, Bandung
9. Angklung crafting at Sanggar Edas, Bogor
10. Children from 33 Provinces of Indonesia play angklung together during the 63rd Independence Day Celebrations on 17th August 2009 at the Presidential Palace in Jakarta.

Additional Photographs

11. Children from Lab school Junior High School, Bandung play Angklung
12. Children of SMA-N 1 Senior High School, Bandung play Angklung
13. Harvesting of black bamboo for making angklung. The bamboo must be cut 3 segments above the ground, so it will not die and the roots can still propagate further.
14. Traditional Angklung Buncis being played at Saung Angklung Udjo, Bandung
15. Gita (16 yrs.) leads the angklung orchestra using hand signals at SMA-N1 Jatinunggal, Sumedang
16. Children at SDN Dr. Cipto Elementary School, Bandung play Angklung
17. Children from Diponegoro Junior High School, Jakarta, play angklung
18. University students at Sanggar Kabumi Upi, Bandung play Angklung
19. Making of angklung in an arts workshop at Surade, Sukabumi
20. Bamboo from different districts produces different qualities of sound (Handiman)
21. Ladies making angklung frames at Saung Angklung Udjo, Bandung
22. Obby A.K. Wiramihadrja, of Masyarakat Musik Angklung (Angklung Music Society)
23. Taufik Udjo, Director of Saung Angklung Udjo, Bandung, along with some of his artists and staff
24. Students of Budi Mulya Senior High School, Bogor perform Gambang Katung including angklung at an interfaith social work event.
25. Exhibition of angklung at Saung Angklung Udjo, Bandung, 11/08/09.
26. Children from 33 Provinces of Indonesia learn angklung in Jakarta
27. Teachers from SMAN-1 Senior High School, Jatinunggal, play Calung
28. Indonesian Angklung Nomination Verification Session, 11/08/09 at Bandung.
29. Deputy Governor of West Java Province, Dede Yusuf, states his support for safeguarding and development of the cultural heritage of Indonesian Angklung
30. Signing of the Declaration of mutual respect and cooperation for safeguarding and development of Indonesian angklung cultural heritage by members of the Indonesian Angklung community.

Video Film 10 min

Map of Indonesia with 14 Provinces having Angklung Culture marked

<p>Map of West Java, Banten and DKI Jakarta Provinces with areas having angklung culture marked.</p> <p>3 reference books (see Bibliography below)</p>
<p>b. Cession of rights including registry of items</p>
<p>Required cession of rights provided.</p>
<p>c. List of additional resources</p>
<p>Books</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumarsono, Tatang and Pirous, Erna Garnasih, <i>Membela Kehormatan Angklung</i>, Bandung, Yayasan Serambi Pirous, 2007. The first part is a biography of Daeng Soetigna, including how he developed diatonic angklung in 1938 and its subsequent development. The second part is a collection of papers regarding Daeng by those who knew him. 2. Antariksa, Basuki and Mahendra, Ahmad, <i>Angklung: Traditional Musical Art and Cultural Heritage of the Indonesian Nation (English)</i> Jakarta, DEPbudpar, 2007. The meaning of angklung, its history and development, types of traditional and modern angklung and their distribution in Indonesia, techniques of making angklung and noble values contained in traditional angklung musical arts. 3. Sulhan Syafi'i, <i>Udjo: Diplomasi Angklung, Saung Angklung Udjo</i>, Jakarta, PT. Grasindo, 2009. A biography of Udjo Ngalagena, Daeng Sutigno's student and founder of Saung Angklung Udjo, the largest and most active centre of angklung culture. <p>Input from the Angklung Community through Research</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Soetigna, Daeng, <i>Een Poging To Rehabilitate van de Angklung, Indonesian translation by Kwee Sien No Apin</i>, Paper for B-1 examination in Vocal Arts at Ministry of Education and Culture, Jakarta, 1954 (Defending the Honour of Angklung). See 1. above 5. <i>Buku Panduan Pemasangan dan Perawatan Alat Musik Angklung</i>, Saung Angklung Udjo, Bandung, 2008. Guide to Installation and Maintenance of Angklung. 6. <i>The Making of Angklung</i>, Saung Angklung Udjo, Bandung, 2008. A paper explaining selection and preparation of the special black bamboo and the process of crafting and tuning angklung for optimum results and insect resistance. 7. Vita Mutiara, SSi, <i>Paduan Suara Edelweiss</i>, Kursus Piano Edelweiss, Batam, 2009. A paper describing the training of an angklung orchestra in Batam Island, Riau Islands Province, including character building through angklung training. 8. Wiramihadrja, Obby A. R., <i>100 Tahun Padaeng. Daeng Soetigna, A Trail of Invention in World's Music History</i>, MMA, Bandung, 2008. Programme guide to Daeng Soetigna Centenary celebration. 9. Kurnia, Ganjar and Nalan, Arthur S, <i>Deskripsi Kesenian Jawa Barat</i>, Dinas Kesenian Jawa Barat dan Pusat Pembangunan Dinamika Pembangunan UNPAD, Bandung, 2003. A description of the various arts of West Java Province, including varieties of angklung. 10. Wiramihardja, Obby A. R, <i>Angklung History</i>, MMA, Jakarta, 2007. A small booklet in English describing the history of Angklung in the past and its present development, including Angklung education and bamboo raw materials quality
<p>CONTACT INFORMATION</p>
<p>A. Contact person for correspondence</p>
<p>Drs. Harry Waluyo, M.Hum c/o Centre for Research and Development of Culture Kompleks DIKNAS, Gedung E, Lt. 9</p>

Jalan Jenderal Besar Sudirman, Jakarta 12170, Indonesia
Tel. +62 21 572 5518 Fax. +62 21 572 5529
Email: harry.waluyo@budpar.go.id

B. Competent body involved

DEPUTY V FOR CULTURE, TOURISM, YOUTH AND SPORTS COORDINATING MINISTER FOR PEOPLE'S WELFARE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta, 10110, INDONESIA
No. Telp +62 21 345 3284 Fax +62 21 345 3284
email: sugihartatmo@menkokesra.go.id

DIRECTOR GENERAL OF CULTURAL VALUES, ARTS AND FILMS, MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta 10110, INDONESIA
No. Telp +62 21 3838441, 3838445; Fax +62 21 3804026 email: suparman_tsp@yahoo.com

HEAD OF THE BODY FOR RESOURCES DEVELOPMENT OF THE DEPARTMENT OF CULTURE AND TOURISM

Drs. I Gusti Putu Laksaguna, CHK, M.Sc
Kompleks DIKNAS, Gedung E, Lt. 22
Jalan Jenderal Besar Sudirman, Jakarta 12170, Indonesia
No. Telp. +62 21 3838615 No. Fax +62 21 3861700
Email : igp.laksaguna@yahoo.co.id

C. Concerned community organization(s) or representative(s)

Masyarakat Musik Angklung Indonesia (Angklung Music Society)

Jalan Bhinneka IV No. 2, Cawang Baru, Jakarta 13340
Tel. +62 21 8191610; +62 81808100691
Email: service@angklung-web-institute.com

Saung Angklung Udjo

Jalan Padasuka 118, Bandung, 40192, Jawa Barat
Tel. +62 22 727 1714, 710 1736 Fax. +62 22 720 1587
Email: info@angklung-udjo.co.id

KADIN Indonesia Foundation

Menara KADIN Indonesia, Lt. 29,
Jalan H.R Rasuna Said, X-5 Kav. 2-3, Jakarta Selatan 12950, Indonesia
Tel. +62 21 527 4484 Fax. +62 21 5274331, 527 4332
Email:sutrisno@kadin-indonesia.or.id

SIGNATURE ON BEHALF OF THE STATE PARTY

Name: Agung Laksono

Title: COORDINATING MINISTER FOR PEOPLE'S WELFARE
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Date: 30 December 2009

Signature:<signed>



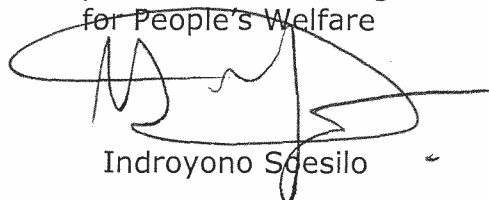
**COMMITMENT OF THE
COORDINATING MINISTRY FOR PEOPLE'S WELFARE
REGARDING
"SAFEGUARDING OF THE CULTURE
OF INDONESIAN ANGKLUNG"**

For the purpose of guaranteeing the continuation of safeguarding and development of Indonesian Angklung, both now and in the future, the Coordinating Ministry for People's Welfare of the Republic of Indonesia has and will continue to carry out efforts for the conservation of Indonesian Angklung. This is in accord with the basic duties of the Coordinating Ministry for People's Welfare as the Chair of the Working Group on World Heritage, wherein Indonesian Angklung is one of the elements which we are nominating for inscription on the Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity.

The efforts which we will carry out are as follows:

1. To coordinate, facilitate and motivate stakeholders in safeguarding Indonesian Angklung as Intangible Cultural Heritage;
2. To provide opportunities to all members of the angklung community in Indonesia to carry out activities for safeguarding Indonesian Angklung;
3. To give appreciation to members of the Indonesian Angklung community who continuously carry out safeguarding, development and utilization of angklung culture
4. To assist in activities to promote Indonesian Angklung;
5. To push for the establishment of regulations for conservation and safeguarding of Indonesian Angklung;
6. To push the appropriate agencies to promote the cultivation of black bamboo, as the raw material for making angklung musical instruments;
7. To push the appropriate agencies to include angklung musical arts in the educational curriculum as local content;
8. To push and support performances of the musical art of Indonesian Angklung at functions held by the government and by the community..

Jakarta, 24th August 2009
Secretary of the Coordinating Ministry
for People's Welfare


Indroyono Soesilo



**MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM
REPUBLIC OF INDONESIA**

**COMMITMENT OF THE
MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM
REGARDING
“SAFEGUARDING OF THE CULTURE
OF INDONESIAN ANGKLUNG”**

This file nominating Indonesian Angklung for inscription on the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity has been prepared with the fullest possible participation and agreement of the Indonesian Angklung community by a team formed by the Body for Resources Development of the Ministry of Culture and Tourism.

The Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Indonesia herein states its highest commitment to efforts for safeguarding the culture of Indonesian Angklung as one of the elements of Intangible Cultural Heritage of Indonesia.

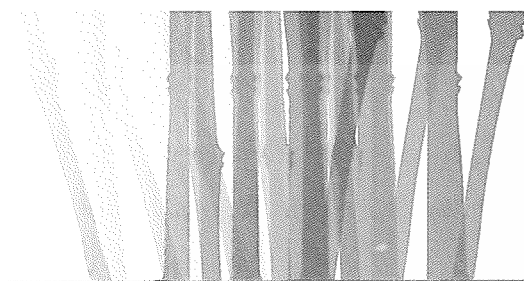
The Ministry of Culture and Tourism also herein declares that data regarding Indonesian Angklung has been recorded in an inventory of Intangible Cultural Heritage maintained within the territory of the Republic of Indonesia.

Jakarta, 24th August 2009

Minister of Culture and Tourism,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jero Wacik'.

Ir. Jero Wacik, S.E



Saung Angklung Udjo hereby states its commitment to carry out the following planned measures to safeguard and develop the intangible cultural heritage of Indonesian Angklung:

1. To carry out consistent periodic training for craftspersons and angklung trainers from all over Indonesia, in order to achieve regeneration of craftspersons and trainers .. (Budgetted Cost USD \$59.800) Priority 1 2009 onwards
2. To conduct research and documentation related to the origins and development of the various types of angklung of Indonesia, both traditional and modern, (Budgetted Cost USD \$21.000) Priority 2. 2009 Onwards
3. To conduct research and development related to the beneficial uses of angklung for mankind (psychological and medical benefits of playing angklung). (Budgetted Cost USD \$24.000) Priority 3 2009 Onwards
4. To carry out documentation of the varieties of angklung arts and products, as well as to increase public awareness of angklung cultural heritage, through the establishment of an Angklung Museum (planned area of the building 400 M², Budgetted Cost \$117.073) Priority 4/ 2010-2011
5. To carry out development of infrastructure of training in angklung cultural heritage, consisting of a training centre and a music studio, in order to accommodate more training activities and regeneration of players and trainers in angklung (planned area of the building 850 m², Budgetted Cost USD \$248.780) Priority 5, 2011 – 2013
6. To carry out development in infrastructure for production of the traditional handcraft of angklung making, in order to produce good quality angklung instruments (planned area of the building 450m², Budgetted cost USD \$131.700) Priority 6 2013

Bandung, 22nd August 2009


Satria Yanwar Akbar
Operational Director


Taufik Hidayat Udjo
President Director



**Masyarakat Musik Angklung (MMA)
(Angklung Music Society)**

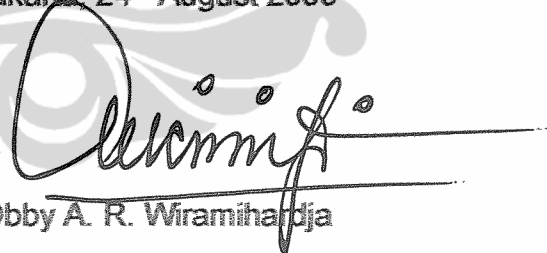
Jalan Bhinneka IV No. 2, Cawang Baru, Jakarta 13340
Telp. +62 21 8191610; +62 81808100691
Email: service@angklung-web-institute.com

**COMMITMENT OF THE ANGKLUNG MUSIC SOCIETY
REGARDING
“SAFEGUARDING OF THE CULTURE
OF INDONESIAN ANGKLUNG”**

The Angklung Music Society herein states its firm commitment to safeguarding and developing the cultural heritage of Indonesian Angklung through the following ongoing activities:

1. To continue training of angklung music trainers. Priority 1. Continuous.
2. To organize training for angklung craftspersons Priority 2, Continuous
3. To frequently organize performances of angklung music, to test the angklung groups which have been trained. Priority 3. Continuous
4. Aspires to hold a large scale inter-community performance to manifest the hopes of the late Daeng Soetigna that angklung should be a tool to be used for world peace. Priority 4.

Jakarta, 24th August 2009



Obby A. R. Wiramihardja

**Declaration of Lovers of the Indonesian Angklung Cultural Heritage
(the Bandung Declaration)**

We, craftspersons, teachers, players and lovers of all varieties of Indonesian Angklung musical cultural heritage

Declaring our respects and highest appreciation to our predecessors who had created and developed varieties of Angklung Indonesia musical instruments, both traditional and modern, and their associated intangible cultural values, and passed them down to ourselves,

Hereby declare our resolve to always respect each other and work together to safeguard and develop Angklung Indonesia musical culture as an element of the cultural heritage of the Indonesian nation.

Bandung, 11th August 2009

(signed by 87 Angklung lovers)





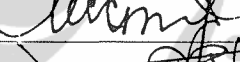
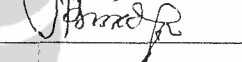
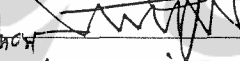
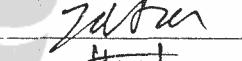

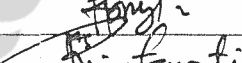

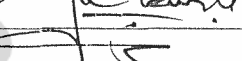



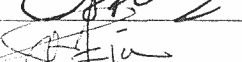


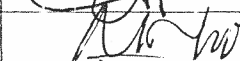
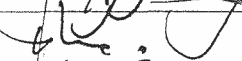
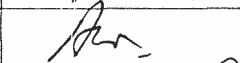
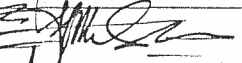


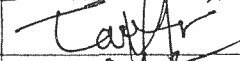





**Deklarasi Pecinta Warisan Budaya Angklung Indonesia
(Deklarasi Bandung)**

Kami pengrajin, pembina, pemain dan pecinta segala jenis warisan budaya musik Angklung Indonesia,

Menyatakan hormat dan penghargaan setinggi-tinggi kepada para pendahulu kami yang telah menciptakan dan mengembangkan berbagai jenis alat musik Angklung Indonesia, baik yang tradisional maupun yang modern, serta nilai budaya takbenda terkait dengannya, dan mewariskannya kepada kami;

Dengan ini menyatakan tekad kami untuk selalu saling menghargai dan bekerjasama guna melestarikan dan mengembangkan budaya musik Angklung Indonesia sebagai salah satu warisan budaya bangsa Indonesia.

Bandung, 11 Agustus 2009

Nama Jelas	Tanda Tangan	Nama Jelas	Tanda Tangan
DEDE YUSUF		Dadang Sunjaya	
IGUSTI PUTU LAKSANA		Ade Yusuf	
OBBY. A.R.		Sri Rajeki	
Iman Suqilo		IQBAL AMARULLAH	
ERNA G. PIROWS		YASMIN SAVITRI	
CAVIA M.		RITA ANGGOROWATI	
Handiman		Hj. Eva Farida	
Opan Sopandi		H. SRI HARTATI	
EDDY PERMADI		Sopian	
Dudi M. Sa		Moch Juyana	
Mumuk MUMUK		Dede Wahidin	
Wahy Ariy		Rahman Adi. P.	
Ante SNAK		Usman. Sulana	
TAUFIK. UDJO		Dian. Suiawan	
A. YUANA. N		Nurhidia E	


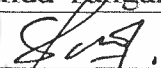
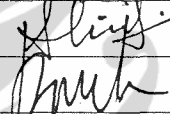

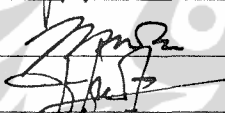



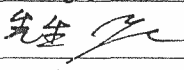
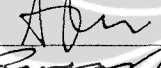
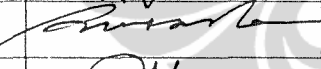
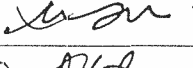
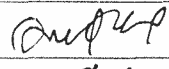


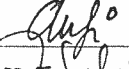
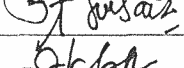

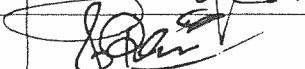
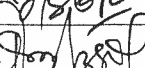
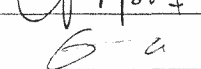
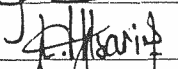
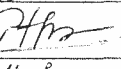
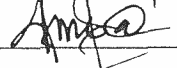



Deklarasi Pecinta Warisan Budaya Angklung Indonesia (Deklarasi Bandung)

Kami pengrajin, pembina, pemain dan pecinta segala jenis warisan budaya musik Angklung Indonesia,

Menyatakan hormat dan penghargaan setinggi-tinggi kepada para pendahulu kami yang telah menciptakan dan mengembangkan berbagai jenis alat musik Angklung Indonesia, baik yang tradisional maupun yang modern, serta nilai budaya takbenda terkait dengannya, dan mewariskannya kepada kami;

Dengan ini menyatakan tekad kami untuk selalu saling menghargai dan bekerjasama guna melestarikan dan mengembangkan budaya musik Angklung Indonesia sebagai salah satu warisan budaya bangsa Indonesia.

Bandung, 11 Agustus 2009

Nama Jelas	Tanda Tangan	Nama Jelas	Tanda Tangan
Datay Sumarso		M. SANI. W.	
Aan Handoyo RONY MULYONO		Sam Udjo sari GS	
Asep Nugraha Diel (GS)		Inen GS PEBBY	 
Yuken		M. YUSFIAT. S	
Ade Daryana HERFAN R	 	Aeri Ayu Lestari Virgiawan Prasa	 
Uluya Ubunudin S. Doyana K.	 	Annisa Nurfitri S Januar Hri S.	 
Dudi M. San YAYAN UDJO	 	IFVra Nelly. F Bali annisa G.S	 
Resi S. (GS)		Reribasari	
Lilis S. (GS)		Gitta m k	
Ma		Apong susuwati	

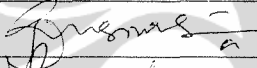
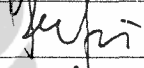

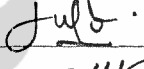


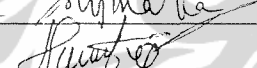



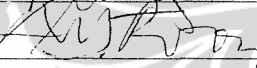
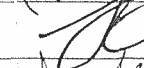
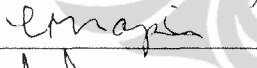
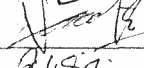
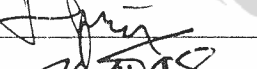
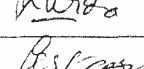
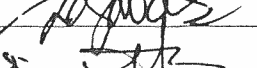
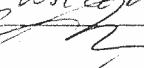

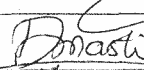
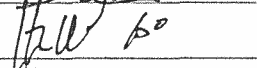

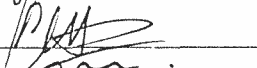



**Deklarasi Pecinta Warisan Budaya Angklung Indonesia
(Deklarasi Bandung)**

Kami pengrajin, pembina, pemain dan pecinta segala jenis warisan budaya musik Angklung Indonesia,

Menyatakan hormat dan penghargaan setinggi-tinggi kepada para pendahulu kami yang telah menciptakan dan mengembangkan berbagai jenis alat musik Angklung Indonesia, baik yang tradisional maupun yang modern, serta nilai budaya takbenda terkait dengannya, dan mewariskannya kepada kami;




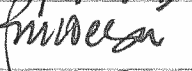






Dengan ini menyatakan tekad kami untuk selalu saling menghargai dan bekerjasama guna melestarikan dan mengembangkan budaya musik Angklung Indonesia sebagai salah satu warisan budaya bangsa Indonesia.








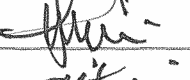




Bandung, 11 Agustus 2009

Nama Jelas	Tanda Tangan	Nama Jelas	Tanda Tangan
Dra. Ina Rusmelina		YURRI E.	
Dra Hanny A.		Rachman	
ADE RAMLI H S.Pd		Wallah	
ADE SUPRIATNA SUTISDA.		Taufik UDjo	
RAJO DIMAS		Dayu Prastin	
AD. PIROUS		Gita Mayang	
Erna G. Pirus		Harry Patra	
Aqus Babang		Terra Umante	
Potipon Djawis		Ratna Widiastuti	
Andi Gajim		LESTARI PUTRI	
GELORA		Bayu Anggara	
Irfan		Dinasti Roshadanti	
Edi Yusuf			
Lukman Gusman			

Angket Budaya Angklung di Daerah

Berkas Nominasi Angklung Indonesia untuk diinskripsikan UNESCO pada Daftar Representatif Budaya Takbenda Warisan Manusia

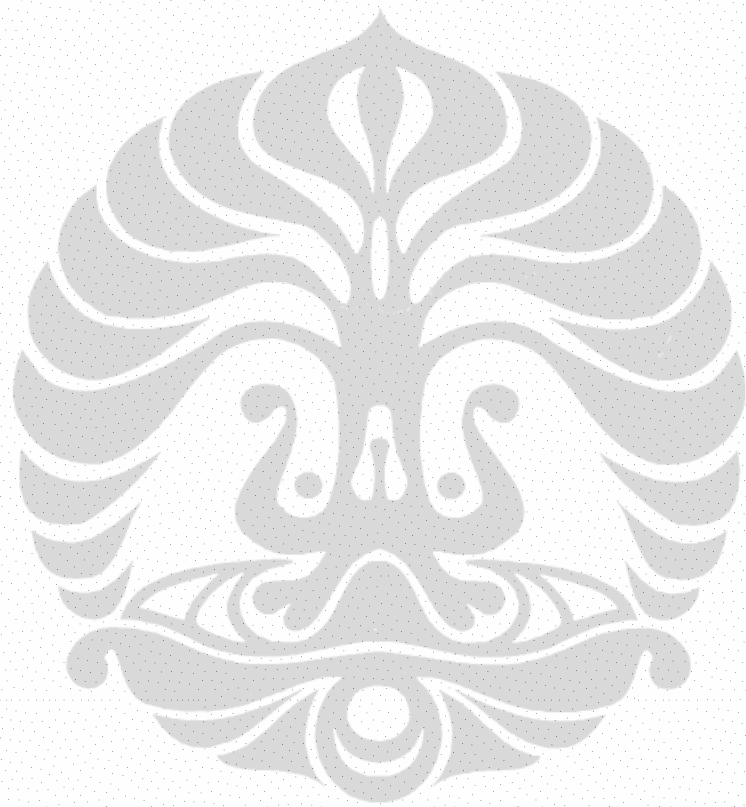
Anjungan Provinsi	Adakah budaya angklung tradisional di daerah Bapak/Ibu?	Apakah ada budaya angklung modern/Padaeng di daerah Bapak/Ibu?	Apakah Angklung dibuat di daerah Bapak/ Ibu?	Setuju Angklung Indonesia dicalonkan sebagai warisan budaya takbenda	Nama Jelas	Tanda Tangan
1. Nanggroe Aceh Darussalam	TIDAK (SAMA M. AD)	TIDAK	TIDAK	SETUJU	OUT PUTRI ALYANUR	
2. Sumatera Utara (N. Sumatra)	TIDAK	YA (Sebagian)	TIDAK	YA.	ETY .J. Nadenik	
3. Sumatera Barat (W. Sumatra)	TIDAK	TIDAK	TIDAK	SETUJU	YUSRAINI	
4. Bengkulu	TIDAK	TIDAK	TIDAK	SETUJU SAMA	RULI RM	
5. Riau	TIDAK	ADA	ADA	SANGAT SETUJU	HENDRY NAGIR	
6. Kepulauan Riau (Riau Islands)	TIDAK	TIDAK	TIDAK	SETUJU	FAWWAR FAWWAR	
7/ Jambi	TIDAK	TIDAK	TIDAK	SETUJU	PAMIN	
8. Sumatera Selatan (South Sumatra)	YA	YA	TIDAK	SETUJU	ADI SURAIRAH	
9. Lampung	TIDAK	TIDAK	TIDAK	SETUJU	SHIRLEY FOLIZA	
10. Kepulauan Bangka Belitung	TIDAK	TIDAK	TIDAK	SETUJU	RATNO	

Anjungan Provinsi	Adakah budaya angklung tradisional di daerah Bapak/Ibu?	Apakah ada budaya angklung modern/Padaeng di daerah Bapak/Ibu?	Apakah Angklung dibuat di daerah Bapak/ Ibu?	Setuju Angklung Indonesia dicalonkan sebagai warisan budaya takbenda	Nama Jelas	Tanda Tangan
11. DKI Jakarta	TIDAK	YA	TIDAK (DI DINGGIRAN)	TENTU.	EDWARD	
12. Jawa Barat (West Java)	YA	YA	YA	SANGAT SETUJU	WINDI RUSDIANA	
13. Banten	ADA (BAPUY)	TIDAK	ADA	SANGAT SETUJU	TAUFIK SALEH	
14. Jawa Tengah (Central Java)	ADA (MAMUSAU)	TIDAK	YA	SETUJU	DWI PUJI LESTARI	
15. DI Yogyakarta	ADA (CAGU MAMUSAU)	ADA	TIDAK	SETUJU	NOATI MAN	
16. Jawa Timur (East Java)	ADA (SANGAT CAGU BANTU MAMUSAU)	ADA (1806)	ADA	SANGAT SETUJU	MUNARNO	
17 Kalimantan Barat (West Kalimantan)	TIDAK	TIDAK	TIDAK	SETUJU	SUYARSO	
18 Kalimantan Tengah (Central)	TIDAK (SAMUN)	TIDAK	TIDAK	SETUJU	SUMARE	
19. Kalimantan Selatan (South)	TIDAK	TIDAK	TIDAK	SETUJU	KAMIN	
20 Kalimantan Timur (East)	TIDAK	TIDAK	TIDAK	SETUJU	USPEK	
21. Bali	ADA SENO (TAU, ANI, ANUNWA)	TIDAK	YA (CAGU BANTU BALI)	SETUJU	I WAYAN SUARICA	
22. Nusa Tenggara Barat (West NT)	ADA SAGU BANTEN/MAA.	ADA	TIDAK	SETUJU - MUKIR NUSANTARA.	SUFRI N.	

Anjungan Provinsi	Adakah budaya angklung tradisional di daerah Bapak/Ibu?	Apakah ada budaya angklung modern/Padaeng di daerah Bapak/Ibu?	Apakah Angklung dibuat di daerah Bapak/ Ibu?	Setuju Angklung Indonesia dicalonkan sebagai warisan budaya takbenda	Nama Jelas	Tanda Tangan
23.Nusa Tenggara Timur (East NT.)	TIDAK	ADA	ADA	TIKTI SETUJU	FERI	
24.Sulawesi Barat (W. Sulawesi)	TIDAK	TIDAK	TIDAK	SETUJU	HERMAN	
25.Sulawesi Utara (N. Sulawesi)	TIDAK (KOLONTANG)	TIDAK	TIDAK	SETUJU	RITANA	
26.Sulawesi Tengah (Central Sulawesi)	TIDAK (ADA MUKIK SAMBA)	TIDAK	TIDAK	SETUJU SEIKALI	MUHAMMAD KHAMIL	
27.Sulawesi Selatan (South Sulawesi)	TIDAK	TIDAK	TIDAK	SETUJU	HASAN	
28.Sulawesi Tenggara (SE))	TIDAK (ADA MUKIK SAMBA)	TIDAK	TIDAK	SETUJU	TIKE	
29.Gorontalo	TIDAK	TIDAK	TIDAK	SETUJU	LATIF HAICILI	
30. Maluku	TIDAK (ADA MUKIK SAMBA)	TIDAK	TIDAK	SETUJU.	SAMSUDIN	
31. Maluku Utara	TIDAK	TIDAK	TIDAK	SETUJU	HENDRICK	
32/ Papua Barat	TIDAK	TIDAK	TIDAK	SETUJU	ANDREAS W.	
33. Papua	TIDAK (ADA MUKIK SAMBA)	TIDAK	TIDAK	SETUJU	MARCEL SIANTE	

Mengetahui:

Tanggal 1 Agustus, 2009 / Yang melakukan wawancara



Pernyataan Keikutsertaan dan Persetujuan Komunitas Angklung atas Berkas Nominasi Angklung Indonesia untuk diinskripsi oleh UNESCO pada Daftar Representatif Budaya Takbenda Warisan Manusia

Statement of Participation and Agreement of the Angklung Community with Nomination File Angklung Indonesia for inscription by UNESCO on the Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity

Kami, komunitas Angklung Indonesia terdiri dari pengrajin angklung, pelatih dan pemain musik angklung, pemuka adat/kebudayaan, pejabat/dinas/aparat dan anggota organisasi angklung, yang bertanda tangan di bawah ini, setelah membaca/mendengarkan presentasi tentang isi berkas Nominasi Angklung Indonesia untuk diinskripsi oleh UNESCO pada Daftar Representatif Budaya Takbenda Warisan Manusia pada Sidang Verifikasi, dan memberikan masukan kami, dengan ini menyatakan: / *We, the undersigned members of the community of Indonesian Angklung, consisting of angklung craftspersons, trainers, musicians, tradition and culture experts, government and local officials and members of angklung organizations, after reading/hearing a presentation of the abovementioned nomination file of Angklung Indonesia to be inscribed on the UNESCO Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity, at a Verification Seminar and giving our input, hereby state:*

1. Bahwa kami telah diikutsertakan dalam persiapan berkas nominasi ini dan telah memberikan masukan kami dalam perancangan berkas tersebut / *That we have participated in the preparation of this nomination file and have given our input for the drafting of this nomination file.*

2. Bahwa kami memahami isi berkas, dan setelah dilakukan koreksian seperlunya, kami secara bebas menyetujui dan percaya bahwa isi berkas merupakan gambaran yang benar tentang warisan budaya Angklung Indonesia termaksud, dan setuju kalau berkas nominasi ini diajukan kepada UNESCO untuk diinskripsi pada Daftar Representatif Budaya Takbenda Warisan Manusia. *That we understand the contents of the file, and after necessary corrections have been made, we freely agree with and believe that it represents a true picture of the cultural heritage of Indonesian Angklung, and agree that the file be proposed to UNESCO for inscription on the Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity..*

Saung Angklung Udjo, Bandung, 11 Agustus 2009/ *11th August 2009*

**Pernyataan Keikutsertaan dan Persetujuan Komunitas Angklung atas Berkas Nominasi Angklung Indonesia untuk
dinskripsi oleh UNESCO pada Daftar Representatif Budaya Takbenda Warisan Manusia**

**Statement of Participation and Agreement of the Angklung Community with Nomination File Angklung Indonesia for
inscription by UNESCO on the Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity**

No.	Nama/ Name	Alamat/ Address	No. Telpn/HP	Kegiatan terkait Angklung Angklung Related Activity	Tanda tangan Signature
1	HARRY NAWYD	JL. VENUS SUKARAJA JARANRA 5725228		Peneliti	
2	A. UHANA, NANA DARSA	Jln Padasuk 83, 0817422571		Jelajah Seni	
3	Utang Humawan	Babakan Sari Cibiru 081809343999		Pembis Budaya	
4	Dadang Sunjaya	Jl. Cijawura Girang II 1111		Pelatih	
5	Ade Yusuf	SS BA Japar, Blj 081321067450		Peneliti	
6	Sri Rospki	Jl. Medan Merdeka Barat no 3 - Jakarta		Pengrajin/Pakar Warisan	
7	Dr. Hj. Eva Farida MPR	Jl. Dr. Cipto. WPT Bandung		Pengagum	
8	Label Amrullah	Jl. Suka Asih no 61 A Bandung		Pelatih	
9	YASMIN SAVITRI	Jl. Dr. Setiabudi no. 219 Bandung		Player KABUMI	
10	RITA ANGEOROWATI	Jl. Suka Asih 61A Setiabudhi Bandung		Pembina Latihan Angklung	
11	Hj. SRI HARTATI, S.Pd	JL GEGER KALONG GIRANG NO 12 BANDUNG		Pembina	
12	Sopian	- SDA -		Pemain, Pelatih	
13	Moch. Juyaman	SMAN JATINUNGGAL KAB. SUMEDANG		Pelatih	
14	Bedewahidin	SMAN Jatinunggal 081322687744		Pembina	
15	Rahman Ach B.	SMAN Jatinunggal		Pemain	

**Pernyataan Keikutsertaan dan Persetujuan Komunitas Angklung atas Berkas Nominasi Angklung Indonesia untuk
dinskripsi oleh UNESCO pada Daftar Representatif Budaya Takbenda Warisan Manusia**

**Statement of Participation and Agreement of the Angklung Community with Nomination File Angklung Indonesia for
inscription by UNESCO on the Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity**

No.	Nama/ Name	Alamat/ Address	No. Telpon/HP	Kegiatan terkait Angklung Angklung Related Activity	Tanda tangan Signature
16.	Usman Suhana B., S.Sn.	Cibatu Garut	081932174573	Pembina may. Angklung Paderus	
17	Dian Seriwani	Cibatu Garut	081399382556	"	
18	Nurhadiat	SDN Dr. Cepti	085295137920	Pembina Angklung	
19.	Aan Handoyo	SMP Laboratorium UPI	0816609475	Pelatih Angklung	
20	M. SANI. W.	MARGALUYU 243 B CIMAH		MMA + AWI	
21	RONY MULYONO	CIDERAH	0818208437	Yayasan Dayaloka	
22	Aep Nugraha, S.Sn, M.Sn	Jl. melong Raya 80	081322519151	STSI Bandung karawitan	
23	Diat Wn Sj.	Jatinunggal	081394447570	SMA W Jatinunggal	
24	Agih Nugraha	Jatinunggal	081320616006	SISWA	
25	Renitasari	"	085295221825	"	
26.	Gita MK	"	087827562933	"	
27	Apony susuwati	Pasirhanga	087827902122	"	
28	Nisa Khusnaeni	Setiabudi	081573021232	Mahasiswa STBA	
29	Furien	Margahayu, Kopo	081321800489	Mahasiswa "	
30	Sari Yudianti	Cimahi	085220703992	"	

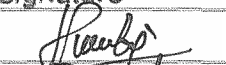

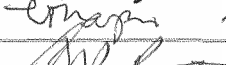


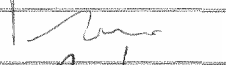
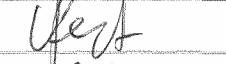








**Pernyataan Keikutsertaan dan Persetujuan Komunitas Angklung atas Berkas Nominasi Angklung Indonesia untuk
dinskripsi oleh UNESCO pada Daftar Representatif Budaya Takbenda Warisan Manusia**

**Statement of Participation and Agreement of the Angklung Community with Nomination File Angklung Indonesia for
inscription by UNESCO on the Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity**

No.	Nama/ Name	Alamat/ Address	No. Telpon/HP	Kegiatan terkait Angklung Angklung Related Activity	Tanda tangan Signature
31.	Resi S.	Kopo	085721261022	STBA (GS, Angklung)	
32	IMa	Cibiru	0856722291	STBA (GS, angklung)	
33	Pebby Ayu	Cibiru	085659128843	STBA (GS, angklung)	
34	Annisa Nurfitri S.	Cihampelas	085721048319	STBA (GS angklung)	
35	Virgiawan Praga	Kopo	085722940030	STBA (GS Angklung)	
36	M. FUSFIAN S	Kopo	081394483928	STBA (- " -)	
37.	Lilis Saribanon	Cihampelas	085694959515	STBA (- " -)	
38.	Januar tri Susanti	Cihampelas	085723647444	STBA (GS Angklung)	
39.	Ivra Nelly F	Usung Berang	081394220600	STBA (GS Angklung)	
40	Bani Annisa N a S	Cilbahi	085659250086	STBA (GS angklung)	
41	Dra. Ina Rasmelina	Turangga Barat	0811238474	STBA (GS. off)	
42.	Dra. Hanny. A.	Cigadung Pasautrea	0818.625228	STBA (GS.off.)	
43	Sam Udjo	Sawang Angklung Udjo	08156169020	penerus Pak Udjo	
44	Idham P.M	sawang angklung udjo	085624123312	penerus Pak SAMUDJO	
45	Rano Dimas	DAGO, BANDUNG	08881833444	Konsultan Sawang Angklung Udjo	

Pernyataan Keikutsertaan dan Persetujuan Komunitas Angklung atas Berkas Nominasi Angklung Indonesia untuk
dinskripsi oleh UNESCO pada Daftar Representatif Budaya Takbenda Warisan Manusia

Statement of Participation and Agreement of the Angklung Community with Nomination File Angklung Indonesia for
inscription by UNESCO on the Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity

No.	Nama/ Name	Alamat/ Address	No. Telpon/HP	Kegiatan terkait Angklung Angklung Related Activity	Tanda tangan Signature
46	SITI SITA	MUSEUM Sri Batara Ciar		PEKERJA hrs. PRA.	
47	ACE SUPRIATNA	— " —	085221145114	— " —	
48	Erna G. Pirous	Jl. Bukit Pakar Timur II/III		1953-1960	
49	AD. PIROUS	— " —		— " —	
50	Dayu Prastini	Jl. Padalaras		Makan Jabur	
51	PRIMA	Tempo			
52	Luchman Gusman	Bank Indonesia			
53	YURRI ERFANSYAH	REPUBLIKA	081809517830		
54	Rachman	Kad ar Bdg	085624848525		
56	Walwan	Cicadas	081931364022	pecinta angklung	
57	TAJIFIK. UPTA	Sungai Anyang Nopo			
58	Dayu Prastini	Jl. Padalaras		Angklung Course	
59	Gina Mayang	Jl. Padasuka Indah A.30/B Cimahi		Host / Instruktur Angklung	
60	Harry Patra	Jl. Gandapura		Host / Instruktur Angklung	
61	Terra Varante	Jl. A. Yani Gg. Bbk Tanansi No.32		pecinta angklung	

**Pernyataan Keikutsertaan dan Persetujuan Komunitas Angklung atas Berkas Nominasi Angklung Indonesia untuk
dinskripsi oleh UNESCO pada Daftar Representatif Budaya Takbenda Warisan Manusia**

**Statement of Participation and Agreement of the Angklung Community with Nomination File Angklung Indonesia for
inscription by UNESCO on the Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity**

No.	Nama/ Name	Alamat/ Address	No. Telpon/HP	Kegiatan terkait Angklung Angklung Related Activity	Tanda tangan Signature
62.	Putra Widastuti	Ciherah F RT 03 No.61 Belg	085659345950	Duta Bahasa (pencinta angklung)	
63.	LESTARI P.	PAJAJENAN R3 no 2		PUTA BAHASA	
64	Dinasti Rahodianti	Jl. Bang Bayang no. 79 Dago	081320401024	LO (IACS)	
65	Bayu Anggara	JL. Cimindi no 88 /	022-91917347	LO (IACS)	
66	Deni Darmawenda	Jl. Moh. Toha no. 132 /	022-91234881	IPR Lawyer	
67.	Kiki Kurnataman	Jl. Jatiwangi 13 ^A	9190066	manajemen Room & Venue	
68.	sabrina Maharani	Jl. Pasir leutik no. 14			
69.	BBY.A.R. Wiramihardja	Jl. Bhineka IV/2 Cawang. Baru		Pembina.	
70	Handiman D	Jl. Suiapati 95 Bandung	022-2516388	Pembina / Perajuri	
71	GAORA MURAHARAJA	Jl. Suiapati 95 Bandung	08111557160	AKAR BUDAYA	
72.	Uhy Muhammad	Jl. Jend. Sudirman Jakarta	0818121879	Calon peneliti	



KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

TENTANG

REVIEW

RENCANA STRATEGIS

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Tahun 2010 - 2014





PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : PM.105/UM.001/MKP/2010

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2010-2014

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran kebudayaan dan pariwisata dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan telah ditetapkan komitmen yang bersifat strategis di bidang kebudayaan dan pariwisata, berupa Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014;
 - b. bahwa dalam upaya lebih memperjelas kinerja Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dalam memberikan gambaran tingkat pencapaian tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi, misi dan strateginya, diperlukan adanya penyempurnaan dan perbaikan Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014 dimaksud;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan perubahan atas Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014, dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 07/HK.001/MKP-2007;




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2010-2014.**

KESATU : Menetapkan Perubahan Pertama Atas Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014 yang merupakan pedoman dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

KEDUA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Nopember 2010

 MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Ir. JERO WACIK, SE 



Kata Pengantar



Dalam rangka perwujudan amanat Peraturan Presiden RI no 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Renstra-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh.

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kembudpar) telah menyusun Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 2010 – 2014 (Renstra Kembudpar 2010 – 2014) yang memuat visi, misi, nilai-nilai, penilaian dan kajian lingkungan eksternal dan internal, tujuan, sasaran dan faktor kunci keberhasilan, serta strategi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dari tahun 2010 sampai dengan 2014 sebagai upaya memberikan informasi yang akuntabel dan terpercaya menyangkut program dan kegiatan untuk mencapai target dan sasaran pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan nasional.

Dalam perjalanan waktu, Renstra tersebut mengalami revisi atau penyempurnaan. Review Renstra ini disusun untuk lebih mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kinerja di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Dengan berpedoman dengan Renstra ini, seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dapat menyelenggarakan kegiatan secara

lebih sistematis, konsisten, dan seimbang sehingga pencapaian kinerja rencana strategis yang telah ditetapkan ini dapat dengan mudah diukur.

Pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Renstra Kemenbudpar 2010 – 2014 ini, semoga kerja sama ini dapat ditingkatkan di masa yang akan datang

Jakarta,



Bab I.

Pendahuluan

1.1. Kondisi Umum

Pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan merupakan bagian dari proses pembangunan nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur. Pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan kebudayaan tercakup dalam pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang terkait erat dengan pengembangan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025, yang mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama diarahkan pada pencapaian sasaran untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab; dan mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Dalam pembangunan kebudayaan, terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Disamping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif serta harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan nasional, dan memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan alam dan budaya bangsa dengan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang kebudayaan telah berperan penting dalam peningkatan pemahaman keragaman budaya, penyelesaian masalah tanpa kekerasan, serta pengembangan interaksi antarbudaya. Sementara itu dalam pembangunan kepariwisataan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata berperan penting sebagai penyelenggara pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dalam pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup di dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan kebudayaan periode tahun 2004-2009, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata telah berperan penting dalam memperkuat jati diri dan karakter bangsa dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur, yang memberikan kemajuan yang cukup berarti dan menjadi landasan pelaksanaan pembangunan kebudayaan pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014. Berbagai kemajuan yang telah dicapai, antara lain semakin pulih dan terpeliharanya kondisi aman dan damai dilihat dari menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok masyarakat, serta semakin kukuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh: (1) semakin berkembangnya pemahaman terhadap pentingnya kesadaran multikultural yang ditandai oleh menurunnya eskalasi konflik/perkelahian antar kelompok warga di tingkat desa (dari 2.583 desa pada tahun 2003 menjadi 1.235 desa (109,2 persen) pada tahun 2008; BPS, Podes 2008); (2) tumbuhnya sikap saling menghormati dan menghargai keberagaman budaya yang ditandai dengan persentase persepsi masyarakat terhadap kebiasaan bersilaturahmi (79,22 %) ¹; persentase persepsi masyarakat terhadap kebiasaan kegiatan gotong royong (84,6 %) ²; serta persentase persepsi masyarakat terhadap kebiasaan tolong menolong antar sesama warga (90,4%) ³ (Susenas tahun 2006); (3) semakin berkembangnya proses internalisasi nilai-nilai luhur, pengetahuan dan teknologi tradisional, serta kearifan lokal yang relevan dengan tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti nilai-nilai persaudaraan, solidaritas sosial, saling menghargai, serta rasa cinta tanah air; (4) meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap hasil karya kreatifitas seni budaya dan perfilman yang ditandai antara lain dengan meningkatnya jumlah produksi film seluloid nasional dari tahun 2007 berjumlah 53 film dan pada tahun 2009 berjumlah 78 film. Di samping itu ditandai pula dengan penyelenggaraan berbagai pameran, festival, pementasan, dan pentas seni dan film, pemberian penghargaan di bidang seni dan film, serta pengiriman misi kesenian ke berbagai acara internasional sebagai bentuk diplomasi/promosi kesenian nasional Indonesia.

¹ persentase persepsi masyarakat terhadap kebiasaan bersilaturahmi kadang-kadang – sering – dan lebih baik

² persentase persepsi masyarakat terhadap kegiatan gotong royong

³ persentase persepsi masyarakat terhadap kebiasaan tolong menolong antar sesama warga

Jumlah Produksi Film di Indonesia Tahun 2007 – 2009

No	Nama	2007	2008	2009
1.	Film seluloid nasional	53	87	78
2.	Film iklan seluloid	3.015	2.073	7.824
3.	Film Seluloid Impor	56	137	161
Jumlah		3.124	2.297	8.063

Sumber : Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2009

Data Film Seluloid yang Terdaftar dan Lulus Sensor Tahun 2007 - 2009

No	Nama	2007	2008	2009
1.	Film yang terdaftar	77	182	131
2.	Film yang lulus sensor	53	87	78

Sumber : Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2009

Rekapitulasi Hasil Sensor Film dan Rekaman Video Tahun 2007 - 2009

No	Nama	2007	2008	2009
1	Film Nasional Lulus Penuh	40	60	51
2	Film Nasional Lulus dengan Potongan	10	27	27
3	Film Nasional yang Ditolak	-	0	0
4	Film Import Lulus Penuh	99	102	114
5	Film Import Lulus dengan Potongan	71	42	44
6	Film Import yang Ditolak	-	2	3
7	Rekaman Video Lulus Penuh	6.783	33.393	27.980
8	Rekaman Video Lulus dengan Potongan	354	1.240	1.250
9	Rekaman Video yang Ditolak	-	81	52

Sumber : Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2009

Jumlah Perusahaan yang Memiliki Ijin Usaha Perfilman (IUP)

No	Jenis	2007	2008	2009
1	Perusahaan Produksi	704	1.072	1.163
2	Penyewaan Alat Film	17	17	17
3	Jasa Laboratorium Film	2	2	2
4	Pengimpor Film	50	56	57
JUMLAH		773	1.147	1.239

Sumber : Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2009

(5) tumbuhnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan kekayaan dan warisan budaya yang ditandai oleh meningkatnya kesadaran, kebanggaan, dan penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia, meningkatnya upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan benda cagar budaya (BCB)/situs, serta berkembangnya peran dan fungsi museum sebagai sarana rekreasi dan edukasi.

Sampai dengan tahun 2009, daftar warisan budaya dunia (*World Cultural Heritage*) di Indonesia ada tiga; daftar budaya tak benda warisan manusia yang diakui sebagai warisan budaya dunia ada tiga; sedangkan daftar nominasi warisan budaya dunia yang sudah mendapat nomor sementara ada dua situs/kawasan dan *tentative list* yang sedang disiapkan ada 5 situs/kawasan.

Daftar Warisan Budaya Dunia (*World Cultural Heritage List*)

No	Nama	Nama Penetapan	Tahun Penetapan	Nomor Penetapan
1.	Kompleks Candi Borobudur	<i>Borobudur Temple Compound</i>	1991	nomor: 592
2.	Kompleks Candi Prambanan	<i>Prambanan Temple Compound</i>	1991	nomor : 642
3.	Situs Prasejarah Sangiran	<i>Sangiran Early Man Site</i>	1996	nomor 593

Sumber : Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2009

Daftar Representatif Budaya Takbenda Warisan Manusia

No	Nama	Nama Penetapan	Tahun Penetapan
1.	Wayang	<i>Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity</i>	2003
2.	Keris	<i>Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity</i>	2005
3.	Batik	<i>Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity</i>	2009

Sumber : Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2009

Daftar Nominasi Warisan Budaya Dunia Dan *Tentative List* Warisan Budaya Dunia

No	Nama
Nominasi Warisan Budaya Dunia	
1.	<i>"The Cultural Landscape of Bali Province"</i> (nomor sementara 1194 C)
2.	<i>"Tana Toraja Traditional Settlement"</i> (nomor sementara 1038 C)
<i>Tentative List</i> Warisan Budaya Dunia	
1	Kompleks Percandian Muara Jambi, di Jambi
2	Kompleks Percandian Muara Takus, di Riau
3	Bekas Kota Lama Kerajaan Majapahit, di Trowulan
4	Lukisan gua-gua prasejarah di Maros-Pangkep, di Sulawesi Selatan
5	Pemukiman Tradisional Nias Selatan, di Sumatera Utara

Sumber : Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2009

Dari inventarisasi data Benda Cagar Budaya (BCB) di Indonesia sampai dengan tahun 2009 : jumlah Benda Cagar Budaya BCB/situs sebanyak 8.783 BCB/situs, dari jumlah tersebut yang sudah dipelihara sebanyak 1.815 BCB/Situs sedangkan yang belum dipelihara sebanyak 6.968 BCB/Situs dengan jumlah juru pelihara sebanyak 2.802 orang.

Data Benda Cagar Budaya (BCB) di Indonesia

No	Nama	Jumlah
1.	Jumlah BCB situs	8.783
2.	Jumlah yang dipelihara	1.815
3.	Jumlah yang belum dipelihara	6.968
4.	Jumlah juru pelihara	2.802

Sumber : Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2009

(6) meningkatnya kerja sama yang sinergis antar-pihak terkait dalam upaya pengembangan nilai budaya, pengelolaan keragaman budaya serta perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN ke-1 periode tahun 2004 – 2009 , RPJMN ke-2 periode tahun 2010 – 2014 ditujukan untuk lebih menekankan **pemantapan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa.**

Sementara itu, peran strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dalam peningkatan kinerja kepariwisataan selama Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode tahun 2005-2009 telah mendukung pencapaian hasil dan kemajuan yang ditunjukkan dengan meningkatnya penerimaan PDB dari Rp 2,295.83 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 4,954.03 triliun pada tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi PDB pariwisata selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008. Tahun 2008 pertumbuhan PDB pariwisata mencapai angka 6,31 % sedangkan PDB nasional sebesar 6,06 %, dimana kontribusi PDB pariwisata terhadap PDB nasional pada tahun 2008 mencapai angka 3,09 %.

KINERJA PARIWISATA BERDASARKAN INDIKATOR EKONOMI TAHUN 2001-2009

NO	URAIAN	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009* (Q.1)
1	ADHB (triliun Rp)									
	PDB NASIONAL	1,646.32	1,821.83	2,013.67	2,295.83	2,774.28	3,339.22	3,949.32	4,954.03	1,300.30
	PDB PARIWISATA	49.10	75.25	81.34	88.61	101.69	118.67	134.89	153.25	42.26
	Hotel	9.94	10.46	11.33	12.69	14.15	16.07	17.32	18.82	4.93
	Restoran	33.75	58.63	63.19	68.32	78.81	92.42	106.25	121.24	33.66
	Rekreasi & Hiburan	5.41	6.17	6.82	7.61	8.74	10.17	11.32	13.19	3.68
2	ADHK (triliun Rp)									
	PDB NASIONAL	1,440.41	1,505.22	1,577.17	1,656.52	1,750.82	1,847.13	1,963.09	2,082.10	527.33
	PDB PARIWISATA	46.77	49.24	51.68	55.15	58.48	61.92	66.09	70.27	18.55
	Hotel	9.64	10.11	10.74	11.59	12.31	12.95	13.65	14.20	3.58
	Restoran	32.09	33.65	35.12	37.26	39.45	41.72	44.68	47.62	12.69
	Rekreasi & Hiburan	5.04	5.48	5.82	6.30	6.71	7.25	7.77	8.45	2.27
3	PERTUMBUHAN EKONOMI (%)									
	PDB NASIONAL	3.64	4.50	4.78	5.03	5.69	5.50	6.28	6.06	4.37
	PDB PARIWISATA	5.63	5.28	4.95	6.72	6.03	5.88	6.74	6.31	8.18
	Hotel	7.39	4.83	6.24	7.93	6.23	5.18	5.37	4.07	3.20
	Restoran	5.20	4.87	4.38	6.08	5.88	5.75	7.08	6.58	9.34
	Rekreasi & Hiburan	5.12	8.76	6.13	8.34	6.52	7.95	7.26	8.70	9.96
4	KONTRIBUSI PDB PARIWISATA TERHADAP PDB NASIONAL (%)									
	PDB PARIWISATA	2.98	4.13	4.04	3.86	3.67	3.55	3.42	3.09	3.25
	Hotel	0.60	0.57	0.56	0.55	0.51	0.48	0.44	0.38	0.38
	Restoran	2.05	3.22	3.14	2.98	2.84	2.77	2.69	2.45	2.59
	Rekreasi & Hiburan	0.33	0.34	0.34	0.33	0.32	0.30	0.29	0.27	0.28

Sumber: BPS *) Angka sementara

Keberhasilan kinerja kepariwisataan juga tercermin dari meningkatnya jumlah pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) dari 195.770 juta perjalanan pada tahun 2001 menjadi 225,042 juta perjalanan pada tahun 2008. Peningkatan pergerakan wisatawan nusantara selama tahun 2001–2008 menghasilkan peningkatan pengeluaran dari Rp 58,71 triliun di tahun 2001 menjadi Rp 123,17 triliun di tahun 2008 atau meningkat sebesar 109,79 persen. Pergerakan wisatawan nusantara dalam kurun waktu tahun 2001-2008 telah terjadi pertumbuhan yang berfluktuasi dengan rata-rata sebesar 2,08 persen per tahun.

**PERKEMBANGAN WISATAWAN NUSANTARA
TAHUN 2001-2009**

TAHUN	WISNUS (ribuan orang)	PERTUMBUHAN (%)	PERJALANAN (ribuan orang)	PENGELUARAN (triliun Rp)	PERTUMBUHAN (%)
2001	103.884	-	195.770	58,71	-
2002	105.379	1,44	200.589	68,82	17,22
2003	110.030	4,41	207.119	70,87	2,98
2004	111.353	1,20	202.763	71,70	1,17
2005	112.701	1,21	198.359	74,72	4,21
2006	114.270	1,39	204.553	88,21	18,05
2007	115.335	0,93	222.389	102,01	15,64
2008	117.213	1,63	225.042	123,17	20,74
2009*)	-	2,18%	229,95	128,77	-

*) tahun 2009 : angka sementara
Sumber: Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Jaringan Kementerian Budpar, 2009

Jumlah kunjungan wisman sebanyak 5,1 juta pada tahun 2001 meningkat menjadi 6,2 juta pada tahun 2008, atau meningkat sebesar 21,5 persen. Sementara itu, penerimaan devisa meningkat dari USD 5,4 miliar pada tahun 2001 menjadi USD 7,3 miliar pada tahun 2008, atau meningkat sebesar 35,89 persen. Dalam kurun waktu tahun 2001-2008 telah terjadi peningkatan kunjungan wisman rata-rata sebesar 4,4 persen per tahun, dan penerimaan devisa rata-rata sebesar 12,56 persen per tahun.

**KUNJUNGAN WISMAN, RATA-RATA PENGELUARAN, LAMA TINGGAL
DAN PENERIMAAN DEvisa TAHUN 2001 – 2009**

TAHUN	KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGERA	PERTUM- BUHAN (%)	RATA-RATA PENGELUARAN PER ORANG (USD)		RATA-RATA LAMA TINGGAL (hari)	PENERIMAAN DEvisa (juta USD)	PERTUM- BUHAN (%)
			PER KUNJUNGAN	PER HARI			
2001	5.153.620	1,77	1.053,36	100,42	10,49	5.428,62	-5,57
2002	5.033.400	-2,33	893,26	91,29	9,79	4.496,15	-17,18
2003	4.467.021	-11,25	903,74	93,27	9,69	4.037,02	-10,21
2004	5.321.165	19,12	901,66	95,17	9,47	4.797,87	18,85
2005	5.002.101	-6,00	904,00	99,86	9,05	4.521,90	-5,75
2006	4.871.351	-2,61	913,09	100,48	9,09	4.447,98	-1,63
2007	5.505.759	13,02	970,98	107,70	9,02	5.345,98	20,19
2008*)	6.429.027	16,77	1.178,54	137,38	8,58	7.377,39	38,00
2009**)	4.619.483	1.07	995,93	129,57	7,69	-	-

Catatan : *) termasuk 194.530 penumpang transit internasional
**) Wisman Jan- Sept 09

Berdasarkan data angka-angka wisatawan mancanegara di atas, maka perolehan devisa dari sektor pariwisata cukup menggembirakan selama periode tahun 2005-2008. Devisa dari sektor pariwisata selalu berada dalam posisi enam besar dibandingkan dengan komoditas lainnya, dimana tahun 2008 devisa sektor pariwisata berada di urutan ke – 4 sebagai penyumbang devisa terbesar di bawah minyak dan gas bumi; minyak kelapa sawit dan karet olahan sebagaimana tampak dalam tabel berikut.

RANGKING DEvisa SEKTOR PARIWISATA (2004-2008)

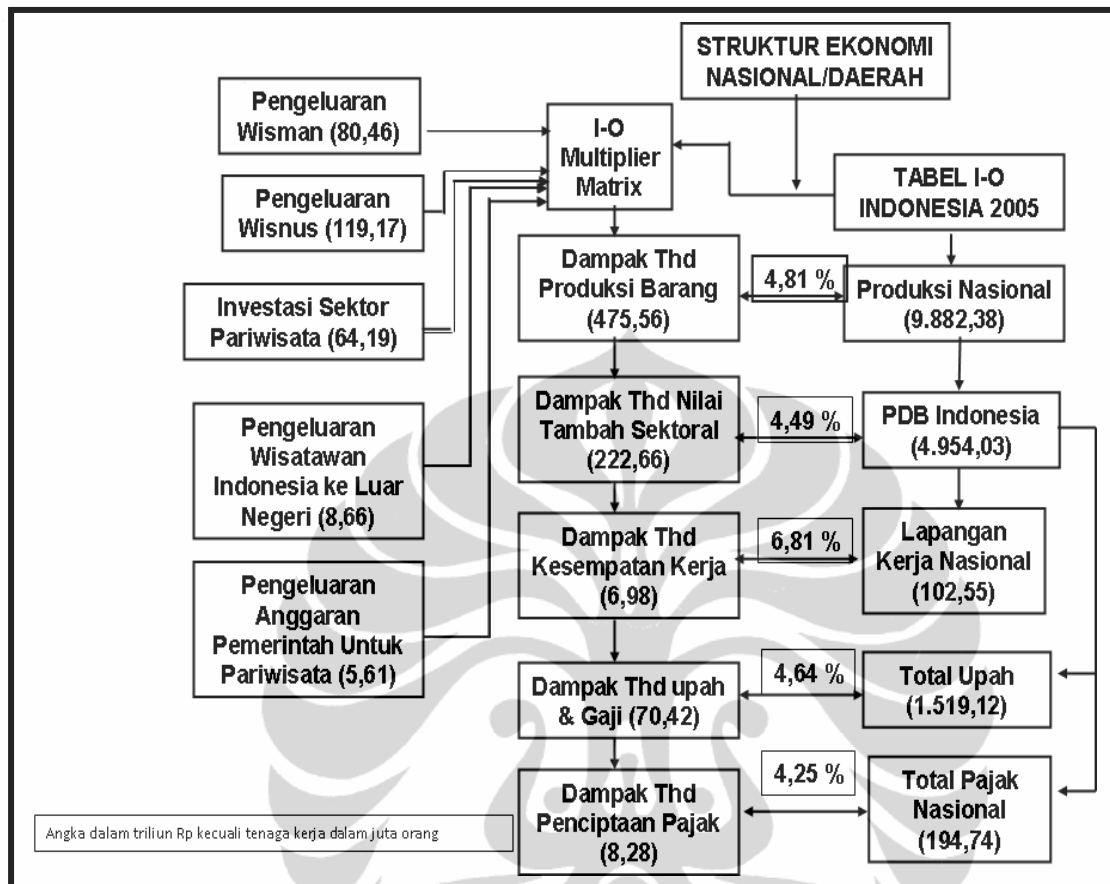
RANK	2006		2007		2008	
	JENIS KOMODITI	NILAI (juta USD)	JENIS KOMODITI	NILAI (juta USD)	JENIS KOMODITI	NILAI (juta USD)
1	Minyak & gas bumi	21.209,50	Minyak & gas bumi	22.088,60	Minyak & gas bumi	29.126,30
2	Pakaian jadi	5.608,16	Minyak klp sawit	7.868,64	Minyak klp sawit	12.375,57
3	Karet olahan	5.465,14	Karet olahan	6.179,88	Karet olahan	7.579,66
4	Minyak klp sawit	4.817,64	Pakaian jadi	5.712,87	<i>Pariwisata</i>	7.377,00
5	Alat listrik	4.448,74	<i>Pariwisata</i>	5.345,98	Pakaian jadi	6.092,06
6	<i>Pariwisata</i>	4.447,98	Alat listrik	4.835,87	Alat listrik	5.253,74
7	Tekstil	3.908,76	Tekstil	4.177,97	Tekstil	4.127,97
8	Kayu olahan	3.324,97	Bahan kimia	3.402,58	Kertas & brg dr kertas	3.796,91
9	Kertas & brg dr kertas	2.859,22	Kertas & brg dr kertas	3.374,84	Makanan olahan	2.997,17
10	Bahan kimia	2.697,38	Kayu olahan	3.076,88	Kayu olahan	2.821,34
11	Makanan olahan	1.965,56	Makanan olahan	2.264,00	Bahan kimia	2.754,30

TAHUN 2008 SEKTOR PARIWISATA MENEMPATI URUTAN KE-4 SEBAGAI PENYUMBANG DEvisa TERBESAR NASIONAL

Variabel pembelanjaan wisman dan wisnus bersama-sama dengan variabel-variabel investasi sektor pariwisata, pengeluaran wisatawan Indonesia ke luar negeri (wisnas), pengeluaran anggaran Pemerintah untuk pariwisata, dan pengeluaran dunia usaha untuk bidang pariwisata akan menjadi basis perhitungan dampak terhadap sektor-sektor lainnya.

Pada tahun 2008, variabel-variabel di atas telah memberikan kontribusi dampak terhadap produksi barang dan jasa nasional sebesar Rp 475,56 triliun (4,81%), terhadap PDB sebesar Rp 222,66 triliun (4,49%), terhadap kesempatan kerja sebanyak 6,98 juta orang (6,81%), terhadap upah dan gaji sebesar Rp 70,42 triliun (4,64%) dan terhadap penciptaan pajak sebesar Rp 8,28 triliun (4,25%). Perkembangan dampak ekonomi pariwisata terhadap kesempatan kerja dan pajak tidak langsung dapat dilihat dalam berikut.

Bagan Dampak Ekonomi Pariwisata Tahun 2008



Catatan:

- Basis Data Tahun 2008 Angka dalam triliun rupiah kecuali tenaga kerja dalam juta orang ,
- Sumber: BPS, 2009, diolah oleh : Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Jaringan, Kemenbudpar, 2009

Kinerja pariwisata di atas berdasarkan neraca perjalanan wisata dapat dikenali *travel balance* dengan melihat angka aliran devisa yang masuk (*inflows*) dikurangi dengan aliran keluar (*outflows*) oleh wisatawan nusantara yang berpergian ke luar negeri. Data dari tahun 2004 menunjukkan angka *net* (pengurangan *inflows* dengan *outflows*) menunjukkan fluktuasi yang cenderung naik kembali (*rebound*). Pada tahun 2004 nilai *net* yang diperoleh mencapai USD 1.291 selanjutnya pada tahun 2006 memiliki nilai yang paling rendah sekitar USD 418 kemudian secara bertahap pada tahun 2007 naik sebesar 5,7 % kemudian pada tahun 2008 nilai *net* naik ke angka USD 1.981 dimana tingkat kenaikan angka tersebut dipengaruhi oleh kenaikan peroleh devisa sekitar USD 7.377 dari tahun sebelumnya hanya sebesar USD 5.346.

**KINERJA PARIWISATA BERDASARKAN
NERACA PERJALANAN PARIWISATA (*TRAVEL BALANCE*)
(juta USD)**

TAHUN	INFLOWS	OUTFLOWS	NET
2004	4.798	3.507	1.291
2005	4.522	3.584	938
2006	4.448	4.030	418
2007	5.346	4.904	442
2008	7.377	5.397	1.981
2009 (Q1-3)	4.619	3.575	1.044

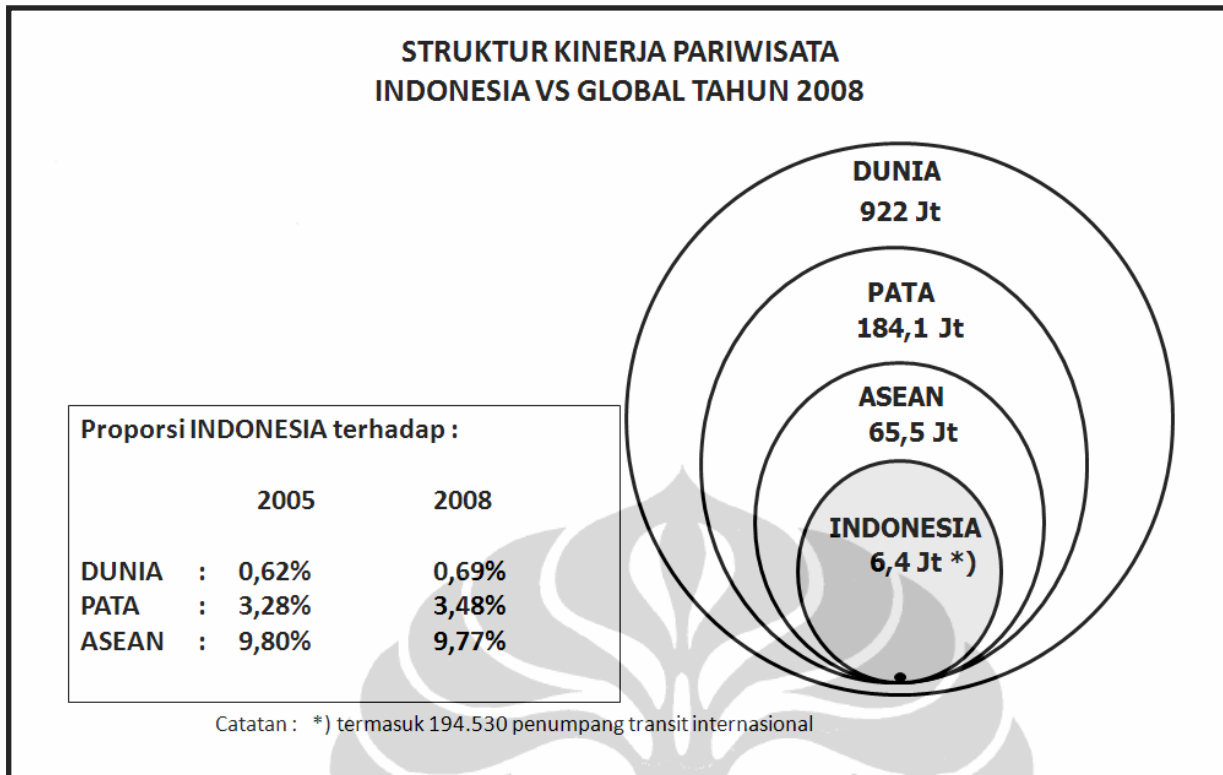
Sumber : Bank Indonesia (Neraca Pembayaran Indonesia) &
Depbudpar (Survei Outbound setiap tahun)

Apabila dilihat dari kinerja pariwisata Indonesia terhadap kinerja pariwisata global, dari data tahun 2008 menunjukkan bahwa kinerja pariwisata Indonesia masih menunjukkan nilai yang positif (+) dilihat dari pertumbuhan kunjungan wisatawan dunia. Dari data yang ada pada tahun 2008 kinerja pariwisata Indonesia terhadap dunia menunjukkan bahwa pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kunjungan wisatawan dunia, dimana Indonesia mencapai angka pertumbuhan wisatawan sebesar 12,8% sedangkan dunia menunjukkan angka 2,00%.

**STRUKTUR KINERJA PARIWISATA
INDONESIA vs GLOBAL TAHUN 2008**

	DUNIA (2008)		INDONESIA (2008)	
	PARIWISATA	INTERNASIONAL	PARIWISATA	NASIONAL
JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA	922 JUTA		6,4 JUTA	
PERTUMBUHAN KUNJUNGAN WISATAWAN	2,00%		12,89%	
PENDAPATAN PARIWISATA	USD 944,00 miliar		USD 7,38 miliar	
KONTRIBUSI PARIWISATA TERHADAP GDP	9,90%	60,59 Triliun	4,49%	514,39 Miliar
INVESTASI BIDANG PARIWISATA	9,40%	USD 487 Miliar	5,09%	Rp. 35,24 Triliun
PENYERAPAN TENAGA KERJA PARIWISATA	238 Juta Lapangan Kerja	Lapangan Kerja	5,22 Juta (6,81%) Lapangan Kerja	102,55 Juta Lapangan Kerja

Kontribusi Pariwisata terhadap GDP 2008 :
Malaysia 12,3% Thailand 6,5%



1.2. Potensi Dan Permasalahan

Tantangan pembangunan kebudayaan dalam kurun waktu tahun 2005 – 2025 seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadi tantangan bangsa Indonesia untuk dapat mempertahankan jati diri bangsa sekaligus memanfaatkannya untuk pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya dan peningkatan daya saing melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dan penyerapan nilai-nilai universal.

Rumusan permasalahan yang muncul bidang kebudayaan pada periode ke-1 (tahun 2005 – 2009) pelaksanaan RPJPN adalah sebagai berikut :

- a. Lemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya.
- b. Terjadinya krisis jati diri (identitas) nasional.
- c. Kurangnya kemampuan bangsa dalam mengelola kekayaan budaya yang kasat mata (*tangible*) dan yang tidak kasat mata (*intangible*).

Melihat kondisi umum serta tantangan dan permasalahan di atas, secara umum permasalahan pembangunan kebudayaan untuk jangka waktu tahun 2010 – 2014 adalah :

1. **Memperkuat karakter dan jati diri bangsa.** Semakin derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah membuka peluang terjadinya interaksi budaya antarbangsa. Proses interaksi budaya tersebut di satu sisi berpengaruh

positif terhadap perkembangan dan perubahan orientasi nilai dan perilaku bangsa Indonesia. Di sisi lain interaksi budaya dapat menimbulkan pengaruh negatif, seperti semakin mudarnya penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, rasa cinta tanah air, serta berbagai perilaku yang tidak sesuai dengan nilai, norma, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kondisi ini ditunjukkan antara lain oleh munculnya gejala menurunnya kualitas penggunaan bahasa Indonesia, menurunnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri, serta menurunnya sikap toleransi dan tenggang rasa dalam masyarakat sehingga menimbulkan potensi terjadinya pertikaian dan konflik antarwarga. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah konflik yang terjadi masih cukup tinggi, yaitu sebanyak 2.687 kasus (Podes 2008). Dari sejumlah kasus konflik tersebut, jenis konflik yang paling sering terjadi adalah konflik antarkelompok warga (46,0 persen), konflik warga antardesa/kelurahan (34,9 persen), serta konflik antarsuku/etnis (4,4 persen). Dengan demikian, tantangan ke depan adalah **memelihara dan melestarikan nilai-nilai tradisi luhur seperti, cinta tanah air, nilai solidaritas sosial, dan keramahmatan yang menjadi identitas budaya yang berfungsi sebagai perekat persatuan bangsa dalam segenap aspek kehidupan masyarakat.**

2. **Meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap keragaman budaya.** Keragaman seni-budaya dan tradisi telah menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang kaya dengan berbagai bentuk ekspresi budaya dan pengetahuan tradisional, seperti seni rupa, seni pertunjukan, seni media, cerita rakyat, permainan tradisional, tekstil tradisional, pasar tradisional, dan upacara tradisional. Keragaman seni, budaya, dan tradisi yang merupakan hasil karya budaya ini perlu untuk dipelihara, dilindungi dan dikembangkan oleh masyarakat. Pengembangan seni, budaya, dan tradisi memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan apresiasi masyarakat dari generasi ke generasi terhadap keragaman budaya, yang adaptif terhadap pengaruh budaya global yang positif untuk kemajuan bangsa. Sesuai dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat, peningkatan apresiasi dan penyaluran kreativitas berkesenian masyarakat menghadapi kendala, antara lain: (1) terbatasnya sarana dan prasarana kesenian, seperti galeri, taman budaya, gedung kesenian, dan gedung bioskop; (2) menurunnya minat masyarakat dalam menonton kegiatan seni-budaya dari 20,2 persen pada tahun 2003 menjadi 16,0 persen pada tahun 2006 (BPS, Susenas 2006); (3) terjadinya pembajakan karya seni dan budaya. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah **peningkatan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap karya seni dan budaya serta perlindungan terhadap kekayaan intelektual (KI), terutama karya seni dan budaya, baik yang bersifat individual maupun kolektif.**

3. **Meningkatkan kualitas pengelolaan warisan budaya.** Kondisi objektif dewasa ini menunjukkan bahwa pada era otonomi daerah, kualitas pengelolaan warisan budaya bangsa, seperti benda cagar budaya, situs, kawasan cagar budaya, dan museum masih sangat beragam. Berdasarkan data per November tahun 2009, jumlah benda cagar budaya (BCB) yang telah diinventarisasi adalah sebanyak 8.783 BCB/situs (Kemenbudpar, 2009). Jumlah tersebut, BCB yang dipelihara baru mencakup 1.815 BCB/situs (22,4 persen), sedangkan BCB yang telah dipugar baru sebanyak 643 BCB (5,1 persen) dan dikonservasi sebanyak 146 BCB (1,6 persen). Sedangkan untuk masalah perlindungan, yang menyangkut kasus pencurian dan perusakan BCB dari tahun 2008 sampai dengan November 2009 terdapat 39 kasus. Di samping itu, apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap warisan budaya seperti candi, istana, tugu, monumen dan tempat bersejarah lainnya masih belum berkembang yang antara lain ditunjukkan dengan menurunnya jumlah pengunjung dari 4,8 juta orang pada tahun 2006 menjadi 3,1 juta orang pada tahun 2008 (Kemenbudpar, 2008). Hal tersebut menunjukkan masih kurangnya apresiasi, pemahaman, komitmen, dan kesadaran tentang arti pentingnya warisan budaya dengan berbagai kandungan nilai-nilai luhurnya sebagai sarana edukasi dan rekreasi yang dapat mengilhami berkembangnya industri budaya yang memiliki nilai ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah **peningkatan upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya sebagai sarana rekreasi, edukasi dan pengembangan kebudayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.**
4. **Meningkatkan sumberdaya di bidang kebudayaan.** Keberhasilan pembangunan kebudayaan juga dipengaruhi oleh dukungan sumberdaya yang memadai seperti sumberdaya manusia kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan, kelembagaan, pendanaan, kemitraan, serta penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, sumberdaya kebudayaan perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pengembangan sumberdaya kebudayaan menghadapi beberapa permasalahan antara lain adalah : (1) terbatasnya sumberdaya manusia di bidang kebudayaan yang berkualitas, (2) belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan, (3) terbatasnya sarana dan prasarana kebudayaan, (4) terbatasnya dukungan peraturan perundangan kebudayaan, (5) terbatasnya kemampuan pendanaan, serta (6) belum optimalnya koordinasi antarinstansi di tingkat pusat dan daerah, serta belum optimalnya kerjasama antarpihak, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Tantangan ke depan adalah **peningkatan kapasitas sumberdaya pembangunan kebudayaan yang didukung oleh sumberdaya manusia yang kompeten, kualitas dan intensitas hasil penelitian sebagai bahan rumusan kebijakan pembangunan di bidang kebudayaan, sarana dan prasarana yang memadai, tata pemerintahan yang baik (*good governance*), serta koordinasi antartingkat pemerintahan yang efektif.**

Sedangkan untuk tantangan pembangunan sektor kepariwisataan dalam RPJPN Tahun 2005 - 2025 yang akan dihadapi adalah : meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan untuk mewujudkan secara nyata sektor pariwisata mampu **meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengurangi ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain yang lebih maju**. Tantangan tersebut dihadapkan pada situasi persaingan pengembangan pariwisata antarnegara yang makin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses globalisasi.

Berdasarkan atas kondisi umum dan tantangan pembangunan pariwisata jangka panjang tersebut di atas, maka untuk jangka waktu tahun 2010 – 2014 terdapat permasalahan sebagai berikut :

Pembangunan kepariwisataan sampai saat ini, walaupun telah menunjukkan kinerja yang membaik, namun masih belum mampu mendorong upaya mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan rakyat yang tercermin dari semakin menurunnya kontribusi pariwisata terhadap penerimaan PDB dan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2007 dibandingkan dengan kondisinya pada tahun 2004. Oleh karenanya, tantangan pembangunan kepariwisataan tahun 2010-2014 adalah meningkatkan kontribusi pariwisata dalam penerimaan PDB dan penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan pembangunan serta meningkatkan penerimaan devisa. Secara eksternal, tantangan tersebut dihadapkan pada semakin ketatnya persaingan antarnegara dalam menciptakan destinasi pariwisata yang mampu mendatangkan wisatawan dan investor, serta semakin pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Secara internal, tantangan pembangunan kepariwisataan dihadapkan pada situasi belum optimalnya kesiapan destinasi nasional untuk bersaing di pasar global, belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (*information and communication technology/ICT*) sebagai sarana pemasaran dan promosi pariwisata, masih rendahnya kualitas dan kuantitas serta profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) pariwisata dalam bersaing di pasar global, masih rendahnya jumlah dan nilai investasi di bidang pariwisata, dan belum optimalnya kemitraan dan kerjasama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat (*public and private partnership*).

1. **Kesiapan destinasi pariwisata nasional.** Belum optimalnya kesiapan destinasi untuk bersaing di pasar global dikarenakan masih lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata dan belum memadainya dukungan transportasi dan infrastruktur. Untuk meningkatkan kemampuan destinasi bersaing di pasar global dalam menarik wisatawan, diperlukan upaya meningkatkan kemampuan pengelolaan destinasi dan informasi pariwisata dengan didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan transportasi darat, laut, dan udara yang memadai serta kondisi keamanan yang kondusif sehingga wisatawan merasa nyaman dan aman berada di daerah wisata.
2. **Pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (*information and communication technology/ICT*) sebagai sarana pemasaran dan promosi.** Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang cukup pesat menuntut adanya perubahan strategi dalam pemasaran pariwisata. Namun pada umumnya

ketersediaan sarana ICT, seperti internet, saluran telepon, *broadband* untuk mendukung aktivitas *on-line* dari para wisatawan belum memadai. Di sisi lain, sarana ICT sangat penting untuk meningkatkan efektifitas pemasaran dan distribusi pariwisata. Di samping itu, dalam beberapa hal, *e-business* mampu memberikan banyak kemudahan bagi wisatawan memperoleh informasi. Oleh karenanya sebagai salah satu upaya meningkatkan pemanfaatan ICT sebagai sarana promosi dan pengembangan destinasi pariwisata, strategi pengembangan *e-business* dan *e-marketing* sangat penting mengingat strategi tersebut mampu secara efektif menjangkau pasar yang jauh lebih luas dan tanpa batas.

3. **Kualitas dan kuantitas serta profesionalisme sumber daya manusia (SDM) pariwisata.** Pembangunan kepariwisataan memerlukan peran aktif SDM, baik aparatur, pelaku usaha dan tenaga kerja, maupun masyarakat. Keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah bidang pariwisata disebabkan oleh minimnya pengetahuan kepariwisataan dan sering terjadinya perpindahan aparatur. Sedangkan tingkat profesionalisme SDM peneliti, perencana, manajerial sampai dengan *front liners* (tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan wisatawan) sangat ditentukan oleh kualitas dari pendidikan, yang pada umumnya belum : (1) memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menghasilkan SDM yang memiliki kompetensi tinggi, (2) adanya kurikulum yang berbasis kompetensi global serta (3) adanya standar kompetensi. Ditambah lagi adanya penempatan SDM pariwisata yang tidak sesuai dengan kebutuhan (*the right man not in the right place*). Pemahaman dan persepsi masyarakat tentang kepariwisataan dengan segala implikasinya masih sangat terbatas. Kondisi permasalahan tersebut turut memberikan andil pada lemahnya daya saing SDM pariwisata secara nasional. Di sisi lain, dalam era globalisasi, persaingan SDM semakin ketat, menuntut kualitas dan kuantitas serta profesionalisme SDM pariwisata berbasis kompetensi dan berstandar internasional perlu terus ditingkatkan.
4. **Jumlah dan nilai investasi di bidang pariwisata.** Masih terbatasnya jumlah investasi di bidang pariwisata menunjukkan bahwa peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan pariwisata masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi, situasi keamanan, dan kebijakan pemerintah yang belum mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif. Oleh karena itu, penciptaan iklim investasi yang kondusif di bidang pariwisata dalam rangka meningkatkan minat investor untuk melakukan investasi di Indonesia perlu terus dilakukan.
5. **Kemitraan dan kerja sama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat (*public and private partnership*).** Kemitraan dan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara pemerintah, swasta (industri pariwisata) dan masyarakat, sangat diperlukan dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan kepariwisataan. Sektor publik atau pemerintah berperan dalam menyediakan infrastruktur dan kerangka regulasi yang dapat mendorong swasta dan masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan kepariwisataan nasional. Untuk itu, upaya pengembangan pola-pola kemitraan dan kerjasama yang efektif dan efisien guna mendukung pembangunan kepariwisataan nasional akan terus dikembangkan dan di tingkatkan.

Semua permasalahan di bidang pariwisata tersebut bermuara pada daya saing pariwisata Indonesia dibandingkan dengan negara lain di dunia. Daya saing pariwisata Indonesia, menurut *The Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) Report 2009* yang diterbitkan oleh *World Economic Forum (WEF) 2009*, Indonesia menempati urutan ke-81 di antara 133 negara di dunia. Apabila dilihat dari peringkat regional maka daya saing pariwisata Indonesia berada di posisi ke-15 dari 25 negara di kawasan Asia Pasifik dan ke-5 di antara 8 negara Asean. Indeks Daya Saing Pariwisata Dunia yang dikeluarkan oleh WEF dinilai dengan 14 pilar dimana setiap pilar memiliki variabel yang disebut sub pilar dengan jumlah 73 sub pillar, dari 73 sub pilar ini mencakup semua hal yang berkaitan dengan pembangunan pariwisata di suatu negara baik yang berkaitan langsung dengan industri pariwisata (dibawah kendali langsung oleh institusi pariwisata) maupun yang tidak berkaitan langsung dengan industri pariwisata (dibawah kendali sektor/instansi lain). Berdasarkan metode penilaian diatas maka nilai tertinggi dari 14 pilar penilaian indeks daya saing tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki daya saing yang unggul pada pilar daya saing harga, artinya Indonesia adalah destinasi dunia nomor 3 dunia yang murah untuk dikunjungi karena harga hotel yang bersaing (di tempat ke-7), pajak tiket dan jasa bandara (*airport charges*) yang dinilai rendah dan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terjangkau. Pilar-pilar lainnya dimana Indonesia memiliki nilai yang kurang baik mencakup antara lain : pilar kebijakan/peraturan; pilar lingkungan; pilar keselamatan dan keamanan; pilar kesehatan; dan pilar infrastruktur teknologi informasi.

Dengan cara mengenali kelemahan-kelemahan dalam laporan daya saing pariwisata tersebut, maka dapat diambil berbagai langkah koreksi yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Upaya peningkatan daya saing pariwisata memerlukan kerjasama dan koordinasi yang harmonis dan konsisten, baik vertikal – antara pusat dengan daerah, maupun horizontal – antara pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya. Satu dan lain hal, mengingat bahwa pengembangan serta peningkatan daya saing pariwisata memerlukan keterlibatan instansi lintas sektoral dengan pertimbangan dan pemikiran multi disiplin seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisata.

INDEK DAYA SAING PARIWISATA TAHUN 2009 KAWASAN REGIONAL

Negara	Regional Rank *)	Pillars													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Singapura	2	1	42	10	53	2	15	4	37	17	27	1	10	94	29
Malaysia	7	9	54	59	69	23	35	28	77	46	4	30	21	21	32
Thailand	8	62	99	118	71	22	25	56	39	71	19	57	22	24	33
Brunei Darussalam	12	88	131	19	105	99	32	35	86	55	2	52	100	31	86
Indonesia	15	123	130	119	110	10	60	89	88	102	3	42	78	28	37
Philipina	16	72	73	113	87	59	73	90	96	92	16	69	53	65	63
Vietnam	17	96	100	100	95	61	84	80	109	79	11	82	81	52	68
Kamboja	21	122	107	88	126	18	106	107	125	122	21	108	15	58	77

PILLARS :	1. Kebijakan dan Peraturan 2. Pariwisata Berkelanjutan 3. Keamanan dan Keselamatan 4. Kesehatan 5. Prioritas Sektor Tourism and Travel	6. Infrastruktur Transportasi Udara 7. Infrastruktur Transportasi Darat 8. Infrastruktur Pariwisata 9. Infrastruktur InfoKomTek 10. Daya Saing Harga	11. Sumber Daya Manusia 12. Afinitas 13. Sumber Daya Alam 14. Sumber Daya Budaya
-----------	--	--	---

Sumber : *The Travel & Tourism Competitiveness Report 2009, World Economic Forum*
 *) Ranking Regional : Asia Pasifik.

Dari sisi pasar pariwisata internasional diketahui bersama bahwa tahun 2008 dunia dilanda krisis harga minyak, bahan pangan, pemanasan dunia, dan keuangan. Kemudian, pada tahun 2009 banyak kalangan memperkirakan bahwa krisis keuangan masih akan berlangsung dan mempunyai dampak serius terhadap pengurangan lapangan kerja dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Makin tingginya dampak krisis ekonomi menyebabkan pengurangan produksi barang dan jasa, meningkatnya inflasi, meningkatnya pengangguran, pengurangan permintaan produk non migas, rendahnya investasi, pendapatan pajak turun, dan dapat mendorong peningkatan bunga bank. Karena permintaan barang dan jasa menurun, sehingga penurunan harga minyak kurang berpengaruh terhadap penanggulangan krisis ekonomi.

Krisis ekonomi dunia tahun 2009 diperkirakan akan memperlambat pertumbuhan GDP di banyak negara. Untuk dapat mengurangi pengeluaran, penduduk berpendapatan menengah ke bawah cenderung memperpendek lama tinggal dan jarak perjalanan wisata. Keadaan ini memperketat persaingan pemasaran pariwisata internasional. Akibatnya untuk menarik wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada tahun 2009 diperlukan upaya lebih besar dari tahun sebelumnya. Pengurangan anggaran pemasaran dikhawatirkan akan berdampak negatif pada pencapaian sasaran jumlah kunjungan wisatawan.

Di samping krisis ekonomi, terdapat pula perubahan iklim global yang menyebabkan terganggunya kegiatan transportasi, pariwisata, penyediaan pangan dan penurunan produktifitas. Hal buruk yang dapat terjadi karena perubahan iklim adalah pendapatan per kapita dapat turun hingga 20%. Pada tahun 2005, pariwisata

mempunyai kontribusi terhadap emisi CO₂ sekitar 5%. Lalu lintas penerbangan dari negara-negara maju mempunyai kontribusi terhadap perubahan iklim dunia sekitar 2,7% dari total emisi gas buang. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan lingkungan kepariwisataan. Walaupun mempunyai kontribusi terhadap perubahan iklim, pariwisata mempunyai peran dalam mengentaskan kemiskinan dengan penciptaan lapangan kerja. Pariwisata di Indonesia menciptakan lapangan kerja sebesar 5,22% dari seluruh lapangan kerja nasional (Nesparnas, BPS 2007).

Pertumbuhan kunjungan wisatawan internasional diprediksi akan mencapai 1,6 miliar wisatawan pada tahun 2020 (*United Nation – World Tourism Organization/UNWTO*). Pertumbuhan ini memberikan peluang cerah bagi industri pariwisata sekaligus ketatnya persaingan pemasaran pariwisata oleh banyak negara di dunia. Untuk pasar Timur Tengah mempunyai pangsa wisatawan internasional 4,4% dari total seluruh dunia dan rata-rata pertumbuhannya merupakan yang tertinggi di dunia yaitu sebesar 6,7% per tahun diikuti oleh kawasan Asia Timur dan Pasifik sebesar 6,5% per tahun.

Pangsa pasar wisatawan internasional terbesar di dunia adalah kawasan Eropa diprediksikan akan mengalami penurunan dari 59,8% tahun 1995 menjadi 45,9% pada tahun 2020. Pangsa pasar ke dua terbesar diduduki oleh kawasan Asia Timur dan Pasifik yaitu 25,4%. Baik dari sisi pangsa pasar maupun rata-rata pertumbuhan, kawasan Asia Timur dan Pasifik berada di urutan kedua di dunia dan Asean ada di dalam kawasan ini.

Kedatangan wisatawan internasional tahun 2007 sebesar 908 juta atau tumbuh 6,9%, kemudian pada tahun 2008 sebesar 924 juta atau tumbuh lebih rendah yaitu menjadi 1,8%. Berdasarkan berita *press releases web site unwto.org* tanggal 18 Januari 2010, maka pada tahun 2009 diprediksikan jumlah wisatawan internasional mengalami penurunan sebesar - 4% atau sebanyak 880 juta wisatawan. Untuk tahun 2010 UNWTO memprediksi pertumbuhan wisatawan internasional sebesar 3 % sampai dengan 4 %.

Pertumbuhan kedatangan wisatawan internasional di lingkungan Asia Pasifik pada tahun 2008 menurun yaitu hanya sebesar 1,6% tetapi pada tahun yang sama, Indonesia berhasil meraih 6,4 juta kunjungan wisman atau tumbuh 16,3%. Tahun 2009, di kawasan Asia Pasifik jumlah kedatangan wisatawan internasional masih mengalami pertumbuhan negatif (-2%), dengan pertumbuhan pada bulan Januari – Juni 2009 mengalami pertumbuhan negatif (-7%), kuartal kedua (Juli – Desember 2009) mengalami kenaikan pertumbuhan positif kedatangan wisatawan internasional sebesar 2 %.

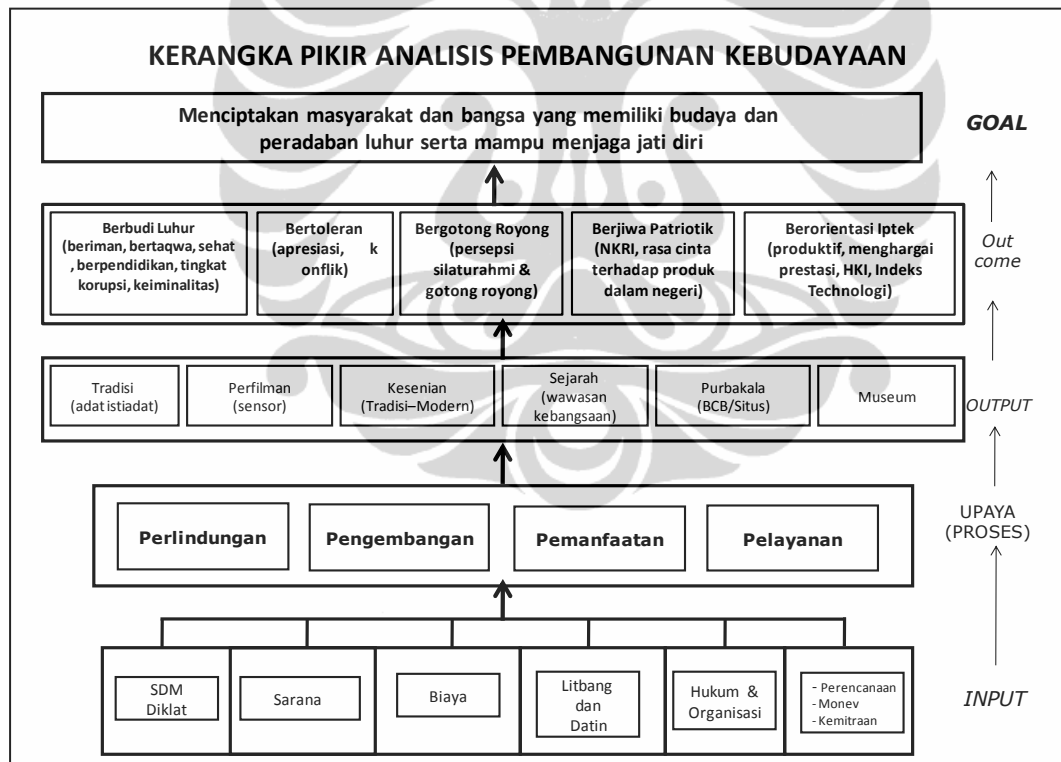
Bab II.

Visi, Misi, Dan Tujuan

2.1. Visi Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata

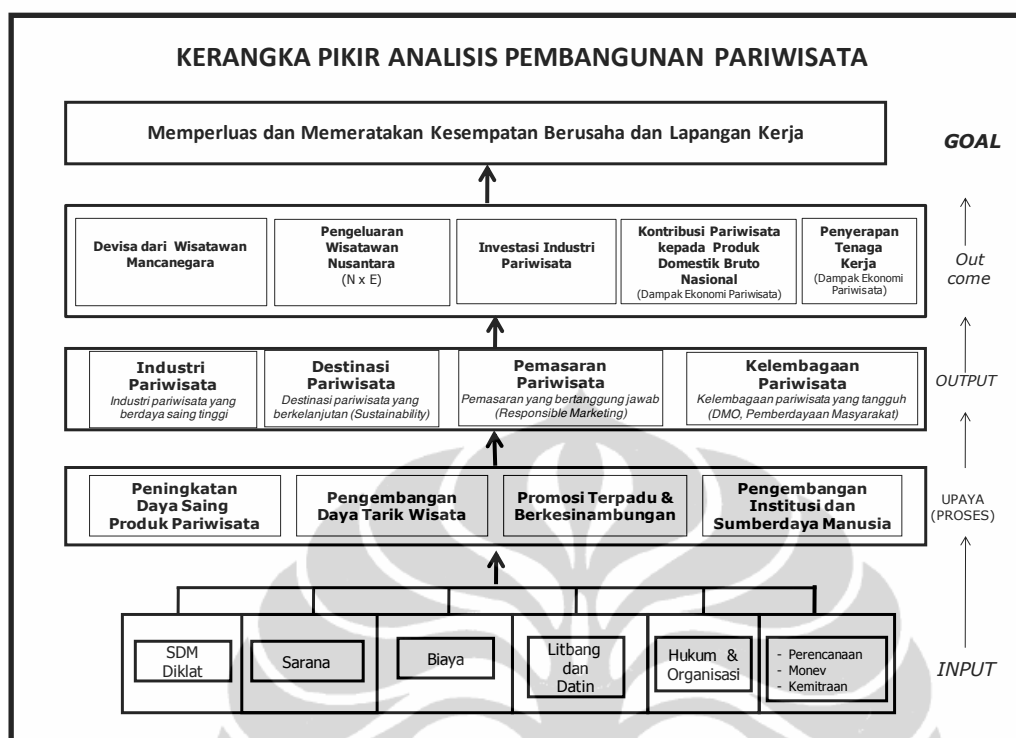
Untuk membangun visi, misi dan tujuan serta sasaran strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata periode tahun 2010 -2014 maka dikembangkan kerangka pikir sebagai berikut.

A. Kerangka Pikir Kebudayaan



Sumber : Bappenas 2009.

B. Kerangka Pikir Kepariwisataan



Sumber : Bappenas, dengan perubahan, 2009

Visi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata untuk periode tahun 2010 – 2014 dibangun dengan mempertimbangkan :

- 1. Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025** dengan rumusan sebagai berikut :

INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

Visi RPJPN tahun 2005–2025 tersebut mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai.

Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya.

Bangsa mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian.

Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi tantangan-tantangan. Karena menyangkut sikap,

kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas-luasnya. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.

Tingkat kemajuan suatu bangsa dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dari indikator sosial, tingkat kemajuan suatu negara diukur dari kualitas sumberdaya manusianya. Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila sumberdaya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi.

Kemajuan suatu bangsa juga diukur berdasarkan tingkat perkembangan **ekonomi**, kemajuan suatu bangsa diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada **tingkat pendapatan dan pembagiannya**. Tingginya pendapatan rata-rata dan ratanya pembagian ekonomi suatu bangsa menjadikan bangsa tersebut lebih makmur dan lebih maju. Negara yang maju pada umumnya adalah negara yang sektor industri dan **sektor jasanya telah berkembang**. Selain itu, dalam proses produksi berkembang keterpaduan antarsektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan **sektor-sektor jasa**; serta pemanfaatan sumber alam yang bukan hanya ada pada pemanfaatan ruang daratan, tetapi juga ditransformasikan kepada pemanfaatan ruang kelautan secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara. Negara yang maju umumnya adalah negara yang perekonomiannya stabil. Gejolak yang berasal dari dalam maupun luar negeri dapat diredam oleh ketahanan ekonominya.

Bangsa yang maju pada umumnya menganut sistem demokrasi, yang sesuai **dengan budaya dan latar belakang sejarahnya**. Bangsa yang maju adalah bangsa yang **hak-hak warganya**, keamanannya, dan ketenteramannya terjamin dalam kehidupannya. Selain unsur-unsur tersebut, bangsa yang maju juga harus didukung dengan infrastruktur yang maju.

Pembangunan bangsa Indonesia bukan hanya sebagai bangsa yang mandiri dan maju, melainkan juga bangsa yang **adil dan makmur**. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus objek pembangunan, rakyat mempunyai hak, baik dalam merencanakan, melaksanakan, maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, masalah keadilan merupakan ciri yang menonjol pula dalam pembangunan nasional.

Keadilan dan kemakmuran harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; **memperoleh lapangan pekerjaan**; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; mengamankan dan mempertahankan negara; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Dengan demikian, bangsa adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia.

2. Visi Presiden Untuk Periode Tahun 2009 – 2014

- 1) **Kesejahteraan Rakyat**, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan budaya bangsa yang akan dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) **Demokrasi**, yaitu terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.
- 3) **Keadilan**, yaitu terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia

Memperhatikan Visi RPJPN tahun 2005 - 2025 dan Visi Presiden tahun 2009 – 2014 di atas, serta tantangan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan ke depan, visi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan tahun 2014 dirumuskan sebagai berikut :

Visi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010 - 2014

**TERWUJUDNYA BANGSA INDONESIA YANG MAMPU
MEMPERKUAT JATI DIRI DAN KARAKTER BANGSA SERTA
MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

2.2. Misi Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2010 – 2014

Misi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata untuk periode tahun 2010 – 2014 dibangun dengan mempertimbangkan :

1. **Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025** dengan rumusan sebagai berikut :

a. **Kebudayaan**

Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah **memperkuat jati diri dan karakter bangsa** melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan **interaksi antarbudaya**, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

b. **Pariwisata**

Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan pengetahuan; dan membangun infrastruktur yang maju; serta melakukan reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; **memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan di setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan di dalam negeri.**

2. **Misi Presiden Untuk Periode Tahun 2009 – 2014**

Perwujudan Misi Indonesia 2014, adalah :

- 1) **Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera**
- 2) **Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi**
- 3) **Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang**

Untuk mewujudkan Visi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010 – 2014 di atas serta mempertimbangkan misi RPJPN tahun 2005 - 2025 dan Misi Presiden 2009 - 2014 dan berpedoman terhadap tugas pokok dan fungsi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang transparan dan akuntabel dengan mengutamakan kepentingan masyarakat maka Misi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010 – 2014 dirumuskan sebagai berikut :

Misi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014

- 1. Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya dalam rangka memperkuat jati diri dan karakter bangsa.**
- 2. Mengembangkan industri pariwisata berdaya saing, destinasi yang berkelanjutan dan menerapkan pemasaran yang bertanggung jawab (*responsible marketing*).**
- 3. Mengembangkan sumberdaya kebudayaan dan pariwisata.**
- 4. Menciptakan tata pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel.**

2.3. Tujuan

Berdasarkan atas visi dan misi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010 – 2014 di atas maka dirumuskan tujuan sebagai berikut :

- T.1. Meningkatkan kesadaran, apresiasi, kreativitas dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya.**
- T.2. Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya.**
- T.3. Mengembangkan kepariwisataan yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat**
- T.4. Meningkatkan kapasitas sumberdaya pembangunan kebudayaan dan pariwisata.**
- T.5. Mewujudkan pengelolaan tugas dan fungsi Kementerian kebudayaan dan kepariwisataan yang bersih dan berwibawa.**

2.4. Sasaran Strategis

Berdasarkan atas tujuan di atas maka sasaran strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010 – 2014 adalah :

1. Untuk mencapai tujuan pada T1, ditetapkan sasaran sebagai berikut :
 - T.1.S.1. Meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya**, yang ditandai oleh hal sebagai berikut :

Karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi.
 - T.1.S.2. Meningkatnya kreativitas dan produktivitas para pelaku budaya**, yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :
 - A. *Produksi film nasional yang berkualitas;*
 - B. *Karya budaya yang memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual;*
 - C. *Pelaku budaya yang mendapatkan penghargaan.*
 - T.1.S.3. Meningkatnya bantuan fasilitasi sarana seni budaya** , ditandai oleh hal sebagai berikut :

Daerah yang mendapatkan bantuan fasilitasi sarana seni budaya.
2. Untuk mencapai tujuan pada T2, ditetapkan sasaran sebagai berikut :
 - T.2.S.1. Terwujudnya penetapan dan pengelolaan terpadu cagar budaya**, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :
 - A. *Warisan budaya dunia dan cagar budaya nasional yang ditetapkan dan dikelola secara terpadu;*
 - B. *Cagar budaya yang dilestarikan.*
 - T.2.S.2. Terwujudnya revitalisasi museum**, ditandai oleh hal sebagai berikut :

Museum yang memenuhi standar pelayanan dan pengelolaan.
3. Untuk mencapai tujuan pada T3, ditetapkan sasaran sebagai berikut :
 - T.3.S.1. Meningkatnya pengeluaran dan lama tinggal wisatawan**, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:
 - A. **Lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara**, dengan tingkat rata-rata lama tinggal wisatawan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut :

1) Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014
Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara (hari)	7,80	7,70	7,70	7,60	7,50

2) Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014
Lama Tinggal Wisatawan Nusantara (hari)	2,10	2,25	2,50	2,75	3,00

B. **Pengeluaran wisatawan/hari**, dengan tingkat rata-rata pengeluaran/pembelanjaan wisatawan per hari dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut :

1) Rata-rata Pengeluaran/Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014
Rata-rata Pengeluaran/Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara (per kunjungan dalam USD)	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040

2) Rata-rata Pengeluaran/Pembelanjaan Wisatawan Nusantara

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014
Rata-rata Pengeluaran/Pembelanjaan Wisatawan Nusantara (per kunjungan dalam Rp)	600.000	650.000	700.000	700.000	750.000

T.3.S.2 Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing internasional, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

A. **Jumlah tenaga kerja di bidang pariwisata yang disertifikasi** sebanyak 50 ribu orang pada akhir tahun 2014, dengan jumlah tenaga kerja yang disertifikasi per tahun untuk periode 2010 – 2014 sebagai berikut :

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Tenaga Kerja yang Disertifikasi (orang)	5.000	15.000	15.000	10.000	5.000

B. Jumlah daerah tujuan wisata baru sebanyak 29 buah pada akhir tahun 2014.

T.3.S.3 Terwujudnya kapasitas pengelolaan destinasi pariwisata, ditandai oleh hal sebagai berikut :

Jumlah dan kualitas pengelolaan destinasi yang dikembangkan (Destination Management Organization) sebanyak 15 buah pada akhir tahun 2014.

T.3.S.4 Terwujudnya diversifikasi destinasi pariwisata, ditandai oleh hal – hal sebagai berikut :

A. Berkembangnya **pariwisata berbasis pedesaan** sebanyak 2.000 desa wisata melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Bidang Pariwisata pada tahun 2014, dengan jumlah desa wisata yang dikembangkan pada periode 2010 – 2014 adalah :

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Desa Wisata (desa)	200	674	978	700	822

B. **Jumlah Pola Perjalanan (Travel Pattern)** sebanyak 16 buah pada akhir tahun 2014.

T.3.S.5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dan pergerakan wisatawan nusantara, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

A. **Kunjungan wisatawan mancanegara**, dengan peningkatan jumlah wisatawan pertahun sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Wisatawan Mancanegara (orang)	Pertumbuhan (%)
2010	6.750.000	-
2011	7.100.000	5,19
2012	7.500.000	5,63
2013	8.000.000	6,67
2014	8.600.000	7,50

- B. **Pergerakan kunjungan wisatawan nusantara**, dengan jumlah pertahun pergerakan wisatawan nusantara sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara (perjalanan)	Pertumbuhan (%)
2010	230.000.000	-
2011	237.000.000	3,04
2012	245.000.000	3,38
2013	258.000.000	5,31
2014	276.000.000	6,98

- T.3.S.6. **Mendukung peningkatan kontribusi pariwisata bagi perekonomian nasional terhadap PDB, lapangan kerja, dan investasi**, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- A. **Penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara ke Indonesia dan penerimaan dari pengeluaran wisatawan nusantara** yang ditandai dengan:

- 1) Meningkatnya perolehan **penerimaan devisa**, dengan perolehan setiap tahun pada periode 2010 – 2014 sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Penerimaan Devisa (USD miliar)
2010	6,75
2011	7,17
2012	7,65
2013	8,24
2014	8,95

- 2) Meningkatnya penerimaan dari **pengeluaran wisatawan nusantara** dengan pertumbuhan penerimaan dari pengeluaran wisatawan nusantara periode 2010 – 2014 sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Penerimaan dari Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Rp triliun)
2010	Rp 138,00
2011	Rp 154,05
2012	Rp 171,50
2013	Rp 180,60
2014	Rp.207,00

- B. **Produk Domestik Bruto (PDB)** : Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Nasional dengan target sebagai berikut :

Tahun	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Nasional
2010	4,80 %
2011	4,95 %
2012	5,10 %
2013	5,20 %
2014	5,25 %

C. **Lapangan Kerja** : Kontribusi pariwisata terhadap **penyediaan lapangan kerja** nasional dengan target :

Tahun	Kontribusi Pariwisata Terhadap Lapangan Kerja Nasional
2010	7,70 juta orang
2011	8,10 juta orang
2012	8,50 juta orang
2013	8,90 juta orang
2014	9,20 juta orang

D. **Investasi** : Nilai investasi bidang pariwisata dengan prosentase investasi bidang pariwisata dalam investasi nasional sampai dengan akhir tahun 2014 sebagai berikut:

Tahun	Peranan Investasi bidang Pariwisata dalam investasi nasional
2010	5,19 %
2011	5,45 %
2012	5,76 %
2013	6,06 %
2014	6,43%

4. Untuk mencapai tujuan pada T4, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

T.4.S.1. Meningkatnya **kapasitas SDM aparatur/industri /masyarakat bidang kebudayaan dan pariwisata yang berdaya saing internasional**, ditandai oleh hal - hal sebagai berikut:

- A. *Sumber Daya Manusia lulusan UPT pendidikan tinggi kepariwisataan yang terserap di pasar kerja di dalam maupun luar negeri sampai dengan akhir tahun 2014 sebanyak 6.831 orang.*
- B. *Anggota masyarakat yang pengetahuannya di bidang kebudayaan dan pariwisata sampai dengan akhir tahun 2014 sebanyak 5.685 orang*

T.4.S.2. Meningkatnya **kapasitas nasional untuk penelitian dan pengembangan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat luas**, ditandai oleh hal sebagai berikut:

Penelitian bidang kebudayaan, pariwisata dan arkeologi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan kebudayaan dan pariwisata sampai dengan akhir tahun 2014 mencapai 850 hasil penelitian.

5. Untuk mencapai tujuan pada T5, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

T.5.S.1. Meningkatnya **kualitas manajemen dan pelayanan publik di bidang kebudayaan dan pariwisata** , ditandai oleh hal - hal sebagai berikut:

A. Persentase berkurangnya keluhan pegawai dan masyarakat

B. Opini terhadap Laporan Keuangan Kementerian Budpar

T.5.S.2. Meningkatnya **transparansi dan akuntabilitas** kinerja di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, ditandai oleh hal sebagai berikut:

A. Prosentase meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;

B. Prosentase meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



Matrik Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah dan Tahunan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET							
				2010	2011	2012	2013	2014	2014		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
T.1.	Meningkatkan kesadaran, apresiasi, kreativitas dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya.	T.1.S.1.	Meningkatnya Internalisasi nilai-nilai budaya	1. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	220	220	900	1000	1000	3340	kj
		T.1.S.2.	Meningkatnya kreativitas dan produktivitas para pelaku budaya	2. Jumlah produksi film nasional yang berkualitas	75	77	79	80	80	391	kj
				3. Jumlah karya budaya yang memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual	400	400	450	500	550	550	nkj
		T.1.S.3.	Meningkatnya bantuan fasilitasi sarana seni budaya	1. Jumlah daerah yang mendapatkan bantuan fasilitasi sarana seni budaya	25	252	253	-	-	530	kj
provinsi kab/kota	5 20				14 238	14 239	-	-	33 497		
T.2.	Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya.	T.2.S.1.	Terwujudnya penetapan dan pengelolaan terpadu cagar budaya	1. Jumlah warisan budaya dunia dan cagar budaya nasional yang ditetapkan dan dikelola secara terpadu	1	3	2	2	2	9	nkj
				2. Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	2,100	3,400	6,470	8,470	7,700	7,700	nkj
		T.2.S.2.	Terwujudnya revitalisasi museum	1. Jumlah museum yang memenuhi standar pelayanan dan pengelolaan	4	30	10	15	20	79	kj
		T.3.	Mengembangkan kepariwisataan yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat	T.3.S.1.	Meningkatnya Pengeluaran dan Lama Tinggal Wisatawan	1. Lama Tinggal Wisatawan (hari) :					
a Mancanegara	7.8					7.7	7.7	7.6	7.5	7.50	nkj
b Nusantara	2.10					2.25	2.50	2.75	3.00	3.00	nkj
2. Pengeluaran Wisatawan perkunjungan											
a Mancanegara (USD)	1,000			1,010	1,020	1,030	1,040	1,040	nkj		
b Nusantara (Rp. ribu)	600			650	700	700	750	750	nkj		
T.3.S.2.	Terwujudnya destinasi pariwisata berdaya saing Internasional	3. Jumlah Sertifikasi Tenaga Kerja di bidang pariwisata (dalam ribu)	5	15	15	10	5	50	nkj		
		4. Jumlah daerah tujuan wisata baru	29	29	29	29	29	29	nkj		
T.3.S.3.	Terwujudnya kapasitas pengelolaan destinasi pariwisata	5. Jumlah dan kualitas pengelolaan destinasi yang dikembangkan (Destination Management Organization)	2	15	15	15	15	15	nkj		

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET						
				2010	2011	2012	2013	2014	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
		T.3.S.4.	Terwujudnya diversifikasi destinasi pariwisata	6 Jumlah Desa Wisata yang Menjadi Sasaran PNPM Bidang Pariwisata	200	674	978	700	822	2,000 nkj
				7 Jumlah Pola Perjalanan (Travel Pattern)	0	4	4	4	4	16 k)
		T.3.S.5.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dan pergerakan wisatawan nusantara	1 Jumlah kunjungan wisman (juta orang)	6.8	7.1	7.5	8.0	8.6	8.6 nkj
				2 Jumlah pergerakan wisnus (juta perjalanan)	230	237	245	258	276	276 nkj
		T.3.S.6.	Mendukung peningkatan kontribusi pariwisata bagi perekonomian nasional terhadap PDB, lapangan kerja, dan investasi	1. Penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara ke Indonesia dan penerimaan dari pengeluaran wisatawan nusantara						
				a Meningkatnya perolehan penerimaan devisa	6.75	7.17	7.65	8.24	8.95	8.95 nkj
				b Meningkatnya penerimaan dari pengeluaran wisatawan nusantara	138	154	172	181	207	207.00 nkj
				2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Nasional	4.80	4.95	5.10	5.20	5.25	5.25 nkj
				3. Kontribusi pariwisata terhadap penyediaan lapangan kerja nasional	7.70	8.10	8.50	8.90	9.20	9.20 nkj
				4. Nilai investasi bidang pariwisata dengan prosentase investasi bidang pariwisata dalam investasi nasional	5.19	5.45	5.76	6.06	6.43	6.43 nkj
T.4.	Meningkatkan kapasitas sumberdaya pembangunan kebudayaan dan pariwisata.	T.4.S.1.	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur/industri/masyarakat bidang budpar yang berdaya saing internasional.	1. Jumlah lulusan UPT pendidikan tinggi kepariwisataan yang terserap di pasar kerja di dalam maupun luar negeri (orang)	1241	1276	1378	1438	1498	6831 k)
				2. Jumlah anggota masyarakat yang pengetahuannya di bidang kebudayaan dan pariwisata meningkat (orang)	1150	1150	1175	1190	1200	5865 k)
		T.4.S.2.	Meningkatnya kapasitas nasional untuk penelitian dan pengembangan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat luas.	1 Jumlah penelitian bidang kebudayaan, pariwisata dan arkeologi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan kebudayaan dan pariwisata	165	170	171	172	172	850 k)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET							
				2010	2011	2012	2013	2014	2014		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
T.5.	Mewujudkan pengelolaan tugas dan fungsi Kementerian Kebudayaan dan pariwisata yang bersih dan berwibawa.	T.5.S.1. Meningkatnya kualitas manajemen dan pelayanan publik di bidang kebudayaan dan pariwisata	1. Persentase berkurangnya keluhan pegawai dan masyarakat	100	100	100	100	100	100	k)	
			2. Opini terhadap Laporan Keuangan Kementerian Budpar	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		T.5.S.2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	1. Persentase meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	100	100	100	100	100	100	100	nk)
			2. Persentase meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	100	100	100	100	100	100	100	nk)
<p>Keterangan : k) : Kumulatif selama 5 tahun nk) : Non Kumulatif</p>											

Bab III.

Arah Kebijakan dan Strategi

3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional

Sesuai dengan Prioritas Nasional seperti yang tercantum dalam Buku I Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014, pembangunan di bidang kebudayaan merupakan bagian dari **Prioritas Nasional ke 11 yaitu : Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi**. Dalam Prioritas Nasional tersebut diamanatkan :

Tema Prioritas : Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan.

Substansi Inti :

1. Perawatan : Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia ditargetkan sebelum Oktober 2011;
2. Sarana : Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten selambat-lambatnya Oktober 2012;
3. Penciptaan : Pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan penelitian, penciptaan dan inovasi dan memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas;
4. Kebijakan : Peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni dan budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya;
5. Inovasi Teknologi : Peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya maritim menuju ketahanan energi, pangan, dan antisipasi perubahan iklim; dan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda.

Di dalam Buku II RPJMN tahun 2010 -2014, khususnya Bab II : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama, pembangunan bidang kebudayaan diprioritaskan pada penguatan jati diri bangsa dan pelestarian budaya yang dilakukan melalui empat fokus prioritas. *Pertama*, **penguatan jati diri dan karakter bangsa yang berbasis pada keragaman budaya**, dengan meningkatkan: (a) pembangunan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal; (b) pemahaman tentang

kesejarahan dan wawasan kebangsaan; (c) pelestarian, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkuat khasanah budaya bangsa; (d) pemberdayaan masyarakat adat; dan (e) pengembangan promosi kebudayaan dengan pengiriman misi kesenian, pameran, dan pertukaran budaya. **Kedua, peningkatan apresiasi terhadap keragaman serta kreativitas seni dan budaya**, melalui (a) peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya; (b) penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten selambat-lambatnya Oktober 2012; (c) pengembangan kesenian seperti seni rupa, seni pertunjukan, seni media, dan berbagai industri kreatif yang berbasis budaya; (d) pemberian insentif kepada para pelaku seni dalam pengembangan kualitas seni dan budaya dalam bentuk fasilitasi, pendukungan dan penghargaan; dan (d) pengembangan perfilman nasional yang adaptif dan interaktif terhadap nilai-nilai baru yang positif. **Ketiga, peningkatan kualitas perlindungan, penyelamatan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya**, melalui: (a) penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia sebelum Oktober 2011; (b) perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan peninggalan purbakala, termasuk peninggalan bawah air; (c) pengembangan permuseuman nasional sebagai sarana edukasi, rekreasi, serta pengembangan kesejarahan dan kebudayaan; dan (d) penelitian dan pengembangan arkeologi nasional; **Keempat, pengembangan sumber daya kebudayaan**, melalui (a) pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan penelitian, penciptaan dan inovasi dan memudahkan akses dan penggunaan oleh masyarakat luas dibidang kebudayaan, (b) peningkatan jumlah, pendayagunaan, serta kompetensi dan profesionalisme SDM kebudayaan; (c) peningkatan pendukungan sarana dan prasarana untuk pengembangan seni dan budaya masyarakat; (d) peningkatan penelitian dan pengembangan kebudayaan; (e) peningkatan kualitas informasi dan basisdata kebudayaan; dan (f) pengembangan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, sektor terkait, masyarakat dan swasta.

Selain itu, fokus prioritas pembangunan kebudayaan di atas didukung oleh peningkatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kebudayaan, dengan tetap memperhatikan kesetaraan gender dan pembangunan yang berkelanjutan.

Kebijakan pembangunan kepariwisataan tahun 2010-2014 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan tetap memperhatikan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipasi masyarakat, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan serta berpegang pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sesuai dengan Prioritas Nasional seperti yang tercantum dalam Buku I RPJMN tahun 2010 – 2014, pembangunan di bidang kepariwisataan merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Lainnya di bidang Kesejahteraan Rakyat. Dalam Program Prioritas Nasional tersebut antara lain diamanatkan :

- a. Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20 % secara bertahap dalam 5 tahun;
- b. Promosi 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif;
- c. Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata;
- d. Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan *hospitality management* yang kompetitif di kawasan Asia.

Di dalam Buku II RPJMN 2010 -2014, khususnya Bab III : Ekonomi, Strategi pembangunan kepariwisataan yang merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari prioritas peningkatan ekspor adalah sebagai berikut.

- a. Mengembangkan industri pariwisata dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan peluang usaha yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja;
- b. Mengembangkan destinasi pariwisata dengan mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata, melakukan konsolidasi akses transportasi mancanegara dan dalam negeri, terutama ke sepuluh tujuan pariwisata Indonesia, dan mengembangkan kawasan strategis dan daya tarik pariwisata berbasis wisata bahari, alam, dan budaya di luar Jawa dan Bali, termasuk industri kreatif, serta mengembangkan desa wisata melalui PNPM Mandiri;
- c. Mengembangkan pemasaran dan promosi pariwisata dengan meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20 (dua puluh) persen secara bertahap dalam 5 (lima) tahun dan mempromosikan ke 10 (sepuluh) tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif, serta menguatkan strategi pemasaran dan promosi pariwisata terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan responsif terhadap pasar;
- d. Mengembangkan sumber daya pariwisata dengan strategi meningkatkan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan *hospitality management* yang kompetitif di kawasan Asia, dan meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan kepariwisataan.

Strategi tersebut diatas didukung oleh peningkatan koordinasi lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan, terutama di bidang (a) pelayanan kepabeanaan keimigrasian, dan karantina; (b) keamanan dan

ketertiban; (c) prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan; (d) transportasi darat, laut, dan udara; dan (e) bidang promosi dan kerja sama luar negeri; serta koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan tersebut, fokus prioritas dan kegiatan prioritas kepariwisataan dalam RPJMN 2010-2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Fokus Prioritas Pengembangan Industri Pariwisata, yang didukung oleh kegiatan prioritas:
 1. Pengembangan Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata; dan
 2. Pengembangan Standardisasi Pariwisata.
- 2) Fokus Prioritas Pengembangan Tujuan Pariwisata yang didukung oleh kegiatan prioritas:
 1. Pengembangan Daya Tarik Pariwisata;
 2. Pemberdayaan Masyarakat di Tujuan Pariwisata;
 3. Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata; dan
 4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengembangan Tujuan Pariwisata.
- 3) Fokus Prioritas Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata, yang didukung oleh kegiatan prioritas:
 1. Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri;
 2. Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri;
 3. Pengembangan Informasi Pasar Pariwisata;
 4. Peningkatan Publikasi Pariwisata;
 5. Peningkatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (*Meeting, Incentive Travel, Conference, and Exhibition/MICE*); dan
 6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemasaran.
- 4) Fokus Prioritas Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, yang didukung oleh kegiatan prioritas:
 1. Pengembangan SDM Kebudayaan dan Pariwisata;
 2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Kepariwisata; dan
 3. Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata.

3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tersebut di atas, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010 – 2014 menetapkan **arah kebijakan dan strategi** sebagai berikut:

<i>Arah Kebijakan dan Strategi</i>	1. PENINGKATAN KESADARAN DAN PEMAHAMAN JATI DIRI DAN KARAKTER BANGSA.
------------------------------------	--

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Jati Diri dan Karakter Bangsa, maka strategi diarahkan dengan :

- 1) Peningkatan internalisasi nilai-nilai budaya yang mendukung pembangunan karakter dan pekerti bangsa.
- 2) Peningkatan revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai tradisi.
- 3) Peningkatan pemberdayaan komunitas adat.
- 4) Peningkatan internalisasi kesejarahan dan wawasan kebangsaan.

<i>Arah Kebijakan dan Strategi</i>	2. PENINGKATAN APRESIASI MASYARAKAT TERHADAP KERAGAMAN SERTA KREATIVITAS NILAI BUDAYA SENI DAN FILM.
------------------------------------	---

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan Peningkatan Apresiasi Masyarakat terhadap Keragaman serta Kreativitas Nilai Budaya Seni dan Film, maka strategi diarahkan dengan :

- 1) Peningkatan sarana pengembangan, pendalaman dan pagelaran, seni budaya di kota besar dan ibukota kabupaten.
- 2) Peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya.
- 3) Peningkatan apresiasi terhadap karya seni budaya dan perfilman.
- 4) Peningkatan kreativitas dan produktivitas para pelaku seni budaya dan perfilman.
- 5) Peningkatan kualitas pengelolaan galeri nasional
- 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan Lembaga Sensor Film
- 7) Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil kajian sejarah tradisional.

Arah Kebijakan
dan Strategi

3.

**PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN PERLINDUNGAN,
PENGEMBANGAN, DAN PEMANFAATAN WARISAN BUDAYA.**

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Warisan Budaya, maka strategi diarahkan dengan :

- 1) Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya.
- 2) Peningkatan kualitas pengelolaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan benda cagar budaya, situs, kawasan cagar budaya, dan Kesejarahan.
- 3) Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan museum, termasuk naskah-naskah kuno.

Arah Kebijakan
dan Strategi

4.

PENGEMBANGAN SUMBERDAYA KEBUDAYAAN

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan, maka strategi diarahkan dengan :

- 1) Pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan penelitian di bidang kebudayaan.
- 2) Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia kebudayaan.
- 3) Peningkatan kualitas informasi dan basis data kebudayaan.
- 4) Pengembangan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, sektor terkait, masyarakat dan swasta.

Arah Kebijakan
dan Strategi

5.

**PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA YANG BERDAYA
SAING**

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan Pengembangan Industri Pariwisata yang Berdaya Saing , maka strategi diarahkan dengan :

- 1) Penguatan industri pariwisata dan keterkaitan antara industri pariwisata dan industri kreatif, termasuk dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- 2) Peningkatan dan penguatan basis data dan informasi investasi pariwisata.
- 3) Pengembangan *Travel Pattern* serta kemudahan pariwisata.
- 4) Pengembangan UMKM dan industri kreatif bidang pariwisata.

- 5) Penerapan standar kompetensi dan standar usaha pariwisata.
- 6) Penerapan sertifikasi kompetensi pariwisata dan usaha pariwisata dan kode etik pariwisata di destinasi pariwisata.
- 7) Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor.

Arah Kebijakan
dan Strategi

6.

**PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA YANG
BERKELANJUTAN (*Sustainability*)**

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata yang Berkelanjutan (*sustainability*), maka strategi diarahkan dengan :

- 1) Peningkatan konsolidasi akses transportasi manca negara dan dalam negeri, terutama ke 10 (sepuluh) tujuan pariwisata Indonesia.
- 2) Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata serta meningkatkan kualitas dan standar pelayanan minimum pariwisata;
- 3) Penataan dan diversifikasi daya tarik wisata alam bahari, wisata budaya dan wisata buatan termasuk event dan olah raga.
- 4) Pengembangan kawasan strategis pariwisata berbasis wisata bahari, alam, dan budaya di luar Jawa dan Bali;
- 5) Pengembangan destinasi pariwisata di pulau-pulau terdepan, terluar, dan wilayah perbatasan
- 6) Pengembangan daya tarik wisata dan inovasi produk yang berbasis lingkungan.
- 7) Peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas *stakeholders* pengembangan daya tarik wisata.
- 8) Penataan kebijakan dan manajemen daya tarik wisata dan produk pariwisata
- 9) Pemanfaatan media cetak, elektronik dan *public figure* dan media kesenian tradisional.
- 10) Pengamanan dan kenyamanan oleh masyarakat di destinasi.
- 11) Peningkatan pemberdayaan masyarakat di perdesaan melalui peningkatan PNPM mandiri bidang pariwisata.
- 12) Peningkatan efektifitas pengelolaan destinasi pariwisata melalui peningkatan koordinasi dan keterpaduan pembangunan pariwisata dan *Destination Management Organization (DMO)*.
- 13) Peningkatan dan penguatan basis data dan informasi destinasi dan PNPM Mandiri pariwisata.

PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA YANG BERTANGGUNG JAWAB (*Responsible Marketing*)

Pengembangan pemasaran pariwisata diarahkan untuk meningkatkan penerimaan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Upaya untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan melalui peningkatan promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri, peningkatan informasi pasar wisata, peningkatan publikasi kepariwisataan, pengembangan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition/MICE*) dengan tetap memberikan dukungan manajemen kepada segenap pelaku pemasaran pariwisata nasional dan daerah.

Dalam melaksanakan kebijakan umum tersebut di atas, maka arah kebijakan dan strategi pengembangan pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab (*responsible marketing*) di tahun 2010 – 2014 adalah:

- 1) Meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara maupun nusantara sebesar 20 (dua puluh) persen secara bertahap dalam 5 (lima) tahun.
- 2) Meningkatkan promosi 10 (sepuluh) tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif.
- 3) Meningkatkan jumlah anggota jaringan situs *online* kepariwisataan Indonesia melalui pengembangan data dan informasi destinasi pariwisata yang dilengkapi dengan dokumentasi dan visualisasi.
- 4) Meningkatkan pemanfaatan informasi pasar pariwisata oleh pelaku pariwisata melalui pelaksanaan *familiarization trip* pada para *Tour Operator, Travel Agencies, Travel Writer* dan *Media Crew* dari negara-negara sumber wisatawan ke berbagai destinasi di Indonesia.
- 5) Meningkatkan kuantitas pengguna bahan promosi kepariwisataan melalui penyediaan, penyajian dan diseminasi bahan promosi cetak, elektronik, dan publikasi kepariwisataan.
- 6) Meningkatkan ketersediaan rekomendasi strategi pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata melalui pengembangan analisis pasar dan *market intelligence* kepariwisataan mancanegara dan nusantara baik di tingkat pusat maupun daerah.
- 7) Meningkatkan eksistensi kepariwisataan Indonesia di luar negeri melalui keikutsertaan dan partisipasi segenap pelaku kepariwisataan Indonesia pada bursa kepariwisataan internasional, *sales mission, direct selling* dan *roadshow* khususnya di negara-negara fokus pasar.
- 8) Meningkatkan pemahaman masyarakat internasional mengenai kepariwisataan Indonesia melalui dukungan atas penyelenggaraan festival seni, budaya dan pariwisata di mancanegara, serta pelayanan informasi oleh *Visit Indonesia Tourism Officers* di negara-negara fokus pasar.

- 9) Meningkatkan jumlah pergerakan wisatawan nusantara melalui penyelenggaraan *direct promotion*, penyelenggaraan *event* pariwisata utama, serta dukungan bagi penyelenggaraan *event* seni, budaya dan pariwisata di berbagai daerah.
- 10) Meningkatkan pelaksanaan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition/MICE*) nasional dan internasional melalui pengembangan kapasitas, promosi dan *bidding* kegiatan MICE, serta penyelenggaraan dan dukungan *event* MICE.
- 11) Meningkatkan dukungan bagi partisipasi seluruh *stakeholders* dalam promosi pariwisata Indonesia melalui dukungan manajemen SDM, perencanaan, regulasi, evaluasi dan keuangan.

Arah Kebijakan
dan Strategi

8.

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN YANG TANGGUH

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan **Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata yang Tangguh**, maka strategi diarahkan dengan :

- 1) Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan *hospitality management* yang kompetitif di kawasan Asia
- 2) Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kepariwisataan dengan mengembangkan SDM pariwisata berbasis kompetensi melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan di dalam dan di luar negeri
- 3) Peningkatan penelitian dan pengembangan pariwisata dalam mendukung kebijakan pembangunan pariwisata
- 4) Peningkatan profesionalisme dan daya saing SDM bidang Pariwisata
- 5) Peningkatan dukungan manajemen sumberdaya pariwisata
- 6) Pemantapan koordinasi dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat atau pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan di tingkat lokal, nasional dan internasional.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata di atas dalam pelaksanaannya untuk jangka waktu tahun 2010 – 2014 didukung oleh kebijakan :

- a. **PENINGKATAN KERJASAMA DAN KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR** pada tataran kebijakan, program dan kegiatan, terutama khusus untuk (a) kebudayaan mencakup : pendidikan dan agama; perdagangan dan pariwisata; pertahanan dan keamanan; pemuda dan olah raga; pemerintahan daerah (b) kepariwisataan mencakup bidang : pelayanan kepabearian keimigrasian, dan karantina; keamanan dan ketertiban; prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan kesehatan lingkungan; transportasi darat, laut dan udara; dan bidang promosi pariwisata dan kerjasama luar negeri serta koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.
- b. **PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)**, meliputi : penataan SDM; ketatalaksanaan, kelembagaan, dan organisasi.



Berdasarkan arah kebijakan dan strategi tersebut, maka **Program dan Kegiatan Prioritas** Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010 -2014 sebagai berikut :

Program **1.** | **PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA, SENI DAN PERFILMAN**

Tujuan:

Memperkuat nilai budaya dan keragaman budaya di tengah pergaulan global.

Sasaran :

1. Tersedianya sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibukota kabupaten/kota.
2. Meningkatnya internalisasi, revitalisasi, dan reaktualisasi nilai-nilai budaya.
3. Meningkatnya apresiasi terhadap keragaman seni budaya dan perfilman.
4. Meningkatnya kreatifitas, dan produktifitas para pelaku seni budaya, dan perfilman.

Dengan indikator kinerja program, sebagai berikut:

1. Fasilitasi pagelaran, pameran, festival karya seni budaya dan film.
2. Fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman, dan pagelaran seni budaya.
3. Sosialisasi dan intenalisasi nilai-nilai budaya.
4. Reaktualisasi, inventarisasi, dan dokumentasi karya budaya.
5. Produksi film nasional yang berkualitas.
6. Karya budaya yang memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual.

Kegiatan-kegiatan prioritas sebagai pelaksanaan penugasan khusus kementerian tahun 2010 - 2014 yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Nilai Budaya, Seni dan Perfilman adalah :

- i. **Menginventarisasi budaya nasional dan daerah secara menyeluruh, meliputi :**
 - Pembentukan Tim Inventarisasi
 - Pengumpulan data dan kompilasi melibatkan instansi terkait
 - Koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam hal penetapan.
- ii. **Menyediakan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman, dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibukota kabupaten/kotamadya:**
 - Dukungan fasilitasi saran dan prasarana kesenian daerah.
 - Memfasilitasi pengembangan kesenian daerah.

- Mewujudkan prasarana dan sarana pusat pengembangan kebudayaan nasional yang representatif.
- iii. **Meningkatkan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya, yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya :**
- Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan karakter dan pekerti bangsa.
 - Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan kebudayaan.
 - Mengembangkan perfilman Indonesia dan mendorong meningkatnya produksi film nasional.
 - Meningkatkan apresiasi, pesona dan ketahanan budaya Indonesia.
 - Meningkatkan wawasan kebangsaan melalui sosialisasi dan internalisasi nilai budaya.
 - Meningkatkan apresiasi dan kerjasama antar lembaga di bidang kebudayaan.
- iv. **Meningkatkan sarana dan prasarana Pusat Pengembangan Kebudayaan Nasional.**

Sedangkan kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata melalui Program Pengembangan Nilai Budaya, Seni dan Perfilman tahun 2010 - 2014 adalah sebagai berikut :

- 1) **Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa**, antara lain melalui Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Membangun Karakter Dan Pekerti Bangsa, Sosialisasi Pedoman Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa, Perkemahan Budaya Nasional, Dialog Interaktif Wawasan Kebangsaan, Anugerah Kebudayaan, Penghargaan Kepada Maestro Seni Tradisi, Pergelaran Orkestra Dan Paduan Suara “Gita Bahana Nusantara”, Penyusunan Pedoman Pembangunan Karakter Dan Pekerti Bangsa, Serta Kampanye Jati Diri Bangsa, Monitoring Dan Evaluasi.
- 2) **Pelestarian dan Pengembangan Nilai-nilai Tradisi**, antara lain melalui Perekaman Data Kebudayaan Bidang Tradisi, Inventarisasi Arsitektur Tradisional, Inventarisasi Kain Tradisional, Identifikasi Dan Kajian Organisasi Sosial, Pameran Dan Atraksi Gasing Nusantara, Sosialisasi Pedoman Pembinaan Pasar Pesona Budaya, Pesta Permainan Tradisional Anak, Festival Tradisi Bahari, Gelar Budaya, Dan Penerbitan Naskah Bidang Tradisi, Monitoring Dan Evaluasi.
- 3) **Pengembangan Masyarakat Adat**, antara lain melalui Fasilitasi Komunitas Adat Dan Kepercayaan, Sistematisasi Nilai-Nilai Kepercayaan, Pembinaan Pelaku Budaya Sipiritual Bagi Generasi Muda, Pembelajaran Kepercayaan Komunitas Adat Lintas Negara, Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri, Sosialisasi Bidang Kepercayaan, Dialog Komunitas Adat Wilayah Perbatasan, Dialog

Pemberdayaan Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Sipil, Gelar Budaya Spiritual Dan Kepercayaan Komunitas Adat, Pameran Budaya Spiritual Dan Komunitas Adat, Pengelolaan Dokumentasi, Publikasi & Perpustakaan, Pengolahan Database Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemetaan Komunitas Adat, Etnografi Komunitas Adat, Monografi Budaya Spiritual, Perekaman Dan Penayangan Film Dokumenter, Aktualisasi Nilai-Nilai Budaya Spiritual, Monitoring Dan Evaluasi.

- 4) **Pelestarian dan Pengembangan Kesenian**, antara lain melalui Revitalisasi Seni Yang Hampir Punah, Pemetaan Dan Penyusunan Database Kesenian, Pameran Kesenian, Misi Kesenian Dalam Dan Luar Negeri, Festival Dan Seminar Internasional “Art Summit Indonesia (ASI), Lomba Seni Tingkat Nasional, Festival/Pekan/Pawai/Pergelaran Seni Di Kota-Kota Besar Dan Kabupaten/Kotamadya, Pekan Produk Kreatif Indonesia, Pekan Teater Indonesia, “Art Fair”, Festival Nasional Kesenian, Pawai Budaya Nusantara, “Indonesia Performing Arts Mart (IPAM), “World Choir Games”, Kongres Kesenian, Dukungan Event Kegiatan Sanggar/Organisasi/Lembaga Kesenian, Bimbingan Teknis Advokasi Organisasi Kesenian, Dukungan Pekan Olahraga Dan Kesenian Pondok Pesantren Tingkat Nasional (POSPENAS), Semarak Budaya Nusantara, Pendukung Fasilitas Sarana Bagi Pengembangan, Pendalaman Dan Pergelaran Seni Budaya Di Kota Besar Dan Ibukota Kabupaten/Kota, Monitoring Dan Evaluasi.
- 5) **Pengembangan Perfilman Nasional**, antara lain melalui Fasilitas Pembuatan Film Kompetitif Dan Sosialisasi Produksi Film Kepada “*Production House*”, Workshop Film Dokumenter, Festival Film Indonesia, Festival Film Pelajar Dan Kine Klub, Festival Film Kearifan Budaya Lokal, Dukungan Program Pada Komunitas Perfilman, Pemanfaatan Dan Penggandaan Produksi Tim Asing, Koordinasi Tim Pembuatan Film Non Cerita Asing Di Indonesia, Fasilitas Lembaga Perfilman, Pengiriman Film Indonesia Ke Luar Negeri, Pasar Film Internasional Di Luar Negeri, Pengiriman Delegasi Dan Film Ke Festival Film Di Luar Negeri, Pembuatan *Online Database* Tentang Perfilman, Penyelenggaraan Apresiasi Film, Forum Koordinasi Peredaran Dan Distribusi Film, Forum Komunikasi Inter Kementerian, Forum Komunikasi Lembaga Perfilman, Koordinasi Kebijakan Perfilman, Penyelenggaraan Hari Film Nasional, Pembuatan Direktori Perfilman, Rencana Induk Pembangunan Perfilman, Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Perfilman, Festival Film Pelajar Dan Kine Klub, Festival Film Kearifan Budaya Lokal, Monitoring Dan Evaluasi.
- 6) **Pengembangan Galeri Nasional**, antara lain melalui Pengakuisisian, Preservasi, Konservasi, Restorasi Dan Penataan Pameran Tetap Koleksi GNI, Pameran Seni Rupa Modern Dan Kontemporer, Pameran Kerjasama Internasional, Kerjasama Dengan Pusat Kebudayaan Asing, Pameran Seni Rupa Keliling, Pameran Karya Maestro Seni Rupa, Pameran Photo Summit, Pameran Seni Rupa Nusantara, Sosialisasi Dan Bimbingan Edukasi GNI, Lomba Menulis Resensi Seni Rupa Dan Pameran Seni Rupa Anak Berprestasi,

Pengembangan Prasarana Galeri Nasional Indonesia, Monitoring Dan Evaluasi.

- 7) **Peningkatan Sensor Film**, antara lain melalui Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Penyensoran Film Dan Reklame Film, Monitoring Dan Evaluasi.
- 8) **Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional**, antara lain melalui Penelitian Bidang Sejarah Dan Nilai Tradisional, Inventarisasi Warisan Budaya Takbenda, Dialog Budaya, Festival, Pergelaran, Lomba, Sosialisasi, Lawatan Budaya/Sejarah, Diskusi Dan Sarasehan, Monitoring Dan Evaluasi.
- 9) Untuk kelancaran kegiatan prioritas, diperlukan **Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya**, antara lain melalui Penyiapan Ratifikasi Konvensi UNESCO, Penyusunan Naskah Akademik RUU Kebudayaan, Dukungan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan, Penyempurnaan Petunjuk Teknis Jabatan Pamong Budaya, Penyusunan Rencana Peraturan Perundang-Undangan Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film, Pendukung Diplomas dan Kerjasama Budaya Di Forum Internasional, Pendukung Program ASEAN – COCI, Kajian Pusat Kebudayaan, Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, Pekan Budaya Seni dan Film, Dialog Budaya, Pendukung Kegiatan Pekan Produk Kreatif Indonesia, Dukungan Penyediaan Sarana Bagi Pengembangan, Pendalaman, dan Pagelaran Seni Budaya Di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Temu Kepala Taman Budaya Se-Indonesia, Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga Terkait, Fasilitasi Badan Pekerja Kongres Kebudayaan, Pendukung Even Seni Budaya Dalam Negeri, Pengembangan Pusat Kebudayaan Nasional, Pengembangan Database Kebudayaan dan Pencatatan Warisan Budaya Indonesia, Penyelenggaraan Kehumasan Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film, Pengelolaan Administrasi Keuangan, Umum dan Personalialia, serta Monitoring Dan Evaluasi.

Program **2.** | **KESEJARAHAN, KEPURBAKALAN, DAN PERMUSEUMAN**

Tujuan :

Meningkatkan pelestarian kekayaan dan keragaman budaya untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa yang multikultur ditengah pergaulan global.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya, khususnya Benda Cagar Budaya/Situs/ Kawasan Cagar Budaya.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengelolaan museum, termasuk naskah-naskah kuno.

3. Meningkatkan internalisasi nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan yang mendukung pembangunan karakter dan jati diri bangsa.

Dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai sejarah dan sejarah kewilayahan Indonesia.
2. Warisan budaya dunia dan cagar budaya nasional yang ditetapkan dan dikelola secara terpadu.
3. Benda cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara.
4. Situs dan kawasan cagar budaya yang dilindungi, dipelihara, dan dieksplorasi.
5. Museum yang memenuhi standar pelayanan dan pengelolaan.
6. Koleksi dan naskah kuno yang diselamatkan dan dikelola.

Kegiatan - kegiatan prioritas sebagai pelaksanaan penugasan khusus kementerian tahun 2010 - 2014 yang dilaksanakan melalui Program Kesejarahan, Kepurbakalaan dan Permuseuman adalah :

- i. Menyiapkan kajian pembentukan lembaga Pengelolaan Terpadu bagi Kawasan Warisan Budaya Dunia dan Cagar Budaya Nasional.**
- ii. Menetapkan dan membentuk Pengelolaan Terpadu untuk Pengelolaan Cagar Budaya :**
 - Penetapan dan Pembentukan Pengelolaan Terpadu untuk Pengelolaan Cagar Budaya dimulai dengan Kawasan Candi Borobudur, dan dilanjutkan dengan Kompleks Candi Prambanan, dan Kawasan Prasejarah Manusia Purba Sangiran.
 - Pengembangan Cagar Budaya Nasional.
 - Mengusulkan Warisan Budaya Dunia kepada Unesco yaitu *"The Cultural Landscape of Bali Province"* dan *"Traditional Settlement of Tana Toraja"*.
- iii. Melakukan Revitalisasi Museum :**
 - Melakukan Revitalisasi Museum di 33 propinsi.
 - Gerakan Nasional Cinta Museum.
 - Mengembangkan Museum Nasional Jakarta.
 - Mengembangkan Museum Maritim Nasional di Belitung.
 - Mengembangkan Museum Batik Nasional di Pekalongan.
- iv. Menangani naskah-naskah kuno di 5 Museum :**
 - Melakukan pendataan dan inventarisasi naskah-naskah kuno yang berada di Museum Nasional, Museum Radyapustaka, Museum Sonobudoyo, Museum Keraton Solo dan Museum Keraton Yogyakarta.
 - Melakukan perawatan dan konservasi terhadap naskah-naskah kuno.
 - Penyelamatan (ganti rugi) naskah-naskah kuno untuk milik negara.
 - Melakukan literasi naskah-naskah kuno.

- Pendokumentasian dengan menggunakan mikro film dan publikasi hasil literasi.
- v. **Menginventarisasi dan menetapkan benda cagar budaya dan situs secara nasional.**
- vi. Menyelenggarakan *Pre Meeting ASIAN-Europe* di Solo tahun 2010, dan penyelenggaraan *Ministrial Meeting ASIAN-Europe* di Bali tahun 2012.
- vii. **Melakukan Revisi Undang-undang RI Nomor 5/1992** tentang Benda Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10/1993 tentang Penjelasan UU RI Nomor 5/1992.
- viii. **Menyusun peraturan bersama Menteri tentang Pengurangan/Pembebasan PBB bagi Cagar Budaya.**

Sedangkan kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata melalui Program Kesejarahan, Kepurbakalaan dan Permuseuman tahun 2010 - 2014 adalah sebagai berikut :

- 1) **Pengembangan Nilai Sejarah**, antara lain dengan : Penulisan Sejarah Seri Pengenalan Tokoh Sejarah, Penulisan Sejarah Lokal dalam Perspektif Nasional, Penulisan Sejarah Pemikiran, Pekan Nasional Cinta Sejarah, Lawatan Sejarah Nasional, Musyawarah Kerja Nasional Pengajaran Sejarah, Lomba Karya Tulis Wawasan Kebangsaan, dan Pendukung Konferensi Nasional Sejarah VIII, Pemantuan dan Evaluasi.
- 2) **Pengembangan Geografi Sejarah**, antara lain dengan: Penulisan sejarah wilayah, Pemetaan geografi sejarah, Konferensi IAHA/Workshop Internasional, Workshop Geografi Sejarah, Lomba Penulisan Geografi Sejarah, Kemah Sejarah, Sosialisasi SIG dan Pedoman Kajian Geografi Sejarah, Festival dan Pameran Pusat Peradaban Se-Indonesia, dan Arung Sejarah Bahari, Pemantuan dan Evaluasi.
- 3) **Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Bawah Air**, antara lain: Eksplorasi Situs Bawah Air, Penyelesaian Kasus Pelestarian yang Dapat Diselesaikan, Naskah akademis RUU bidang Peninggalan Bawah Air, Ekspedisi Jejak Peradaban Budaya Bahari, Pameran Peninggalan Bawah Air, Publikasi dan Dokumentasi tentang Peninggalan Bawah Air, Pendukung pengembangan Museum Nasional Maritim, dan Kajian Pengembangan Pusat Pendidikan Arkeologi Bawah Air, Pemantuan dan Evaluasi.
- 4) **Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan**, antara lain: Penyusunan pedoman Penanganan BCB Pascabencana; Pedoman Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya; Kerjasama Penanganan BCB lintas sektoral, swasta nasional dan internasional, organisasi nasional dan internasional; Pendukung Penanganan Cagar Budaya Pascabencana; Pemantauan dan Evaluasi Cagar Budaya yang Dilestarikan; Cagar budaya yang Dianalisis Usianya; Cagar budaya yang dikembangkan untuk dimanfaatkan;

dan Pengembangan Kapasitas SDM Pelestarian Cagar Budaya; Pelaksanaan Kegiatan Pameran, Workshop, Sosialisasi; dan Gerakan Nasional Pelestarian Cagar Budaya, Pemantuan dan Evaluasi.

- 5) **Pengembangan Pengelolaan Permuseuman termasuk 5 UPT khusus Museum**, antara lain: Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas SDM Museum, Penanganan naskah kuno di beberapa museum dan masyarakat, Pengelolaan koleksi museum, Pameran, Workshop, dan pelaksanaan Gerakan Nasional Cinta Museum, Pemantuan dan Evaluasi.
- 6) **Pengembangan Pengelolaan Museum Nasional**, antara lain: Dukungan Gerakan Nasional Cinta Museum meliputi pameran, seminar, workshop, dll; Pengembangan dan Penataan di Gedung C dan Storage Museum Nasional berdasarkan standar internasional; Penambahan Koleksi, Penyelamatan, Perawatan, dan Pemeliharaan Koleksi dan naskah kuno; Pameran; dan Pengembangan Sistem Pengamanan terpadu, Pemantuan dan Evaluasi.
- 7) **Pelestarian Peninggalan Purbakala di 14 UPT bidang purbakala**, antara lain: Pengelolaan dan Pelestarian Kompleks Percandian Muara Jambi, Kawasan Warisan Budaya Dunia Sangiran, Kawasan Warisan Budaya Dunia Borobudur, Kawasan Warisan Budaya Dunia Prambanan, Kawasan kota kuno kerajaan Majapahit di Trowulan, Kawasan pemukiman tradisional Nias Selatan, Kawasan Kota Lama Masa Islam di Aceh, Kawasan Gua Prasejarah Maros Pangkep, Kawasan Pemukiman Tradisional Tana Toraja, Kawasan Benteng-benteng Ternate, Kawasan Megalitik Lembah Bada, Kawasan Landscape Budaya Bali, Kawasan Penglima Besar Soedirman, serta perlindungan, pemeliharaan, pemugaran, dan konservasi BCB/Situs/Kawasan di 14 wilayah kerja UPT, Inventarisasi dan Pendaftaran Peninggalan Purbakala, Pengkajian Pelestarian Peninggalan Purbakala, Pelaksanaan Penyuluhan, Dokumentasi dan Publikasi, serta melakukan penyuluhan, sosialisasi, advokasi, dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan SDM pelestarian peninggalan purbakala, Pemantuan dan Evaluasi.
- 8) Untuk kelancaran kegiatan prioritas, diperlukan **Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala**, antara lain melalui penyusunan peraturan perundangan, norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam bidang sejarah dan purbakala, revisi PP No. 10 Tahun 1993 tentang Penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, kerjasama multilateral dan bilateral dengan negara-negara lain dan organisasi internasional (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization/UNESCO, International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property/ICCROM, International Council Of Museums/ICOM, Association of Southeast Asian Nation/ASEAN); peningkatan kapasitas SDM dalam bidang teknis dan manajerial; pendukungan dan apresiasi untuk organisasi profesi/lembaga swadaya masyarakat/pelestari; pengembangan *system data base* bidang sejarah dan purbakala; publikasi dan penyajian informasi tentang kesejarahan, kepurbakalaan, dan permuseuman;

pendukung terhadap pelestarian benda cagar budaya/situs/kawasan cagar budaya dan museum milik masyarakat/yayasan/organisasi masyarakat; peningkatan kualitas administrasi, kepegawaian, dan umum; menyelenggarakan koordinasi dan forum komunikasi dengan pemangku kepentingan; dan melakukan penyusunan rencana program serta monitoring evaluasi kegiatan pelestarian yang dilakukan dalam bidang kesejarahan, keperbukalaan, dan permuseuman.

Program **3.** | **PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA**

Tujuan :

- 1) Meningkatkan kualitas dan kapasitas usaha, industri dan investasi pariwisata nasional.
- 2) Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata nasional.

Sasaran :

- 1) Meningkatnya destinasi pariwisata yang berdaya saing tinggi di pasar global.
- 2) Meningkatnya pengeluaran dan lama tinggal wisatawan.

Dengan indikator kinerja program sebagai berikut :

- 1) Lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara.
- 2) Pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara.
- 3) Kuantitas dan kualitas pengelolaan destinasi yang dikembangkan (*Destination Management Organization/DMO*).
- 4) Jumlah dan keragaman daya tarik wisata.
- 5) Masyarakat yang menjadi sasaran sadar wisata.
- 6) Desa wisata yang menjadi sasaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri bidang pariwisata.
- 7) Sertifikasi tenaga kerja di bidang pariwisata.

Kegiatan - kegiatan prioritas sebagai pelaksanaan penugasan khusus kementerian tahun 2010 - 2014 yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Destinasi adalah :

- i. **Melakukan konsolidasi akses transportasi mancanegara dan dalam negeri, terutama ke 10 tujuan pariwisata Indonesia.**
 - Meningkatkan kerjasama dan keterpaduan pengembangan akses wisatawan mancanegara dan dalam negeri.
- ii. **Mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata.**
 - Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata di daerah.

- iii. **Meningkatkan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan *hospitality management* yang kompetitif di kawasan Asia.**
 - Dukungan daya tarik pariwisata di daerah termasuk data base pariwisata
 - Pengelolaan Destinasi dan Pelaksanaan Konferensi DMO (*Destination Management Organization*) dalam rangka peningkatan pengelolaan destinasi
 - PNPM Mandiri bidang pariwisata
 - Pemberdayaan masyarakat dan gerakan sadar wisata melalui media
 - Peningkatan daya saing pariwisata
 - Pengembangan standarisasi, peningkatan sertifikasi dan mutu pelayanan untuk tenaga kerja pariwisata dan usaha pariwisata
 - Dukungan peningkatan kapasitas usaha dan industri pariwisata
- iv. **Mendorong peningkatan iklim investasi pariwisata**

Sedangkan kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata melalui Program Pengembangan Destinasi Pariwisata tahun 2010 - 2014 adalah sebagai berikut :

1. **Pengembangan Usaha, Industri dan Investasi Pariwisata, antara lain melalui** penataan kebijakan usaha pariwisata di 13 jenis usaha dan turunannya, dukungan kepada pengembangan usaha, fasilitasi pembentukan GPI, Penyusunan *Travel Pattern* dan Paket Wisata yang siap dijual, bimbingan teknik pelayanan prima, peningkatan kapasitas organisasi, koordinasi penataan dan pelayanan bebas visa kunjungan singkat, *visa on board*, *visa on line*, peningkatan pelayanan di bandara, pelabuhan laut, daerah perbatasan, koordinasi pengembangan jaringan transportasi multimoda antar daerah di 10 Destinasi, kemitraan usaha pariwisata, UMKM dan Industri Kreatif di bidang pariwisata, dukungan dan kerjasama lintas sektor, peningkatan iklim investasi dan promosi terpadu pariwisata, perdagangan dan investasi (*Tourism, Trade and Investment*), penyusunan dan penerapan kebijakan dan peraturan perundangan dalam bidang usaha dan industri pariwisata termasuk kebijakan pencadangan, skema insentif, sebagai turunan dari UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemantuan dan Evaluasi.
2. **Pengembangan Standardisasi Pariwisata, antara lain melalui** penyusunan materi uji kompetensi, pelatihan untuk master assessor dan assessor, penyusunan dan penerapan pedoman sertifikasi usaha, fasilitasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Lembaga Serifikasi Usaha (LSU), kerjasama standar dalam dan luar negeri, penyusunan dan penerapan kebijakan dan peraturan perundangan dalam bidang standardisasi sebagai turunan dari UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemantuan dan Evaluasi.
3. **Pengembangan Daya Tarik Pariwisata**, antara lain melalui Penataan Manajemen Produk dan Kebijakan Daya Tarik Wisata Bahari, Wisata Budaya dan Wisata Buatan di 29 destinasi (P. Abang – Kepulauan Riau; Bromo,

Tengger, Semeru – Jawa Timur; Toba, Nias – Sumatera Utara; Pangandaran – Jawa Barat; Mentawai – Sumatera Barat; Sleman – DIY; D. Sentarum – Kalimantan Barat; Bunaken – Sulawesi Utara; C. Borobudur, Dieng, Karimunjawa – Jawa Tengah; G. Rinjani, G. Tambora – NTB; Toraja – Sulawesi Selatan; P. Komodo, D. Kelimutu – NTT; D. Batur – Bali; Kep. Seribu, Kota Tua – DKI Jakarta; Tanjung Lesung – Banten; Raja Ampat – Papua Barat; P. Weh Sabang – NAD; P. Togeang, P. Tomini – Sulawesi Tengah; P. Wakatobi – Sulawesi Tenggara; Banda – Maluku; Tanjung Putting – Kalimantan Tengah; Derawan – Kalimantan Timur); penetapan daya tarik wisata nasional, penetapan destinasi pariwisata nasional dan kawasan strategis pariwisata atau kawasan khusus pariwisata berdasarkan *destination assessment*, pengembangan daya tarik wisata berbasis lingkungan untuk keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berbasis masyarakat, memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata, kajian daya tarik pariwisata, penyusunan dan penerapan kebijakan pengembangan daya tarik pariwisata, pengembangan pulau-pulau terdepan dan daerah perbatasan yang memiliki potensi pariwisata, koordinasi dan keterpaduan dengan lintas sektor seperti : Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan untuk pendukung pengembangan daya tarik pariwisata di daerah, Pemantuan dan Evaluasi.

4. **Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata**, antara lain melalui penyusunan petunjuk teknis penerapan sadar wisata, peningkatan kesadaran masyarakat dalam menerapkan unsur-unsur sapta pesona, bimbingan penyuluhan untuk pemerintah daerah dalam gerakan sadar wisata, penerapan kode etik pariwisata di destinasi pariwisata, pemanfaatan media cetak, elektronik dan *public figure*, pemanfaatan media massa dan kesenian tradisional, dukungan *event* tradisional, fasilitasi pengamanan dan kenyamanan oleh masyarakat di destinasi, koordinasi dan kerjasama lintas sektor, Pemantuan dan Evaluasi.
5. **Peningkatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Bidang Pariwisata**, antara lain melalui peningkatan daya tarik di desa wisata, peningkatan usaha yang dilakukan masyarakat di desa wisata, peningkatan pemberdayaan masyarakat di desa wisata, peningkatan kapasitas masyarakat dan usaha masyarakat desa berbasis industri kreatif, dukungan dan kerjasama lintas sektor, kemitraan dengan tour operator dan usaha pariwisata untuk mendatangkan wisatawan ke desa; pengembangan desa wisata dilakukan melalui penentuan kriteria, dukungan usaha pariwisata dan pelayanan, pengelolaan desa wisata, Pemantuan dan Evaluasi.
6. Untuk kelancaran kegiatan prioritas, diperlukan **Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata**, antara lain melalui kajian perencanaan destinasi pariwisata, peningkatan *destination management*, penataan database, informasi dan pencitraan destinasi, inventarisasi *baseline* dan *destination assessment*, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di daerah, koordinasi dan

kerjasama dengan lintas sektor dalam pembangunan prasarana dan prasaran di destinasi pariwisata dan Peningkatan koordinasi dan keterpaduan pembangunan pariwisata dan Pendukung untuk pengembangan *Destination Management Organization* (DMO), pendukung peningkatan kapasitas pegawai, kerjasama teknis dalam dan luar negeri, partisipasi pada pertemuan internasional, penyelenggaraan event nasional dan internasional, penetapan penghargaan destinasi pariwisata, peningkatan pengelolaan administrasi keuangan, umum dan personalia, monitoring dan evaluasi akuntabilitas pembangunan destinasi pariwisata.

Program **4.** | **PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA**

Tujuan :

- 1) Menjadikan pemasaran kegiatan utama pembangunan kepariwisataan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
- 2) Mendukung pengembangan pariwisata sebagai sektor penghasil devisa negara ketiga setelah sektor minyak dan gas, serta minyak kelapa sawit.
- 3) Mewujudkan pergerakan penduduk dan perjalanan wisatawan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia

Sasaran :

- 1) Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara,
- 2) Meningkatnya jumlah pergerakan wisatawan nusantara,
- 3) Meningkatnya keterlibatan stakeholders Indonesia dalam memasarkan pariwisata,
- 4) Meningkatnya pelayanan informasi dan kelengkapan informasi pariwisata Indonesia,

Dengan indikator sebagai berikut :

- 1) Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara,
- 2) Jumlah transaksi yang dihasilkan dari promosi pariwisata Indonesia di luar negeri,
- 3) Jumlah partisipasi pada bursa pariwisata internasional, pelaksanaan misi penjualan (sales mission) dan pendukung penyelenggaraan festival,
- 4) Jumlah pergerakan wisatawan nusantara,
- 5) Jumlah transaksi penjualan paket wisata nusantara di pasar dalam negeri.
- 6) Jumlah penyelenggaraan promosi langsung (direct promotion) dan penyelenggaraan event pariwisata berskala nasional dan internasional
- 7) Jumlah daerah yang mendapat dukungan promosi kepariwisataan.

- 8) Jumlah daerah yang dikembangkan menjadi tujuan wisata MICE,
- 9) Jumlah dokumen publikasi strategi promosi dan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri,
- 10) Jumlah destinasi yang memiliki data dan informasi yang lengkap,

Kegiatan - kegiatan prioritas sebagai pelaksanaan penugasan khusus kementerian tahun 2010 - 2014 yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata adalah :

- i. **Meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20% secara bertahap dalam 5 tahun** dengan :
 - Meningkatkan upaya promosi pariwisata ke 15 negara fokus pasar internasional
 - Meningkatkan upaya promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri terutama pada 10 tujuan pariwisata Indonesia
 - Meningkatkan aktivitas MICE nasional dan internasional di tujuan pariwisata Indonesia, melalui pelaksanaan event promosi MICE di dalam dan luar negeri
- ii. **Mempromosikan 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif** dengan meningkatkan penyajian dan diseminasi data dan informasi kepariwisataan Indonesia.
- iii. **Mendorong konsolidasi akses transportasi mancanegara dan dalam negeri, terutama ke 10 tujuan pariwisata Indonesia** dengan meningkatkan konsolidasi dan koordinasi lintas kementerian/ lembaga dalam peningkatan akses internasional ke 10 tujuan pariwisata Indonesia.

Sedangkan kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata melalui Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata tahun 2010 - 2014 adalah sebagai berikut :

1. **Peningkatan Promosi Dalam Negeri**, dengan kegiatan prioritas antara lain:
 - a. Penyelenggaraan *direct promotion* di pusat-pusat keramaian dan perbelanjaan.
 - b. Penyelenggaraan *event* pariwisata berskala nasional dan internasional.
 - c. Pendukung *event* seni, budaya dan pariwisata daerah.
 - d. Operasionalisasi Pusat Informasi Kepariwisata (*Tourism Information Center*).
 - e. Pemantuan dan evaluasi Peningkatan Promosi Dalam Negeri
2. **Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri**, dengan kegiatan prioritas, antara lain :
 - a. Partisipasi pada bursa pariwisata internasional.

- b. Pelaksanaan *sales mission* di fokus pasar wisatawan.
 - c. Pendukung penyelenggaraan Festival Indonesia di mancanegara.
 - d. Pemantuan dan evaluasi Peningkatan Promosi luar Negeri
- 3. Peningkatan Informasi Pasar Pariwisata**, dengan kegiatan prioritas antara lain :
- a. Analisis pasar dan *marketing intelligence* pasar wisatawan.
 - b. Penyelenggaraan *Familiarization Trip*.
 - c. Perintisan pusat promosi pariwisata Indonesia.
 - d. Pemantuan dan evaluasi Peningkatan Informasi Pasar Pariwisata.
- 4. Peningkatan Publikasi Pemasaran Pariwisata**, dengan kegiatan prioritas antara lain :
- a. Pengembangan data dan informasi pemasaran pariwisata.
 - b. Pengembangan penyajian data dan informasi pemasaran pariwisata.
 - c. Peningkatan diseminasi data dan informasi pemasaran pariwisata.
 - d. Pemantuan dan evaluasi Peningkatan Publikasi Pariwisata.
- 5. Peningkatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (*Meeting, Incentive Travel, Convention And Exhibition/MICE*)** dengan kegiatan prioritas antara lain :
- a. Pengembangan kapasitas MICE Indonesia.
 - b. Promosi penyelenggaraan MICE di Indonesia.
 - c. Pendukung *bidding* dan penyelenggaraan MICE.
 - d. Pemantuan dan evaluasi Peningkatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran.
- 6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya**, dengan kegiatan prioritas antara lain :
- a. Layanan Bidang Hukum,
 - b. Layanan Bidang Perencanaan dan Monev,
 - c. Layanan Bidang Keuangan,
 - d. Layanan Bidang Kepegawaian,
 - e. Layanan Bidang Umum,
 - f. Layanan Perkantoran,
 - g. Sarana dan Prasarana

Program **5.** | **PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Tujuan :

Meningkatkan kualitas, kuantitas, profesionalisme, dan daya saing sumberdaya kebudayaan dan pariwisata yang adaptif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan.

Sasaran :

Meningkatnya kapasitas sumberdaya pembangunan kebudayaan dan pariwisata.

Dengan indikator sebagai berikut :

- 1) Peserta pembekalan dan pelatihan bidang kebudayaan dan pariwisata.
- 2) SDM lulusan unit pelaksana teknis (UPT) pendidikan tinggi kepariwisataan yang terserap di pasar kerja di dalam maupun luar negeri.
- 3) Jumlah penelitian dan pengembangan.

Kegiatan - kegiatan prioritas sebagai pelaksanaan penugasan khusus kementerian tahun 2010 - 2014 yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Sumberdaya Kebudayaan dan Pariwisata adalah :

- i. **Penyusunan indeks pengembangan kebudayaan** (*Cultural Development Index*) yang bertujuan untuk mengetahui apakah kebudayaan masih hidup di masyarakat pendukungnya, terancam punah, atau sudah hilang. Dengan mengetahui tingkat perkembangan kebudayaan tersebut dapat diambil langkah-langkah penyelamatan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat pendukungnya dan masyarakat luas.
- ii. **Meningkatkan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai mutu tingkat pelayanan dan *hospitality management* yang kompetitif di Kawasan Asia.**
 - Meningkatkan profesionalisme dan daya saing SDM kebudayaan pariwisata.
 - Meningkatkan status pengelolaan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung/Bali dan Akademi Pariwisata Makassar/Medan menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP).
 - Meningkatkan status kelembagaan dari Sekolah Tinggi menjadi Institut dan Akademi menjadi Sekolah Tinggi.
 - Meningkatkan kualitas pendidikan di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung/Bali dan Akademi Pariwisata Makassar/Medan melalui program akreditasi pendidikan tinggi kepariwisataan.
 - Pembekalan bidang Kebudayaan dan Pariwisata bagi aparatur pemerintah, industri kebudayaan dan pariwisata, dan masyarakat sekitar destinasi pariwisata.

- Menyusun kurikulum pengembangan SDM kebudayaan dan pariwisata bagi aparaturnya pemerintah, industri kebudayaan dan pariwisata dan masyarakat sekitar destinasi pariwisata.
- iii. **Mengembangkan kapasitas nasional untuk pelaksanaan penelitian, penciptaan, dan inovasi, dan memudahkan akses dan penggunaan oleh masyarakat luas, melalui pelaksanaan kegiatan:**
- Peningkatan Penelitian dan Pengembangan bidang kebudayaan, difokuskan pada dukungan untuk pengembangan kesejarahan, kepurbakalaan, dan permuseuman, nilai tradisi, budaya, seni, kearifan-kearifan lokal, dan film.
 - Peningkatan Penelitian dan Pengembangan bidang kepariwisataan, yang difokuskan pada kepentingan dalam rangka pengembangan kepariwisataan, meliputi bidang: 1) bidang pengembangan pemasaran, 2) pengembangan destinasi, pengembangan industri, serta 4) kelembagaan.
 - Peningkatan Penelitian dan Pengembangan bidang arkeologi, dengan yang dibagi dalam 5 kategori pokok, yaitu 1) siapa dan dari mana kita migrasi dan proses hunian di nusantara; 2) interaksi manusia dan lingkungan alam masa lampau; 3) keanekaragaman budaya nusantara; 4) perdagangan insuler di nusantara, serta 5) mencari asal-usul dan persebaran *puak-puak* Melayu.

Sedangkan kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata melalui Program Pengembangan Sumberdaya Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010 - 2014 adalah sebagai berikut :

- 1) **Pengembangan Sumberdaya Manusia Kebudayaan dan Kepariwisataan**, dengan sub kegiatan: Pembekalan SDM Aparatur/Industri dan Masyarakat, peningkatan Kerjasama, Penyusunan dan review kurikulum, Penyusunan modul pembekalan budpar, Workshop pengembangan SDM, Supervisi pengembangan SDM pariwisata, Penyusunan Laporan, Pemantuan dan Evaluasi.
- 2) **Pengembangan Pendidikan Tinggi Pariwisata Kemenbudpar**, dengan sub kegiatan: Perkuliahan/pengajaran dan praktik, Penyusunan Program dan Rencana Kerja, peningkatan Kerjasama, Penyusunan dan review kurikulum dan syllabus, Penerbitan dan deseminasi informasi, serta Penyusunan Laporan, Pemantuan dan Evaluasi.
- 3) **Penelitian dan Pengembangan bidang kebudayaan**, dengan sub kegiatan: Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan terapan, Publikasi dan dokumentasi Kelitbangan, penyusunan Program dan Kerjasama Kelitbangan, Peningkatan fungsional peneliti, serta Penyusunan Laporan, Pemantuan dan Evaluasi.
- 4) **Penelitian dan Pengembangan bidang kepariwisataan**, dengan sub kegiatan: Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan terapan, Publikasi dan dokumentasi Kelitbangan, penyusunan Program dan Kerjasama Kelitbangan,

Peningkatan fungsional peneliti, serta Penyusunan Laporan, Pemantuan dan Evaluasi.

- 5) **Penelitian dan Pengembangan bidang arkeologi.** dengan sub kegiatan: Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan terapan, Publikasi dan dokumentasi Kelitbangan, penyusunan Program dan Kerjasama Kelitbangan, Peningkatan fungsional peneliti, serta Penyusunan Laporan, Pemantuan dan Evaluasi.
- 6) **Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya** Badan Pengembangan Sumberdaya Kebudayaan dan Pariwisata, Penyusunan dokumen perencanaan, pemantauan dan evaluasi.

Program teknis di atas didukung oleh Program Generik sebagai berikut :

<i>Program</i> 6. <i>(Generik)</i>	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENBUDPAR
---	--

Tujuan :

Meningkatkan kualitas pelayanan, pengelolaan, perencanaan dan pelaksanaan yang ditunjang oleh pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan bidang kebudayaan dan pariwisata.

Sasaran :

Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan, perencanaan dan pelaksanaan yang ditunjang oleh pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Dokumen pelaksanaan pembinaan administrasi serta dokumen perencanaan dan hukum.
- 2) Publikasi informasi kebudayaan dan pariwisata.
- 3) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan organisasi dilingkungan Depbudpar.
- 4) Peserta diklat aparatur negara.
- 5) Kerjasama internasional.
- 6) Informasi kebudayaan dan pariwisata dan media informasi.
- 7) Fasilitasi dan pendukung kegiatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata pusat dan daerah.

Program tersebut memiliki kegiatan prioritas :

- 1) **Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan**, dengan sub kegiatan antara lain : Penyusunan Laporan Keuangan SAI dan Monev Pelaksanaan, Pelaksanaan

Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Akuntansi Keuangan dan BMN di Lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Finalisasi Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Penyusunan Daya Serap Realisasi Keuangan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010, Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Aktifitas, Pemantuan dan Evaluasi.

- 2) **Peningkatan Layanan Administrasi Umum**, dengan sub kegiatan antara lain : Rapat-Rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan Kelompok Kerja/Konsultasi, Penataan Arsip Aktif, Penyusunan Laporan Semesteran BMN Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Penataan Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara, Pembinaan Pengelolaan Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara, Penyusunan Harga Satuan Barang, Pemantuan dan Evaluasi.
- 3) **Peningkatan Layanan Informasi Publik**, dengan sub kegiatan antara lain : Workshop bidang Budpar bagi Jurnalis Media Cetak dan Elektronik, Pengembangan Kehumasan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Media Relations, Peningkatan Hubungan Antar Lembaga dan Mitra Kerja, Peningkatan PR-ing melalui Event-Event di Dalam dan Luar Negeri, Penerbitan Publikasi Tahunan, Pemantuan dan Evaluasi.
- 4) **Pelayanan administrasi kepegawaian dan organisasi**, dengan sub kegiatan antara lain : Ujian Dinas Dan Penyesuaian Ijazah, Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Mutasi Pegawai Di Daerah, Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Formasi Pegawai, Penyelenggaraan Penerimaan CPNS, Pemeriksaan Dan Penyelesaian Kasus-Kasus Kepegawaian, Penyusunan Dokumen Kegiatan Biro Kepegawaian Dan Organisasi Kajian Dan Monitoring Kepangkatan Pegawai, Peningkatan Dan Pengembangan Penelaahan Pemberkasan Pegawai, Program Sidang Baperjakat Di Lingkungan Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata, Peningkatan Pelayanan Pemberhentikan Dan Kepensiunan, Pelantikan Pejabat, Pemantuan dan Evaluasi.
- 5) **Pendidikan dan Pelatihan Aparatur**, dengan sub kegiatan antara lain : Diklat PIM Tingkat II – IV, Diklat Teknis Pariwisata, Diklat Teknis Kebudayaan , Diklat Teknis Bahasa Asing, Pelatihan Communication & PR-Ing, Diklat Prajabatan Gol I, II dan III, Penyusunan Modul Diklat, Pemantuan dan Evaluasi.
- 6) **Peningkatan Kerjasama Internasional**, dengan sub kegiatan antara lain : Peningkatan Kerjasama Lingkup Multilateral, Peningkatan Kerjasama Lingkup Bilateral, Peningkatan Kerjasama Lingkup Regional, Peningkatan Kerjasama Lingkup Sub Regional Pendampingan Tamu Negara / Menteri Dan Fasilitas Program Kerja Sama Luar Negeri Di Indonesia, Pemantuan dan Evaluasi.
- 7) **Peningkatan layanan data dan sistem informasi**, dengan sub kegiatan antara lain : Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Nasional, Perancangan Neraca Satelit Kebudayaan Nasional, Pendataan Profil Wisnas Yang Bepergian Keluar Negeri, Pendataan Profil Wisman Yang Meninggalkan Indonesia, Pendataan Wisman Melalui Pintu Masuk Internasional, Statistik Kebudayaan Dan Pariwisata, Kerjasama Pengelolaan Data Dan Sistem Jaringan, Unit Kliring Data Spasial, Pengembangan Sistem Informasi, Pemeliharaan Dan Peremajaan Website, Pemantuan dan Evaluasi.

- 8) **Pengembangan Perencanaan dan Hukum**, dengan sub kegiatan antara lain : Pengkoordinasian Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata termasuk tindak lanjut, Penelaahan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata, Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Penyesuaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Rapat Koordinasi Penyusunan Anggaran, Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Pendukung Kegiatan Kebudayaan Dan Pariwisata, Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Nasional bidang Kebudayaan dan Pariwisata (Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan Nasional; Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional).

Program

7.

SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENBUDPAR

(Generik)

Tujuan :

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Sasaran :

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Pemeliharaan dan pengadaan inventaris kantor.

Program tersebut memiliki kegiatan prioritas :

Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana, dengan sub kegiatan antara lain : Perawatan Gedung Kantor , Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2/4 / 6 / 10 , Perawatan Sarana Gedung, Pengadaan Barang Inventaris Kantor, Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2/4/6/10.

Program

8.

PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENBUDPAR

(Generik)

Tujuan :

- 1) Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja satker/unit kerja melalui kegiatan pengawasan.
- 2) Mewujudkan aparat pengawas yang berintegritas dan profesional.

Sasaran :

- 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja satuan kerja/unit kerja di lingkungan Depbudpar.
- 2) Meningkatnya keandalan sumber daya manusia (SDM) Pengawas didukung dengan SOP Pengawas.

Dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Satuan kerja/unit kerja yang telah melaksanakan sistem AKIP
- 2) Hasil temuan yang ditindaklanjuti.
- 3) SOP pengawasan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Program tersebut memiliki kegiatan prioritas :

- 1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Inspektur I**
- 2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Inspektur II**
- 3) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Inspektur III**
- 4) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal**

Dengan sub kegiatan antara lain :

Pedoman Umum Pengawasan Itjen; Pedoman dan Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaksanaan Dekonsentrasi (Dekon) dan Tugas Pembantuan (TP) di lingkungan Depbudpar; Pedoman Reviu Atas Laporan Keuangan ; Pedoman Audit Kinerja; Penyusunan Pedoman Pengawasan; Penyusunan Pedoman Sistem Pengumpulan Dan Pengelolaan Data Kinerja; Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Tupoksi Dan Audit Keuangan (Inspektorat I); Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Tupoksi Dan Audit Keuangan (Inspektorat II); Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Tupoksi Dan Audit Keuangan (Inspektorat III); Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Dekon TP; Pemantauan Dan Evaluasi PNPM; Tindaklanjut Temuan Hasil Pemeriksaan; Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu; Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Budpar dan Dekon TP; Reviu LRA; Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas); Pelaksanaan Koordinasi dan Peningkatan Pengawasan Dalam Mencapai Tata Pemerintahan Yang Baik; Pemutahiran Data Temuan.

Bab IV.

P e n u t u p

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sebagai salah satu kementerian dalam kabinet Indonesia Bersatu II harus menyusun Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Renstra Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata adalah *dokumen perencanaan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata untuk periode 5 (lima) tahun*. Renstra Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mencakup materi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014 dan Visi Misi Presiden periode tahun 2009 - 2014.

Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014 ini sebagai rencana jangka menengah yang masih bersifat strategik dan indikatif diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan (*rolling plan*) dalam kurun waktu lima tahun.

Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014 ini akan mampu diimplementasikan secara optimal diperlukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan internal dan eksternal Kemenbudpar baik di tingkat nasional (antarinstansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat) maupun internasional (multilateral, regional dan bilateral).

Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014, diperlukan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan dan etos kerja seluruh personil dan satuan kerja di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014 selama kurun waktu 5 tahun tidak akan terlepas dengan kondisi yang berkembang di tingkat nasional maupun global sehingga pada waktunya diperlukan penyempurnaan.

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Ir. JERO WACIK, SE

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010 - 2014
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				2010	2014		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(10)	
I.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan, perencanaan dan pelaksanaan yang ditunjang oleh pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	1. Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan administrasi serta dokumen perencanaan dan hukum	94	488	k)	SEKRETARIAT JENDERAL
			2. Jumlah Publikasi informasi kebudayaan dan pariwisata	12	79	k)	
			3. Jumlah penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan organisasi di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	33	208	k)	
			4. Jumlah peserta Diklat Aparatur Negara	1593	9222	k)	
			5. Jumlah kerjasama internasional	47	260	k)	
			6. Jumlah informasi kebudayaan dan pariwisata dan jumlah media informasi	16	122	k)	
			7. Jumlah fasilitasi dan pendukung kegiatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata Pusat dan Daerah	4	30	k)	
a	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya kinerja pengelolaan administrasi keuangan	1. Jumlah dokumen laporan keuangan	47	238	k)	Biro Keuangan
			2. Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis pengelolaan keuangan	667	3584	k)	
b	Peningkatan Layanan Administrasi Umum	Meningkatnya layanan administrasi urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi pengelolaan perlengkapan	1. Jumlah dokumen laporan data aset BMN Semesteran dan Tahunan	3	15	k)	Biro Umum
			2. Jumlah dokumen laporan urusan tata usaha dan rumah tangga	2	10	k)	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				2010	2014		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(10)	
c	Peningkatan Layanan Informasi Publik	Meningkatnya penyediaan dan pelayanan informasi serta hubungan dengan masyarakat dalam rangka membentuk dan memperkuat citra Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	1. Jumlah dokumentasi dan publikasi terbitan Pusat Informasi dan Humas yang menyajikan berbagai informasi Budpar;	112	737	k)	Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
			publikasi	12	79		
			dokumentasi foto/video/rekaman suara	52	322		
			event kegiatan kebudayaan dan pariwisata	48	336		
			2. Jumlah kerjasama dengan media massa;	32	234	k)	
			stasiun TV	5	36		
			Media Cetak	8	66		
Media Online	4	33					
Stasiun Radio	3	25					
Media Outdoor	12	74					
3. Jumlah media, insan pers dan jurnalis yang mendapatkan apresiasi Pusat Informasi dan Humas	30	200	k)				
4. Jumlah hubungan dengan media massa, kelompok masyarakat, instansi pemerintah/lembaga, swasta/assosiasi;	60	340	k)				
5. Jumlah kegiatan pendampingan kunjungan kerja	20	140	k)				
d	Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Organisasi	Meningkatnya pelayanan penyelesaian administrasi kepegawaian dan organisasi	1. Jumlah dokumen administrasi kepegawaian dan organisasi	33	208	k)	Biro Kepegawaian dan Organisasi
			2. Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi kepegawaian dan organisasi	2	10	k)	
e	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Meningkatnya kapasitas manajemen dan teknis aparatur	1. Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Teknis	1429	7391	k)	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
			2. Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi diklat	2	10	k)	
f	Peningkatan Kerjasama Internasional	Meningkatnya partisipasi dan kerjasama bilateral dan multilateral di tingkat regional dan internasional	1. Jumlah keikutsertaan pada forum kerjasama regional dan internasional	37	210	k)	Biro Kerjasama Luar Negeri
			2. Jumlah dokumen kesepakatan kerjasama internasional	10	50	k)	
			3. Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi Kerjasama Luar Negeri	2	10	k)	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				2010	2014		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(10)	
g	Peningkatan Layanan Data dan Sistem Informasi	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi serta sistem jaringan	1. Jumlah dokumen data dan informasi kebudayaan dan pariwisata	16	122	k)	Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Jaringan
			2. Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi	2	10	k)	
h	Pengembangan Perencanaan dan Hukum	Terwujudnya koordinasi, perumusan, penyusunan, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan kebijakan, rencana dan program, kegiatan dan anggaran serta penyusunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian	1. Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum bidang kebudayaan dan pariwisata	42	225	k)	Biro Perencanaan dan Hukum
			2. Jumlah koordinasi lintas sektor di bidang perencanaan kebudayaan dan pariwisata	4	20	k)	
		Meningkatnya fasilitasi dan pendukung kegiatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata Pusat dan Daerah	1. Jumlah fasilitasi dan pendukung kegiatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata pusat dan daerah	4	30	k)	
II.	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	1. Jumlah pemeliharaan dan pengadaan inventaris kantor	148	743	k)	SEKRETARIAT JENDERAL
	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	Terselenggaranya pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1. Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi gedung dan sarana prasarana	29	164	k)	Biro Umum
			2. Jumlah pemeliharaan dan pengadaan Kendaraan roda 2/4/6	119	579	k)	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(10)
III.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja satuan kerja/unit kerja di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	1. Prosentase satuan kerja yang telah melaksanakan sistem AKIP	100	100 <i>nk</i>	INSPEKTORAT JENDERAL
		Meningkatnya keandalan SDM Pengawas didukung dengan SOP Pengawas	2. Prosentase hasil temuan yang ditindaklanjuti	100	100 <i>nk</i>	
			3. Jumlah SOP pengawasan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan	9	27 <i>k</i>	
a	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektur I	Meningkatnya ketaatan satuan kerja/unit kerja dalam melaksanakan sistem AKIP, Inspektur I	1. Prosentase satuan kerja yang telah melaksanakan sistem AKIP	100	100 <i>nk</i>	Inspektur I
		Meningkatnya transparansi dalam pengelolaan kegiatan	2. Prosentase satuan kerja yang telah menyebarkan informasi secara terbuka yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat	100	100 <i>nk</i>	
		Mendorong penurunan tingkat penyalahgunaan pengelolaan anggaran wilayah I	3. Prosentase hasil temuan yang ditindaklanjuti	100	100 <i>nk</i>	
			4. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan review	1	5 <i>k</i>	
b	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektur II	Meningkatnya ketaatan satuan kerja/unit kerja dalam melaksanakan sistem AKIP, Inspektur II	1. Prosentase satuan kerja yang telah melaksanakan sistem AKIP	100	100 <i>nk</i>	Inspektur II
		Meningkatnya transparansi dalam pengelolaan kegiatan	2. Prosentase satuan kerja yang telah menyebarkan informasi secara terbuka yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat	100	100 <i>nk</i>	
		Mendorong penurunan tingkat penyalahgunaan pengelolaan anggaran wilayah II	3. Prosentase hasil temuan yang ditindaklanjuti	100	100 <i>nk</i>	
			4. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan review	1	5 <i>k</i>	
c	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektur III	Meningkatnya ketaatan satuan kerja/unit kerja dalam melaksanakan sistem AKIP, Inspektur III	1. Prosentase satuan kerja yang telah melaksanakan sistem AKIP	100	100 <i>nk</i>	Inspektur III
		Meningkatnya transparansi dalam pengelolaan kegiatan	2. Prosentase satuan kerja yang telah menyebarkan informasi secara terbuka yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat	100	100 <i>nk</i>	
		Mendorong penurunan tingkat penyalahgunaan pengelolaan anggaran wilayah III	3. Prosentase hasil temuan yang ditindaklanjuti	100	100 <i>nk</i>	
			4. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan review	1	5 <i>k</i>	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				2010	2014		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(10)	
d	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	Meningkatnya kemampuan SDM pengawas yang didukung dengan SOP pengawasan	1. Jumlah SOP pengawasan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan 2. Jumlah auditor yang meningkatkan keterampilannya 3. Jumlah naskah standar pelayanan administrasi kepegawaian dan keuangan yang terbangun 4. Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi program pengawasan	9 3 4 2	27 15 16 10	k) k) k) k)	Sekretariat Inspektorat Jenderal
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA, SENI DAN PERFILMAN	Meningkatnya Internalisasi, revitalisasi, dan reaktualisasi nilai-nilai budaya yang mendukung pembangunan dan karakter pekerti bangsa Meningkatnya apresiasi terhadap keragaman seni budaya dan perfilman Meningkatnya kreativitas dan produktivitas para pelaku seni budaya dan perfilman Tersedianya sarana bagi pengembangan, pendalaman, dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibukota kabupaten/kota	1. Jumlah peserta sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai budaya 2. Jumlah reaktualisasi, inventarisasi dan dokumentasi karya budaya. <i>Inventarisasi dan dokumentasi karya Reaktualisasi</i> 3. Jumlah produksi film nasional yang berkualitas 4. Jumlah karya seni budaya yang memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual 5. Jumlah fasilitasi pergelaran, pameran, festival, lomba karya seni budaya dan perfilman <i>pergelaran</i> <i>pameran seni budaya</i> <i>pameran seni rupa</i> <i>festival</i> <i>lomba</i> <i>pawai budaya</i> <i>workshop</i> <i>festival film</i> <i>organisasi perfilman</i> <i>organisasi/ komunitas adat</i> 6. Jumlah fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya. <i>provinsi</i> <i>kab/kota</i>	1200 220 211 9 75 400 83 3 4 9 3 2 1 3 10 18 30 25 5 20	6900 1100 1055 45 391 2000 415 15 20 45 15 10 5 15 50 90 150 529 33 496	k) k)	DIREKTORAT JENDERAL NILAI, BUDAYA, SENI DAN PERFILMAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				2010	2014		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(10)	
a	Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa	Meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya yang mendukung pembangunan karakter dan pekerti bangsa.	1. Jumlah peserta internalisasi dan sosialisasi karakter dan pekerti bangsa/kampanye jatidiri bangsa	600	3900	k)	Direktorat Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa
			2. Jumlah pelaku budaya dan pemangku kepentingan yang mendapatkan penghargaan	50	300	k)	
			3. Jumlah naskah rumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria	2	10	k)	
			4. Jumlah dokumen laporan evaluasi dan bimbingan teknis	2	10	k)	
b	Pelestarian dan Pengembangan Nilai - Nilai Tradisi	Meningkatnya inventarisasi, revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai tradisi	1. Jumlah naskah inventarisasi nilai-nilai tradisi	50	50	nk)	Direktorat Tradisi
			2. Jumlah karya budaya bidang tradisi yang diaktualisasikan kembali	5	5	nk)	
			3. Jumlah naskah rumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria	2	10	k)	
			4. Jumlah dokumen laporan evaluasi dan bimbingan teknis	2	10	k)	
			5. Jumlah dokumen laporan dokumentasi dan publikasi	1	5	k)	
c	Pengembangan Masyarakat Adat	Meningkatnya pemberdayaan komunitas adat.	1. Jumlah fasilitasi dan advokasi komunitas adat.	32	160	k)	Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
			<i>Organisasi/komunitas adat</i>	30	150		
			<i>gelar budaya</i>	1	5		
			<i>pameran</i>	1	5		
			2. Jumlah naskah inventarisasi komunitas adat	10	50	k)	
			3. Jumlah naskah rumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria	2	10	k)	
4. Jumlah dokumen laporan evaluasi dan bimbingan teknis	2	10	k)				
5. Jumlah dokumen laporan hasil dokumentasi dan publikasi	1	5	k)				

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(10)
f	Pengembangan Galeri Nasional	Meningkatnya kualitas pengelolaan Galeri Nasional	1. Jumlah karya seni rupa yang di pameran	1750	2000 <i>nk</i>	Galeri Nasional Indonesia
			2. Jumlah karya seni yang diakuisisi	4	4 <i>nk</i>	
			3. Jumlah karya seni rupa yang dipreservasi (konservasi dan restorasi)	75	415 <i>k</i>	
			4. Jumlah fasilitasi prasarana pengembangan pusat kebudayaan nasional	-	1 <i>nk</i>	
			5. Jumlah dokumen hasil dokumentasi dan penyebarluasan informasi	1	5 <i>k</i>	
			6. Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi	2	10 <i>k</i>	
			7. Jumlah fasilitasi pameran seni rupa	7	35 <i>k</i>	
g	Peningkatan Sensor Film	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan Lembaga Sensor Film	1. Jumlah film/video/iklan yang lulus sensor	40,000	221,000 <i>k</i>	Lembaga Sensor Film
			2. Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi	2	10 <i>k</i>	
			3. Jumlah dokumen laporan hasil dokumentasi dan kearsipan	1	5 <i>k</i>	
h	Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional	Meningkatnya pemanfaatan hasil-hasil kajian sejarah dan nilai tradisional	1. Jumlah naskah kajian pelestarian sejarah dan nilai tradisional	110	1157 <i>k</i>	Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
			2. Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi (11 BPSNT)	22	110 <i>k</i>	
			3. Jumlah peserta bimbingan dan penyuluhan (orang) di 11 BPSNT	550	2750 <i>k</i>	
			4. jumlah dokumen hasil inventarisasi perlindungan karya budaya (11 BPSNT)	11	55 <i>k</i>	
			5. Jumlah dokumen hasil dokumentasi dan penyebarluasan informasi (11 BPSNT)	11	55 <i>k</i>	
			6. Jumlah dokumen hasil pelayanan publik (11 BPSNT)	11	55 <i>k</i>	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				2010	2014		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(10)	
i	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film	Meningkatnya manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam rangka pengembangan nilai budaya, seni dan perfilman	1. Jumlah fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya	25	25	k)	Sekretariat Direktorat Jenderal Nilai, Budaya, Seni dan Perfilman
			<i>Provinsi</i>	5	5		
			<i>Kab/kota</i>	20	20		
			2. Jumlah fasilitasi prasarana pengembangan pusat kebudayaan nasional	1	1	k)	
			3. Jumlah fasilitasi event bidang NBSF	12	60	k)	
			4. Jumlah naskah pedoman, kajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang nilai budaya, seni dan perfilman	6	30	k)	
5. Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi program	2	10	k)				
6. Jumlah dokumen laporan kerjasama luar negeri, hasil peliputan dan perekaman serta kehumasan	3	15	k)				
7. Jumlah dokumen laporan administrasi kepegawaian, keuangan, dan umum	3	15	k)				
V	PROGRAM KESEJARAHAN, KEPURBAKALAN, DAN PERMUSEUMAN	Meningkatnya internalisasi nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan yang mendukung pembangunan karakter dan jati diri bangsa.	1. Jumlah peserta internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai sejarah dan sejarah kewilayahan Indonesia	5,600	37,500	k)	DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA
		Meningkatnya kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya, khususnya Benda Cagar Budaya/Situs/ Kawasan Cagar Budaya	1. Jumlah warisan budaya dunia dan cagar budaya nasional yang ditetapkan dan dikelola secara terpadu	1	9	k)	
			2. Jumlah benda cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara.	2,100	7,700	nk)	
	3. Jumlah situs dan kawasan cagar budaya yang dilindungi, dipelihara, dan dieksplorasi	2,226	2,490	nk)			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(10)
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengelolaan museum, termasuk naskah-naskah kuno.	1. Jumlah museum yang memenuhi standar pelayanan dan pengelolaan	4	79 k)	
			2. Jumlah koleksi dan naskah kuno yang diselamatkan dan dikelola	3,120	4,000 nk)	
a	Pengembangan Nilai Sejarah	Meningkatnya internalisasi nilai-nilai sejarah melalui penulisan sejarah dan bimbingan	1. Jumlah Naskah Sejarah	3	15 k)	Direktorat Nilai Sejarah
			2. Jumlah peserta internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai sejarah	5,200	33,300 k)	
			3. Jumlah naskah rumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria	2	10 k)	
			4. Jumlah dokumen laporan evaluasi dan bimbingan teknis	2	10 k)	
			5. Jumlah dokumen laporan hasil dokumentasi dan publikasi	2	10 k)	
b	Pengembangan Geografi Sejarah	Meningkatnya inventarisasi dan pemetaan geografi sejarah	1. Jumlah naskah sejarah kewilayahan Indonesia	5	29 k)	Direktorat Geografi Sejarah
			2. Jumlah peta/atlas geografi sejarah	1	11 k)	
		Meningkatnya pemahaman dan Apresiasi masyarakat terhadap sejarah kewilayahan Indonesia	1. Jumlah peserta internalisasi dan sosialisasi sejarah kewilayahan Indonesia	400	4,200 k)	
			2. Jumlah naskah rumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria	2	10 k)	
			3. Jumlah dokumen laporan evaluasi dan bimbingan teknis	2	10 k)	
c	Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Bawah Air	Meningkatnya kualitas perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan peninggalan bawah air	1. Jumlah situs bawah air yang diidentifikasi, diinventarisasi, dipetakan, ditetapkan dan dieksplorasi	8	73 k)	Direktorat Peninggalan Bawah Air
			2. Jumlah BCB bawah air yang diselamatkan, diamankan, dirawat, diawetkan, dan dimanfaatkan	1,000	6,000 nk)	
		Meningkatnya internalisasi pelestarian peninggalan bawah air	1. Jumlah peserta yang berpartisipasi bidang peninggalan bawah air	1,230	27,330 nk)	
			2. Jumlah tenaga ahli dan terampil bidang peninggalan bawah air	20	330 k)	
			3. Jumlah naskah rumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria	2	10 k)	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(10)
			4. Jumlah dokumen laporan evaluasi dan bimbingan teknis	2	10	k)
			5. Jumlah dokumen laporan hasil dokumentasi dan publikasi	1	5	k)
d	Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan	Terwujudnya penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu cagar budaya	1. Jumlah penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu cagar budaya	1	9	k)
		Meningkatnya kualitas perlindungan, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan BCB/situs dan kawasan kepurbakalaan secara terpadu	1. Jumlah BCB/Situs/Kawasan yang diinventaris dan ditetapkan secara nasional	1,100	1,700	nk)
			2. Jumlah cagar budaya nasional yang dinominasikan dan didaftarkan sebagai warisan dunia	4	4	nk)
		Meningkatnya internalisasi pelestarian peninggalan purbakala	1. Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam pelestarian cagar budaya	1,300	11,011,405	k)
			2. Jumlah naskah rumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria	2	10	k)
			3. Jumlah dokumen laporan evaluasi dan bimbingan teknis	2	10	k)
e	Pengembangan Pengelolaan Permuseuman	Meningkatnya kualitas pengelolaan koleksi dan naskah serta pelayanan museum termasuk museum daerah	1. Jumlah koleksi dan naskah kuno yang dikelola	620	1,500	nk)
			<i>Koleksi Naskah</i>	500	1,000	
				120	500	
			2. Jumlah Museum yang direvitalisasi	4	84	k)
			3. Jumlah Museum Berskala Nasional yang dikembangkan (Museum Nasional Batik dan Museum Maritim)	1	2	nk)
		Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap museum	1. Jumlah peserta berpartisipasi dalam Gerakan Nasional Cinta Museum	1,500,000	17,500,000	k)
			2. Jumlah pengunjung museum	56,500	371,000	k)
			3. Jumlah naskah rumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria	2	10	k)
			4. Jumlah dokumen laporan evaluasi dan bimbingan teknis	2	10	k)
f	Pengembangan Pengelolaan Museum Nasional	Meningkatnya kualitas pengelolaan koleksi dan naskah serta pelayanan museum	1. Jumlah peserta bimbingan dan penyuluhan	200	1,000	k)
			2. Jumlah penerbitan publikasi museum (eksemplar)	5,500	49,500	k)
			3. Jumlah koleksi dan naskah yang dikelola	2,500	12,500	k)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(10)
			4. Luas pengembangan dan penataan Gedung C Museum Nasional yang berskala internasional (m ²)		39,086 k)	
			5. Luas Pengembangan Tempat Penyimpanan (<i>storage</i>) (m ²)	-	6,144 k)	
			6. Luas pengembangan dan penataan Gedung C tempat penyimpanan (<i>storage</i>) dan ruang presentasi (m ²)	1,142	44,308 k)	
		Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap museum nasional	1. Jumlah pengunjung dalam dukungan Gerakan Nasional Cinta Museum	200,000	1,500,000 k)	
			2. Jumlah naskah rumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria	2	10 k)	
g	Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala	Meningkatnya kualitas perlindungan, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan BCB/Situs dan Kawasan kepurbakalaan	1. Jumlah Cagar Budaya/Situs/Kawasan yang dilestarikan dan dikelola	2,218	2,470 nk)	UPT Bidang Purbakala 14 unit satuan kerja
			2. Inventarisasi dan pendaftaran peninggalan purbakala	2,600	2,600	
			3. Pengkajian pelestarian tinggalan purbakala	56	346 k)	
		Meningkatnya internalisasi pelestarian peninggalan purbakala	1. Jumlah orang yang mengunjungi situs/kawasan cagar budaya	3,500	17,500 k)	
			2. Jumlah SDM yang mampu melakukan pelestarian BCB/situs/kawasan	840	4,200 k)	
			3. Jumlah naskah rumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria	2	10 k)	
h	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala	Terselenggaranya kegiatan koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan dukungan teknis bidang Kesenjarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman	1. Jumlah fasilitasi sarana perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kepurbakalaan dan permuseuman	33	179 k)	Sekretariat Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala
			2. Jumlah naskah pedoman, kajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang sejarah dan purbakala	6	30 k)	
			3. Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi program	2	10 k)	
			4. Jumlah dokumen laporan kerjasama luar negeri, hasil peliputan dan perekaman serta kehumasan	3	15 k)	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(10)
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya destinasi pariwisata yang berdaya saing tinggi di pasar global	1 Lama Tinggal Wisatawan (hari) :			DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
			a Mancanegara	7.8	7.50 nk)	
		b Nusantara	2.10	3.00 nk)		
		Meningkatnya Pengeluaran dan Lama Tinggal Wisatawan	2 Pengeluaran Wisatawan harian			
			a Mancanegara (USD)	1,000	2,000 nk)	
		b Nusantara (Rp. ribu)	600	750 nk)		
		3 Jumlah dan kualitas pengelolaan destinasi yang dikembangkan (Destination Management Organization)	2	15 nk)		
4 Jumlah & Keragaman Daya Tarik Wisata.	7	29 nk)				
5 Jumlah Masyarakat yang Menjadi Sasaran Sadar Wisata (orang/kelompok)	4000	2000 nk)				
6 Jumlah Desa Wisata yang Menjadi Sasaran PNPM Bidang Pariwisata	200	2,000 nk)				
7 Jumlah Sertifikasi Tenaga Kerja di bidang pariwisata (dalam ribu)	10	6 nk)				
a	Pengembangan Daya Tarik Pariwisata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penataan daya tarik wisata	1. Jumlah dan lokasi wisata alam dan bahari berstandar internasional	6	25 nk)	Direktorat Produk Pariwisata
			2. Jumlah dan lokasi wisata budaya	1	4 nk)	
			3. Jumlah naskah rumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria	1	5 k)	
			4. Jumlah dokumen laporan Evaluasi dan Bimbingan Teknis	2	10 k)	
b	Pengembangan Standardisasi Pariwisata	Meningkatnya penyusunan dan pemutakhiran standar pariwisata	1. Jumlah dan jenis standar kompetensi	8	38 k)	Direktorat Standardisasi Pariwisata
			2. Jumlah dan jenis standar usaha	6	32 k)	
	Meningkatnya penerapan standar dan kompetensi pariwisata	1. Jumlah Materi Uji Kompetensi dan Pedoman Sertifikasi Usaha	8	36 k)		
		2. Jumlah Master Asesor dan Asesor	1000	5000 k)		
		3. Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) & Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) Pariwisata	7	36 k)		
		4. Jumlah Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi (dalam ribu orang)	10	50 k)		
		5. Jumlah naskah rumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria	1	5 k)		
		6. Jumlah dokumen laporan Evaluasi dan Bimbingan Teknis	2	10 k)		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				2010	2014		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(10)	
c	Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata	Meningkatnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan	1. Jumlah kelompok sadar wisata	200	1100	k)	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
			2. Jumlah masyarakat sadar wisata (orang)	4000	22000	k)	
			3. Jumlah naskah rumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria	1	5	k)	
			4. Jumlah dokumen laporan Evaluasi dan Bimbingan Teknis	2	10	k)	
d	Pengembangan Usaha, Industri dan Investasi Pariwisata	Berkembangnya usaha, industri dan investasi pariwisata	1. Jumlah Kebijakan Usaha Pariwisata (naskah)	8	48	k)	Direktorat Usaha Pariwisata
			2. Jumlah Industri/Asosiasi Pariwisata yang mendapat dukungan	4	35	k)	
			3. Jumlah Pola Perjalanan (Travel Pattern)	6	37	k)	
			4. Jumlah Profil Investasi Pariwisata	5	33	k)	
			5. Jumlah UMKM dan Industri Kreatif bidang pariwisata	8	48	k)	
			6. Jumlah naskah rumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria	1	5	k)	
			7. Jumlah dokumen laporan Evaluasi dan Bimbingan Teknis	2	10	k)	
e	Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata	Meningkatnya daya tarik dan keterlibatan masyarakat di desa wisata	1. Jumlah daya tarik wisata di desa	75	750	k)	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
		Meningkatnya jumlah desa wisata	2. Jumlah Usaha masyarakat desa berbasis industri kreatif di bidang pariwisata	25	225	k)	
			3. Jumlah desa Pendukung usaha pariwisata	100	1025	k)	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(10)
f	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata	Terselenggaranya kegiatan koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan pendukung teknis dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan destinasi pariwisata	1. Jumlah kegiatan pemutakhiran database dan informasi destinasi 2. Jumlah <i>Destination Management Organizaion</i> (DMO) 3. Jumlah Dukungan Amenitas Pariwisata 4. Jumlah dukungan teknis pengembangan destinasi pariwisata 5. Jumlah naskah pedoman, kajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang pengembangan destinasi pariwisata 6. Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi pemasaran pariwisata 7. Jumlah dokumen laporan administrasi kepegawaian, keuangan dan umum	7	29 <i>nk</i>	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata
				2	15 <i>nk</i>	
				6	29 <i>nk</i>	
				36	239 <i>k</i>	
				3	15 <i>k</i>	
				2	10 <i>k</i>	
				3	15 <i>k</i>	
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN					DIREKTORAT JENDERAL PEMASARAN
		Meningkatnya Jumlah wisatawan mancanegara	1 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (juta orang)	6.8	8.6 <i>nk</i>	
		Meningkatnya jumlah pergerakan wisatawan nusantara	2 Jumlah transaksi pelaksanaan promosi pariwisata Indonesia di luar negeri (transaksi)	8,000	10400 <i>nk</i>	
			3 Jumlah Pergerakan wisatawan nusantara (juta perjalanan)	230	276 <i>nk</i>	
			4 Jumlah transaksi penjualan paket wisata nusantara di pasar dalam negeri (transaksi)	3,500	6,500 <i>nk</i>	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(10)
		Meningkatnya keterlibatan stakeholders pariwisata Indonesia dalam memasarkan pariwisata Indonesia	<p>5 Jumlah Event pariwisata diseluruh Indonesia (event)</p> <p>6 Jumlah daerah yang mendapatkan dukungan promosi kepariwisataan (daerah)</p> <p>7 Jumlah daerah yang dipromosikan menjadi tujuan MICE (daerah)</p>	43	45 <i>nk</i>	
				33	33 <i>nk</i>	
				5	9 <i>nk</i>	
		Meningkatnya pelayanan informasi dan kelengkapan informasi pariwisata Indonesia	8 Jumlah dokumen publikasi strategi promosi dan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri (naskah)	32	41 <i>nk</i>	
			10 Jumlah destinasi yang memiliki data dan informasi yang lengkap (daerah)	10	10 <i>nk</i>	
a	Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Meningkatkan jumlah pergerakan wisatawan nusantara	<p>1. Jumlah Penyelenggaraan Promosi Langsung (<i>Direct Promotion</i>) di pusat-pusat keramaian dan perbelanjaan (event)</p> <p>1. Jumlah Penyelenggaraan <i>Event</i> Pariwisata Berskala Nasional dan Internasional (event)</p> <p>2. Jumlah Pendukung <i>Event</i> Seni, Budaya dan Pariwisata Daerah (event)</p> <p>3. Jumlah Penyelenggaraan event daerah (unit)</p> <p>4. Jumlah naskah rumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria</p> <p>5. Jumlah dokumen laporan Evaluasi dan Bimbingan Teknis</p>	19	138 <i>k</i>	
				21	158 <i>k</i>	
				45	219 <i>k</i>	
				-	33 <i>nk</i>	
				-	4 <i>k</i>	
				-	8 <i>k</i>	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(10)
b	Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri	Meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara	1. Jumlah Partisipasi pada bursa pariwisata internasional (event)	47	242	k)
			2. Jumlah Pelaksanaan Misi Penjualan (<i>Sales Mission</i>) di fokus pasar wisatawan (event)	15	79	k)
			3. Jumlah Pendukung penyelenggaraan Festival Indonesia di mancanegara (event)	10	50	k)
			4. Jumlah Perwakilan Promosi Pariwisata Indonesia (<i>Indonesia Tourism Promotion Representative Officers</i>) di Luar Negeri (kota)	12	15	nk)
			5. Jumlah naskah rumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria	-	4	k)
			6. Jumlah dokumen laporan evaluasi dan bimbingan teknis	-	8	k)
c	Pengembangan Informasi Pasar Pariwisata	Meningkatkan pelayanan informasi dan kelengkapan informasi pariwisata Indonesia	1. Jumlah dokumen hasil analisis pasar dalam dan luar negeri (naskah)	23	123	k)
			2. Jumlah penyebaran informasi fokus pasar pariwisata Indonesia (eksemplar)	8,000	54,200	k)
			3. Jumlah Peserta Perjalanan Pengenalan (<i>Famillirization Trip/Fam Trip</i>) sesuai target, jadwal, fokus pasar dan pasar potensial (orang)	400	2,500	k)
			4. Jumlah naskah rumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria (naskah)	1	5	k)
			5. Jumlah dokumen laporan evaluasi dan bimbingan teknis (naskah)	2	10	k)
d	Peningkatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (Meeting, Incentive Travel, Conference and	Meningkatkan keterlibatan stakeholders Indonesia dalam memasarkan pariwisata	1. Jumlah Daerah yang dikembangkan menjadi tujuan wisata MICE (daerah)	5	32	k)
			2. Jumlah Promosi Penyelenggaraan MICE (event)	12	66	k)
			3. Jumlah Pendukung Penawaran (<i>Bidding</i>) dan Penyelenggaraan MICE (event)	56	292	k)
			5. Jumlah naskah rumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria (naskah)	-	4	k)
			6. Jumlah dokumen laporan evaluasi dan bimbingan teknis (naskah)	-	8	k)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(10)
e	Peningkatan Publikasi Pemasaran Pariwisata	Meningkatkan pelayanan informasi dan kelengkapan informasi pariwisata Indonesia	1. Jumlah destinasi yang memiliki data dan informasi yang lengkap (daerah) 2. Jumlah bahan promosi cetak (juta eksemplar) 3. Jumlah bahan promosi elektronik (ribu keping) 4. Jumlah publikasi media cetak, media elektronik dan media luar ruang (media) 5. Jumlah bahan promosi cetak yang terdiseminasi (ribu eksemplar) 6. Jumlah bahan promosi elektronik yang terdiseminasi (ribu keping) 7. Jumlah naskah rumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria 8. Jumlah dokumen laporan evaluasi dan bimbingan teknis	10	50 k)	
				0.90	5.30 k)	
				90	683 k)	
				85	430 k)	
				619	3,097 k)	
				90	449 k)	
				1	5 k)	
				2	10 k)	
f	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemasaran	Meningkatkan keterlibatan stakeholders Indonesia dalam memasarkan pariwisata	1. Jumlah <i>event</i> pengembangan kebijakan pemasaran dan promosi pariwisata oleh masyarakat 2. Jumlah <i>event</i> Dukungan pengembangan kebijakan pemasaran dan promosi pariwisata daerah 3. Jumlah naskah pedoman, kajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang pemasaran Pariwisata 4. Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi pemasaran pariwisata 5. Jumlah dokumen laporan administrasi kepegawaian, keuangan dan umum	23	23 k)	
				79	79 k)	
				3	23 k)	
				12	70 k)	
				27	148 k)	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				2010	2014		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(10)	
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Meningkatnya kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan dan pariwisata	1. Jumlah peserta pembekalan dan pelatihan bidang kebudayaan dan pariwisata(orang)	1150	5865	k)	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			2. Jumlah SDM lulusan UPT pendidikan tinggi kepariwisataan yang terserap di pasar kerja di dalam maupun luar negeri (orang)	1241	6831	k)	
			3. Jumlah penelitian dan pengembangan	165	850	k)	
a	Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Kepariwisata	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur/industri/ masyarakat bidang kebudayaan dan kepariwisataan	1. Jumlah sumber daya yang dilatih di bidang kebudayaan dan kepariwisataan (orang)	1150	5865	k)	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
			2. Jumlah naskah kebijakan dan norma, standar, prosedur, kriteria (kurikulum dan modul pembekalan)	3	15	k)	
			3. Jumlah dokumen laporan kerjasama	6	32	k)	
			4. Jumlah dokumen laporan evaluasi	1	5	k)	
b	Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata	Meningkatnya profesionalisme dan daya saing SDM bidang pariwisata di 4 UPT pendidikan tinggi pariwisata	1. Jumlah program study	34	42	nk)	Sekolah Tinggi Pariwisata/Akpar
			2. Jumlah mahasiswa aktif(orang)	4780	27030	k)	
			3. Jumlah dosen (orang)	390	500		
			4. Jumlah lulusan pendidikan pariwisata (orang) di 4 UPT Pendidikan Tinggi pariwisata	1241	6831	k)	
			5. Jumlah penelitian dosen (naskah/laporan)	79	588	k)	
			6. Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi	8	40	k)	
			7. Jumlah dokumen laporan kerjasama	4	20	k)	
			8. Jumlah naskah kurikulum dan silabus	8	40	k)	
			9. Jumlah dokumen laporan publikasi dan deseminasi	8	40	k)	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(10)
c	Penelitian dan Pengembangan Bidang Kebudayaan	Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebudayaan dalam mendukung kebijakan pembangunan kebudayaan	1. Jumlah penelitian dan Pengembangan bidang kebudayaan	13	65 k)	Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan
			2. Jumlah naskah publikasi dan diseminasi Litbang Kebudayaan	10	58 k)	
			3. Jumlah dokumen laporan kerjasama Litbang Kebudayaan	7	46 k)	
			4. Jumlah dokumen laporan evaluasi	2	10 k)	
d	Penelitian dan Pengembangan Bidang Kepariwisata	Meningkatnya penelitian dan pengembangan kepariwisataan dalam mendukung kebijakan pembangunan kepariwisataan	1. Jumlah penelitian dan Pengembangan bidang kepariwisataan	8	50 k)	Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata
			2. Jumlah naskah publikasi dan diseminasi Litbang Kepariwisata	10	58 k)	
			3. Jumlah dokumen laporan kerjasama Litbang Kepariwisata	7	46 k)	
			4. Jumlah dokumen laporan evaluasi	2	10 k)	
e	Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi.	Meningkatnya penelitian dan pengembangan bidang arkeologi.	1. Jumlah penelitian dan pengembangan bidang arkeologi.	144	735 k)	Pusat Penelitian dan Pengembangan arkeologi Nasional dan 10 Balai Arkeologi
			2. Jumlah naskah publikasi informasi litbang Arkeologi (10 balar dan arkenas)	23	115 k)	
			3. Jumlah naskah kerjasama bidang Arkeologi (10 balar dan arkenas)	12	60 k)	
			4. Jumlah dokumen laporan program kerja (10 balar dan arkenas)	22	110 k)	
			5. Jumlah dokumen laporan evaluasi (10 balar dan arkenas)	22	110 k)	
f	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata	Meningkatnya dukungan pelayanan manajemen sumber daya kebudayaan dan pariwisata	1. Jumlah Pelayanan manajemen Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata (pelayanan)	21	107 k)	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata
			2. Jumlah dokumen laporan kerjasama	1	5 k)	
			3. Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata	2	10 k)	
			4. Jumlah dokumen laporan administrasi kepegawaian, keuangan dan umum	3	15 k)	

Keterangan :

k) : Kumulatif selama 5 tahun

nk) : Non Kumulatif

**KEBUTUHAN PENDANAAN TAHUN 2010 - 2014
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**



NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI PENDANAAN (DALAM MILYAR Rp.)				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	135.99	157.05	159.77	170.87	187.63
a	Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Organisasi	7.91	8.80	9.00	10.00	12.40
b	Peningkatan Kerjasama Internasional	14.93	14.60	18.90	18.40	20.00
c	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	39.05	8.17	42.03	43.03	44.03
d	Pengembangan Perencanaan dan Hukum	24.03	24.86	33.03	38.03	43.49
e	Peningkatan Layanan Administrasi Umum	15.71	68.55	16.41	17.91	17.91
f	Peningkatan Layanan Informasi Publik	12.42	11.73	13.40	14.40	15.90
g	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara	11.40	10.57	13.40	14.50	15.90
h	Peningkatan Layanan Data dan Sistem Informasi	10.55	9.78	13.60	14.60	18.00
II.	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	31.99	15.15	37.99	39.99	41.19
a	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	31.99	15.15	37.99	39.99	41.19
III.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA	21.96	35.90	27.90	29.90	31.90
a	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektur I	4.51	5.00	6.80	7.96	8.76
b	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektur II	4.51	5.00	6.10	6.97	7.57
c	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektur III	4.50	5.00	6.10	6.97	7.57
d	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	8.44	20.90	8.90	8.00	8.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI PENDANAAN (DALAM MILYAR Rp.)				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA, SENI DAN PERFILMAN	199.82	252.50	324.41	335.50	335.94
a	Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional	48.39	57.90	51.40	53.40	53.40
b	Pengembangan Masyarakat Adat	3.40	6.00	5.40	6.40	6.40
c	Pelestarian dan Pengembangan Kesenian	16.00	44.60	49.60	30.00	30.00
d	Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa	8.00	10.00	10.00	11.50	11.50
e	Pengembangan Perfilman Nasional	14.00	21.25	46.00	48.00	48.00
f	Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Tradisi	4.55	6.40	6.50	7.50	7.50
g	Pengembangan Galeri Nasional	6.13	8.10	53.00	54.00	54.00
h	Peningkatan Sensor Film	20.71	20.75	28.00	29.00	29.00
i.	Dukungan Manajemen dan DukunganTeknis Lainnya Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film	78.64	77.50	74.51	95.70	96.14
V	PROGRAM KESEJARAHAN. KEPURBAKALAN. DAN PERMUSEUMAN	308.93	546.50	439.96	462.41	462.00
a	Pengembangan Geografi Sejarah	4.00	3.68	5.00	8.00	7.00
b	Pengembangan Nilai Sejarah	4.00	3.76	5.00	8.00	7.00
c	Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Bawah Air	4.70	4.76	7.00	9.00	9.00
d	Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan	9.74	126.35	13.80	15.80	14.80
e	Pengembangan Pengelolaan Permuseuman	28.27	149.88	87.20	73.15	78.70
f	Pengembangan Pengelolaan Museum Nasional	16.33	17.90	62.30	65.46	68.50
g	Dukungan Manajemen dan Dukungan-Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala	58.11	39.78	43.50	45.00	44.00
h	Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala	183.78	200.40	216.16	238.00	233.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI PENDANAAN (DALAM MILYAR Rp.)				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	141.45	289.00	347.50	302.50	276.50
a	Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata	10.00	20.70	20.0	10.0	10.0
b	Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata	20.00	61.70	92.5	107.5	103.5
c	Pengembangan Daya Tarik Pariwisata	40.00	96.36	17.3	17.9	10.1
d	Pengembangan Standardisasi Pariwisata	22.00	29.49	35.0	30.0	23.0
e	Pengembangan Usaha dan Industri Pariwisata	12.00	44.87	20.0	15.0	10.0
f	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata	37.45	35.88	162.7	122.1	119.9
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	446.18	542.10	508.05	495.01	495.66
a	Peningkatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (Meeting, Incentive Travel, Conference and Exhibition/MICE)	43.60	57.72	45.60	47.40	47.90
b	Pengembangan Informasi Pasar Wisata	42.00	36.98	42.00	42.50	42.50
c	Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri	43.30	115.30	44.60	46.10	47.10
d	Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri	100.00	105.45	121.74	109.41	110.61
e	Peningkatan Publikasi Pariwisata	133.55	161.81	146.32	148.81	147.36
f	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemasaran	83.73	64.85	107.79	100.79	100.19

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI PENDANAAN (DALAM MILYAR Rp.)				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	393.25	316.31	313.20	317.88	319.59
a	Penelitian dan Pengembangan bidang arkeologi.	41.25	48.25	50.53	52.46	53.48
b	Penelitian dan Pengembangan bidang Kebudayaan	5.00	6.50	7.50	8.50	8.50
c	Penelitian dan Pengembangan bidang Kepariwisataan	5.00	6.50	7.50	8.50	8.50
d	Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Kepariwisataan	5.40	9.70	7.30	7.70	7.50
e	Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata	317.80	183.51	217.80	217.18	217.89
f.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata	18.80	18.35	22.57	23.54	23.72
g	Pengembangan Pendidikan Kebudayaan		43.50			
TOTAL		1,679.57	2,154.51	2,158.78	2,154.06	2,150.41

Catatan : Untuk remunerasi masih belum dianggarkan


 MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

 Ir. JERO WACIK, SE.

Selasa, 10 Juli 2012

SUARA KARYA

nline

| politik | hukum | ekonomi | bisnis | metropolitan | nusantara | olahraga | internasional | hiburan | opini | humor |



HOME

Wisata



LIPUTAN KUSUS



WANITA



KESEHATAN



OTOMOTIF



TEKNOTREND



WISATA



BUDAYA



GRIYA



OLAHRAGA



GAMES



PENTAS



ADVERTORIAL

Berita Lainnya

- ▶ JALAN-JALAN KE CHINA Melelahkan tapi Mengasyikkan
- ▶ JALAN-JALAN KE CHINA Paket Wisata dan Kota Tanpa Sepeda Motor
- ▶ JALAN-JALAN KE CHINA Menjual Daya Tarik Kompleks Olahraga
- ▶ KERJA SAMA SIA Dukung Promosi Pariwisata Indonesia
- ▶ DINAMIKA DESTINASI PARIWISATA Saka Pariwisata dan Pokdarwis Dongkrak Turisme Jabar
- ▶ Jaguar, Lengkapi Koleksi Kucing Besar Lima Benua di TSI
- ▶ Pertamina Peduli Konservasi Terumbu Karang
- ▶ DINAMIKA DESTINASI PARIWISATA Saka Pariwisata Potensial Bangkitkan Turisme Indonesia
- ▶ Kemenakertrans Bangun Jalan Poros 177 Kilometer
- ▶ KESENIAN Jangan Biarkan Angklung Menjadi Aset Negara Lain
- ▶ Zivanna Letisha Promosikan Potensi Seni Budaya Indonesia
- ▶ Trail of Civilization 2009 Candi Borobudur Masih Diakui Unesco

arsip

Hotel Anda

- ▶ BENCANA ALAM Banjir dan Longsor Landa Aceh dan Jambi
- ▶ Hotel Ibis, Surabaya Tamu yang Berpuasa Leluasa Menikmati Tujuh Takjil
- ▶ GUGATAN BANJIR Sidang Hadirkan Pakar Bencana Alam

Festival Musik Bambu Nusantara

Terbukti, Seni Budaya Indonesia Sangat Menarik

Senin, 20 Agustus 2007

Dalam rangka menyemarakkan pesta kemerdekaan yang ke-62 Republik Indonesia, selama dua hari berturut-turut sejak Sabtu, 18 Agustus lalu, bertempat di Hal D Pekan Raya Jakarta (PRJ), digelar Festival Musik Bambu Nusantara.

Diikuti beragam bentuk tampilan musik bambu dari seluruh Indonesia, kesenian tersebut ternyata mendapat perhatian luas dari masyarakat. Selain masyarakat Kota Jakarta, sejumlah guru dan siswa teladan dari seluruh wilayah Tanah Air juga sempat menonton festival itu.

Dwiki Dharmawan, pentolan kelompok musik Krakatau, yang hadir dalam festival tersebut, memuji penampilan kelompok musik Bambu Melulu dari Sulawesi Utara, Saung Angklung Udjo dari Bandung, Jabar, dan Jegog dari Bali maupun penampilan seniman jazz balawan yang juga dari Bali.

Lalu, apa arti semua itu? Sekjen Depbudpar Sapta Nirwandar mengatakan, tampilnya beragam jenis musik bambu dari daerah-daerah di Indonesia dalam Festival Musik Bambu Nusantara membuktikan potensi seni budaya Indonesia sangat menarik. "Ternyata bambu bersifat multifungsi. Akarnya bisa dijadikan bahan sayur, daunnya bisa jadi pembungkus bacang, makanan khas masyarakat Jabar, sementara bambunya, selain bisa dijadikan aneka keperluan perabotan rumah tangga, juga bisa dijadikan perlengkapan musik yang nilai jualnya tinggi," ujar Sapta se usai membuka Festival Musik Bambu tersebut di PRJ, Jakarta, Sabtu lalu.

Di hari pertama festival itu digelar, karnaval bambu diwarnai aksi enggrang awi sada, saung angklung Mang Udjo, balawan, serunai, sambasunda, pentas Krakatau dengan mengandalkan peralatan musik dari bambu, kemudian suling buluh, genggong, kecapi suling, dan ensemble seruling alor.

Minggu (19/8) kemarin ditampilkan angklung banyumas, calung banyumas, rindik, joget bumbung, arumba melodi manis, tarling, kentongan purbalingga, angklung carub, angklung buhun dari pedalaman Banten, saluang, arumba Udjo, tolet, dan soulflip.

Selain menampilkan beragam tampilan musik bambu, juga diketengahkan pula sejumlah stan yang menjual beragam souvenir dari bahan utama bambu.

Juru bicara Depbudpar, Turman Siagian, kepada Suara Karya menginformasikan, selain menampilkan Festival Musik Bambu Nusantara, dalam rangka menyemarakkan pesta kemerdekaan tahun ini juga diselenggarakan Festival Film 62 Layar Tancap. Acara itu digelar pada Sabtu, 18 Agustus, di lapangan Desa Putera Jagakarsa, Gelora Bung Karno, Senayan, kemudian di Lapangan Baseball Gelora Rawamangun dan Lapangan Persima, Tambora, dan di kawasan Pekan Raya Jakarta. Minggu kemarin digelar pula Pawai Budaya Nusantara di depan Istana Merdeka dan Jalan Merdeka Barat, Jakarta. (Ami Herman)

arsip

[Politik](#) | [Hukum](#) | [Ekonomi](#) | [Metropolitan](#) | [Nusantara](#) | [Internasional](#) | [Hiburan](#) |
[Humor](#) | [Opini](#) | [About Us](#)

Copy Right ©2000 **Suara Karya Online**
Powered by [Hanoman-i](#)



CARI BERITA :

VOUCHER RESTORAN*

 Lihat promo hari ini

*Contoh promo yang akan datang

Berita Terkini

[Konser Intim Kahitna di Usia 26 Tahun](#)

[Lagu Kahitna bagi Anjasmara dan Dian Nitami](#)

[Tips Romantis Bebi Romeo dan Meisya Siregar](#)

[Tom Cruise Ingin Rujuk dengan Katie Holmes](#)

Topik Terhangat

[Korupsi Quran](#)

[Hambalang](#)

[Dahlan](#)

[Laga DKI 1](#)

Berita Pilihan

[Foto-foto Kim Jong-un Bersama Perempuan Misterius](#)

[Kemenpora Dinilai Jadi Sarang Korupsi](#)

[Menteri Dahlan Iskan Mau Impor Kelinci](#)

[Main Game Sehari, Mahasiswa Biologi Tewas](#)

[Bayern Bantah Dekati Pirlo](#)

[Jokowi-Ahok Yakini Pemilih Siluman Masih Ada](#)

Home Seleb Seni

Like 31k

Follow 127K followers

JUM"AT, 10 OKTOBER 2008 | 13:57 WIB

Bambu Nusantara World Music Festival di Sabuga

Besar Kecil Normal

TEMPO Interaktif, BANDUNG:- Tak kurang dari 1.500 siswa dan mahasiswa serta seniman akan memeriahkan Festival Bambu Nusantara di

Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung, Sabtu – Minggu (11-12/10). "Ini bagian dari rangkaian World Music Festival yang akan digelar tahun depan," ujar Ketua Penyelenggara Wawan Djuanda, dari Republic of Entertainment.

Dalam acara ini, akan disuguhkan antara lain penampilan Music Bambu Inovatif (klasik arumba, punk klung, house music DJ (soul clip), bambu ensemble (bambu ning pring), dan bambu orchestra (Lentera). Selain itu ada pula music bambu Indigenous diantaranya Jegog (Bali), patrol, calung, rindik, bambu melulu, dan angklung carub.

Ada pula serunai (Medan), seruling buluh, terompet bambu, kecap suling, cianjuran dan toleat. "Penonton juga akan disuguhi parade angklung yang tidak ada pada Festival Bambu Nusantara tahun lalu," kata Wawan. Parade angklung ini antara lain akan diikuti peserta dari beberapa SMU dan perguruan tinggi di Bandung.

Selain penampilan musik dari bambu, akan dibahas pula seputar keunikan bambu dalam workshp yang digelar mulai Sabtu pagi. Acara ini, kata Wawan, dapat menambah wawasan tentang bambu yang jumlahnya tidak kurang dari 1.250 jenis di dunia dan berasal dari 75 marga. "Di Indonesia tercatat sebanyak 39 bambu yang berasal dari delapan marga," katanya.

Workshop serupa pernah digelar Juli tahun lalu di Bandung dan beberapa kota lainnya seperti Denpasar, Solo, dan Jakarta. Sedangkan Festival Musik Bambu Nusantara diselenggarakan di Jakarta pada pertengahan Agustus tahun lalu.

Wawan menambahkan, rangkaian festival ini akan bermula pada empat pagelaran tahun depan yaitu Festival Angklung, Festival Bambu, Festival Seruling Nusantara, dan World Music Festival. "Rencananya akan dilaksanakan mulai Maret 2009," katanya.

Rana Akbari Fitriawan

Mau cari rumah, apartemen, atau kamar kos?

Berita Terkait

[Agar Siswa Tak Hanya Kenal Justin Bieber](#)

[Ketika "Patung Liberty" dan "Kuda Troya" Mampir di Jogja](#)

[Ribuan Warga Padati Banyuwangi Ethno Carnival](#)

[Pembukaan Borobudur Diramaikan Festival Jazz](#)

[Jero Wacik Dorong Wisatawan Kunjungi Danau Batur](#)

Topik

[Festival Budaya](#)

Tiket

Dapatkan diskon sampai 70% dengan tiket berikut. Segera daftarkan!
www.disdus.com/Tiket_Jakarta

Umroh Murah dan Mabru

Paket Umroh Ramadhan promo Harga promo umroh liburan sekolah
www.ngstour.co

Kost di UPH LippoKarawaci

bersih, nyaman, dan service hotel cepat
Disc 20% sampai desember'12
www.avalonresidence.com/

Iklan oleh Google

Terpopuler

[Kenapa Angka 7 Begitu Istimewa untuk Regina Idol](#)

[Ledakan ala Tompi dan Glenn di Jazz Gunung](#)

[Trio Macan Sebarkan "Iwak Peyek" di Malaysia](#)

Komentar

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertentensi suku, agama, ras, dan antar golongan

4 hari di Bali Rp.799.000
 Gratis F&B sampai Rp.500,000 khusus pemegang CC gold/platinum
www.TheBaliGetaway.com

Gratis pulsa
 Kerjakan survei dan dapatkan isi ulang pulsa gratis. Mudah sekali.
members.txteagle.com

Cari Lowongan Kerja?
 Berbagai macam Lowongan ada disini. Manajer, Kasir, SPG, Engineer DLL
www.berniaga.com/career

Iklan oleh Google

0 [Bagikan](#) [Tweet](#) 0

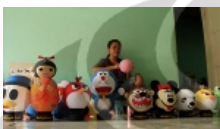
Nikmati Majalah Tempo dan Koran Tempo untuk Tablet iPad dan Android Anda, klik disini

[Share](#) [Print](#)

Foto Terkini



Liburan Sederhana ala Anak Pantai Cilincing



Menyulap Benang Jahit Menjadi Lampion Cantik



Foto-foto Kim Jong-un Bersama Perempuan Misterius



Kapolda Metro Jaya Bernyanyi di Ulang Tahun Salihara



Festival Bodypainting se-Dunia Digelar di Austria



Para Penghibur di Acara Festival Musik Essence

BISNIS BOLA GAYA! DUNIA METRO POLITIK OLAHRAGA OTOMOTIF SELEBI! TEKNO TRAVEL FOTO INFOGRAFIS VIDEO FOKUS! JEDA
 ENGLISH EDITION MAJALAH TEMPO KORAN TEMPO U-MAG TRAVELOUNGE PHOTO STOCK PDAT JURNALISME PUBLIK FORUM BLOG LELANG
 CAPING OPINI KOLOM CARI ANGIN INFORIAL :: TEMPO MOBILE APPS MOBILE SITE IPAD IPHONE BLACKBERRY ANDROID

[TENTANG](#) | [TERM OF US](#) | [KARIR](#)

COPYRIGHT © 2011 [TEMPO.CO](#)

Sports Games Online

Hanya Ada disini, Ayo Gabung Segera Dapatkan Hadaahnya
www.tri7betbola.com

Dedicate Server Indonesia

E3-1230, RAM 16GB, HD 2x1TB, 1GBPS, 2jt/bln, IIX- IDC, Promo Code: E1230
www.idroot.com

Bali Car Rental Deals

\$ 16/Day - No hassle Cost Free Consultation & Bali Road Maps
www.balicheapcar.com

Iklan oleh Google

Hotel Penerbangan **detiktravel**

Cari Penawaran Terbaik di Sini

Lokasi Cari

Info Promosi Travel



Marina Bay Sands marinabaysands.com	Rp 2,363.000
Berjaya Langkawi Resort berjayahotel.com	Rp 5,249.000

Powered by **wego**

IKLANBARIS

Ketik Kata Kunci

Cari Iklan

-  [Kapsul Obati Autis CP. Klik!! Memungkinkan menolong anak yg Autis, Epilepsy, CP serta penyakit kelompok Encephalopathic](#)
-  [Jadi Perkasa & Tahan Lama](#)

Cara Mudah Masuk ITB & PTN Favorit Lainnya Klik Disini

Promo Juli Buy 4 Get 1 (adpoint Regular)

BERITA LAIN

Selasa, 12/06/2012 07:42 WIB

detikBandung

Kamis, 01/10/2009 09:26 WIB

Festival Bambu Nusantara 3
Sajian Eksotisme Musik Bambu di Mal
 Pradipta Nugrahanto - detikBandung

Share Tweet 0 0 Like 0



Iklan oleh Google

Froggies Divers Manado

The Magic Wall of Bunaken - We'll Show You Their Secret
www.divefroggies.com

Study in UK by IBEC

Official Representative of 25 UK Universities in Indonesia
www.ibec.or.id

Composite Timber Deck

Singapore Green Label Decking Scratch Fade Resistant Timber Wood
www.polydeck.biz

RCM & RBI Practices

Practical Methods for Maintenance Group Discount, Call: 021-5708775
handaltraining.com

Bandung - Musik bambu memang begitu lekat dengan budaya Indonesia. Tak hanya dalam kehidupan keseharian tapi juga dalam seni budaya seperti musik.

Jawa Barat pun menyimpan begitu banyak potensi musik bambu. Maka untuk lebih memasyarakatkan musik bambu, perhelatan Festival Bambu Nusantara pun digelar untuk ketiga kalinya.

"Ada banyak suara yang bisa dihasilkan dari musik bambu. Diluar itu, musik bambu kini telah banyak dikolaborasikan dengan banyak musik-musik lainnya," tutur Presiden Republic Entertainment Wawan Juanda dalam jumpa persnya di Eplex Mal Parisj Van Java Jala Sukajadi, Rabu(30/9/2009).

Namun, beda halnya dengan tahun sebelumnya, Festival Bambu Nusantara 3 yang akan digelar 17-18 Oktober mendatang tidak akan diadakan di galeri atau gedung konser tapi di mal.

"Agar lebih terasa dekat dengan publik, kami akan menggelar festival yang ketiga ini di Mall Paris Van Java Bandung. Dengan begini, masyarakat yang berkunjung ke mall secara tidak langsung akan menyaksikan berbagai penampilan yang menggunakan bambu," ujar Wawan.

Selain musik, seperti biasa Festival Bambu Nusantara ketiga juga akan menampilkan unsur edukasi dengan turut menghadirkan workshop mainan bambu, alat rumah tangga, hingga fashion dan seminar bambu yang tersebar dalam 9 zona.

"Pada tanggal 17 hingga 18 nanti di PVJ akan ada sembilan zona yang semuanya berkaitan dengan bambu," tambah Wawan.

Dengan acara ini, Wawan berharap akan tertanam kepedulian masyarakat terhadap bambu dan peranannya terhadap kesenian dan kebudayaan.
 (dip/ema)

Download Google Chrome

Pencarian begitu cepat dan mudah dengan browser Web Google.
www.google.com/chrome

JobStreet.com Indonesia

Saatnya perusahaan mencari karyawan 30,000+ lowongan & terus bertambah!
JobStreet.co.id

Iklan oleh Google

Homogenic Isi Soundtrack Film Demi Ucok

- Senin, 07/05/2012 10:55 WIB
Album 'PS' Terbaru Kental Ramuan Progressive Rock
- Selasa, 24/04/2012 19:30 WIB
Elpaska Band Lapas Sukamiskin Launching Album Perdana
- Senin, 19/03/2012 12:08 WIB
Personel 57Kustik Rangkul Anak Jalanan
- Senin, 19/03/2012 11:20 WIB
Personel 57Kustik Hidup di Jalanan Sejak Kecil
- Senin, 19/03/2012 08:21 WIB
57Kustik, dari Lampu Merah ke Pertunjukan Musik Bergengsi

[Indeks Berita](#)

Forum Bandung

[Register](#) | [Login](#)

Thread Pilihan



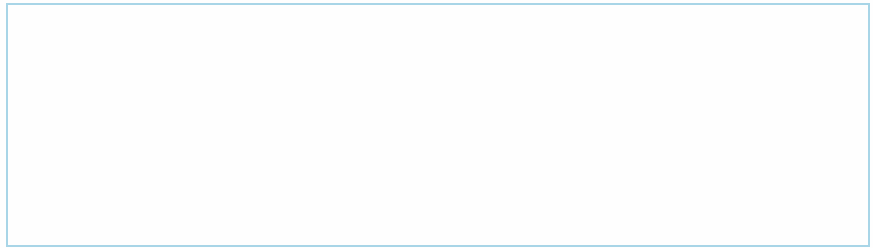
Selasa, 03/07/2012 15:38 WIB

Walah, Anak Jalanan di Bandung Capai 4 Ribu Lebih

Posted : nyimayway

Bandung untuk Koin KPK

Di Langit Bandung Terekam Objek Bercahaya Merah Muda Mirip Mata



Share

(0) Komentar

Kirim Komentar

Disclaimer

Komentar kosong

Foto Lain



Baca juga :

- **Bedug Jepang Dikenal Setelah Harry Roesli Meninggal**
- **Bedug Jepang, Tidak Sekadar Menabuh**
- **Female, Melesat dengan Choir dalam Band**

[HOME](#) | [NEWS](#) | [INFO](#) | [PENGALAMAN ANDA](#) | [LIFESTYLE](#) | [IKLAN BARIS](#) | [FOTO](#) | [TV](#) | [INFO IKLAN](#) | [FORUM BANDUNG](#) | [INDEKS](#) ..

[detikcom](#) | [detikNews](#) | [detikFinance](#) | [detikHot](#) | [detikI-net](#) | [detikSport](#) | [detikFood](#) | [Sepakbola](#) ..

[detikFoto](#) | [detikTV](#) | [detikSurabaya](#) | [detikBandung](#) ..

[detikForum](#) | [Suara Pembaca](#) | [Surat dari Buncit](#) | [Makan Enak \(MEOK\)](#) | [Info Iklan](#) | [Sindikasi](#) ..

Copyright © 2012 **detikcom**, All Rights Reserved | Redaksi | **Karir** | Kotak Pos | Info Iklan | Disclaimer



agus setiawan mengomentari artikel **KOMPAS bola - Milan Cuma Mampu Pinjam**

my Selamat Datang
Register | Login

DAPATKAN UPDATE TERKINI SEPUTAR DUNIA PROPERTI DAN INVESTASI HANYA DI RUBRIK PROPERTI KOMPAS.com

KOMPAS.com

KOMPAS.com

Selasa, 10 Juli 2012 | 08:14 WIB

- Home
- Nasional
- Regional
- Internasional
- Megapolitan
- Bisnis
- Olahraga
- Sains
- Travel
- Oase
- Edukasi
- Infografis
- Video
- More ▾

- Jeda
- Padamu Negeri
- Puisiku
- Ceritaku
- Mata Air
- Novel
- Cakrawala
- Muasal
- Cerber
- Resensi

Aktifkan Facebook Timeline App dan Jelajahi Kompas.com Bersama Teman-Teman Anda.



Festival Musik Bambu Dunia di Bandung

Yurnaldi | Marcus Suprihadi | Senin, 27 September 2010 | 18:25 WIB

Dibaca: 28 | Komentar: 0

Like

Be the first of your friends to like this.

Share:



KOMPAS/ARUM TRESNANINGTYAS DAYUPUTRI

Angklung sebagai alat musik tradisional Jawa Barat memiliki daya tarik bagi para wisatawan asing untuk belajarnya seperti terlihat di Saung Angklung Udjo, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (9/10/2009). Pertunjukan angklung dan belajar bermain angklung yang terbuka untuk umum dan digelar setiap hari ini merupakan salah satu upaya untuk melestarikan seni tradisional angklung sebagai kebudayaan Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com- Untuk menggairahkan dan melestarikan kekayaan khasanah budaya bangsa berupa peralatan musik dari bambu, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia bekerjasama dengan Republic Entertainment dan Maharani Esa Sejati, menggelar Festival Musik Bambu Dunia, tanggal 2-3 Oktober 2010 di Sasana Budaya Ganesha Bandung, Jawa Barat.

TERKAIT:

- [Hendrik, Maestro Musik Bambu](#)
- [Rekor Dunia Membentangkan Paten Kolintang](#)
- [Potensi Musik Bambu Sangat Menantang](#)

Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, Sapta Nirwandar, mengatakan, dengan mengangkat tema *Reinvention Bamboo Music and Culture*, festival yang digelar untuk keempat kali ini akan disemarakan dengan parade angklung, bambu *indigenous* antara lain seruling nusantara, bambu klasik, bamboo



Pagelaran dengan tema **Reinvention Bamboo Music and Culture** ini akan disemarakan parade

KOMPAS Travel

Destinasi utama untuk semua kebutuhan informasi dan panduan traveling Anda.

<http://travel.kompas.com>

- Oase
- Terpopuler
- Terkomentari

Selengkapnya

- [Ekspedisi Khatulistiwa: Suku Dayak... Merawat Indonesia di "Las...](#)
- [Situs Mlawatan Diperkirakan Bekas... Gubernur: Modernisasi Berdampak... Seniman Cilik Ajak Masyarakat...](#)

Selengkapnya

- [Rela Potong Gaji, Kaka Ingin Segera... Hati-hati dengan Ikan Pengincar Testis Tukul Diizinkan Poligami, asalkan... Pengantin Melahirkan di Tengah Pesta... Pelatih Ini Pecat Pemainnya Lewat SMS](#)

Selengkapnya

angklung, bambu indigenous, antara lain seruling nusantara, bambu klasik, bamboo rythim/string, bambu kontemporer.

-- Sapta Nirwandar



rythim/string, bambu kontemporer.

"Juga ada kegiatan pendukung lainnya seperti workshop dan pameran, seminar bambu, dan kuliner dari bambu," kata Sapta Nirwandar, Senin (27/9/2010) di Jakarta.

Menurut Sapta, event Festival Musik Bambu Dunia, yang mendatangkan seniman dan musisi handal dan kreatif dari Indonesia dan luar negeri, menjadi media yang efektif dalam mempromosikan kekayaan seni budaya Indonesia ke dunia Internasional.

Musik bambu sebagai musik universal menjadi soft power dalam mempromosikan pariwisata Indonesia ke manca negara. Dadang dari Republik Entertainment mengatakan, potensi seni budaya bambu yang ada di Tanah Air dan ditampilkan antara lain Saluang dan Talempong dari Sumatera Barat, Giring-giring Kabupaten Lemadau Kalimantan Tengah, Sasando Gong Pulau Rote Nusa Tenggara Timur, Rampak Kentongan Purbalingga, Jawa Tengah, Angklung Carup Banyuwangi, Seniman Bambu WukirYogyakarta, serta musisi gamelan kontemporer shochbreaker Indonesia-Norwegia.

"Dalam pagelaran bambu klasik akan ditampilkan Arumba Plumeria Jepang, Bambu Enre kang, Jegog Bali, Calung Purbalingga, Carub Banyuwangi," tambahnya. Selain menampilkan pertunjukan tari dan musik bambu, juga diadakan bambu talk berupa seminar dengan mengundang para pembicara dari pakar bambu, antara lain Marc Peeters dan Chamin Marka dengan lembaga risetnya Bambu Nusa Verde (BNV) di Yogyakarta.

"BNV melakukan transfer teknologi bambu melalui teknologi kultur jaringan yang dikembangkan oleh perusahaan Bergia, OPRINS Palnt Company," papar Dadang. Pada puncak acara Bambu Nusantara IV hari Minggu(3/10) malam, akan dihelat sebuah ferformance untuk mengenang seorang kreator Bambu Nusantara, Wawan Juanda (alm), dengan menampilkan sejumlah musisi seperti Dwiki Darmawan, Gita Gartika, Balawan, Yuki TendoStar dan Andy/rif dengan diiringi Bambu Orkestra.

Share 35 Tweet 61

TOP STORIES

- Penjaga Musik Tari Tradisi Bangka
Hatta Pastikan Indonesia Pinjami...
Sikat Gigi Efektif dengan Bakteri...
Ramadhan, Zaskia Pisah dengan...
Puasa dan Lebaran, Trafik Internet...

Ada 0 Komentar Untuk Artikel Ini.

Kirim Komentar Anda

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan KOMPAS.com dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. KOMPAS.com akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

KOMPAS.com berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

Silakan login atau register untuk kirim komentar Anda

- Laporan Dana Kampanye Foke-Nara Capai...
Siang Ini Kanselir Jerman Merkel Tiba...
"Si Dukun Cilik" Ponari Tidak...
Presiden Terima Direktur IMF di Istana
Angklung Pukau Masyarakat Jerman di...



TOPIK PILIHAN

PARTIKEL TUHAN



Partikel Tuhan Bukan Satu-satunya

TOM CRUISE-KATIE...



Teman Dekat Tom: Perceraian Itu Bukan karena...

SNMPTN 2011



Meski Curang, 12 Korban Joki Dilepaskan

PIALA ASIA U-22



Timnas U-22 Waspadai Kejutan Makau

KORUPSI DI BUOL



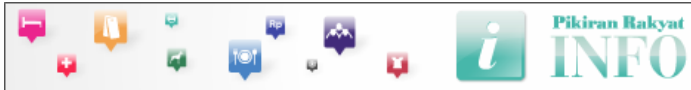
KPK Belum Sita Uang Suap untuk Bupati Buol



Selasa, 10 Jul, 2012 08:14:20 AM

| E-Paper | PR Info | PR Mobile

cari berita..



HOME PERSIB BANDUNG RAYA JAWA BARAT OLAH RAGA NASIONAL LUAR NEGERI EKONOMI PENDIDIKAN HORISON SHOWBIZ OTOMOTIF

INFO Perlu Motor Seken? Infonya :

Home

Kemenbudpar Gelar Bambu Nusantara World Music Festival

Jumat, 30/09/2011 - 04:12

Tweet 3
0

BANDUNG, (PRLM).- Untuk kali kelima Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) Republik Indonesia kembali menggelar Bambu Nusantara World Music Festival. Perhelatan musik dengan komposisi bambu tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 1 – 2 Oktober 2011 bertempat di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Jalan Tamansari, Bandung.

Bambu Nusantara World Music Festival (BNWMF) kali ini akan menjadi titik awal dari regenerasi talent ataupun musisi pengisi acara. Tahun ini BNWMF mengundang lebih banyak talent muda di bidang musik bambu yang dikategorikan sebagai generasi penerus kalangan senior yang sudah masuk ke ranah internasional, dan potensi anak muda ini sudah pantas untuk melanjutkan musik bambu yang tentunya dalam perspektif mereka sendiri.

"Mereka yang sengaja diundang adalah kelompok muda yang tumbuh di sekolah-sekolah dan mereka membentuk komunitas musik bambu. Hal ini menjadi fenomena yang menarik, karena dalam komunitas akan terbangun kreativitas yang menjadi sarana regenerasi," ujar Sulhan Syafei dalam keterangan persnya.

Dikatakan Sulhan, perhelatan kali ini tetap menyajikan bambu sebagai alat musik utama, sesuai dengan judul pagelaran. Kombinasi beberapa alat musik lain dan bentuk alat musik bambu modifikasi terbaru juga akan tampil di sini.

Selain itu, ada pameran produk kreatif dari kampus. Para mahasiswa akan menampilkan karya seni dari bambu yang jarang ditampilkan ke publik. Tahun ini yang mendapatkan kesempatan adalah Fakultas Seni Rupa & Desain Institut Teknologi Bandung, Desain Produk Itenas & Bengkel Kostum STSI Bandung.

Kehadiran kaum muda ini memang berkaitan dengan segmen pengunjung yang kami tuju. Hal ini akan menjadi daya tarik anak muda yang lainnya untuk datang. Ruang untuk kalangan muda ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan kreativitas yang saat ini dimotori oleh anak muda. Hal lain yang berubah adalah panggung utama akan menggunakan tiket. Sedangkan 2 panggung lainnya tetap gratis. Upaya ini sebagai langkah awal untuk menangkap segmen baru penonton yang memang berminat menikmati musik bambu berkelas dunia. (A-87/A-147)***

Tiket

Dapatkan diskon sampai 70% dengan tiket berikut. Segera daftarkan!

www.disdus.com/Tiket_Jakarta

Gratis pulsa

Kerjakan survei dan dapatkan isi ulang pulsa gratis. Mudah sekali.

members.txteagle.com

4 hari di Bali Rp.799.000

Gratis F&B sampai Rp.500,000 khusus pemegang CC gold/platinum

www.TheBaliGetaway.com

Umroh Murah dan Mabruh

Paket Umroh Ramadhan promo Harga promo umroh liburan sekolah

www.ngstour.co

Iklan oleh Google

BERITA TERKAIT

Panjang Lalakan

Musikal Tari "Dawai-Dawai Kasih", Undang Rasa Haru Penonton

Lingkung Seni Sunda ITB Kembangkan Kreativitas

Mahasiswa ITB Publikasikan Budaya Sunda

Pabrik Kornet

Kebon Awi 4

Komunitas Seniman Semakin Marak di Los Angeles

Boneka

Remaja Masih Meminati Tari Jaipong

Mecak Ajian Brajamusti

SENI BUDAYA PIKIRAN RAKYAT ONLINE

366 0



KOMENTAR

Ide yang baik dan cerdas dari
3 menit 8 detik lalu

g**k yang bikin gosip udah
17 menit 20 detik lalu

he he he riya, sombong , ujub
36 menit 33 detik lalu

Menurut saya biar tidak
1 jam 50 detik lalu

ga malu tuhh... kamarana atuh
1 jam 35 menit lalu

menurut saya orang kristen
4 jam 48 menit lalu

satuju kang....saya urang
6 jam 56 menit lalu

Syukuri giliran mulai
8 jam 34 menit lalu

itu apakah benar adanya
8 jam 54 menit lalu

halah eta ti baheula dari
9 jam 21 menit lalu

Post new comment

Nama Anda: *

Anonymous

E-mail: *

Konten ini di bersifat pribadi dan tidak akan diperlihatkan kepada publik If you have a **Gravatar** account, used to display your avatar.

Komentar: *

Informasi lanjutan tentang opsi format HTML yang berlaku.

hprison CRES.

Ketik dua kata ini:

Save Preview

PESTA BOLA
EROPA 2012





MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER, SERANGAN JANTUNG, IMPOTENSI DAN GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN



CELEBRITY MUSIC LIFESTYLE HEALTH TRAVEL FOOD

FEATURES : MY JOURNEY | REFERENSIA | HOT PIC | VIDEO |

SEARCH



FOOD 10 Catatan Harus Anda Ketahui Saat Masak Pasta



CELEBRITY Ini yang Bisa Hambat Pernikahan Nunung-Iyan



LIFESTYLE Nikah di Kuburan, Ageng Kiwi Pilih Busana Sempel



MUSIC Andika Bayar Rp1 Miliar Jika Balik ke Kangen Band



HEALTH Menguk Arti Warna pada Buah & Sayur

HOME • JELAJAH • INDONESIAKU • PELESIR • VIDEO • POTRET • INDEX

TRAVEL » JELAJAH

Follow @okezonenews 102K followers

Festival Bambu Nusantara 2012 Butuh Biaya Besar

Rabu, 28 September 2011 - 18:36 wib wib

Pasha Ernowo - Okezone

START YOUR FUTURE WITH MNC GROUP

www.jobsmnc.co.id



Festival bambu (Foto: Dok Mendbudpar)

PENYELENGGARAAN Festival Bambu Nusantara ke-6 di 2012 ini akan dihelat di Jakarta Convention Center (JCC). Perhelatan ini akan membutuhkan biaya yang besar. Untuk itu, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, tahun depan akan mengajukan dana ke DPR.

"Karena kalau dananya minta sama sponsor, akan sulit. Biasanya sponsor itu pelit," kata Dirjen pemasaran Kemenbudpar, Sapta Nirwandar saat jumpa pers Festival Bambu Nusantara, Selasa (27/9/2011).

Menurut Sapta, perhelatan Festival Bambu Nusantara harus diperhatikan oleh DPR sebagai wakil rakyat.

MOST POPULAR

Ke Destinasi Wisata Ini, Baiknya Telan Ludah

Boleh Kunyah Permen Karet, tapi Jangan Digelembungkan

Tahan Kata-Kata Senonoh Bila ke Dua Kota di Australia

Jalan di Sekitar Pantai, Perhatikan Bikini Anda!

Celana Melorot, Siap-Siap Kena Denda

Punya Libur Tiga Hari? Ke Phuket, Yuk!

"Pasalnya, salah satu alat musik dari Bambu, Angklung Indonesia sudah di kukuhkan oleh UNESCO (Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Budaya) pada sidang kelima Komite Antar Pemerintah tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda-UNESCO di Nairobi, Kenya pada 16 November 2010 lalu," jelasnya.

Sebagai bagian dari budaya bangsa, pengukuhan angklung akan menambah Daftar Representatif Budaya Takbenda Warisan Manusia.

"Pengukuhan itu menandakan Angklung Indonesia kini resmi masuk dalam Daftar Representatif Budaya Takbenda Warisan Manusia (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity)," tutupnya.

Gunung Sinai, Saksi Musa Menerima Mukjizat

Pohon Suci Cikal Bakal Ajaran Buddha

Wisata Pedesaan Bikin Betah Turis Australia di Vietnam

Kapten Costa Concordia Klaim Tangan Tuhan Selamatkan Kapal

MORE

0

Nikmati berita terikini lewat ponsel Anda di m.okezone.com & bb.okezone.com untuk BlackBerry



Cara mengecilkan perut

Produk alami dan kaya akan serat Efektif menahan napsu makan. Murah
www.tokopedia.com

Atap Rooftop Alderon

Atap Dingin + Kedap Suara 100% Tahan Asam & Garam
www.alderon.co.id

Iklan oleh Google

Berita Terkait : *jelajah*

Ternyata, Wisatawan Suka Pamer lewat Facebook

Lestariakan Budaya Batak, Marga Simbolon Gelar Pesta Bolon Sepekan

Dongkrak Pariwisata, Kuker Bakal Punya Bandara & Jembatan Baru

Kuker Bersiap Kenalkan Budaya Kerajaan Tertua

Ini Dia Tempat Wisata Favorit *Facebookers!*

Unik, Turis Ini Keliling Dunia dengan Menari

Melihat Kisah Kalam Aceh di Tujuh Bintang Art Space

Festival Nusantara Ramaikan Ulang Tahun Jakarta

Destinasi Cantik, Sayang Fasilitas Medisnya Terburuk

Dua Kendala Potensi Wisata Daerah Tak Tergali

1 Komentar

Beri Komentar

Disclaimer

Phlipus Kadek - 0 Tanggapan

Maju terus musik tradisional indonesia, buktikan kita bisa berkarya bagi negeri, Group Suara Hati Benih Kasih akan turut melestarikannya melalui menggabungkan angklung dengan musik daerah yang lainnya yang ada di indonesia. sampai ketemu dalam acara Festival Bambu Nusantara 2012 yang ke-6 di jakarta.

Beri Tanggapan

Laporkan

Berikan Komentar Anda

Nama Email

Komentar

5743 Ulangi Kode

ENTERTAINMENT : CELEBRITY MUSIC LIFESTYLE FOOD HEALTH TRAVEL
CHANNEL : NEWS ECONOMY INTERNATIONAL SPORTS BOLA TECHNO AUTOS KAMPUS PROPERTY
MULTIMEDIA : OKEZONE.TV PHOTO PODCAST

 <http://m.okezone.com>



Management : [About Us](#) [Redaksi](#) [Kotakpos](#) [Karier](#) [Info Iklan](#) [Disclaimer](#)
© 2007 - 2012 okezone.com, All Rights Reserved

